



Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, atas segala pertolongan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ini. Karya ini merupakan hasil dari kegiatan "Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak". Kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama dengan Bappeda Lebak, Banten dan telah dilaksanakan sejak Tahun 2016 dan penyerahan dokumen arsiparis pada tahun 2023.

Kegiatan "Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak", ini disusun sebagai bagian dalam pelaksanaan pekerjaan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2016.

Kegiatan "Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak" dilaksanakan oleh beberapa tim ahli dari beberapa disiplin ilmu, seperti tim ahli perencanaan wilayah dan peternakan. Tim Ahli diketuai oleh Salahudin Al-Ayyubi dengan anggota tim Angguh Nugraha dan Budianto sebagai tim ahli bidang perencanaan wilayah dan Fitriani Eka Puji Lestari sebagai tim ahli bidang Peternakan.

Dokumen ini terdiri dari (6) enam bab yang berisikan Bab Pendahuluan, Tinjauan Literatur, Pendekatan dan Metodologi, Gambaran Umum Wilayah serta Hasil dan Pembahasan serta bab mengenai kesimpulan dan rekomendasi.

Akhir kata kami ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu selesainya dokumen ini.

Tim Penyusun

Kata Pengantar

Lembar Pengesahan


Kegiatan

**PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN PETERNAKAN
KABUPATEN LEBAK**

Diketahui oleh

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan:

Dr. Ir. Bagus P Purwanto, M.Agr
NIP . 19600503 198503 1 003



Lembar Pengesahan



DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1	LATAR BELAKANG	1-1
1.2	MAKSUD DAN TUJUAN	1-5
1.3	SASARAN	1-5
1.4	RUANG LINGKUP LOKASI PEKERJAAN	1-5
1.5	PELAPORAN	1-7
1.8	KELUARAN.....	1-7
1.5	SISTEMATIKA PEMBAHASAN	1-9

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

2.1	TINJAUAN BERDASARKAN KEPMENTAN NO. 43/KPTS/PD.410/2015.....	2-2
2.2	TINJAUAN BERDASARKAN PERDA NO. 2 TAHUN 2011 PROVINSI BANTEN TENTANG RTRW PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2030	2-6
	2.2.1 Arahan Terkait Rencana Struktur Ruang.....	2-6
	2.2.2 Arahan Terkait Rencana Pola Ruang	2-8
	2.2.3 Arahan Terkait Rencana Kawasan Strategis	2-14
2.3	TINJAUAN BERDASARKAN PERDA NO. 2 TAHUN 2014 KABUPATEN LEBAK TENTANG RTRW KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014-2034	2-16

2.3.1	Arahan Terkait Rencana Struktur Ruang	2-16
2.3.2	Arahan Terkait Rencana Pola Ruang	2-21
2.3.3	Arahan Terkait Kawasan Strategis.....	2-26
2.4	TINJAUAN BERDASARKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LEBAK 2014-2019	2-28
2.4.1	Isue Strategis	2-28
2.4.2	Visi	2-30
2.4.3	Misi.....	2-30
2.4.4	Strategi dan Arah Kebijakan	2-31
2.5	TINJAUAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG PETERNAKAN (RTRP) (IPB, 1993)	2-34
2.5.1	Keterkaitan Rencana Tata Ruang Peternakan (RTRP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	2-35
2.5.2	Dasar Pertimbangan Penyusunan RTRP	2-35
2.5.3	Materi dan Kegunaan RTRP	2-36
2.5.4	Tahap Penyusunan RTRP	2-36
2.6	STUDI PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN DI KABUPATEN LEBAK (SUB SEKTOR PETERNAKAN).....	2-50
2.6.1	Komoditas Peternakan.....	2-50
2.6.2	Komoditas Unggulan Peternakan	2-50
2.6.3	Pewilayahan Komoditas.....	2-52
2.6.4	Strategi Pengembangan	2-52
2.6.5	Pengembangan Agribisnis	2-55
2.7	BEST PRACTICE SENTRA PETERNAKAN RAKYAT (STUDI KASUS BOJONEGORO).....	2-56
2.7.1	Hasil Studi Banding.....	2-56
2.7.2	Hasil Pembahasan Studi Banding.....	2-60

BAB 3 PENDEKATAN & METODOLOGI

3.1	PENDEKATAN.....	3-2
3.1.1	Pendekatan Gabungan Teoritik – Legalistik – Empir	3-2
3.1.2	Pendekatan Gabungan Kualitatif – Kuantitatif	3-3
3.1.3	Pendekatan Partisipatif dan Stakeholder	3-4
3.1.4	Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan.....	3-4
3.1.5	Tinjauan Mengenai Pengembangan Ekonomi Wilayah	3-6
3.1.6	Tinjauan Mengenai Pola Dasar Pengembangan Kawasan Pertanian	3-7
3.1.7	Tinjauan Mengenai Konsep Agroekosistem	3-8
3.1.8	Tinjauan Mengenai Sistem Agribisnis.....	3-9
3.1.9	Tinjauan Mengenai Pengembangan dan Penyebaran Ternak	3-10
3.1.10	Tinjauan Tentang Pengelolaan Peternakan.....	3-11
3.2	METODOLOGI.....	3-15
3.2.1	Pengumpulan Data	3-15
3.2.2	Pendekatan dan Metoda Analisis... ..	3-18

BAB 4 GAMBARAN UMUM WILAYAH

4.1	LETAK GEOGRAFIS & ADMINISTRASI	4-2
4.1.1	Letak Geografis.....	4-2
4.1.2	Administrasi.....	4-2
4.2	KONDISI FISIK	4-3
4.2.1	Topografi	4-3
4.2.2	Morfologi	4-5
4.2.3	Jenis Tanah.....	4-10
4.2.4	Geologi.....	4-10
4.2.5	Hidrologi.....	4-10

4.2.6	Klimatologi.....	4-15
4.2.7	Penggunaan Lahan.....	4-15
4.3	KONDISI KEPENDUDUKAN	4-20
4.3.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	4-20
4.3.2	Distribusi dan Kepadatan Penduduk.....	4-24
4.3.3	Komposisi Penduduk	4-27
4.3.4	Ketenagakerjaan	4-28
4.3.5	Pembangunan Manusia	4-29
4.3.6	Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat	4-30
4.4	KONDISI EKONOMI	4-30
4.4.1	Perkembangan Nilai Pendapatan Regional	4-30
4.4.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	4-34
4.4.3	Struktur Perekonomian Wilayah.....	4-36
4.4.4	Keuangan Daerah	4-37
4.5	KONDISI SUB SEKTOR PETERNAKAN.....	4-41
4.5.1	Tugas Pokok Dinas Peternakan	4-41
4.5.2	Arah Pembangunan kebijakan Sektor Peternakan	4-48
4.5.3	Perkembangan Nilai Pendapatan Regional Sub Sektor Peternakan	4-53
4.5.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan.....	4-55
4.5.5	Jumlah, Luasan Unit dan Ijin Usaha Peternakan	4-56
4.6	KONDISI INFRASTRUKTUR WILAYAH.....	4-65
4.6.1	Listrik dan Air Bersih	4-65
4.6.2	Transportasi dan Komunikasi.....	4-67

BAB 5 HASIL & PEMBAHASAN

5.1	ANALISIS BERDASARKAN POTENSI KECAMATAN.....	5-2
5.1.1	Tingkat Perkembangan Peternakan.....	5-2

5.1.2	Tipe Kecamatan	5-6
5.1.3	Potensi Dasar Kecamatan	5-7
5.2	ANALISIS BERDASARKAN SUMBERDAYA ALAM & SUMBERDAYA MANUSIA.....	5-10
5.2.1	Nisbah Lahan Pangan Terhadap Penduduk	5-10
5.2.2	Kapasitas Tampung Ternak	5-12
5.2.3	Indeks Konsentrasi Ternak	5-15
5.2.4	Tingkat Pengetahuan Peternak.....	5-24
5.2.5	Tingkat Kemajuan KUD	V-26
5.3	ANALISIS BERDASARKAN SARANA DAN PRASARAN PENDUKUNG PETERNAKAN.....	5-28
5.3.1	Fasilitas Layanan Peternakan	5-28
5.3.2	Jarak ke Sub Pusat Wilayah Pengembangan	5-28
5.3.3	Ketersediaan Listrik.....	5-31
5.3.4	Kemudahan Transportasi.....	5-31
5.4	ANALISIS KECAMATAN DI KABUPATEN LEBAK.....	5-34
5.4.1	Ternak Sapi.....	5-35
5.4.2	Ternak Kambing dan Domba	5-36
5.4.3	Ternak Kerbau	5-36
5.4.4	Ternak Unggas.....	5-37
BAB 6 KESIMPULAN & REKOMENDASI		
6.1	KESIMPULAN	6-2
6.2	REKOMENDASI	6-3



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2011-2014	1-3
Tabel 1.2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebak Tahun 2014 ...	1-6
Tabel 2.1 Rencana Pola Ruang Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034	2-21
Tabel 2.2 Rencana Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034	2-23
Tabel 2.3 Kebutuhan Data Dalam Penyusunan RTRP	2-37
Tabel 2.4 Kriteria Penentuan Pusat Pertumbuhan Ternak (PPT) dan Lokasi Pengembangannya.....	2-39
Tabel 2.5 Kriteria Tipe Kecamatan Dalam Pengembangan Peternakan.....	2-40
Tabel 2.6 Potensi Dasar Kecamatan Dalam Pengembangan Peternakan	2-41
Tabel 2.7 Komoditas Ternak Unggulan Kabupaten Lebak.....	2-51
Tabel 2.8 Peringkat Komoditas Unggulan Peternakan	2-52
Tabel 2.9 Perwilayahan Komoditas Ternak di Kabupaten Lebak.....	2-53
Tabel 2.10 Wilayah Pengembangan Ternak di Kabupaten Lebak.....	2-54
Tabel 2.11 Kegiatan Usaha Budidaya Komoditas Unggulan Peternakan	2-55
Tabel 2.13 Susunan Pengurus GPPT SPR Mega Jaya Dusun Ngantru Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.....	2-57
Tabel 3.1 Jenis dan Sumber Data	3-17
Tabel 4.1 Luas Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan.....	4-2
Tabel 4.2 Luas Wilayah dan Ketinggian Menurut Kecamatan	4-5
Tabel 4.3 Morfologi Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan.....	4-6
Tabel 4.4 Hidrogeologi Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	4-11
Tabel 4.5 Curah Hujan Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	4-16



Tabel 4.6 Penggunaan Lahan Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

Tahun 2013.....	4-19
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014.....	4-21
Tabel 4.8 Laju Jumlah Penduduk di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014.....	4-22
Tabel 4.9 Distribusi Penduduk di Kabupaten Lebak Tahun 2014.....	4-24
Tabel 4.10 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebak Tahun 2014.....	4-26
Tabel 4.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin...	4-27
Tabel 4.12 Indikator Pendidikan di Kabupaten Lebak	4-30
Tabel 4.13 Kontribusi PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2011-2014 Atas Dasar Harga Konstan 2000	4-32
Tabel 4.14 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2014 Atas Dasar Harga Konstan 2000	4-35
Tabel 4.15 Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2010-2014	4-38
Tabel 4.16 Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2010-2014 38 (Persen).....	4-38
Tabel 4.17 Laju Pertumbuhan Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2010-2014.....	4-38
Tabel 4.18 Kontribusi PDRB Sektor Peternakan Kabupaten Lebak Tahun 2011-2014 Atas Dasar Harga Konstan 2000.....	4-54
Tabel 4.19 Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan Kabupaten Lebak Tahun 2014 Atas Dasar Harga Konstan 2000	4-55
Tabel 4.20 Jumlah Ijin Usaha Peternakan di Kabupaten Lebak Tahun 2009.....	4-57
Tabel 4.21 Jumlah Ijin Usaha Peternakan di Kabupaten Lebak Tahun 2010.....	4-57
Tabel 4.22 Jumlah Ijin Usaha Peternakan di Kabupaten Lebak Tahun 2011.....	4-58
Tabel 4.23 Jumlah Ijin Usaha Peternakan di Kabupaten Lebak Tahun 2012.....	4-58



Tabel 4.24 Jumlah Ijin Usaha Peternakan di Kabupaten Lebak Tahun 2013	4-59
Tabel 4.25 Jumlah Ijin Usaha Peternakan di Kabupaten Lebak Tahun 2014	4-60
Tabel 4.26 Izin Usaha Peternakan Dan Tanda Daftar Peternakan Rakyat	
Tahun 2015.....	4-61
Tabel 4.27 Komposisi Konsumen dan Penjualan Air PDM Kabupaten	
Lebak Tahun 2012-2014.....	4-66
Tabel 4.28 Penjualan Tenaga Listrik Kabupaten Lebak Tahun 2012-2014.....	4-67
Tabel 5.1 Tingkat Perkembangan Kecamatan di Kabupaten Lebak.....	5-4
Tabel 5.2 Hasil Skor Analisis Penentuan Pusat Pertumbuhan	5-34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Wilayah	1-7
Gambar 2.1	Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Banten	2-12
Gambar 2.2	Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Banten	2-13
Gambar 2.3	Peta Kawasan Strategis Provinsi Banten.....	2-15
Gambar 2.4	Peta Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Lebak	2-19
Gambar 2.5	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Lebak.....	2-20
Gambar 2.6	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Lebak.....	2-24
Gambar 2.7	Peta Rencana Kawasan Pertanian Kabupaten Lebak.....	2-25
Gambar 2.8	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Lebak... ..	2-27
Gambar 3.1	Kerangka Analisa Penyusunan Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak.....	3-19
Gambar 3.2	Kerangka Penyelesaian Pekerjaan Penyusunan Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak.....	3-20
Gambar 4.1	Peta Administrasi Wilayah	4-4
Gambar 4.2	Peta Topografi Kabupaten Lebak	4-7
Gambar 4.3	Peta Kelerengan Kabupaten Lebak	4-8
Gambar 4.4	Peta Morfologi Kabupaten Lebak.....	4-9
Gambar 4.5	Peta Jenis Tanah Kabupaten Lebak.....	4-12
Gambar 4.6	Peta Geologi Kabupaten Lebak	4-13
Gambar 4.7	Peta Hidrologi Kabupaten Lebak	4-14
Gambar 4.8	Peta Curah Hujan Kabupaten Lebak	4-18
Gambar 4.9	Penggunaan Lahan Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan Tahun 2013.....	4-20
Gambar 4.10	Jumlah Penduduk di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014.....	4-23



Gambar 4.11 Laju Jumlah Penduduk di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014	4-23
Gambar 4.12 Distribusi Penduduk di Kabupaten Lebak Tahun 2014	4-25
Gambar 4.13 Komposisi Tenaga Kerja Menurut 3 (Tiga) Sektor Utama di Kabupaten Lebak Tahun 2014.....	4-28
Gambar 4.14 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	4-29
Gambar 4.15 Kontribusi PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2014 Atas Dasar Harga Konstan 2000.....	4-33
Gambar 4.16 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2014 Atas Dasar Harga Konstan 2000	4-36
Gambar 4.17 Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2010-2014 (Rupiah)	4-39
Gambar 4.18 Penerimaan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2010-2014 (Persen).....	4-39
Gambar 4.19 Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2010-2014 (Persen).....	4-40
Gambar 4.20 Laju Pertumbuhan Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2010-2014.....	4-40
Gambar 4.21 Kontribusi PDRB Sektor Peternakan Kabupaten Lebak Tahun 2011-2014 Atas Dasar Harga Konstan 2000	4-54
Gambar 4.22 Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan Kabupaten Lebak Tahun 2014 Atas Dasar Harga Konstan 2000	4-55
Gambar 4.23 Jumlah Unit Usaha Peternakan Di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014	4-56
Gambar 4.24 Luasan Unit Usaha Peternakan Di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014	4-56
Gambar 4.25 Peta Lokasi Kegiatan Peternakan.....	4-65

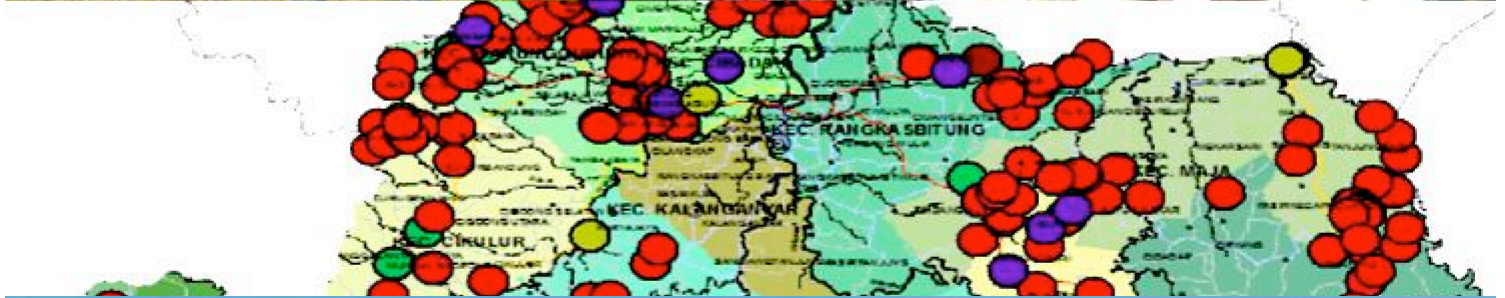


Gambar 4.26 Komposisi Konsumen Air PDAM Kabupaten Lebak Tahun 2014 ...4-66

Gambar 4.27 Penjualan Air PDAM Kabupaten Lebak Tahun 2012-2014 4-67



BAB 1 PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Peranan sektor pertanian termasuk didalamnya subsektor peternakan semakin menonjol pada pengembangan agribisnis saat ini dan masa yang akan datang. Beberapa keunggulan agribisnis berbasis peternakan adalah: mempunyai kelenturan bisnis dan teknologi yang luas dan luwes (misalnya dalam pengembangan sistem integrasi karet-sapi, kelapa-sapi atau ternak dan pelestarian alam), produk peternakan mempunyai nilai elastisitas tinggi terhadap perubahan pendapatan, sehingga permintaan produk peternakan akan selalu meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan (Saragih, 2000).

Seiring dengan peningkatan pengetahuan dan pendapatan masyarakat, permintaan akan pangan sumber protein hewani juga mengalami kenaikan. Untuk itu pembangunan subsektor peternakan sebagai integral dari sektor pertanian perlu mendapatkan perhatian khusus dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya lingkungan yang ada. Hal ini karena kegiatan pada subsector peternakan terbukti memiliki peran penting dalam peningkatan pendapatan petani, pemerataan perekonomian dan kesempatan kerja, serta perbaikan terhadap gizi masyarakat. Tujuan ini dapat dicapai melalui peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak.

Strategi pengembangan peternakan untuk mencapai hasil yang optimal memerlukan perencanaan yang matang dan tepat, sehingga ruang yang digunakan untuk kegiatan pengembangan peternakan tidak bersaing dengan kegiatan lain dan tidak saling mengganggu antara peternakan itu sendiri dengan lingkungan sekitarnya. Untuk itu perlu suatu penataan ruang kawasan peternakan secara khusus, yang disusun berdasarkan potensi lahan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan ternak, akses ke tempat pemasaran dan sarana prasarana yang menunjang usaha dibidang peternakan tersebut. Dengan demikian diharapkan kegiatan dibidang peternakan dapat berjalan dengan aman dan lancar serta mamapu menghasilkan produksi yang optimal dari segi kualitas maupun kuantitas.

Kegiatan peternakan yang telah memiliki kawasan tersendiri yang lebih jelas dan teratur, selain lebih mudah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan maupun penanggulangan wabah penyakit yang dapat segera dilaksanakan, juga memudahkan untuk membuat program-program yang bersifat menunjang kegiatan peternakan tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2013 mengenai pemberdayaan Peternak dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/KPTS/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak, Kawasan usaha peternakan atau lokasi penyebaran peternakan harus memenuhi syarat seperti: Bebas dari patogen yang berbahaya bagi ternak dan manusia yang mengkonsumsi produk hewan, tersedia sumberdaya air dan pakan yang memadai, tersedia prasarana berupa jalan, jembatan, pasar hewan, sesuai dengan peraturan tata ruang dan di bidang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kawasan usaha peternakan yang dimaksud dapat digunakan untuk lahan penggembalaan, kegiatan usaha budidaya ternak, penghasil tumbuhan pakan, tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi dan pelayanan inseminasi buatan, tempat pelayanan kesehatan hewan, dan/atau tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.

Kabupaten Lebak merupakan salah satu wilayah di Provinsi Banten. Keadaan ekonomi Kabupaten Lebak dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku didominasi oleh bidang usaha pertanian, dan sub sektor peternakan berada di urutan ketiga setelah subsektor tanaman bahan pangan dan tanaman perkebunan. Hal ini dapat dilihat perkembangan distribusi PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun 2011-2014 seperti tertera pada **Tabel 1.1**

Tabel 1.1
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian
Kabupaten Lebak Tahun 2011-2014

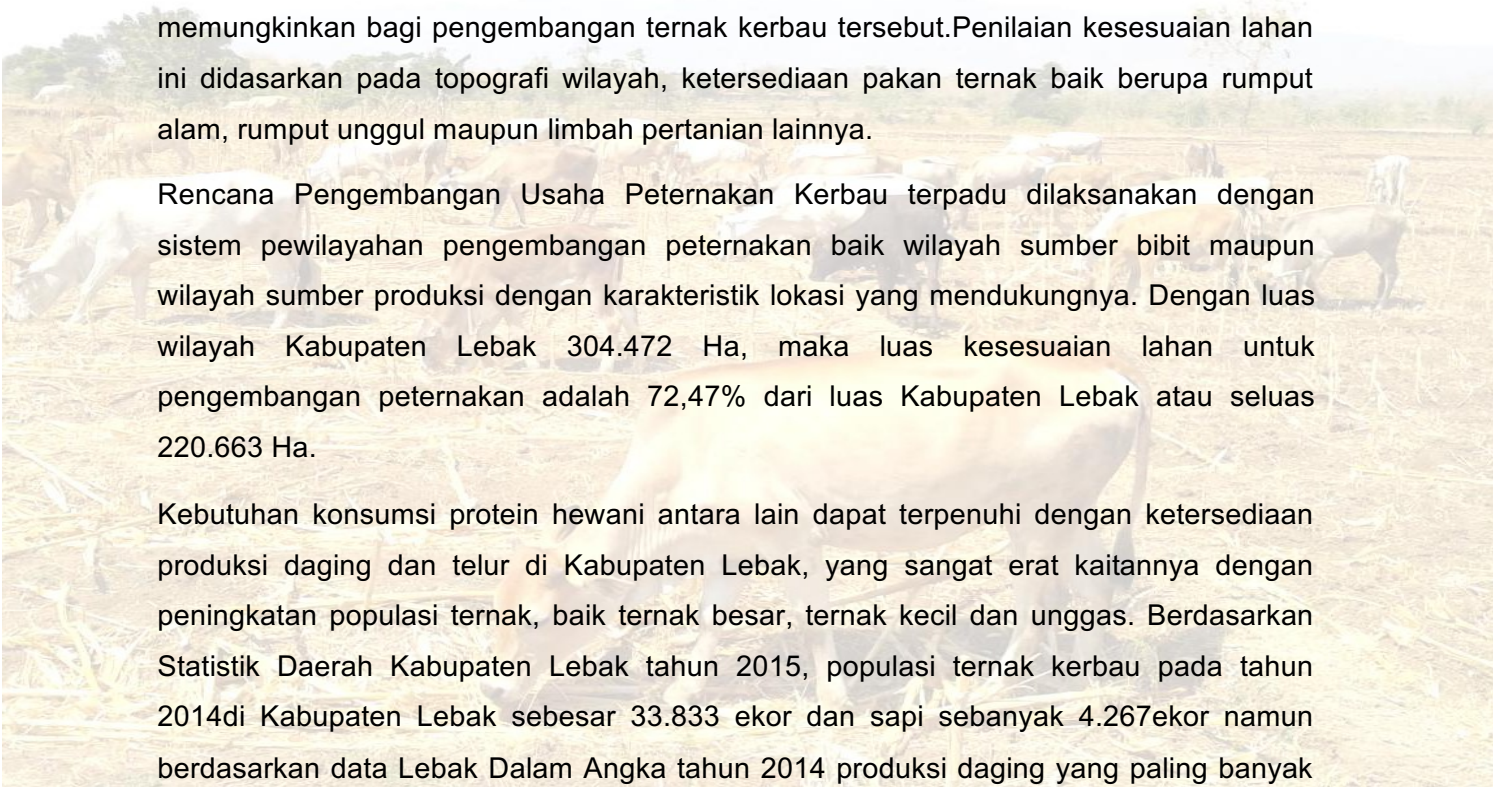
Sektor/Sub Sektor/ Sub Sub Sektor	2011	2012*)	2013*)	2014**)
Pertanian	1.474.157,60	1.570.601,09	1.610.386,11	1.653.902,67
1.1 Tanaman Bahan Pangan	1.022.532,34	1.053.442,42	1.074.365,02	1.095.323,55
1.2 Tanaman Perkebunan	226.753,21	261.044,56	267.630,85	278.344,45
1.3 Peternakan	160.223,43	181.642,00	188.907,68	196.697,10
1.4 Kehutanan	21.776,45	26.054,55	27.767,80	28.766,25
1.5 Perikanan	42.872,17	48.417,56	51.714,76	54.771,33

*) Angka Perbaikan

***) Angka Sementara

Sumber: Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2015

Salah satu komoditi peternakan Kabupaten Lebak yang ditetapkan sebagai komoditi unggulan adalah ternak kerbau dan sapi. Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 43/KPTS/PD.410/1/2015, Provinsi Banten merupakan wilayah kawasan pengembangan komoditas sapi potong dan Kerbau. Kabupaten Lebak sendiri termasuk kedalam Wilayah Pengembangan Peternakan ternak kerbau hal ini dikarenakan



Kabupaten Lebak memiliki kesesuaian lahan, klimatologi dan topografi yang sangat memungkinkan bagi pengembangan ternak kerbau tersebut. Penilaian kesesuaian lahan ini didasarkan pada topografi wilayah, ketersediaan pakan ternak baik berupa rumput alam, rumput unggul maupun limbah pertanian lainnya.

Rencana Pengembangan Usaha Peternakan Kerbau terpadu dilaksanakan dengan sistem pewilayahan pengembangan peternakan baik wilayah sumber bibit maupun wilayah sumber produksi dengan karakteristik lokasi yang mendukungnya. Dengan luas wilayah Kabupaten Lebak 304.472 Ha, maka luas kesesuaian lahan untuk pengembangan peternakan adalah 72,47% dari luas Kabupaten Lebak atau seluas 220.663 Ha.

Kebutuhan konsumsi protein hewani antara lain dapat terpenuhi dengan ketersediaan produksi daging dan telur di Kabupaten Lebak, yang sangat erat kaitannya dengan peningkatan populasi ternak, baik ternak besar, ternak kecil dan unggas. Berdasarkan Statistik Daerah Kabupaten Lebak tahun 2015, populasi ternak kerbau pada tahun 2014 di Kabupaten Lebak sebesar 33.833 ekor dan sapi sebanyak 4.267 ekor namun berdasarkan data Lebak Dalam Angka tahun 2014 produksi daging yang paling banyak dihasilkan dari ayam ras pedaging yakni sebesar 3.179.382 kg, ayam buras 1.324.157 kg, sedangkan yang paling kecil produksinya yaitu untuk daging itik sebesar 6.460 kg.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 alokasi ruang bagi pengembangan peternakan hanya terbatas pada kecamatan-kecamatan tertentu. Mengamati perkembangan usaha dan penambahan populasi ternak di Kabupaten Lebak pada kenyataannya kegiatan peternakan telah menyebar di beberapa kecamatan lain yang tidak diprioritaskan.

Berpijak dari keadaan tersebut maka diperlukan suatu pengalokasian ruang yang baru untuk pengembangan subsector peternakan yang sekarang sudah berkembang karena mampu menghasilkan produksi yang tinggi dan telah mempunyai pasar tersendiri, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten Lebak. Penyebaran dan pengembangan subsector peternakan di Kabupaten Lebak, jelas membutuhkan ruang yang pasti untuk kegiatan usaha secara berkelanjutan, sehingga dibutuhkan penataan sedemikian rupa untuk terciptanya kondisi usaha peternakan yang efisien, baik dalam pra produksi, produksi maupun pasca produksi. Adanya alokasi ruang yang jelas, dapat menjadi dasar pembentukan kawasan yang tujuan dan manfaatnya lebih mampu menyentuh masyarakat peternak untuk meningkatkan usahanya ke arah lebih baik.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan adalah untuk dapat mewujudkan dan memaksimalkan peningkatan kegiatan yang mendukung pra produksi, produksi dan pasca produksi sub sektor peternakan yang mengarah pada kegiatan agribisnis dan agroindustri. Kegiatan ini bertujuan untuk

1. Mengidentifikasi potensi komoditas sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak
2. Mengidentifikasi areal lahan yang sesuai untuk pengembangan subsektor peternakan di Kabupaten Lebak.
3. Menghitung daya dukung lahan yang sesuai bagi usaha sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak.
4. Menentukan arahan kawasan penyebaran dan pengembangan serta kapasitas peningkatan subsektor peternakan berdasarkan potensi sumberdaya lahan di Kabupaten Lebak.

1.3 SASARAN

Adapun sasaran dari kegiatan ini yaitu:

1. Tersusunnya dokumen Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan sehingga dapat menjadi arahan dasar dalam penyusunan dokumen dan rencana implementasi yang terpadu.
2. Mendorong subsektor peternakan sebagai sektor andalan pertanian yang mampu menggerakkan roda perekonomian serta mengupayakan usaha peternakan yang selanjutnya mampu secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1.4 RUANG LINGKUP

Penyusunan kegiatan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan dilaksanakan di Kabupaten Lebak terletak diantara 6°18' - 7°00' Lintang Selatan dan 105°25' - 106°30' Bujur Timur. Kabupaten Lebak memiliki bentang alam cukup luas yang mencapai 304.472,00 Ha. Luas wilayah Kabupaten Lebak ini mencapai kurang lebih 34,20% dari luas Provinsi Banten. Kabupaten Lebak terletak di bagian selatan Provinsi Banten, berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang di bagian barat. Bentuk wilayah yang membentang dari utara ke selatan menghubungkan Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Serang dan sebagian Kabupaten Tangerang di batas bagian utara. Di bagian timur berbatasan dengan dua kabupaten paling barat Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

Tabel 1.2
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebak
Tahun 2014

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah (%)	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Malingping	9.127	3,00	14
2	Wanasalam	13.429	4,41	13
3	Panggarangan	16.336	5,37	11
4	Cihara	15.957	5,24	9
5	Bayah	15.374	5,05	11
6	Cilograng	10.720	3,52	10
7	Cibeber	38.315	12,58	22
8	Cijaku	7.436	2,44	10
9	Cigemblong	7.529	2,47	9
10	Banjarsari	14.531	4,77	20
11	Cileles	12.498	4,10	12
12	Gunungkencana	14.577	4,79	12
13	Bojongmanik	5.821	1,91	9
14	Cirinten	9.112	2,99	10
15	Leuwidamar	14.691	4,83	12
16	Muncang	8.498	2,79	12
17	Sobang	10.720	3,52	10
18	Cipanas	7.538	2,48	14
19	Lebakgedong	6.255	2,05	6
20	Sajira	11.098	3,64	15
21	Cimarga	18.343	6,02	17
22	Cikukur	6.606	2,17	13
23	Warunggunung	4.593	1,51	12
24	Cibadak	4.134	1,36	15
25	Rangkasbitung	4.951	1,63	16
26	Kalanganyar	2.591	0,85	7
27	Maja	5.987	1,97	14
28	Curugbitung	7.255	2,38	10
	Total	304.472	100,00	345

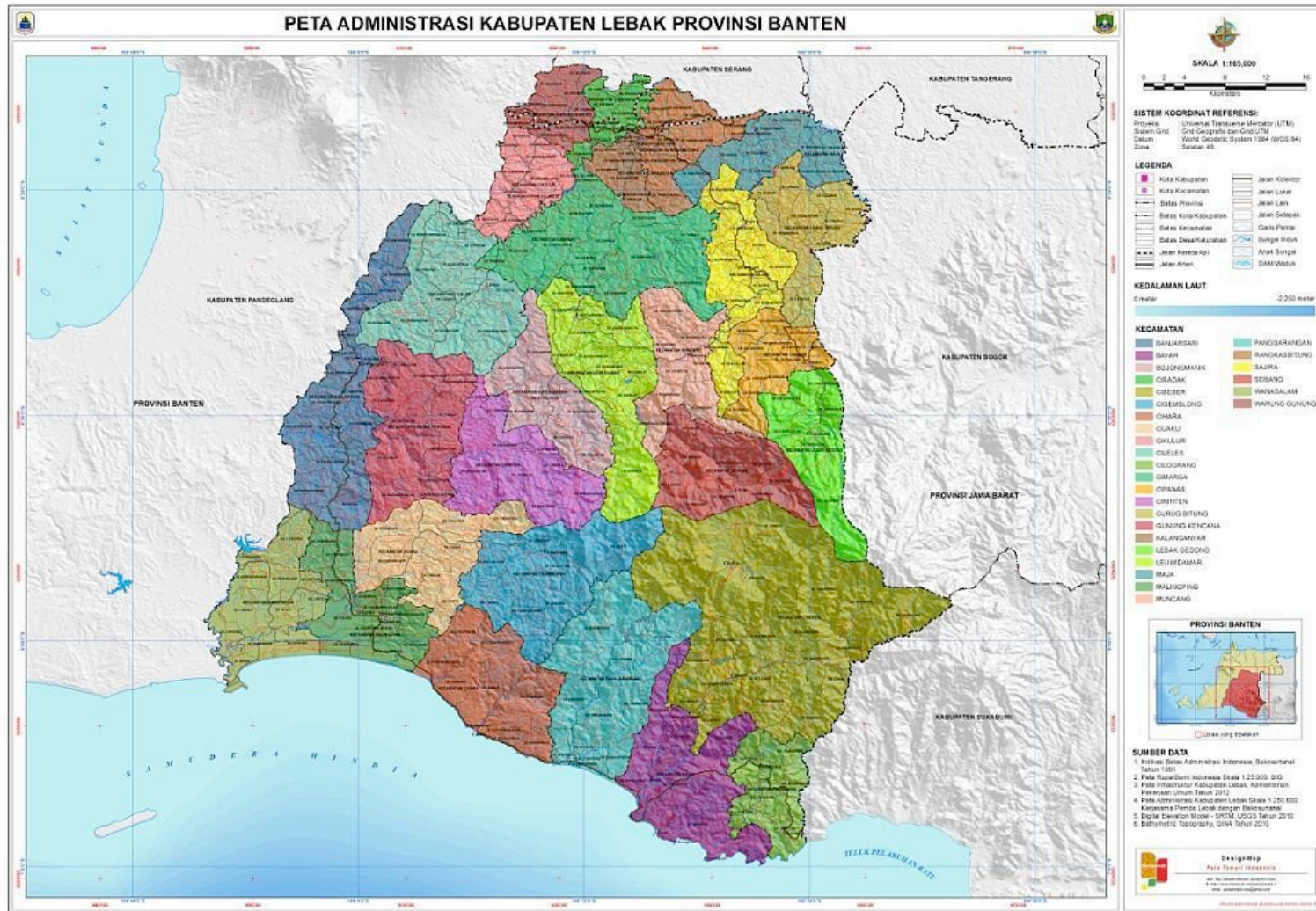
Sumber: Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2015

Kabupaten Lebak di bagian selatan terkoneksi langsung dengan Samudera Indonesia sehingga memiliki wilayah laut sekitar 73,3 KM² dengan panjang pantai mencapai 91,42 KM. Kabupaten Lebak secara administratif terbagi dalam 28 kecamatan, terdiri dari 340 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Cibeber merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah ± 38.315,00 Ha (12,58% dari luas wilayah Kabupaten Lebak). Cibeber juga merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, yaitu 22 desa.

Kecamatan Kalanganyar merupakan wilayah yang paling sempit dengan luas hanya sekitar 0,85% dari luas wilayah Kabupaten Lebak, atau sekitar 2.591 hektar. Kalanganyar juga termasuk kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit (7 desa), setelah Kecamatan Lebakgedong.

Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak

Gambar 1.1
Peta Administrasi Wilayah



1.5 PELAPORAN

Adapun sistematika pelaporan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a) Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan sekurang-kurangnya berisi pemahaman konsultan terhadap lingkup pekerjaan, konsep pendekatan dan metodologi studi, program kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, termasuk daftar kebutuhan data dan rencana survey lapangan berikut formulir-formulir survey lapangan yang diperlukan. Laporan Pendahuluan dibuat sebanyak 5 (lima) eksemplar.

b) Laporan Antara

Laporan Antara berisi antara lain: kajian analisa sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Laporan Antara ini dibuat sebanyak 5 (lima) eksemplar.

c) Laporan Akhir (Final Draft)

Laporan Akhir merupakan perbaikan dari Konsep Laporan Akhir yang telah dibahas oleh Kelompok terkait. Laporan Akhir dibuat sebanyak 5 (lima) eksemplar ditambah dengan softcopy dalam bentuk 5 (lima) buah CD.

1.6 KELUARAN

Tersedianya dokumen Kajian Arahan Penataan Wilayah Penyebaran dan Pengembangan Peternakan di Kabupaten Lebak, yang meliputi tinjauan terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan sub sektor peternakan setempat.

1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penyajian laporan akhir terdiri atas 6 (enam) bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup dan lokasi kegiatan, pelaporan dan output / keluaran pekerjaan, serta sistematika pembahasan.

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

Memberikan gambaran mengenai tinjauan literatur yang meliputi kebijakan pusat dan daerah yang mendukung pengembangan sub sektor peternakan, pedoman penyusunan zonasi peternakan, studi pengembangan komoditas unggulan dan best practice sentra peternakan rakyat

BAB 3 PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Bab ini berisi pendekatan dan metodologi yang akan digunakan dalam melaksanakan pekerjaan

BAB 4 GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN

Memberikan gambaran mengenai keadaan wilayah studi meliputi fisik dasar, kependudukan, perekonomian, gambaran sub sektor peternakan dan kondisi infrastruktur wilayah yang ada.

BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai analisis yang mendukung pada arahan penyebaran kawasan dan pengembangan sub sektor peternakan

BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan rekomendasi kegiatan kedepannya berdasarkan hasil analisis yang mendukung pada arahan penyebaran kawasan dan pengembangan sub sektor peternakan



BAB 2

TINJAUAN LITERATUR



2.1 TINJAUAN BERDASARKAN KEPMENTAN NO. 43/KPTS/PD.410/2015

Suatu wilayah atau kawasan akan memiliki keterkaitan dengan wilayah yang lebih luas guna mendukung perkembangannya. Perkembangan wilayah tersebut tidak terlepas dari fungsi dan keefektifan kebijakan tata ruang dan sektoral yang telah direncanakan pada lingkup kewenangan wilayah di atasnya. Pada bagian ini tinjauan terhadap Keputusan Menteri Pertanian No. 43/KPTS/PD.410/2015 ditinjau untuk melihat arahan penetapan kawasan peternakan di Kabupaten Lebak berdasarkan kebijakan yang lebih luas.

Dalam keputusan tersebut telah ditetapkan dimana saja Kawasan Sapi Potong, Kerbau Kambing, Sapi Perah, Babi dan Domba Nasional. Dari keputusan tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Lebak ditetapkan sebagai kawasan untuk pengembangan ternak kerbau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat lampiran dari Keputusan Menteri Pertanian No. 43/KPTS/PD.410/2015 mengenai Penetapan Kawasan Sapi Potong, Kerbau Kambing, Sapi Perah, Babi dan Domba Nasional.

Dalam keputusan tersebut penetapan kawasan diarahkan untuk lebih digali dan dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan pengembangan kawasan secara bertahap, seperti perencanaan program kegiatan, penyusunan *Masterplan*, penyusunan *Action Plan* sampai kegiatan penyusunan anggaran terkait. Keputusan Menteri Pertanian No. 43/KPTS/PD.410/2015 tersebut memutuskan:

1. Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba dan Babi Nasional pada setiap lokasi dikembangkan melalui perencanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai kelas dan tahapan pembangunan spesifik lokasi secara berkelanjutan.
2. Perencanaan pembangunan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba dan Babi Nasional mencakup penyediaan prasarana, sarana penunjang, teknologi pembiayaan, pengolahan, pemasaran serta kelembagaan dan sumber daya manusia pengelolanya.
3. Guna menyusun rancangan pengembangan kawasan, Eselon I yang menangani penelitian dan pengembangan pertanian melakukan pemetaan kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba dan Babi Nasional di wilayah kerjanya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pertanian provinsi yang membidangi pengembangan komoditas pertanian wajib menyusun *Masterplan*

Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak

Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba dan Babi Nasional diwilayah kerjanya.

5. SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota yang membidangi pengembangan komoditas pertanian wajib menyusun *Action Plan* Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba dan Babi Nasional diwilayah kerjanya dengan mengacu pada *Masterplan* Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba dan Babi Nasional.
6. Pembiayaan Pengembangan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba dan Babi Nasional didukung dan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementrian/Lembaga terkait, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), koperasi, masyarakat, dan/atau integrasi diantaranya.
7. Direktorat Teknis dan Eselon I lingkup Kementrian Pertanian mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengembangan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba dan Babi Nasional.
8. Gubernur dan Bupati/Walikota mensinergikan kegiatan untuk mendukung pengembangan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba dan Babi Nasional melalui dana APBD maupun sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Penetapan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba dan Babi Nasional beralku selama 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 45/Kpts/PD.410/1/2015
TANGGAL : 16 Januari 2015

PENETAPAN KAWASAN SAPI POTONG, KERBAU, KAMBING, SAPI PERAH, DOMBA, DAN BABI NASIONAL

a. Sapi Potong

1. Kab. Aceh Besar
2. Kab. Aceh Tamiang
3. Kab. Aceh Jaya
4. Kab. Bener Meriah
5. Kab. Deli Serdang
6. Kab. Langkat
7. Kab. Agam
8. Kab. Lima Puluh Kota
9. Kab. Pasaman Barat
10. Kab. Kuantan Singingi
11. Kab. Indragiri Hulu
12. Kab. Indragiri Hilir
13. Kab. Pelalawan
14. Kab. Siak
15. Kab. Kampar
16. Kab. Rokan Hulu
17. Kab. Rokan Hilir
18. Kab. Meranti
19. Kab. Sarolangun
20. Kab. Bungo
21. Kab. Lampung Selatan
22. Kab. Lampung Timur
23. Kab. Lampung Tengah
24. Kota Bandar Lampung
25. Kab. Kuningan
26. Kab. Cirebon
27. Kab. Majalengka
28. Kab. Indramayu
29. Kab. Subang
30. Kota Cirebon
31. Kab. Tangerang
32. Kab. Kebumen
33. Kab. Klaten
34. Kab. Sukoharjo
35. Kab. Sragen
36. Kab. Grobogan
37. Kab. Blora
38. Kab. Kulon Progo
39. Kab. Gunung Kidul
40. Kab. Sleman
41. Kota Yogyakarta
42. Kab. Tuban
43. Kab. Lamongan
44. Kab. Bangkalan
45. Kab. Pamekasan
46. Kab. Sumenep
47. Kab. Tanah Laut
48. Kab. Kotabaru
49. Kab. Banjar
50. Kab. Barito Kuala
51. Kab. Hulu Sungai Tengah
52. Kab. Paser
53. Kab. Kutai Kartanegara
54. Kab. Kutai Timur
55. Kab. Berau
56. Kab. Minahasa
57. Kab. Donggala
58. Kab. Sigi
59. Kab. Bulukumba
60. Kab. Bantaeng
61. Kab. Gowa
62. Kab. Maros
63. Kab. Barru
64. Kab. Bone
65. Kab. Mamuju
66. Kab. Muna
67. Kab. Konawe Selatan
68. Kab. Bombana
69. Kab. Klungkung
70. Kab. Karangasem
71. Kab. Buleleng
72. Kab. Lombok Tengah
73. Kab. Lombok Timur
74. Kab. Sumbawa
75. Kab. Dompu
76. Kab. Sumbawa Barat
77. Kota Bima
78. Kab. Sumba Barat
79. Kab. Sumba Timur
80. Kab. Kupang
81. Kab. Timor Tengah Selatan
82. Kab. Timor Tengah Utara
83. Kab. Belu
84. Kab. Ngada
85. Kab. Sumba Tengah
86. Kab. Sumba Barat Daya
87. Kab. Nagekeo
88. Kab. Manggarai Timur
89. Kab. Malaka
90. Kota Kupang
91. Kab. Halmahera Utara
92. Kab. Merauke
93. Kab. Jayapura
94. Kab. Nabire
95. Kab. Keerom
96. Kab. Fak Fak
97. Kab. Manokwari
98. Kab. Sorong
99. Kab. Tambrau
100. Kab. Manokwari Selatan

Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak

b. Kerbau

- | | | |
|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1. Kab. Samosir | 6. Kab. Pandeglang | 11. Kab. Brebes |
| 2. Kab. Padang Lawas | 7. Kab. Lebak | 12. Kab. Hulu Sungai Selatan |
| 3. Kab. Pesisir Selatan | 8. Kab. Serang | 13. Kab. Hulu Sungai Utara |
| 4. Kab. Sijunjung | 9. Kota Serang | |
| 5. Kab. Ogan Komering Ilir | 10. Kab. Tegal | |

c. Kambing

- | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------------|
| 1. Kab. Asahan | 5. Kab. Purworejo | 9. Kab. Jembrana |
| 2. Kab. Simalungun | 6. Kab. Trenggalek | 10. Kab. Tabanan |
| 3. Kab. Kepahiang | 7. Kab. Lumajang | 11. Kab. Maluku Barat Daya |
| 4. Kab. Banyumas | 8. Kab. Jombang | |

d. Sapi Perah

- | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 1. Kab. Bandung | 3. Kab. Semarang | 5. Kab. Malang |
| 2. Kab. Bandung Barat | 4. Kota Salatiga | 6. Kota Batu |

e. Domba

- | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| 1. Kab. Garut | 3. Kab. Ciamis | 5. Kab. Bondowoso |
| 2. Kab. Tasikmalaya | 4. Kab. Banjarnegara | |

f. Babi

- | | | |
|----------------------------|------------------|--------------------|
| 1. Kab. Tapanuli Utara | 4. Kab. Gianyar | 7. Kab. Jayawijaya |
| 2. Kab. Humbang Hasundutan | 5. Kab. Bangli | 8. Kab. Yahukimo |
| 3. Kab. Badung | 6. Kota Denpasar | 9. Kab. Lanny Jaya |



2.2 TINJAUAN BERDASARKAN PERDA NO. 2 TAHUN 2011 PROVINSI BANTEN TENTANG RTRW PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2030

Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor 2. Tahun 2011 tentang RTRWP Banten Tahun 2010-2030. Dalam lingkup tata ruang provinsi, terdapat beberapa hal yang terkait dengan Kabupaten Lebak, sebagai berikut:

2.2.1 Arahan Terkait Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan rencana kerangka tata ruang wilayah provinsi yang dibangun oleh konstelasi pusat-pusat kegiatan (sistem perkotaan) yang berhirarki satu sama lain dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah provinsi meliputi sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi pusat-pusat kegiatan yang ada di wilayah provinsi. Disini akan ditinjau mengenai arahan terkait rencana struktur ruang terhadap wilayah Kabupaten Lebak.

A. Rencana Sistem Perkotaan

Berdasarkan arahan rencana sistem perkotaan Provinsi Banten dapat dilihat arahan yang terkait dengan wilayah Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut:

- Kabupaten Lebak termasuk dalam Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) sebagai penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung sesuai jenjangnya diperlukan dalam rangka penguatan fungsi kota-kota. Secara spesifik wilayah yang kecamatan di Kabupaten Lebak yang termasuk dalam PKWp Provinsi Banten ini adalah Kecamatan Bayah dan Kecamatan Maja.
- Kabupaten Lebak termasuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL), perkotaan di wilayah Kabupaten Lebak yang termasuk dalam PKL Provinsi Banten ini adalah Kecamatan Malingping.
- Berdasarkan kota-perkotaan di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak masuk dalam klasifikasi Perkotaan Kecil meliputi Perkotaan Rangkasbitung, Malingping, Bayah dan Perkotaan Maja.
- Efisiensi pelayanan perkotaan ditentukan melalui skala pelayanan wilayah dengan membentuk perwilayahan, dimana masing-masing Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) memiliki satu pusat. Kabupaten Lebak termasuk dalam WKP III bersama Kabupaten Pandeglang. Adapun arahan fungsi dan peranan WKP III diarahkan untuk pengembangan kegiatan kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, kelautan dan perikanan.

B. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Berdasarkan arahan rencana sistem jaringan prasarana wilayah, berikut merupakan arahan kebijakan yang terkait dengan rencana sistem jaringan wilayah di Kabupaten Lebak, meliputi:

1. Kabupaten lebak termasuk dalam wilayah usulan jalan bebas hambatan prospektif (bersyarat)/jalan strategis nasional prospektif Kragilan (Kabupaten Serang) – Warunggunung (**Kabupaten Lebak**) – Panimbang (Kabupaten Pandeglang) – Bandar Udara Banten Selatan yang penetapannya disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Arahan rencana pengembangan terminal di Kabupaten Lebak meliputi:
 - Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan terminal penumpang tipe A, yaitu Terminal Kaduagung (**Kabupaten Lebak**).
 - Pengembangan terminal penumpang tipe B untuk melayani angkutan antar kota dalam provinsi dan angkutan kota/pedesaan, meliputi Terminal Rangkasbitung, Rangkas dan Terminal Malingping (**Kabupaten Lebak**).
3. Pengembangan jaringan kereta api meliputi jaringan jalur kereta api umum, jaringan jalur kereta api khusus, serta stasiun kereta api, meliputi: meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana Stasiun Rangkasbitung (**Kabupaten Lebak**).
4. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut meliputi :
 - Pengembangan terminal khusus untuk mendukung potensi industri, pariwisata, pertanian dan pertambangan di wilayah **Kabupaten Lebak**.
 - Pengembangan pelabuhan perikanan yaitu kewenangan pusat meliputi peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan Binuangeun di **Kabupaten Lebak**.
5. Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik meliputi pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV diperlukan untuk menyalurkan energi listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit baru diarahkan di **Kabupaten Lebak**;
6. Rencana pengembangan sistem jaringan Jaringan sumber daya air meliputi:
 - Bendungan Karian di **Kabupaten Lebak** untuk memenuhi kebutuhan air baku di wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
 - Bendungan Pasir Kopo di **Kabupaten Lebak** untuk kebutuhan pertanian;
 - Bendung Ciliman di **Kabupaten Lebak** untuk kebutuhan pertanian;

- situ/waduk/danau/rawa yang terdapat di **Kabupaten Lebak** diarahkan untuk kolam penyimpanan (*retention pond*).

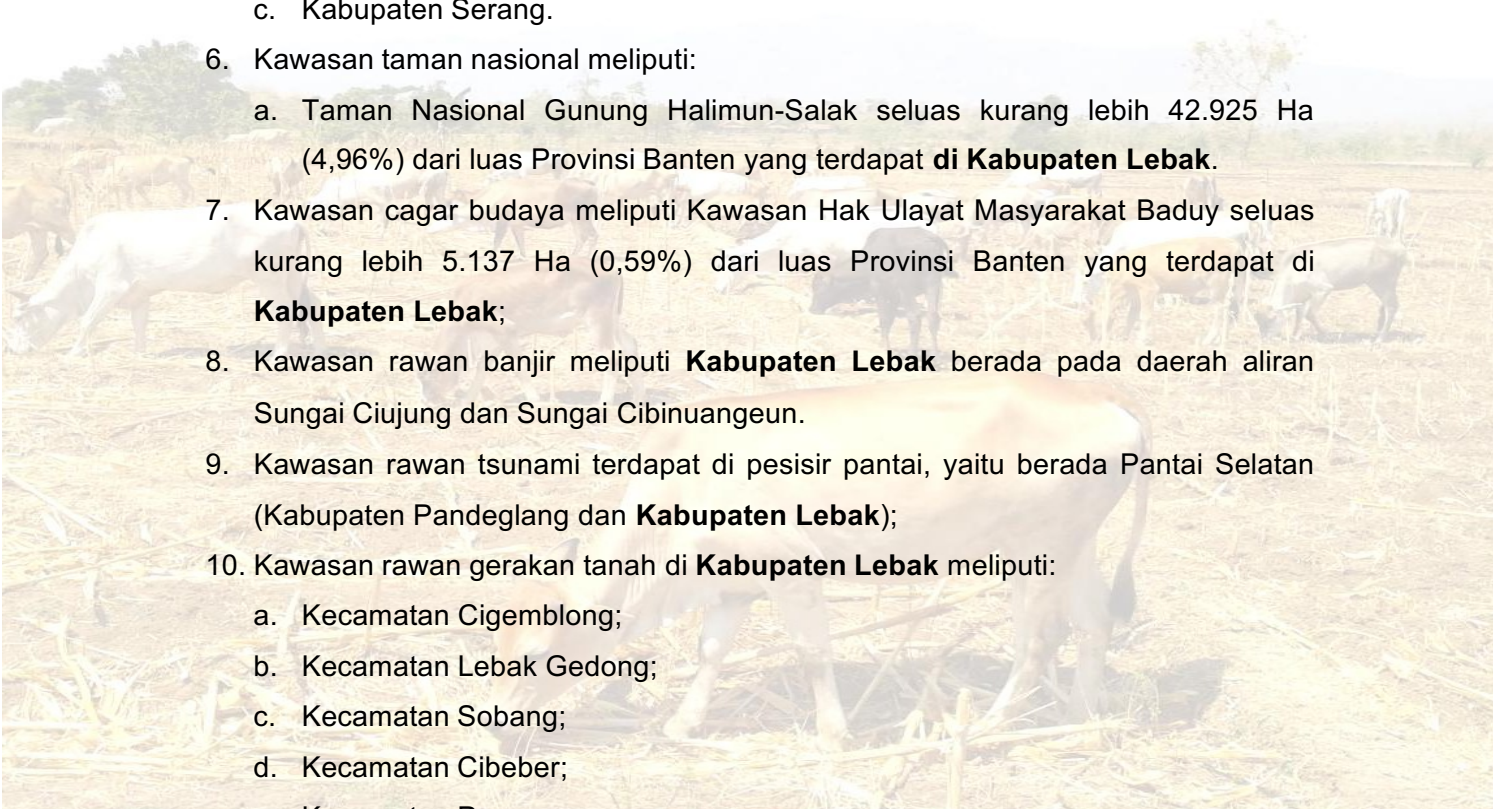
7. Pengelolaan Daerah Irigasi diarahkan untuk kebutuhan pertanian pada tingkat jaringan teknis, meliputi :

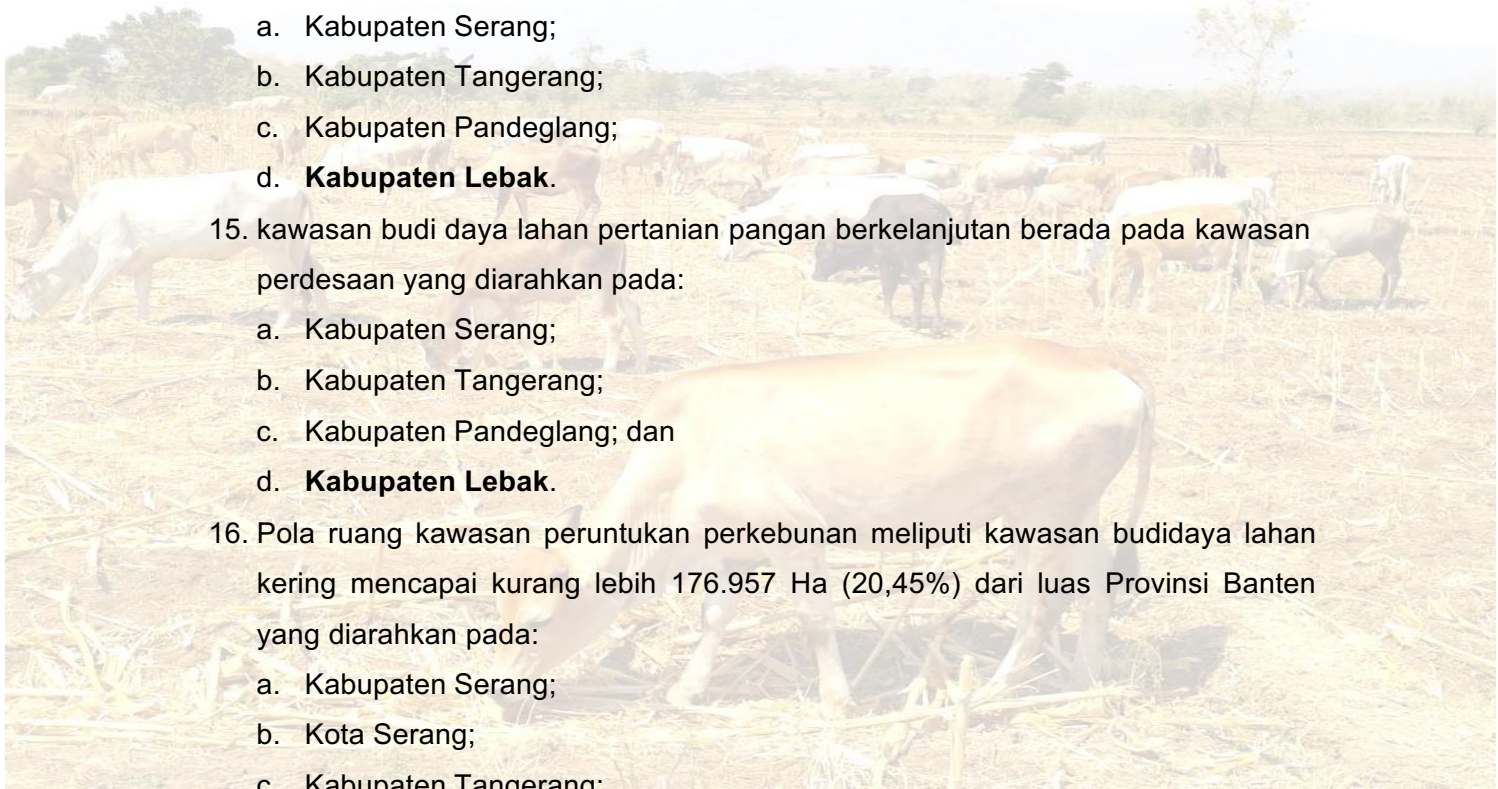
- Daerah Irigasi Cibinuangeun di **Kabupaten Lebak**, luas areal 2.570 Ha
- Daerah Irigasi Cilangkahan I di **Kabupaten Lebak**, luas areal 1.796 Ha

2.2.2 Arahan Terkait Rencana Pola Ruang

Berdasarkan arahan rencana pola ruang Provinsi Banten dapat dilihat arahan yang terkait dengan wilayah Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut:

1. Kawasan hutan lindung meliputi kurang lebih 20.646 Ha (2,39%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di sebagian Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, **Kabupaten Lebak**, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon.
2. Kawasan resapan air berada pada: Kecamatan Cibeber **Kabupaten Lebak**;
3. Sempadan pantai meliputi kurang lebih 5.174 Ha (0,60%) dari luas Provinsi Banten yang berada pada:
 - a. Kabupaten Serang;
 - b. Kota Serang;
 - c. Kabupaten Tangerang;
 - d. Kabupaten Pandeglang;
 - e. **Kabupaten lebak**; dan
 - f. Kota Cilegon.
4. Kawasan sekitar danau atau waduk meliputi kurang lebih 83.155,09 Ha (9,61%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat pada:
 - a. Kabupaten Serang;
 - b. Kabupaten Tangerang;
 - c. Kota Tangerang;
 - d. Kota Tangerang Selatan;
 - e. Kabupaten Pandeglang;
 - f. **Kabupaten Lebak**; dan
 - g. Kota Cilegon.
5. Kawasan sekitar mata air kurang lebih 787 Ha (0,09%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat pada:
 - a. **Kabupaten Lebak**;
 - b. Kabupaten Pandeglang;

- 
- c. Kabupaten Serang.
 6. Kawasan taman nasional meliputi:
 - a. Taman Nasional Gunung Halimun-Salak seluas kurang lebih 42.925 Ha (4,96%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di **Kabupaten Lebak**.
 7. Kawasan cagar budaya meliputi Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Baduy seluas kurang lebih 5.137 Ha (0,59%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di **Kabupaten Lebak**;
 8. Kawasan rawan banjir meliputi **Kabupaten Lebak** berada pada daerah aliran Sungai Ciujung dan Sungai Cibinuangun.
 9. Kawasan rawan tsunami terdapat di pesisir pantai, yaitu berada Pantai Selatan (Kabupaten Pandeglang dan **Kabupaten Lebak**);
 10. Kawasan rawan gerakan tanah di **Kabupaten Lebak** meliputi:
 - a. Kecamatan Cigemblong;
 - b. Kecamatan Lebak Gedong;
 - c. Kecamatan Sobang;
 - d. Kecamatan Cibeber;
 - e. Kecamatan Panggarangan
 11. Pola ruang kawasan peruntukan hutan produksi seluas kurang lebih 58.091 Ha (6,71%) dari luas Provinsi Banten yang diarahkan pada:
 - a. Kabupaten Serang;
 - b. Kabupaten Pandeglang;
 - c. **Kabupaten Lebak**.
 12. Kawasan budi daya tanaman pangan seluas kurang lebih 216.577 Ha (25,03%) dari luas Provinsi Banten yang diarahkan pada:
 - a. Kabupaten Serang;
 - b. Kota Serang;
 - c. Kabupaten Tangerang;
 - d. Kabupaten Pandeglang;
 - e. **Kabupaten Lebak**; dan
 - f. Kota Cilegon.
 13. Kawasan budi daya hortikultura diarahkan pada:
 - a. Kabupaten Serang;
 - b. Kabupaten Tangerang;
 - c. Kabupaten Pandeglang;
 - d. **Kabupaten Lebak**.



14. Kawasan budi daya peternakan diarahkan pada:
 - a. Kabupaten Serang;
 - b. Kabupaten Tangerang;
 - c. Kabupaten Pandeglang;
 - d. **Kabupaten Lebak.**
15. kawasan budi daya lahan pertanian pangan berkelanjutan berada pada kawasan perdesaan yang diarahkan pada:
 - a. Kabupaten Serang;
 - b. Kabupaten Tangerang;
 - c. Kabupaten Pandeglang; dan
 - d. **Kabupaten Lebak.**
16. Pola ruang kawasan peruntukan perkebunan meliputi kawasan budidaya lahan kering mencapai kurang lebih 176.957 Ha (20,45%) dari luas Provinsi Banten yang diarahkan pada:
 - a. Kabupaten Serang;
 - b. Kota Serang;
 - c. Kabupaten Tangerang;
 - d. Kota Tangerang;
 - e. Kota Tangerang Selatan;
 - f. Kabupaten Pandeglang;
 - g. **Kabupaten Lebak;** dan
 - h. Kota Cilegon.
17. Pola ruang kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud diarahkan untuk mengembangkan perikanan tangkap, kawasan budi daya perikanan, kawasan pengolahan ikan, dan mengembangkan minapolitan pada:
 - a. Kabupaten Serang;
 - b. Kabupaten Tangerang;
 - c. **Kabupaten Lebak;**
 - d. Kabupaten Pandeglang;
 - e. Kota Serang.
18. Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi bahan galian logam (emas), diarahkan pada **Kabupaten Lebak**, berada pada:
 - a. Desa Cikotok;
 - b. Desa Warung Banten;
 - c. Desa Lebak Situ;

- 
- d. Desa Sinargalih;
 - e. Desa Cimancak;
 - f. Desa Sukamulya;
 - g. Desa Cidikit;
 - h. Desa Citorek;
 - i. Desa Cikate;
 - j. Desa Kanekes;
 - k. Desa Guradog;
 - l. Desa Bojongmani;
 - m. Desa Caringin;
 - n. Desa Gunung Kendang; dan
 - o. Desa Bulakan.

19. Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan batubara diarahkan pada **Kabupaten Lebak** yang berada pada:

- a. Desa Cihara/Cimandiri;
- b. Desa Darmasar, dan
- c. Desa Bojongmanik.

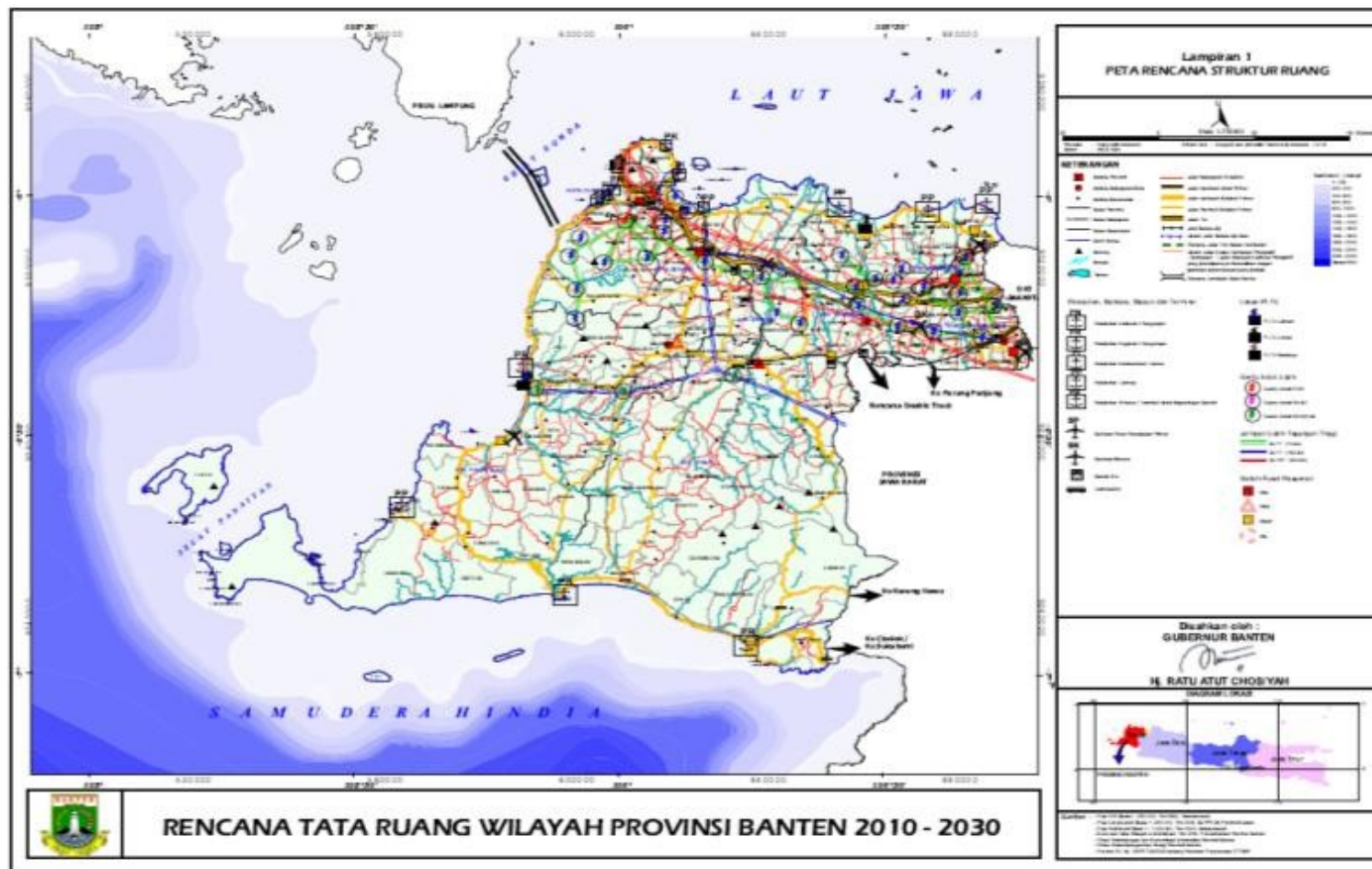
20. Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan panas bumi, **Kabupaten Lebak** berada di Pamancalan Speculative 225 MW, Gunung Endut Speculative 100 MW Possible 40 MW, dan Ciseeng Hipotetik 100 MW).

21. Pola ruang kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan perdesaan diarahkan pada:

- a. Kabupaten Serang;
- b. Kota Serang;
- c. Kabupaten Tangerang;
- d. Kota Tangerang;
- e. Kota Tangerang Selatan;
- f. Kabupaten Pandeglang;
- g. **Kabupaten Lebak**;
- h. Kota Cilegon.

Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak

Gambar 2.1
Peta Rencana Struktur Ruang
Provinsi Banten



100

2.2.3 Arahan Terkait Rencana Kawasan Strategis

Berdasarkan arahan rencana kawasan strategis Provinsi Banten dapat dilihat arahan yang terkait dengan wilayah Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut:

1. Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah, diarahkan pada kawasan TNI AD komando pendidikan latihan tempur di Kecamatan Sajira **Kabupaten Lebak**;
2. Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi kawasan strategis provinsi diarahkan pada kawasan Masyarakat Adat Baduy di **Kabupaten Lebak**.
3. Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi meliputi kawasan strategis provinsi diarahkan pada:
 - a. Bendungan Karian di **Kabupaten Lebak**;
 - b. Bendungan Pasir Kopo di **Kabupaten Lebak**;
 - c. Bendungan Cilawang di **Kabupaten Lebak**;
 - d. Bendungan Tanjung di **Kabupaten Lebak**;
 - e. Bendung Ciliman di **Kabupaten Lebak**;
4. Pengembangan kawasan agropolitan diarahkan pada Kecamatan Wanasalam **Kabupaten Lebak**;
5. Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi Banten meliputi Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, **Kabupaten Lebak**, dan Kota Cilegon.
6. Kawasan Strategis Provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Lebak meliputi:
 - a. Kawasan Malingping di **Kabupaten Lebak**;
 - b. Kawasan Bayah di **Kabupaten Lebak**;

2.3 TINJAUAN BERDASARKAN PERDA NO. 2 TAHUN 2014 KABUPATEN LEBAK TENTANG RTRW KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014-2034

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak 2014-2034, terdapat kebijakan dan arahan yang dapat berdampak terhadap pola pengembangan spasial peternakan, diantaranya:

2.3.1 Arahan Terkait Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang wilayah diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat pelayanan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Struktur kota-kota di Kabupaten Lebak terbentuk berdasarkan pola geografiis wilayah yang meliputi topografi, bentuk wilayah, dan pola jaringan utama aksesibilitas.

Pengembangan struktur kota-kota di Kabupaten Lebak juga diarahkan pada pola yang telah terbentuk dengan pengembangan wilayah di sekitarnya. Perlu penetapan sub pusat baru yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan arahan rencana struktur ruang dapat dilihat dari arahan yang terkait dengan pengembangan kawasan dalam rencana sistem pengembangan perkotaan dan perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Malingping sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Malingping sebagai PKL memiliki fungsi sebagai :
 - a. Pengembangan perdagangan dan jasa
 - b. Pengembangan pendidikan
 - c. Pengembangan kesehatan
 - d. Pengembangan pariwisata
 - e. pengembangan permukiman
 - f. Pengembangan pertanian**
2. Mempromosikan beberapa pusat kegiatan lainnya di wilayah Kabupaten Lebak yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKLp) , diantaranya Kecamatan Panggarangan sebagai PKLp 2. Pusat kegiatan diatas berfungsi sebagai :
 - a. Pengembangan perdagangan dan jasa
 - b. Pengembangan pendidikan
 - c. Pengembangan kesehatan

- d. Pengembangan pariwisata
- e. Pengembangan permukiman

f. Pengembangan pertanian

3. Penetapan 22 (dua puluh dua) ibukota kecamatan lainnya sebagai PPK, meliputi:

- a. Perkotaan Wanasalam
- b. Perkotaan Cihara
- c. Perkotaan Cilograng
- d. Perkotaan Cibeber
- e. Perkotaan Cijaku
- f. Perkotaan Cigemblong
- g. Perkotaan Banjarsari
- h. Perkotaan Cileles
- i. Perkotaan Gunungkencana
- j. Perkotaan Bojongmanik
- k. Perkotaan Cirinten
- l. Perkotaan Muncang
- m. Perkotaan Sobang
- n. Perkotaan Leuwidamar
- o. Perkotaan Lebakgedong
- p. Perkotaan Sajira
- q. Perkotaan Cimarga
- r. Perkotaan Cikulur
- s. Perkotaan Warunggunung
- t. Perkotaan Cibadak
- u. Perkotaan Kalanganyar
- v. Perkotaan Curugbitung

Pusat kegiatan diatas berfungsi sebagai:

- a. Pusat pelayanan kecamatan
 - b. Pengembangan perdagangan dan jasa
 - c. Pengembangan pendidikan
 - d. Pengembangan permukiman
 - e. Pengembangan pertanian**
 - f. Pengembangan pariwisata
4. Pengembangan kawasan agropolitan

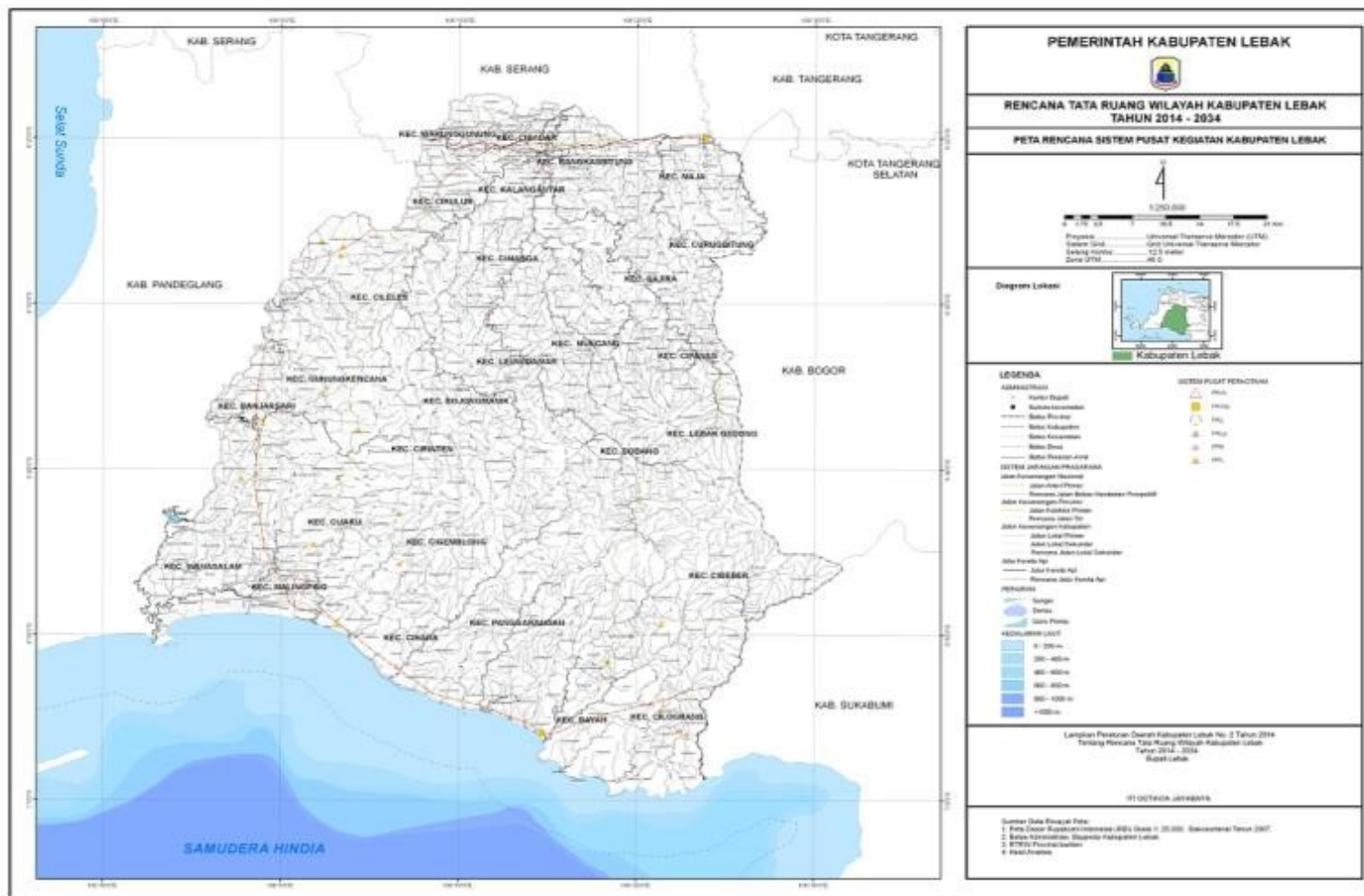
Pengembangan kawasan agropolitan dengan fungsi utama sebagai pusat pengembangan potensi pertanian di kawasan perdesaan di Kabupaten Lebak diarahkan di Kecamatan Wanasalam.

Selain dari rencana rencana pengembangan sistem perkotaan dan perdesaan, berdasarkan arah rencana sistem jaringan prasarana wilayah pun sudah dapat dilihat dapat mendukung kegiatan peternakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta 2.4 mengenai peta sistem pusat kegiatan dan Peta 2.5 mengenai peta rencana struktur ruang.



Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak

Gambar 2.4
Peta Sistem Pusat Kegiatan
Kabupaten Lebak



2.3.2 Arahan Terkait Rencana Pola Ruang

Kebijakan rencana pola ruang Kabupaten Lebak adalah:

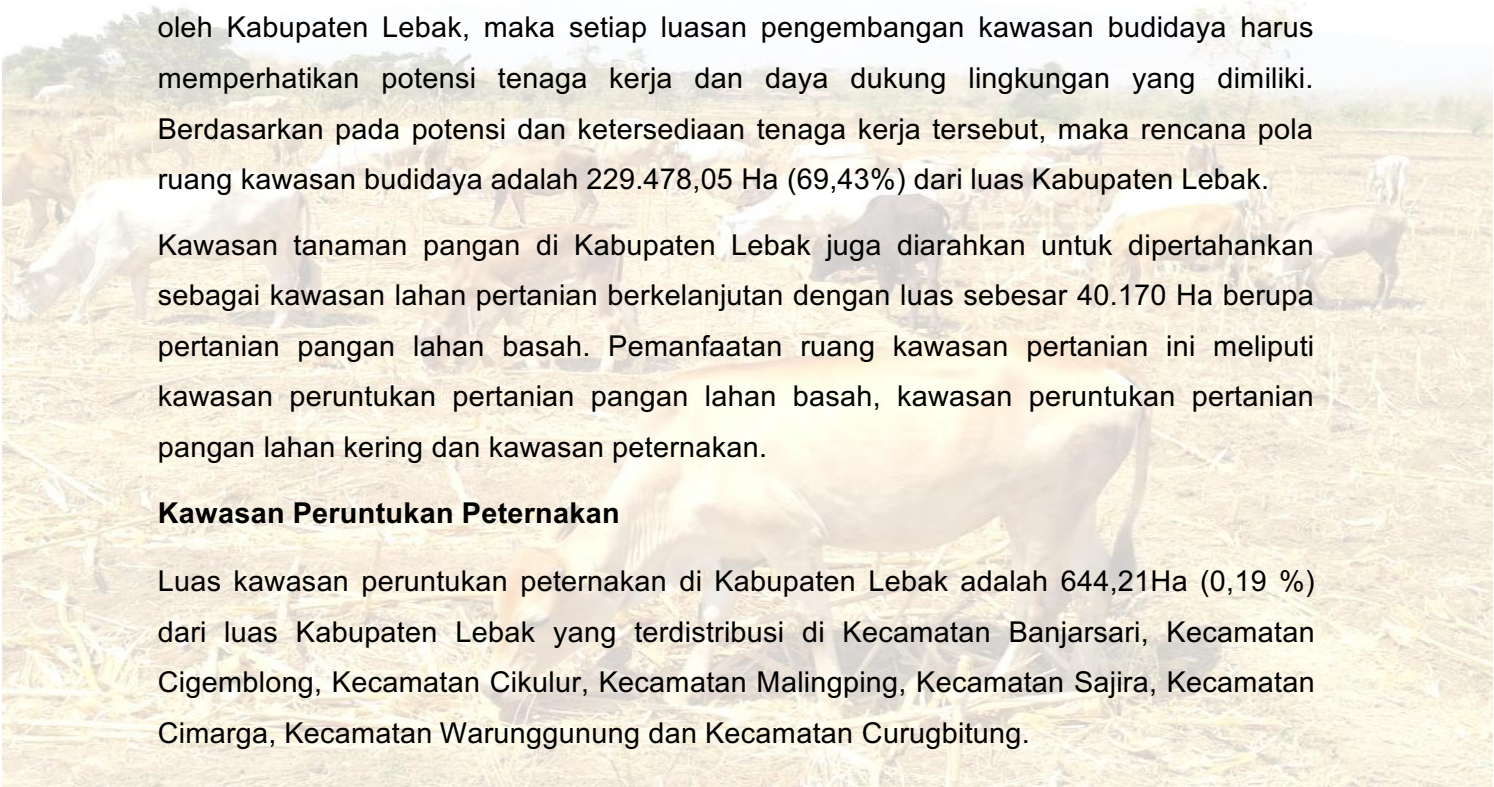
1. Peningkatan ketahanan pangan agribisnis berbasis kewilayahan;
2. Peningkatan kawasan wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan;
3. Pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan;
4. Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung; dan
5. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Berdasarkan kebijakan tersebut, maka rencana pola ruang Kabupaten Lebak Tahun 2034 dikembangkan dengan proporsi untuk kawasan lindung sebesar 101.029,13 Ha (30,57%) dan kawasan budidaya sebesar 229.478,05 Ha (69,43%). Secara lebih lengkap, rencana pola ruang Kabupaten Lebak pada Tahun 2034 dapat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Rencana Pola Ruang Kabupaten Lebak 2014-2034

No	Rencana Pola Ruang		Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kawasan Lindung	Hutan Lindung	3.179,46	0,96
		Kawasan Resapan Air	23.695,13	7,17
		Sempadan Sungai	801,20	0,24
		Sempadan Pantai	39.869,17	12,06
		Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	304,14	0,09
		Kawasan Pelestarian Alam (TNGHS)	16.380,00	4,96
		Kawasan Baduy	5.136,58	1,55
		Rawan Banjir	2.133,35	0,65
		Rawan Longsor	5.581,81	1,69
		Rawan Tsunami	1.076,84	0,33
		Sempadan Mata Air	1.076,84	0,33
	Total		101.029,13	30,57
2	Kawasan Budidaya	Hutan Produksi Terbatas	40.220,07	12,17
		Hutan Produksi Tetap	12.650,37	3,83
		Perkebunan	56.586,00	17,12
		Pertanian Pangan Lahan Basah	40.170,11	12,15
		Pertanian Pangan Lahan Kering	44.083,83	13,34
		Peternakan	644,71	0,20
		Pertambangan	2.732,97	0,83
		Industri	1.395,18	0,42
		Permukiman Perdesaan	16.269,59	4,92
		Minapolitan	288,41	0,09
	Total		299.478,05	69,43
	Luas Total		330.507,18	100,00

Sumber: Perda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034



Selain itu, untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak, maka setiap luasan pengembangan kawasan budidaya harus memperhatikan potensi tenaga kerja dan daya dukung lingkungan yang dimiliki. Berdasarkan pada potensi dan ketersediaan tenaga kerja tersebut, maka rencana pola ruang kawasan budidaya adalah 229.478,05 Ha (69,43%) dari luas Kabupaten Lebak.

Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Lebak juga diarahkan untuk dipertahankan sebagai kawasan lahan pertanian berkelanjutan dengan luas sebesar 40.170 Ha berupa pertanian pangan lahan basah. Pemanfaatan ruang kawasan pertanian ini meliputi kawasan peruntukan pertanian pangan lahan basah, kawasan peruntukan pertanian pangan lahan kering dan kawasan peternakan.

Kawasan Peruntukan Peternakan

Luas kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Lebak adalah 644,21Ha (0,19 %) dari luas Kabupaten Lebak yang terdistribusi di Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Cikulur, Kecamatan Malingping, Kecamatan Sajira, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Warunggunung dan Kecamatan Curugbitung.

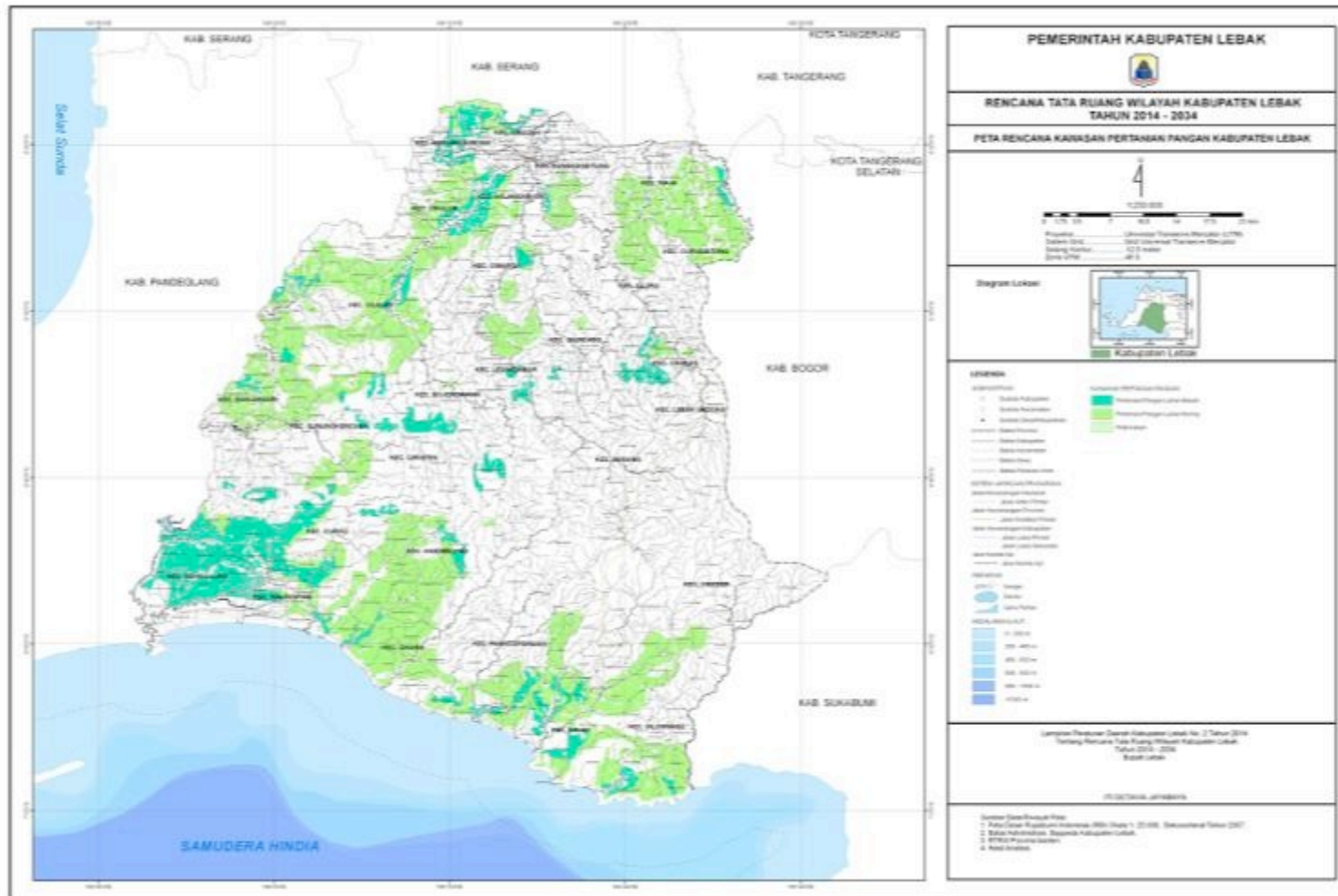
Tabel 2.2
Rencana Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan Kabupaten Lebak 2014-2034

No	Kecamatan	Kawasan Pertanian Pangan			Total (Ha)	Persentase (%)
		Pertanian Lahan Basah	Pertanian Lahan Kering	Peternakan		
1	Banjarsari	1.705,81	3.256,72	124,59	5.087,12	5,99
2	Bayah	835,12	7.131,54	-	7.966,66	9,38
3	Bojongmanik	984,83	64,23	-	1.049,06	1,24
4	Cibadak	415,51	339,96	-	755,47	0,89
5	Cibeber	1.628,04	1.966,98	-	3.595,02	4,23
6	Cigomblong	1.933,50	3.798,53	78,70	5.810,73	6,84
7	Cihara	1.170,74	4.862,25	-	6.032,99	7,11
8	Cijaku	1.426,68	1.960,77	-	3.387,45	3,99
9	Cikukur	1.956,76	290,28	57,69	2.304,73	2,71
10	Cileles	1.547,26	5.706,45	-	7.253,71	8,54
11	Cilograng	690,50	1.686,17	-	2.376,67	2,80
12	Cimarga	1.945,21	1.695,80	85,60	3.726,61	4,39
13	Cipanas	1.393,55	80,27	-	1.473,82	1,74
14	Cirintan	1.415,44	323,02	-	1.738,46	2,05
15	Curugbitung	1.032,96	3.389,41	77,86	4.500,23	5,30
16	Gunungkencana	1.295,72	2.234,02	-	3.529,74	4,16
17	Kalanganyar	717,52	386,31	-	1.103,83	1,30
18	Lebakgadang	525,45	-	-	525,45	0,62
19	Leuwidamar	1.173,89	748,85	-	1.922,74	2,26
20	Maja	1.225,79	1.129,73	-	2.355,52	2,77
21	Malingping	2.340,25	858,61	78,40	3.277,26	3,86
22	Muncang	1.087,35	115,79	-	1.203,14	1,42
23	Panggarangan	2.577,55	974,76	-	3.552,31	4,18
24	Rangkasbitung	981,77	439,33	-	1.421,10	1,67
25	Sajira	2.159,64	99,09	95,87	2.354,60	2,77
26	Sabang	581,76	-	-	581,76	0,69
27	Wanasalam	3.768,86	311,13	-	4.079,99	4,81
28	Warunggunung	1.652,65	233,24	45,50	1.931,39	2,27
Total		40.170,11	44.083,24	644,21	84.897,56	100,00

Sumber: Perda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034

Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak

Gambar 2.7
Peta Rencana Kawasan Pertanian
Kabupaten Lebak



2.3.3 Arahan Terkait Kawasan Strategis

Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi. Kawasan strategis yang berkaitan dengan arah pengembangan kawasan peternakan adalah **Kawasan Strategis Kabupaten Lebak dari Sudut Kepentingan Ekonomi**.

Kriteria penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi potensi ekonomi cepat tumbuh, sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, potensi ekspor, dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.

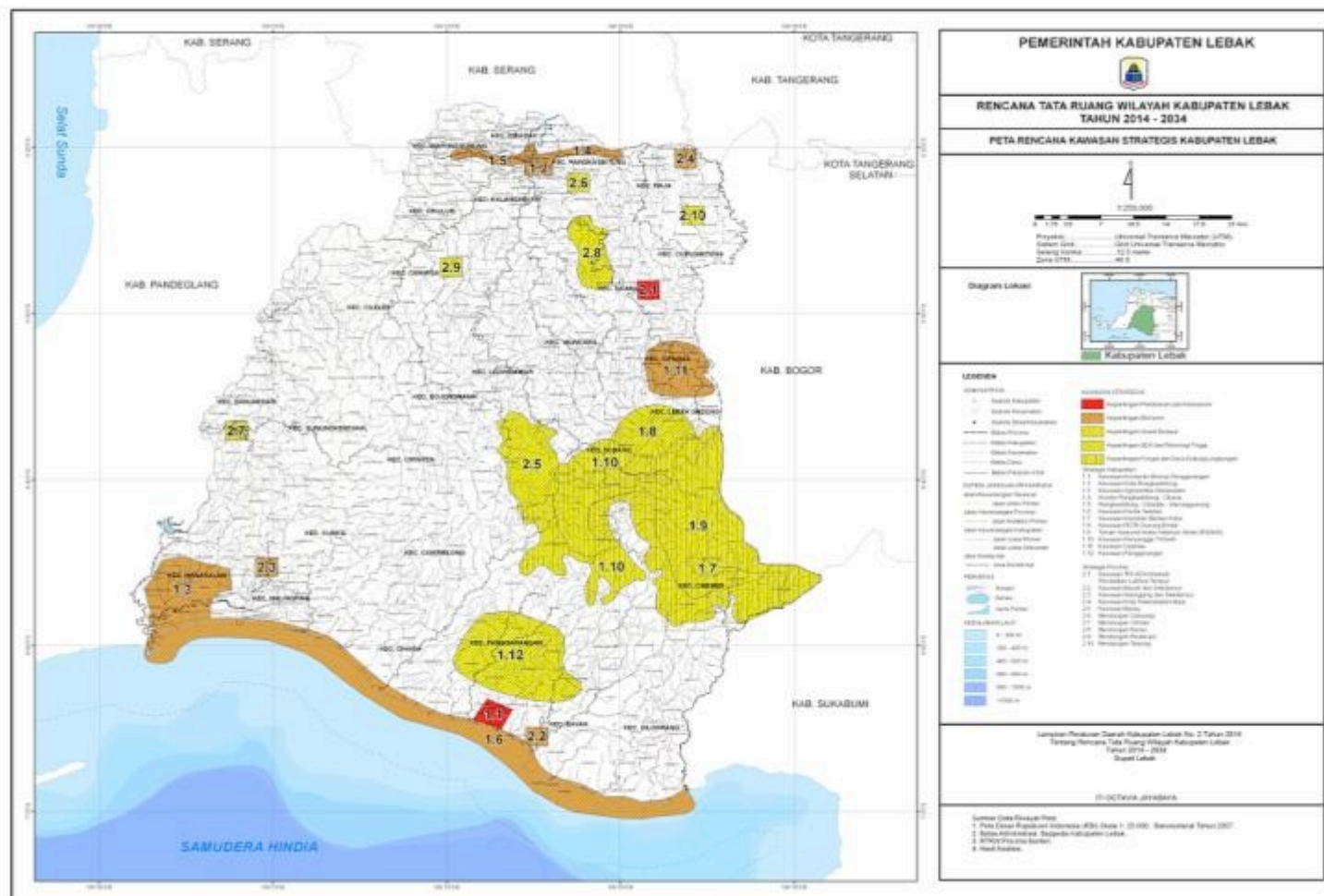
Didasari analisa yang telah dilakukan, kawasan strategis Kabupaten Lebak pada aspek ekonomi adalah:

1. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Wanasalam;
2. Kawasan koridor Rangkasbitung – Citeras;
3. Kawasan koridor Rangkasbitung – Cibadak – Warunggunung;
4. Kawasan pantai selatan;
5. Bendungan Karian;
6. Kawasan Cipanas; dan
7. Kawasan Panggarangan.

Beberapa kawasan tersebut merupakan kawasan yang dipersiapkan oleh kabupaten sebagai kawasan yang nantinya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak

Gambar 2.8
Peta Rencana Kawasan Strategis
Kabupaten Lebak



2.4 TINJAUAN BERDASARKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LEBAK 2014-2019

2.4.1 Isue Strategis

Dalam rencana pembangunan daerah, penyusunan isu-isu strategis merupakan tahapan yang penting. Hal ini karena ketepatan penyusunan isu strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat.


Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan. Secara umum, karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Upaya ini dapat dilakukan melalui analisa permasalahan umum daerah dengan tetap memperhatikan hal-hal yang menjadi prioritas dan isu strategis pada dokumen RPJMN dan RPJMD Provinsi.

Secara nasional, beberapa hal yang dijadikan isu strategis nasional meliputi kebijakan pengembangan wilayah dengan mendorong percepatan pembangunan pada wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Hal lainnya yang menjadi isu strategis nasional adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Dalam RPJMD Provinsi Banten 2012-2017, beberapa hal yang menjadi isu strategis meliputi infrastruktur wilayah/kawasan dan lingkungan hidup, ketahanan pangan, kemiskinan dan pengangguran, pendidikan dan kesehatan, serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030, Kabupaten Lebak ditetapkan sebagai bagian dari beberapa kawasan strategis yang dibentuk untuk mengurangi kesenjangan daerah, yaitu :

- 1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan Pemerintah yaitu Kawasan TNI AD Komando Pendidikan Latihan Tempur di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak.

- 
- 2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan ekonomi untuk :
 - a. Kawasan Malingping di Kabupaten Lebak;
 - b. Kawasan Bayah di Kabupaten Lebak;
 - c. Kawasan Kota Kekerabatan Maja di Kabupaten Lebak;

Selain itu, Kabupaten Lebak juga ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Provinsi Banten yang meliputi :

- 1) Kawasan agropolitan terpadu (termasuk agrowisata);
- 2) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 3) Kawasan pengembangan minapolitan terpadu (perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan dan minawisata);
- 4) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Sosial dan Budaya
- 5) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi :
 - a. Bendungan Karian di Kabupaten Lebak;
 - b. Bendungan Pasir Kopo di Kabupaten Lebak;
 - c. Bendungan Cilawang di Kabupaten Lebak;
 - d. Bendungan Tanjung di Kabupaten Lebak;
 - e. Bendung Ciliman di Kabupaten Lebak;
- 6) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Berdasarkan hal-hal tersebut dan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, serta permasalahan dan tantangan pembangunan yang diperkirakan akan terjadi pada 5 (lima) tahun mendatang, maka ditetapkan isu-isu strategis pembangunan daerah kabupaten Lebak sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintahan daerah;
2. Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur Wilayah ;
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Kelestarian Lingkungan Hidup;
4. Ketahanan Pangan;
5. Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan;
6. Kemiskinan dan ketenagakerjaan;
7. Kemampuan perekonomian daerah;
8. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
9. Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah;
10. Pelestarian cagar budaya dan penerapan nilai-nilai budaya lokal;

11. Kepemudaan dan Olahraga;
12. Kesetaraan gender dan perlindungan anak;
13. Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Ke-13 isu strategis di atas secara substansial telah mencakup 5 (lima) isu dan permasalahan pembangunan yang dijadikan dasar dalam penyusunan visi dan misi calon kepala daerah terpilih pada Pemilu tahun 2013, yaitu:

1. Pengembangan infrastruktur daerah, pengelolaan lingkungan hidup, penanganan desa tertinggal, dan kebencanaan;
2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar;
3. Peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
5. Peningkatan kinerja aparatur daerah dan pelayanan publik.

2.4.2 Visi

Berdasarkan kondisi Kabupaten Lebak sampai dengan saat ini, tantangan dan prediksi yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Kabupaten Lebak tahun 2014-2019 adalah :

***“Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya saing melalui
Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan
Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”***


Sesuai kondisi saat ini, kemajuan Kabupaten Lebak tergantung pada tingkat elastisitas kemajuan terhadap Propinsi Banten dan Nasional.

2.4.3 Misi

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Karenanya, misi pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari visi yang dirumuskan dalam bentuk aktivitas yang menggambarkan upaya mewujudkan visi tersebut.

Adapun misi sebagaimana dimaksud dirumuskan dalam 6 (enam) misi operasional sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif.
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan Publik.

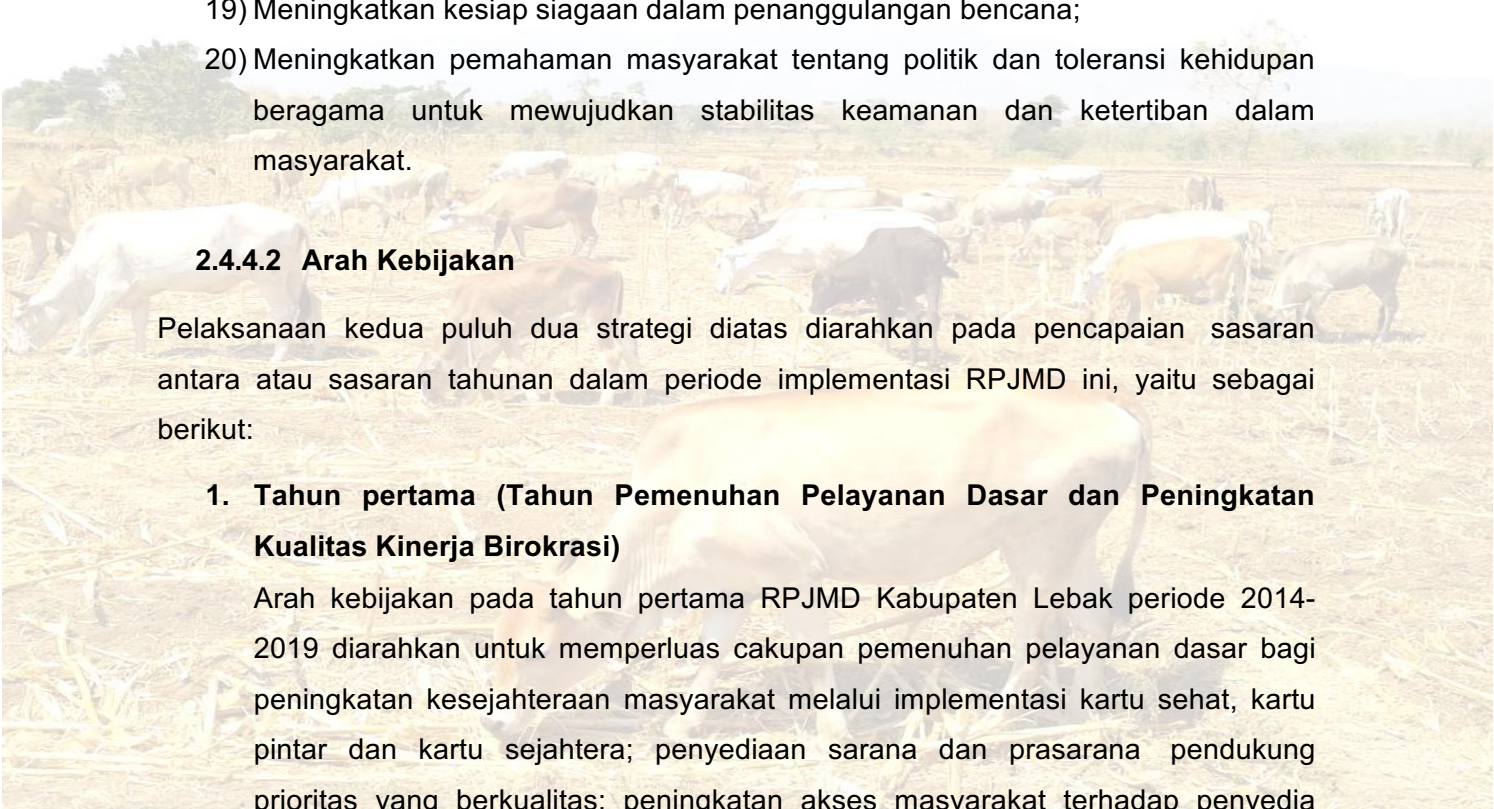
- 
3. Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan.
 4. Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas.
 5. Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan,
 6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah,

2.4.4 Strategi dan Arah Kebijakan

2.4.4.1 Startegi

Berdasarkan pengertian dan kerangka logis dalam perumusan RPJMD ini, maka strategi pembangunan Kabupaten Lebak dalam RPJMD Tahun 2014-2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan;
- 2) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata;
- 3) Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan;
- 4) Optimalisasi pembinaan kepemudaan dan olah raga;
- 5) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya dan penerapan nilai-nilai budaya lokal;
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan;
- 7) Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas tata pemerintahan dan pelayanan publik yang prima;
- 8) Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- 9) Meningkatkan status ketahanan pangan dan pengembangan Perekonomian masyarakat;
- 10) Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang;
- 11) Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;
- 12) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat;
- 13) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan;
- 14) Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 15) Menjaga daerah resapan air sebagai modal ekonomi daerah;
- 16) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- 17) Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
- 18) Meningkatkan ruang terbuka hijau;

- 
- 19) Meningkatkan kesiap siagaan dalam penanggulangan bencana;
 - 20) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik dan toleransi kehidupan beragama untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

2.4.4.2 Arah Kebijakan

Pelaksanaan kedua puluh dua strategi diatas diarahkan pada pencapaian sasaran antara atau sasaran tahunan dalam periode implementasi RPJMD ini, yaitu sebagai berikut:

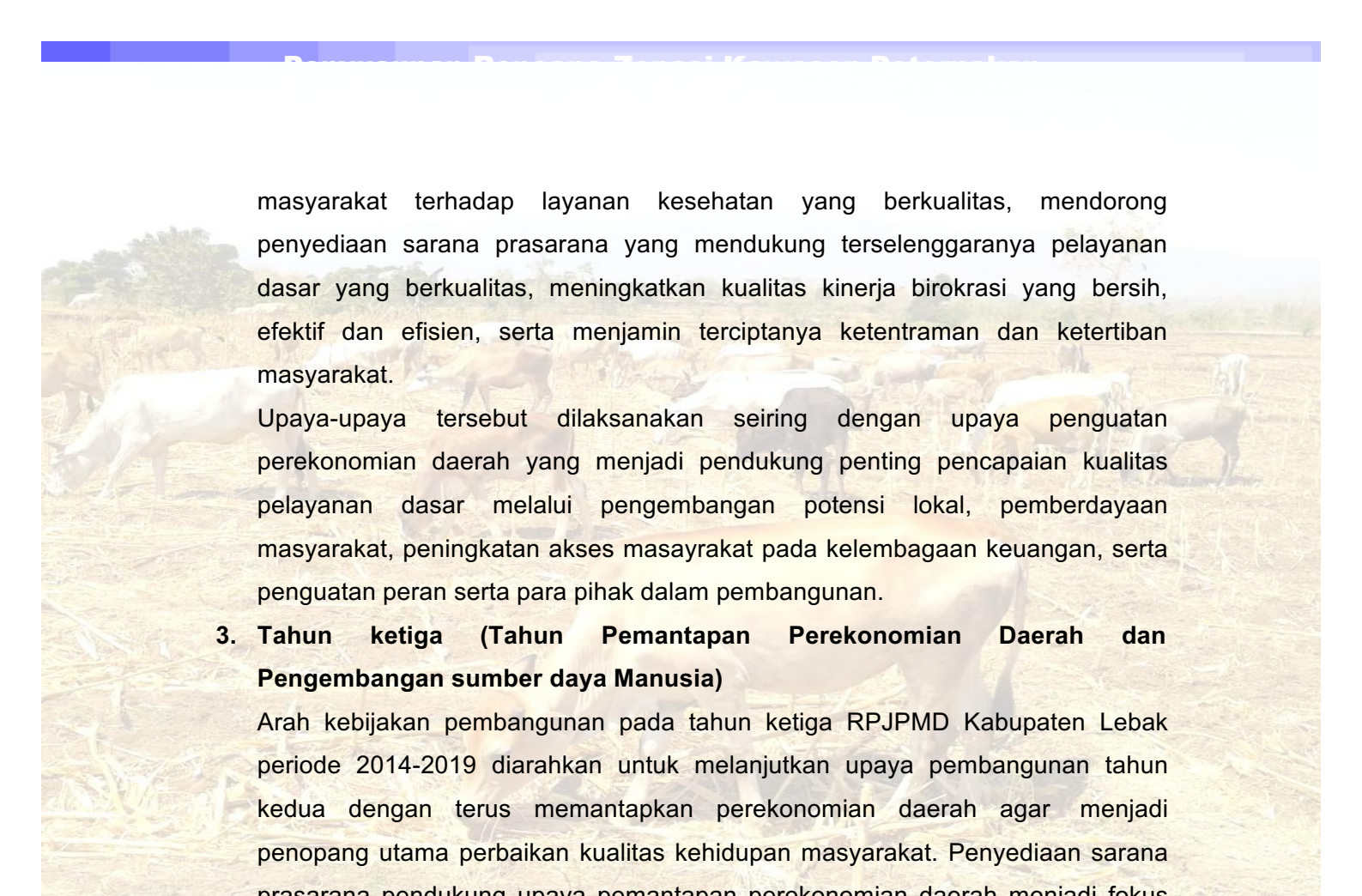
1. Tahun pertama (Tahun Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Kualitas Kinerja Birokrasi)

Arah kebijakan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Lebak periode 2014-2019 diarahkan untuk memperluas cakupan pemenuhan pelayanan dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi kartu sehat, kartu pintar dan kartu sejahtera; penyediaan sarana dan prasarana pendukung prioritas yang berkualitas; peningkatan akses masyarakat terhadap penyedia layanan, peningkatan ketahanan pangan masyarakat, peningkatan kualitas infrastruktur permukiman, penataan ruang terbuka bagi masyarakat, peningkatan perlindungan sosial serta mengembangkan kemitraan dan peran serta para pihak dalam pembangunan.

Upaya tersebut dilaksanakan seiring dengan upaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi yang menjadi pilar penting pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lebak melalui upaya membenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan, peningkatan upaya penyelesaian masalah-masalah pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Penataan pada seluruh sektor pembangunan juga perlu dilakukan sebagai persiapan guna menghadapi periode pembangunan ke depan yang akan berjalan dengan lebih pesat.

2. Tahun kedua (Tahun Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Penguatan Perekonomian Daerah)

Arah kebijakan pada tahun kedua RPJMD Kabupaten Lebak periode 2014- 2019 diarahkan untuk meningkatkan dan menjaga kualitas pelayanan dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan berdaya saing, mempermudah akses



masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, mendorong penyediaan sarana prasarana yang mendukung terselenggaranya pelayanan dasar yang berkualitas, meningkatkan kualitas kinerja birokrasi yang bersih, efektif dan efisien, serta menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Upaya-upaya tersebut dilaksanakan seiring dengan upaya penguatan perekonomian daerah yang menjadi pendukung penting pencapaian kualitas pelayanan dasar melalui pengembangan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses masyarakat pada kelembagaan keuangan, serta penguatan peran serta para pihak dalam pembangunan.

3. Tahun ketiga (Tahun Pemanjapan Perekonomian Daerah dan Pengembangan sumber daya Manusia)

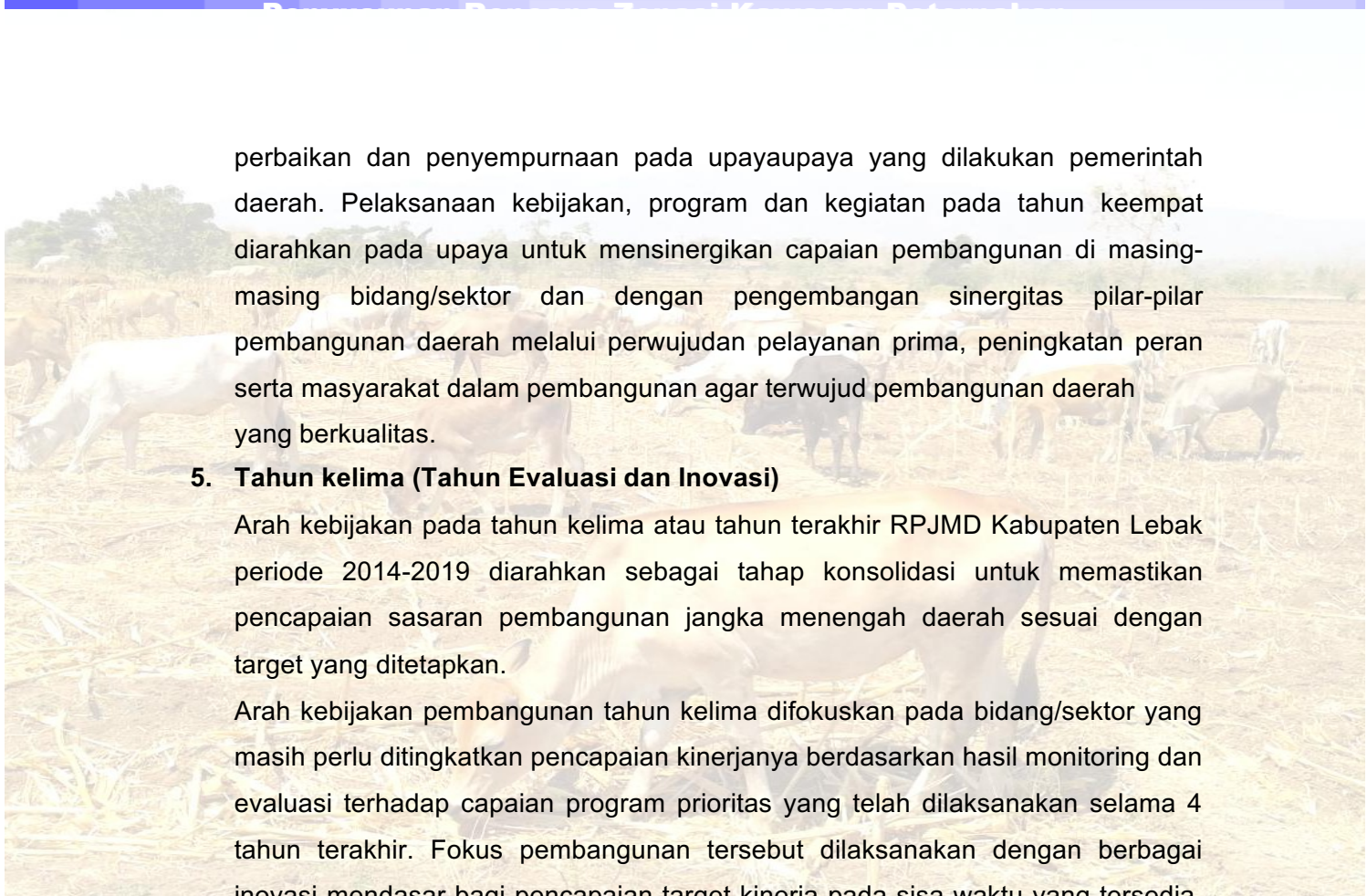
Arah kebijakan pembangunan pada tahun ketiga RPJMD Kabupaten Lebak periode 2014-2019 diarahkan untuk melanjutkan upaya pembangunan tahun kedua dengan terus memantapkan perekonomian daerah agar menjadi penopang utama perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Penyediaan sarana prasarana pendukung upaya pemanjapan perekonomian daerah menjadi fokus pembangunan tahun ketiga terutama sarana prasarana yang menjadi pendorong bagi masuknya modal pihak swasta seperti jaringan jalan, jaringan listrik dan ketersediaan air bersih, dengan didukung oleh peningkatan pelayanan transportasi, serta perumahan dan pemukiman dengan tetap memperhatikan upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

Upaya tersebut dilaksanakan seiring dengan upaya mewujudkan sumberdaya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia, dan peningkatan upaya perlindungan sosial.

4. Tahun Keempat (Tahun Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia dan kualitas pembangunan daerah)

Arah kebijakan pada tahun keempat RPJMD Kabupaten Lebak periode 2014-2019 diarahkan untuk memperkokoh perekonomian Kabupaten Lebak melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi lokal, dan peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi terwujudnya sumberdaya manusia yang unggul dan kesejahteraan masyarakat.

Tahun keempat ini juga diarahkan untuk memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan



perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sector dan dengan pengembangan sinergitas pilar-pilar pembangunan daerah melalui perwujudan pelayanan prima, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan agar terwujud pembangunan daerah yang berkualitas.

5. Tahun kelima (Tahun Evaluasi dan Inovasi)

Arah kebijakan pada tahun kelima atau tahun terakhir RPJMD Kabupaten Lebak periode 2014-2019 diarahkan sebagai tahap konsolidasi untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada bidang/sector yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir. Fokus pembangunan tersebut dilaksanakan dengan berbagai inovasi mendasar bagi pencapaian target kinerja pada sisa waktu yang tersedia.

Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar bagi penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada RPJMD berikutnya.

2.5 TINJAUAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG PETERNAKAN (RTRP) (IPB, 1993)

Rencana Tata Ruang dibedakan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. Selanjutnya dalam kaitannya dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Peternakan (RTRP) Kabupaten yang dilakukan, yang perlu dibahas lebih lanjut adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan terutama Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kotamadya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kotamadya berisi :

1. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
2. Pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu.
3. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem pemukiman pedesaan dan perkotaan.
4. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan.

5. Penatagunaan tanah, air, udara dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

2.5.1 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Peternakan (RTRP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

RTRP yang telah disusun akan memberikan masukan (input) yang efektif dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kotamadya, masukan tersebut dalam hal:

1. Upaya-upaya pengelolaan kawasan budidaya, khususnya budidaya pertanian
2. Perumusan sistem kegiatan pembangunan
3. Perumusan sistem prasarana (transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan)
4. Pendayagunaan sumberdaya alam terutama lahan pertanian

Selain itu, RTRP juga dapat memberikan masukan yang penting dalam:

1. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang
2. Upaya mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah
3. Penetapan lokasi investasi swasta dan juga pemerintah (fasilitas pelayanan, lokasi-lokasi penyebaran ternak, lokasi pusat-pusat pasar dan lain-lain)
4. Penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten/Kotamadya.

2.5.2 Dasar Pertimbangan Penyusunan RTRP

Penyusunan RTRP Kabupaten merupakan upaya menempatkan lokasi aktivitas-aktivitas pembangunan sub-sektor peternakan dalam tata ruang wilayah kabupaten. Oleh karena itu, penyusunan RTRP tidak lepas dari Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ada.

Di pihak lain, penyusunan RTRP Kabupaten adalah untuk menata ruang bagi upaya pengembangan peternakan di wilayah kabupaten yang bersangkutan. Penataan ruang penting untuk menghindari tumpang tindih antar kegiatan dan memungkinkan keterkaitan fungsional antara sub-sistem agribisnis peternakan. Dalam huungan ini, penyusunan RTRP Kabupaten seyogyanya memperhatikan rencana dan strategi pengembangan peternakan yang telah disusun dalam Repelita Kabupaten.

2.5.3 Materi dan Kegunaan RTRP

Produk Kegiatan RTRP Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Peternakan yang merupakan :

1. Struktur tata ruang yang menempatkan aktivitas pembangunan peternakan dalam struktur yang mengacu kepada RUTR dan RDTR yang berlaku. Struktur pemanfaatan ruang ditunjukkan oleh titik-titik pusat pertumbuhan ternak (PPT) dengan daerah “belakangnya” pada setiap satuan wilayah pengembangan (SWP).
2. Pola pemanfaatan ruang yang menunjukkan komoditas atau aktivitas pembangunan peternakan yang potensial didalam setiap kawasan atau SWP.

RTRP Kabupaten dapat dimanfaatkan untuk:

1. Penetapan lokasi investasi dalam pembangunan peternakan. Struktur ruang dengan PPT dan daerah belakangnya menunjukkan wilayah-wilayah potensial bagi pengembangan jenis ternak tertentu. Struktur tersebut dapat menjadi masukan dalam memutuskan investasi pengembangan ternak, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta.
2. Pengembangan fasilitas pelayanan pembangunan peternakan dapat diprioritaskan pada pusat-pusat pertumbuhan ternak yang telah diidentifikasi. Struktur yang ada memungkinkan pola pemanfaatan fasilitas layanan di dalam setiap SWP berpusat ke pusat pertumbuhan ternak.

2.5.4 Tahap Penyusunan RTRP

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam penyusunan RTRP kabupaten meliputi:

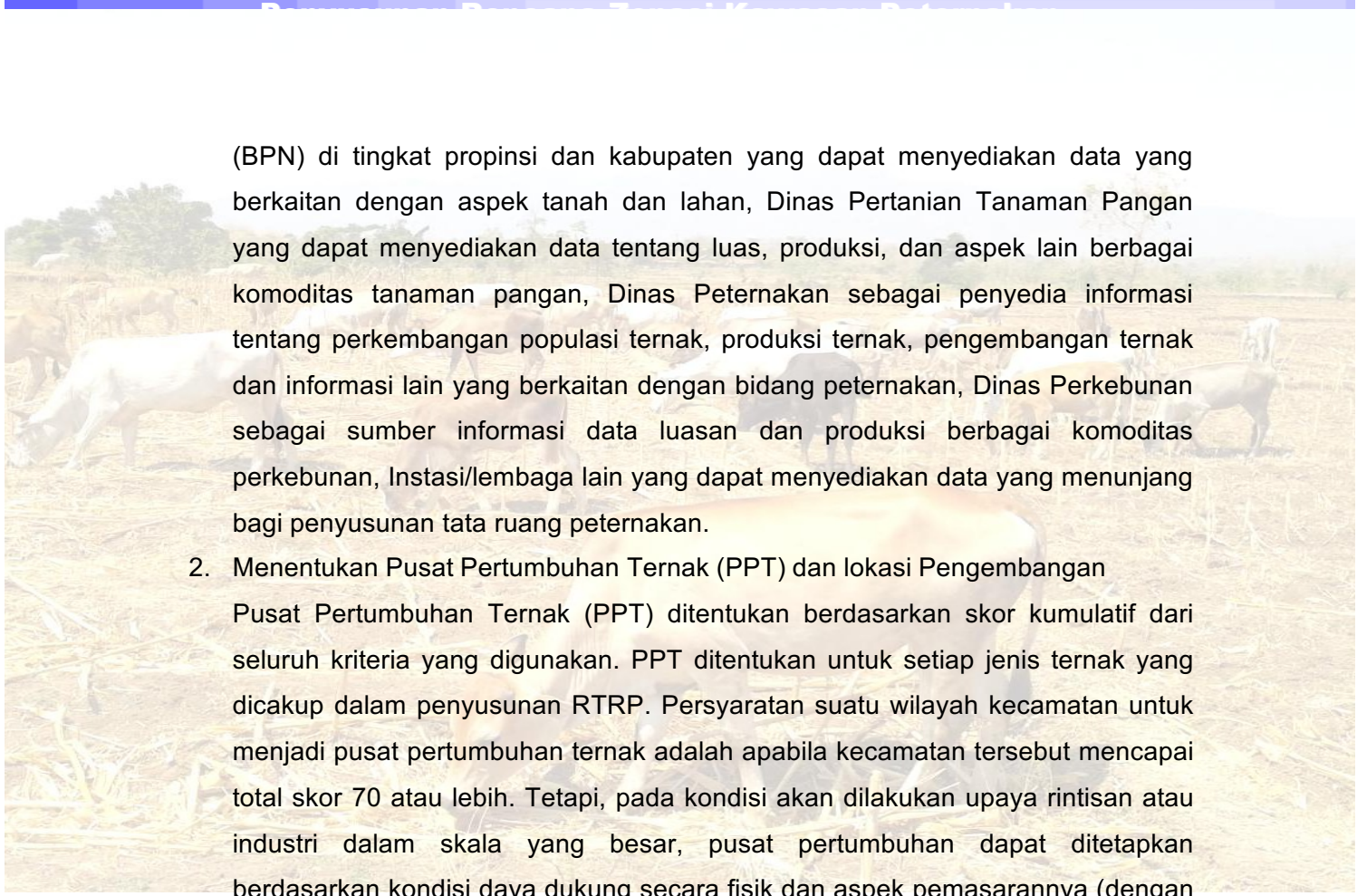
1. Menentukan kebutuhan data bagi penyusunan RTRP
Proses ini mencakup kegiatan mengidentifikasi kebutuhan data/informasi yang diperlukan bagi penyusunan RTRP Kabupaten. Selanjutnya, mengidentifikasi data yang sudah tersedia dan data-data yang perlu dikumpulkan. Secara umum data yang dibutuhkan untuk perhitungan masing-masing kriteria penentuan pusat pertumbuhan ternak disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Kebutuhan Data Dalam Penyusunan RTRP

No	Kategori	Kebutuhan Data
1	Tingkat Perkembangan Kecamatan	Jumlah desa swadaya, swakarsa dan swasembada, jumlah desa di setiap kecamatan
2	Tipe Kecamatan	Distribusi desa menurut tipenya (pesawahan, perladangan, perkebunan, nelayan, peternakan industri, jasa perdagangan)
3	Potensi dasar kecamatan	Luas wilayah kecamatan, populasi penduduk, distribusi lahan menurut jenis tanah, lahan menurut kemiringan, jarak kecamatan ke ibu kota kabupaten/propinsi
4	Fasilitas pelayanan peternakan	Jumlah KUD, BPP, Puskesmas, Pos Satgas Peternakan, Lab. Ternak pembibitan ternak/pakan, <i>holding ground</i> , RPH, karantina, dan fasilitas layanan lain yang ada di kecamatan
5	Nisbah lahan pangan/ penduduk (10 th YAD)	Luas lahan sawah dan ladang/huma/tegal, populasi penduduk 10 tahun terakhir (<i>time series</i>)
6	Kapasitas tampung ternak (10 th YAD)	Data <i>time series</i> luasan sawah, tegal/huma/ladang, padang rumput dan rawa 10 tahun terakhir
7	Indeks konsentrasi ternak	Populasi setiap jenis ternak pada tahun terakhir.
8	Jarak ke pusat SWP	Pusat-pusat SWP dalam wilayah kabupaten, jarak kecamatan terhadap pusat tersebut.
9	Pengetahuan peternak	Jumlah kelompok peternak untuk masing-masing kelas (pemula, lanjut, madya dan utama) yang ada di kecamatan
10	Tingkat kemajuan KUD	Jumlah KUD pada masing-masing kelas yang ada di wilayah kecamatan
11	Ketersediaan listrik	Jumlah pelanggan listrik di kota kecamatan dan sekitarnya.
12	Kemudahan transport	Panjang masing-masing kualitas jalan (tanah, batu dan aspal), ketersediaan sarana transportasi (jumlah, frekuensi dan ongkos)
13	Jarak ke pengolahan susu	Industri pengolahan susu di wilayah kabupaten/propinsi, jarak kecamatan ke lokasi IPS.
14	Proporsi penduduk non muslim	Jumlah penduduk menurut agama

Sumber: Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Peternakan (RTRP) (IPB, 1993)

Selanjutnya, data-data tersebut diubah menjadi skor masing-masing kriteria dari skala 1-10 menjadi skala lain hingga skor maksimum gabungan kriteria menjadi 100. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui beberapa sumber di wilayah Kabupaten diantaranya adalah Kantor Statistik Kabupaten sebagai instansi yang menerbitkan buku Kabupaten Dalam Angka yang dapat berisi lengkap dengan rincian tabel menurut kecamatan, Badan Pertanahan Nasional



(BPN) di tingkat propinsi dan kabupaten yang dapat menyediakan data yang berkaitan dengan aspek tanah dan lahan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang dapat menyediakan data tentang luas, produksi, dan aspek lain berbagai komoditas tanaman pangan, Dinas Peternakan sebagai penyedia informasi tentang perkembangan populasi ternak, produksi ternak, pengembangan ternak dan informasi lain yang berkaitan dengan bidang peternakan, Dinas Perkebunan sebagai sumber informasi data luasan dan produksi berbagai komoditas perkebunan, Instansi/lembaga lain yang dapat menyediakan data yang menunjang bagi penyusunan tata ruang peternakan.

2. Menentukan Pusat Pertumbuhan Ternak (PPT) dan lokasi Pengembangan

Pusat Pertumbuhan Ternak (PPT) ditentukan berdasarkan skor kumulatif dari seluruh kriteria yang digunakan. PPT ditentukan untuk setiap jenis ternak yang dicakup dalam penyusunan RTRP. Persyaratan suatu wilayah kecamatan untuk menjadi pusat pertumbuhan ternak adalah apabila kecamatan tersebut mencapai total skor 70 atau lebih. Tetapi, pada kondisi akan dilakukan upaya rintisan atau industri dalam skala yang besar, pusat pertumbuhan dapat ditetapkan berdasarkan kondisi daya dukung secara fisik dan aspek pemasarannya (dengan total skor yang lebih rendah).

Kriteria diperlukan untuk menentukan kelayakan suatu wilayah kecamatan menjadi PPT di SWP nya. Kriteria PPT berbeda untuk setiap jenis ternak karena setiap ternak memiliki ciri khas yang memerlukan persyaratan tertentu dari wilayah pengembangannya. Kriteria penentuan PPT menurut jenis ternak disajikan pada tabel 2.4.

3. Tingkat Perkembangan Kecamatan:

Kriteria ini berlaku untuk ternak sapi potong, kerbau, domba dan kambing. Kriteria ini menggambarkan tingkat kemajuan kecamatan berdasarkan tingkat kemajuan desa yang ditetapkan menurut kriteria baku dari Departemen Dalam Negeri RI yang mengklasifikasikan desa sebagai swadaya, swakarsa atau swasembada. Setiap klasifikasi desa diberikan skor yang berbeda, Desa Swadaya = 1, Desa Swakarsa = 5 dan Desa Swasembada = 10. Rumus yang dapat digunakan sebagai penentuan skor tingkat perkembangan kecamatan adalah:

**Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan
Kabupaten Lebak**

**Tabel 2.4
Kriteria Penentuan Pusat Pertumbuhan Ternak (PPT) dan Lokasi Pengembangannya**

Kriteria	Penggunaan kriteria						Skoring
	Sapi Potong	Kerbau	Domba/Kambing	Babi	Sapi Perah	Ayam Ras	
1 Tingkat perkembangan kecamatan	1	1	1	-	-	-	Strata I=10, II=5, III=1
2 Tipe Kecamatan	2	2	2	-	1	1	Strata I=10, II=5, III=1
3 Potensi dasar kecamatan	3	3	3	-	2	2	tinggi=10, sedang=5, rendah=1
4 Fasilitas layanan peternakan	4	4	4	-	3	-	cukup=10, sedang=5, kurang=1
5 Nisbah lahan pangan/penduduk 10 tahun YAD	5	5	5	-	-	-	tinggi=10, sedang=5, rendah=1
6 Kapasitas kampung ternak	6	6	6	-	-	-	tinggi=10, sedang=5, rendah=1
7 Indeks konsentrasi ternak	7	7	7	1	-	3	>=10, 1=5, <=1
8 Jarak ke pusat SWP	8	8	8	-	-	-	dekat=10, sedang=5, Jauh=1
9 Pengetahuan peternak	9	9	9	-	4	-	Strata I=10, II=5, III=1
10 Tingkat kemajuan KUD	-	-	-	-	6	-	tinggi=10, sedang=5, rendah=1
11 Ketersediaan listrik	-	-	-	-	-	4	Ada=10, tidak=1
12 Kemudahan transport	-	-	-	2	-	-	mudah=10, sedang=5, sulit=1
13 Jarak ke IPS	-	-	-	-	7	-	dekat=10, sedang=5, Jauh=1
14 Proporsi penduduk non muslim/ muslim	-	-	-	3	-	-	>30%, 20-30%=5, <20%=1

Sumber: Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Peternakan (RTRP) (IPB, 1993)

$$TPK = \frac{(N1 \times 1) + (N2 \times 5) + (N3 \times 10)}{\text{jumlah desa}}$$

Keterangan : N1= jumlah desa Swadaya,

N2= jumlah desa Swasembada,

N3 = jumlah desa Swasembada

4. Tipe Kecamatan

Tipe kecamatan merupakan unsur kriteria yang menggambarkan kedekatan profil desa-desanya terhadap peternakan, berlaku untuk semua jenis ternak kecuali babi. Semakin dekat hubungan tipe kecamatan dengan peternakan, semakin tinggi skor untuk pusat pertumbuhan ternak. Tipe kecamatan ditentukan dengan cara menentukan skor tipe yang ada di kecamatan berdasarkan pedoman pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Kriteria Tipe Kecamatan Dalam Pengembangan Peternakan

Tipe desa		Skor menurut jenis ternak				
		Sapi Potong	Sapi Perah	Kerbau	Domba/Kambing	Unggas
1	Peternakan	10	10	10	10	10
2	Nelayan	1	1	1	1	1
3	Pesawahan	10	10	10	10	10
4	Perladangan	10	10	10	10	10
5	Perkebunan	5	10	10	10	10
6	Kerajinan/industri kecil	5	5	5	5	5
7	Industri sedang/ besar	1	1	1	1	1
8	Perdagangan/jasa	1	1	1	1	10

Sumber: Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Peternakan (RTRP) (IPB, 1993)

Rumus penentuan tipe kecamatan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$TK = \frac{(n1 \times s1) + (n2 \times s2) + \dots + (nk \times sk)}{\text{jumlah desa}}$$

Keterangan : TK= Tipe Kecamatan,

n1...k= jumlah desa pada masing-masing tipe,

s1...k= skor tipe kecamatan

5. Potensi Dasar Kecamatan

Kriteria ini berlaku untuk semua jenis ternak kecuali babi. Potensi ini didasarkan pada beberapa faktor yakni penduduk, alam dan letak kecamatan. Tabel penentuan potensi dasar kecamatan berdasarkan faktor penduduk, Alam, dan letak kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Potensi Dasar Kecamatan Dalam Pengembangan Peternakan

Faktor		Kriteria	Skor
1	Kepadatan penduduk	< 200 orang/ka2	10
		200-300 orang /ka2	5
		>300 orang/ka2	1
Faktor Alam:			
	Produktivitas tanah	Tinggi: latosol, andosol, regosol, mediteran, alluvial	10
		Sedang: podsolik, grunusol, hidronorf, renzina	5
		Rendah: podsol, litosol, planosol, gleihunus, organosol	1
2	Iklim (curah hujan)	Kering < 1000 mm	1
		Sedang 1000-2000 mm	5
		Basah > 2000 mm	10
	Land form (topografi)	Pegunungan (> 45°)	1
		Perbukitan (15 – 45°)	5
		Dataran (< 15°)	10
	Temperatur	< 17°C	10
		17°-25°C	5
		>25°C	1
3	Letak Kecamatan	Dekat : terletak dekat kota besar yang memiliki pelabuhan/terminalinter-regional, pusat pasar regional/sub-regional, industri menengah/besar, pusat pendidikan menengah atas/menengah, bank, dll	10
		Sedang : terletak dekat kota kecil yang memiliki terminal sub-regional,pendidikan menengah pertama/atas, bank produksi, dll	5
		Jauh : terpencil	1

Sumber: Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Peternakan (RTRP) (IPB, 1993)

Rumus penentuan skor potensi dasar kecamatan:

$$PD = \frac{D + \left[\frac{Pd + I + Ld}{3} \right] + Lt}{3}$$

Keterangan: PD = Potensi dasar kecamatan, D = skor kepadatan penduduk, Pd = skor produktivitas tanah, I = skor iklim (curah hujan), Ld = skor land form, Lt = skor letak kecamatan

Rumus penentuan skor potensi dasar kecamatan untuk ternak sapi perah sedikit berbeda, penghitungan faktor alam mencakup empat unsur dengan penambahan unsur temperatur rata-rata :

$$PD = \frac{D + \left[\frac{Pd+I+Ld+T}{4} \right] + Lt}{3}$$

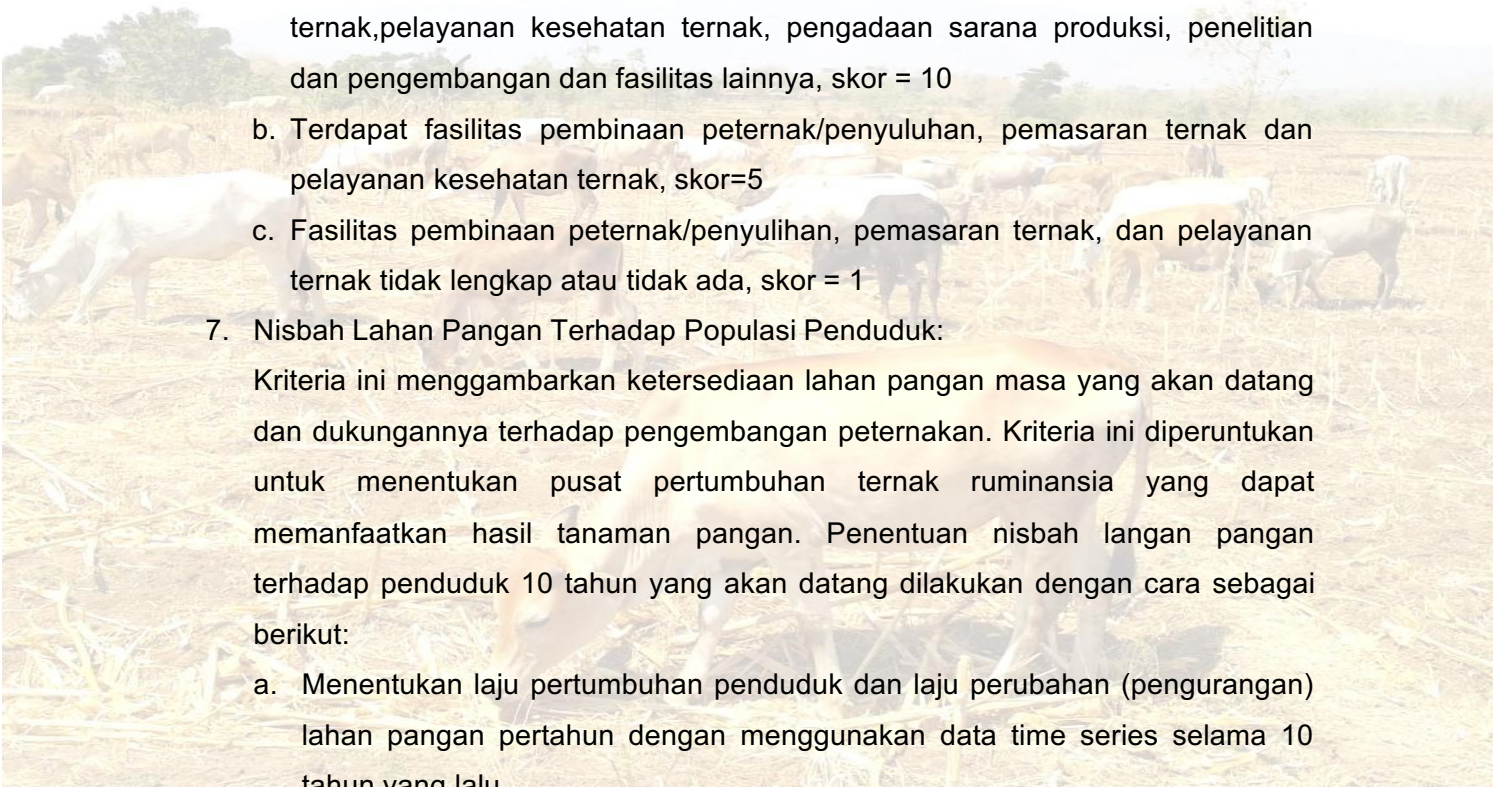
Keterangan: PD = Potensi dasar kecamatan, D = skor kepadatan penduduk, Pd = skor produktivitas tanah, I = skor iklim (curah hujan), Ld = skor land form, T = temperatur rata-rata, Lt = skor letak kecamatan

6. Jumlah Fasilitas Layanan Peternakan

Kriteria ini berlaku untuk semua jenis ternak kecuali babi dan unggas, ditentukan berdasarkan ketersediaan fasilitas layanan yang diperlukan dalam pengembangan peternakan, meliputi:

- a. Fasilitas layanan pembinaan/penyuluhan, seperti Balai Penyuluh Pertanian dan Peternakan, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) peternakan dan lembaga layanan lainnya.
- b. Fasilitas layanan kesehatan ternak seperti pos kesehatan hewan (poskeswan), petugas kesehatan hewan, inseminator dan fasilitas layanan kesehatan lainnya.
- c. Fasilitas layanan pemasaran ternak dan hasilnya, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), pasar ternak dan lembaga lainnya.
- d. Fasilitas layanan pengadaan sarana produksi, seperti toko obat/pakan/bibit ternak, KUD bidang usaha sarana produksi peternakan dan lain-lain
- e. Fasilitas layanan penelitian dan pengembangan peternakan seperti Balai Perbibitan Ternak atau Makanan Ternak, laboratorium diagnostik dan atau fasilitas lainnya yang berperan dalam uji coba teknologi peternakan
- f. Fasilitas layanan lain seperti Rumah Potong Hewan (RPH), holding ground dan atau fasilitas lainnya yang berfungsi memberikan pelayanan penanganan ternak dan hasil ternak.

Kemudian menentukan skor berdasarkan ketersediaan dan jumlah fasilitas layanan peternakan dengan ketentuan :

- 
- a. Terdapat fasilitas pembinaan peternak/penyuluhan, pemasaran ternak, pelayanan kesehatan ternak, pengadaan sarana produksi, penelitian dan pengembangan dan fasilitas lainnya, skor = 10
 - b. Terdapat fasilitas pembinaan peternak/penyuluhan, pemasaran ternak dan pelayanan kesehatan ternak, skor=5
 - c. Fasilitas pembinaan peternak/penyuluhan, pemasaran ternak, dan pelayanan ternak tidak lengkap atau tidak ada, skor = 1

7. Nisbah Lahan Pangan Terhadap Populasi Penduduk:

Kriteria ini menggambarkan ketersediaan lahan pangan masa yang akan datang dan dukungannya terhadap pengembangan peternakan. Kriteria ini diperuntukan untuk menentukan pusat pertumbuhan ternak ruminansia yang dapat memanfaatkan hasil tanaman pangan. Penentuan nisbah lahan pangan terhadap penduduk 10 tahun yang akan datang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menentukan laju pertumbuhan penduduk dan laju perubahan (pengurangan) lahan pangan pertahun dengan menggunakan data time series selama 10 tahun yang lalu.
- b. Menghitung ketersediaan lahan dan populasi penduduk pada 10 tahun yang akan datang dengan menggunakan laju perubahan pada butir (1)
- c. Menentukan nisbah lahan per penduduk dengan membagi luas lahan pangan yang tersedia pada 10 tahun yang akan datang dengan populasi penduduk saat ini.
- d. Menentukan skor nisbah lahan pangan terhadap penduduk 10 tahun yang akan datang dengan ketentuan: Nisbah < 0.1 ha, skor = 1, nisbah $0.1-0.2$ ha, skor = 5, nisbah > 0.2 ha, skor = 10.

8. Kapasitas Tampung Ternak

Kriteria ini diperlukan dalam penentuan pusat pertumbuhan ternak ruminansia yang sangat tergantung pada ketersediaan hijauan makanan ternak. Kapasitas tampung ternak ruminansia dalam suatu wilayah menunjukkan populasi maksimum suatu jenis ternak ruminansia yang terdapat diwilayah tersebut pada kemampuan wilayah dalam menyediakan pakan hijauan.

Rumus kapasitas tampung ternak untuk sapi potong, domba dan kambing:

$$KTT = 3 LG/LS + b PR + c R$$

Keterangan:

KTT = Kapasitas tampung ternak dalam Satuan Ternak (ST)

LG = luas lahan garapan pangan (sawah dan lahan kering) 10 tahun yang akan datang (Ha)

LS = Luas sawah 10 tahun yang akan datang (Ha) (peruntukan ternak kerbau)

PR = luas padang rumput 10 tahun yang akan datang (ha)

R = luas rawa 10 yang akan datang (Ha)

b = Koefisien daya tampung padang rumput yaitu 0.5 ST/Ha untuk padang rumput alam dan 1 ST/Ha untuk padang ilalang

c = Koefisien daya tampung rawa, yaitu 2 ST/Ha untuk rawa air tawar dan 1,2 ST/Ha untuk rawa pasang surut.

1 ST = 1.319 ekor sapi, 8.711 ekor kambing, 7.968 ekor domba, 1.101 ekor

Penentuan skor kapasitas tampung ruminansia dilakukan dengan prosedur persentil dengan membagi tiga kategori sebagai berikut:

- Kapasitas tampung tinggi untuk kecamatan-kecamatan yang nilai kapasitas tampungnya berada di dalam selang sepertiga tertinggi dari seluruh kecamatan dalam kabupaten, skor= 10
- Kapasitas tampung sedang untuk kecamatan-kecamatan yang nilai kapasitas tampungnya berada di sepertiga tengah dari seluruh kecamatan dalam kabupaten, skor= 5
- Kapasitas tampung rendah untuk kecamatan-kecamatan yang nilai kapasitas tampungnya berada di dalam selang sepertiga terendah dari seluruh kecamatan dalam kabupaten, skor= 1

Selain penghitungan kapasitas tampung ternak ruminansia, kita juga dapat melakukan penghitungan penambahan populasi ternak ruminansia. Kapasitas Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia (KPPTR) merupakan salah satu metode penghitungan daya dukung wilayah dalam pengembangan ternak ruminansia dengan menggunakan metode pemetaan wilayah yang menggunakan pendekatan induktif yakni potensi suatu wilayah yang diperkirakan dengan cara memproyeksikan kedalam wilayah administratif tertentu yang dianggap ideal karena sumber daya hijauan pakan dan tenaga pemelihara di wilayah baku yang telah dimanfaatkan secara maksimal tanpa menimbulkan eksek yang merusak (Kismoni I, 1997).

Menurut Kismono (1997) didalam Modul Bahan Pelatihan Petugas Hijauan Makanan Ternak, pendekatan perhitungan potensi wilayah dan pengembangan ternak ruminansia didasarkan pada proporsi-proporsi berikut:

- a. Ternak ruminansia terdiri dari sapi, kerbau, kambing dan domba
- b. Potensi wilayah penyebaran dan pengembangan peternakan didefinisikan sebagai kapasitas wilayah yang bersangkutan untuk menampung tambahan dan populasi ternak ruminansia.
- c. Potensi mempunyai pengertian yang dinamis, berubah dari waktu ke waktu, dapat bertambah dan dapat berkurang.
- d. Potensi kabupaten (propinsi) untuk ternak ruminansia beranggapan pada sistem tertutup untuk wilayah yang bersangkutan, artinya sumber pakan hanya tersedia dari wilayah (kabupaten atau propinsi) yang bersangkutan.
- e. Peubah kunci penentu potensi adalah sumber daya lahan (lahan garapan, padang rumput dan rawa) sebagai proksi ketersediaan pakan, peubah kepala keluarga petani sebagai pemelihara dan peubah populasi riil sebagai potensi nyata.
- f. Skala tingkatan hanya didasarkan pada besarnya nilai kapasitas peningkatan (KPPTR) dengan memperlakukan peubah lain sebagai peubah kebijaksanaan (decision variable).

Metode yang digunakan adalah metode pemetaan potensi wilayah yang selanjutnya dituangkan dalam suatu model yang terdiri dari persamaan-persamaan sebagai dasar dari kapasitas perhitungan populasi ternak ruminansia.

Persamaan-persamaan yang dimaksud adalah :

- a. Potensi maksimum (dalam satuan ternak (ST)) berdasarkan sumberdaya lahan, rumus yang digunakan adalah

$$PMSL = a LG + b PR + c R$$

Keterangan : PMSL = Potensi maksimum sumberdaya lahan, a = koefisien yang dihitung sebagai nisbah populasi ternak ruminansia (ST) dengan luas lahan garapan, LG = Luas lahan garapan (sawah basah, sawah kering, tanah tegalan dan ladang dalam satuan Ha), b= Koefisien yang dihitung sebagai kapasitas tampung padang rumput (0.5 ST/Ha padang rumput alam), PR = Luas padang rumput, c = koefisien yang dihitung sebagai kapasitas tampung rawa (1.2 Ha ST/Ha rawa air tawar), R= Luas rawa.

- b. Kapasitas maksimum (KK) berdasarkan kepala keluarga petani, dengan rumus

$$PMKK = d \text{ KK}$$

Keterangan : PMKK = Potensi maksimum (ST) berdasarkan kepala keluarga petani, d = koefisien yang dihitung berdasarkan jumlah satuan ternak yang dapat dipelihara oleh satu keluarga petani tanpa harus menyewa tenaga kerja luar keluarga (3 ST/KK)

- c. Kapasitas peningkatan populasi ternak ruminansia (ST) berdasarkan sumberdaya lahan, dihitung dengan menggunakan rumus:

$$KPPTR (SL) = PMSL - POPRIL$$

Keterangan: KPPTR (SL) = Kapasitas peningkatan populasi ternak ruminansia (ST) berdasarkan sumberdaya lahan, PMSL = Potensi maksimum (ST) berdasarkan sumberdaya lahan, POPRIL = populasi riil ternak ruminansia (ST)

- d. Kapasitas peningkatan populasi ternak ruminansia (ST) berdasarkan kepala keluarga petani, dihitung dengan menggunakan rumus:

$$KPPTR (KK) = PMKK - POPRIL$$

Keterangan: KPPTR (KK) = Kapasitas peningkatan populasi ternak ruminansia (ST) berdasarkan kepala keluarga petani, PMKK = Potensi maksimum (ST) berdasarkan kepala keluarga petani, POPRIL = populasi riil ternak ruminansia (ST)

KPPTR berdasarkan sumberdaya lahan efektif bila KPPTR sumberdaya lahan (SL) lebih rendah dibandingkan dengan KPPTR berdasarkan Kepala keluarga petani (KK) ($KPPTR (SL) < KPPTR (KK)$). Sedangkan KPPTR berdasarkan kemampuan tenaga kerja dalam hal ini dihitung berdasarkan kepala keluarga petani (KPPTR KK), dianggap efektif bila memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan KPPTR berdasarkan sumberdaya lahan (SL) ($KPPTR (KK) < KPPTR (SL)$). KPPTR efektif ditetapkan sebagai kapasitas peningkatan populasi ternak ruminansia potong disuatu wilayah tertentu, yaitu KPPTR (SL) atau KPPTR (KK) yang mempunyai nilai lebih kecil atau dengan kata lain KPPTR yang berlaku sebagai kendala efektif (binding constraint)

9. Indeks Konsentrasi Ternak

Indeks konsentrasi ternak dapat menggambarkan kepadatan populasi ternak antar kecamatan dalam satu kabupaten. Indeks ini juga dapat menggambarkan kecocokan wilayah kecamatan pada jenis ternak tertentu. Indeks konsentrasi ternak (P_k) kecamatan ditentukan dari nisbah populasi ternak kecamatan terhadap rata-rata populasi kecamatan dalam kabupaten dimana kecamatan tersebut berada (P_r). Kategori indeks konsentrasi adalah :

$P_k/P_r > 1$: kecamatan dominan, populasi di atas rata-rata

$P_k/P_r = 1$: kecamatan yang hanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri

$P_k/P_r < 1$: kecamatan yang jarang/minim

10. Jarak ke pusat SWP

Jarak kecamatan terhadap pusat sub wilayah pengembangan (SWP) dapat menjadi indikator kedekatan kecamatan tersebut terhadap berbagai fasilitas pembangunan dan peluangnya untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Jarak kecamatan dibagi menjadi tiga kategori yakni:

- Dekat, bila pusat SWP dapat ditempuh dalam satu hari pulang pergi dari ibu kota kecamatan. Skor = 10
- Sedang, bila pusat SWP dapat dicapai dalam satu hari perjalanan darat/sungai atau kurang, skor = 5
- Jauh, bila pusat SWP ditempuh dalam waktu lebih dari satu hari perjalanan darat/sungai, atau harus melalui laut. Skor = 1

11. Pengetahuan Peternak

Kriteria ini diperlukan dalam penentuan PPT ternak sapi potong, perah, kerbau dan kambing/domba yang relatif memerlukan keterampilan. Pengetahuan peternak didasarkan pada keberadaan kelompok tani/ternak dan klasifikasinya dan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$TP = \frac{(n_1 \times 10) + (n_2 \times 6) + (n_3 \times 3) + (n_4 \times 1)}{n}$$

Keterangan : TP = Tingkat Pengetahuan Peternak, N1= Jumlah kelompok peternak kelas utama, N2 = Jumlah kelompok peternak kelas madya, N3 = Jumlah kelompok peternak kelas lanjut, N4 = Jumlah kelompok peternak kelas pemula, N = Jumlah seluruh kelompok ternak di Kecamatan.

12. Tingkat Kemajuan KUD

Kriteria ini penting untuk menentukan PPT sapi perah karena peternakan sapi perah sangat memerlukan kelembagaan pemasaran. Penentuan skor tingkat kemajuan KUD di suatu wilayah kecamatan dilakukan berdasarkan jumlah KUD dan klasifikasinya, dengan rumus :

$$TKK = \frac{(n1 \times 10) + (n2 \times 5) + (n3 \times 1)}{n}$$

Keterangan : TKK = Tingkat kemajuan KUD, n1 = Jumlah KUD kelas A, n2 = Jumlah KUD kelas B, n3 = Jumlah KUD kelas C dan belum diklasifikasikan, n = jumlah seluruh KUD di Kecamatan.

13. Ketersediaan Listrik

Ketersediaan listrik dibutuhkan dalam proses pemeliharaan ayam atau unggas terutama pada saat periode awal pemeliharaan. Penentuan skor ketersediaan listrik adalah Tersedianya listrik di kecamatan di beri skor 10, bila tidak tersedia listrik maka skor yang diberikan 1.

14. Kemudahan Transportasi

Kemudahan transport setiap lokasi ditentukan berdasarkan ketersediaan sarana dan sarana transportasi dari lokasi peternakan ke daerah pemasaran. Penilaian tersebut didasarkan pada :

- Kategori mudah bila terdapat jalur transportasi umum yang teratur setiap hari, skor = 10
- Kategori sedang bila terdapat jalur transportasi umum yang teratur tidak setiap hari, skor = 5
- Kategori sulit bila tidak terdapat jalur transportasi umum, skor = 1

15. Jarak ke industri pengolahan susu

Kriteria ini diperlukan hanya dalam penentuan PPT sapi perah yang pemasarannya sangat tergantung konsumen lembaga, industri pengolahan susu (IPS). Penentuan skor dilakukan dengan membagi jarak dalam tiga kategori yakni:

- Dekat, bila IPS dapat dicapai dalam dua jam perjalanan atau kurang, skor = 10
- Sedang, bila IPS dapat dicapai dalam satu hari perjalanan pulang pergi, skor = 5
- Jauh, bila IPS dapat lebih dari satu hari perjalanan, skor = 1

16. Proporsi Penduduk Non-Muslim

Faktor agama sangat diperlukan dalam penentuan PPT babi. Masyarakat yang beragama non-muslim lebih potensial mengembangkan ternak babi dibandingkan dengan masyarakat islam, baik dalam konsumsi maupun produksi. Penentuan skor ini di hiting dengan ketentuan :

- a. Proporsi penduduk non-muslim $> 30\%$, skor = 10
- b. Proporsi penduduk non-muslim 20-30, skor = 5
- c. Proporsi penduduk non-muslim $< 10\%$, skor = 1.

3. Penghitungan Nilai Skor Total

Setelah diperoleh nilai skor masing-masing kriteria, dilakukan penghitungan nilai skor berdasarkan jumlah kriteria untuk masing-masing jenis ternak. Penghitungan skor total dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menyesuaikan skor masing-masing kriteria untuk masing-masing jenis ternak ke dalam skala 100. Faktor penyesuaian skor akan tergantung kepada jumlah kriteria bagi masing-masing jenis ternak.
2. Menjumlahkan skor masing-masing kriteria yang sudah disesuaikan pada skala 100 menjadi skor total kriteria untuk masing-masing jenis ternak.

Suatu kecamatan dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan untuk suatu jenis ternak tertentu jika diperoleh nilai skor gabungan sebesar 70 atau lebih. Namun, pada kondisi tertentu, kebijakan untuk menentukan suatu kecamatan menjadi pusat pertumbuhan ternak tetap dapat dilakukan meski dengan skor gabungan kurang dari 70, dengan syarat :

- a. Memiliki potensi daya dukung ternak yang sedang tetapi memiliki program investasi prasarana wilayah yang dapat mendukung.
- b. Memiliki potensi daya dukung ternak yang sedang tetapi memiliki program pemasaran hasil dalam skala yang besar.

2.6 STUDI PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN DI KABUPATEN LEBAK (SUB SEKTOR PETERNAKAN)

2.6.1 Komoditas Peternakan

Dukungan secara kultural, sosial, dan ekonomi pengembangan ternak di Kabupaten Lebak cukup tinggi oleh karena beragamnya fungsi dan peran ternak dalam kehidupan masyarakat Lebak. Ternak memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Lebak, khususnya sebagai komponen dalam proses produksi, aktivitas ekonomi maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Motivasi beternak yang tinggi dan fungsi ternak yang cukup penting bagi responden (Peternak) menjadikan komoditas ini mempunyai prospek untuk dikembangkan

2.6.2 Komoditas Unggulan Peternakan

Penentuan komoditas unggulan peternakan menggunakan kriteria pendapatan per satuan ternak, produktivitas, penyerapan tenaga kerja, layanan peternakan yang mendukung, dukungan pasar, kesesuaian dengan agroekologis, dan trend produksi. Resume hasil analisis masing-masing kriteria disajikan pada tabel dibawah ini

Pendapatan per satuan ternak per tahun tertinggi diperoleh untuk ternak ayam buras dan terendah ternak ayam ras pedaging. Sebaliknya untuk kriteria produktivitas, ayam buras memiliki nilai terendah. Untuk kriteria produktivitas, ternak yang memiliki nilai tertinggi ternak sapi potong dan ayam ras. Ternak itik paling unggul dalam penyerapan tenaga kerja, sebesar 62,2 Hari Orang Kerja (HOK) per satuan ternak per tahun. Dalam hal ketersediaan fasilitas pendukung relatif merata kecuali untuk ternak domba/kambing yang lebih rendah. Fasilitas pendukung untuk kerbau dan sapi tertinggi karena terdapatnya pos IB meskipun saat ini belum dioperasikan secara optimal. Dukungan pasar terbesar terlihat pada ternak ayam buras, dengan konsumsi daging sebesar 1935,22 gram per kapita per tahun, sementara permintaan terendah pada ternak sapi potong (115,60 gr/kap/th). Dukungan faktor kesesuaian agroekologis tertinggi untuk ternak kambing/domba, sedangkan terendah untuk ternak ayam ras pedaging. Domba juga paling unggul dalam hal perkembangan produksi, yang mencapai 208,97 persen per tahun.

Tabel 2.7
Komoditas Ternak Unggulan Kabupaten Lebak

No	Jenis Usaha Ternak	Nilai Kriteria						
		A Rp/ST/Th	B (%)	C (HOK/ST/Th)	D (Jml)	E (gr/kaptth)	F (% lahan)	G (%/Th)
1	Penggemukan Kerbau	1.213.333	90,00	16,80	5	749,35	41,10	24,49
2	Penggemukan sapi	972.800	100,00	12,60	5	115,60	20,78	0
3	Penggemukan domba	3.416.800	82,00	7,70	2	912,09	44,99	208,97
4	Pengembangbiakan ayam buras	6.153.480	22,00	59,20	4	1.935,22	40,22	62,39
5	Budidaya ayam ras pedaging	497.000	100,00	33,60	4	1.007,92	19,67	6,78
6	Budidaya Itik petelur	1.416.000	37,00	62,20	4	490,52	33,55	2,62

Sumber : Studi Pengembangan Komoditas Unggulan di Kabupaten Lebak , 2002

Keterangan: A=Pendapatan per Satuan Ternak; B=Produktivitas; C=Penyerapan Tenaga Kerja; D= Faktor-faktor yang Mendukung; E=Dukungan Pasar; F=Kesesuaian dengan Agroekologi; G=Trend Produksi

Berdasarkan analisis skoring dengan menggunakan pembobot masing-masing kriteria (masing-masing: 1 untuk trend produksi, 2 untuk pendapatan per satuan ternak; 3 untuk faktor yang mendukung, 4 untuk dukungan pasar, 5 untuk produktivitas, 6 untuk trend produksi, dan 7 untuk kesesuaian agroekologis), diperoleh peringkat unggulan komoditas peternakan dari tertinggi sampai tertendah berturut-turut adalah ternak kambing/domba, kerbau, ayam buras, ayam ras pedaging, itik, dan sapi potong.

Tabel 2.8
Peringkat Komoditas Unggulan Peternakan

No	Komoditas Ternak	Skor	Peringkat
1.	Kambing/domba	0,2901	1
2.	Kerbau	0,1582	2
3.	Ayam Buras	0,2173	3
4.	Ayam Ras	0,1247	4
5.	Itik	0,1099	5
6.	Sapi Potong	0,1003	6

Sumber :Studi Pengembangan Komoditas Unggulan di Kabupaten Lebak, 2002

2.6.3 Pewilayahan Komoditas

Berdasarkan analisis skoring dan pertimbangan tim panel peneliti, untuk peubah-peubah penentu seperti : (1) kapasitas peningkatan populasi ternak, (2) indek konsentrasi ternak, (3) daya dukung sarana dan prasarana, (4) potensi penduduk, (5) tingkat perkembangan wilayah maka telah dapat dibuat prioritas wilayah pengembangan peternakan seperti terlihat dalam Tabel 5 dan Lampiran 2.

Pengembangan komoditas peternakan di wilayah tersebut akan dapat memacu pertumbuhan populasi sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan untuk melestarikan lingkungan sehingga produksi ternak dapat berkelanjutan.

2.6.4 Strategi Pengembangan

Berdasarkan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threats) maka strategi pengembangan peternakan kabupaten lebak adalah sebagai berikut : (1) Produksi skala besar dengan promosi yang lebih intensif; (2) penyediaan modal bagi petani; (3) perbaikan infra struktur; (4) Pengembangan sistem pelayanan dan distribusi yang lebih efisien; (5) Kerjasama pencegahan penyakit dan perbaikan reproduksi dengan daerah lain; (6) peningkatan sistem peralatan dan sarana transportasi; (7) Introduksi teknologi dan industri pakan; (8) pemanfaatan limbah pertanian; (9) Perluasan pasar; (10) Penyediaan pusat layanan hewan.

Tabel. 2.9
Pewilayahan Komoditas Ternak di Kabupaten Lebak

No	Kecamatan	Ternak					
		Domba/ Kambing	Kerbau	Ayam Buras	Ayam Ras	Itik	Sapi
1.	Rangkasbitung		↑			←	
2.	Maja				←	↑	
3.	Sajira				←		
4.	Cibadak					←	
5.	Warung Gunung			←	↑	→	
6.	Cikulur			←			
7.	Cileles						←
8.	Cimarga	→	↑	←			
9.	Leuwidamar			←			
10.	Muncang				←		
11.	Bojongmanik		↑	←			
12.	Gunung Kencana					←	
13.	Banjarsari	→	←	↓			↑
14.	Cijaku						←
15.	Malingping	↑	←	→			→
16.	Panggarangan	↑	←			→	
17.	Bayah	→	←				↑
18.	Cibeber	←					↑
19.	Cipanas		←	↑	→		

Sumber : Studi Pengembangan Komoditas Unggulan di Kabupaten Lebak , 2002

Ket : Angka dalam Lingkaran Menunjukkan Prioritas Pengembangan di Kecamatan yang Bersangkutan.

Dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan ternak unggulan di Lebak, upaya yang diperlukan adalah pemanfaatan fasilitas layanan tersedia secara optimal serta pembangunan fasilitas layanan yang mendukung. Pembangunan fasilitas baru yang diperlukan meliputi: (a) Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Rangkasbitung; (b) Pusat pembibitan ternak di Panggarangan/Bayah; dan (c) Pos Inseminasi Buatan di Malingping.

Tabel 2.10
Wilayah Pengembangan Ternak di Kabupaten Lebak

No.	Jenis Ternak	Wilayah Pembibitan	Wilayah Budidaya
1.	Domba/Kambing	Cibeber, Panggarangan	Cimarga, Banjarsari, Malingping, Bayah, Cibeber, Panggarangan.
2.	Kerbau	Banjarsari, Malingping, Panggarangan, Bayah, Cipanas.	Cimarga, Bojongmanik, Banjarsari, Malingping, Panggarangan, Bayah, Cipanas.
3.	Ayam Buras	Warunggunung, Cikulur	Warunggunung, Cikulur, Cimarga, Leuwidamar, Bojongmanik, Banjarsari, Malingping, Cipanas, Cileles, Maja.
4.	Ayam Ras	Muncang, Cipanas	Maja, Sajira, Warunggunung, Muncang, Cipanas.
5.	Itik	Maja, Warunggunung, Panggarangan	Rangkasbitung, Maja, Cibadak, Warunggunung, Gunungkencana, Panggarangan.
6.	Sapi	Malingping	Malingping, Cileles, Cijaku, Bojongmanik

Sumber : *Studi Pengembangan Komoditas Unggulan di Kabupaten Lebak, 2002*

2.6.5 Pengembangan Agribisnis

Tabel 2.11 memperlihatkan bentuk usaha peternakan yang mungkin dapat dikembangkan di Kabupaten Lebak.

Tabel 2.11
Kegiatan Usaha Budidaya Komoditas Unggulan Peternakan

No	Jenis Usaha	Skala Usaha	Teknologi	Pelaku	Sumber Dana	Kelembagaan
1	Penggemukan kerbau	Kecil-menengah (4-10 ekor)	Kereman	Peternak rakyat	Pemerintah/ peternak mandiri	Mandiri individual
2	Penggemukan sapi potong	Kecil (3 ekor), besar (>10 ekor)	Kereman	Pternak rakyat atau perusahaan swasta	Pemerintah/ swasta	Kemitraan/ swasta miurni
3	Penggemukan kambing/domba	Menengah (4-15 ekor)	Pemanfaatan sampah	Peternak rakyat	Pemerintah/ peternak mandiri	Mandiri individual
4	Pengembangbiakan Ayam Buras	Menengah (100 ekro)	Budidaya intensif dikandang kan	Peternak rakyat	Pemerintah	Koperrasi
5	Penggemukan ayam ras pedaging	Kecil (5000 ekor)	Intensif komersial	Swasta/ peternak mandiri	pemerintah	Kemitraan
6	Produksi Itik Petelur	Kecil (300 ekor)	Semi intensif	Peternak rakyat	pemerintah	Mandiri individual

Sumber : Studi Pengembangan Komoditas Unggulan di Kabpaten Lebak , 2002

Model pengembangan agribisnis peternakan meliputi berbagai upaya pengembangan yang mengarah pada bentuk usaha sebagai berikut : (1) kemitraan, (2) dana bergulir, (3) penggunaan teknologi setempat, (4) pengelompokan peternak sehingga dicapai skala usaha ekonomis, (5) adanya peran aktif pembinaan dari pemerintah.

2.7 BEST PRACTICE SENTRA PETERNAKAN RAKYAT (STUDI KASUS BOJONEGORO)

2.7.1 Hasil Studi Banding

A. SPR Mega Jaya Kasiman Bojonegoro

1. Profil SPR

SPR Perintis Mega Jaya berada di Dusun Ngantru, Desa Sekaran. Kecamatan Kasiman. Luas wilayah Desa Sekaran menurut penggunaan terdiri dari :

- a. Tanah sawah : 518 Ha
- b. Tanah kering (pemukiman dan ladang) : 370 Ha
- c. Tanah perkebunan : 10 Ha
- d. Tanah fasilitas umum (kas, pasar, makam, kantor) : 42, 15 Ha
- e. Tanah hutan (asli) : 692,4 Ha

Total jumlah penduduk di Desa Sekaran sebanyak 3839 orang, terdiri dari 1915 laki-laki dan 1924 perempuan dengan 1025 KK. Sebagian besar Tingkat Pendidikan lulusan Sekolah Dasar (SD) dan mata pencaharian pokok bergerak dibidang pertanian dan ternak masih dianggap sebagai Tabungan.

2. Proses SPR

- a. SPR di Kabupaten bojonegoro dimulai pada tahun 2014, dan lokasi yang dipilih adalah di Dusun Ngantru, Desa Sekaran. Kecamatan Kasiman. Adapun kegiatan yang dilakukan di tahun 2014 adalah :
 - PENDATAAN LAPANGAN (*24 maret s/d 4 April 2014*)
 - SOSIALISASI (*11 s/d 13 Juni 2014*)
 - DEKLARASI (*Bulan Agustus 2014*)

Penguatan Kelembagaan

Pembentukan Gugus Perwakilan Pemilik Ternak (GPPT)

- Beranggotakan Sembilan (9) orang : Ketua , sekretaris , bendahara, dan 6 komisi
- Komisi terdiri dari: Pakan ternak, hubungan masyarakat, kesehatan reproduksi, pemasaran, perbekalan dan keterampilan serta pengolahan limbah

Tabel 2.12
Susunan Pengurus GPPT SPR Mega Jaya Dusun Ngantru Desa Sekaran
Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur

No.	Jabatan	Nama / Identitas diri (KTP)
1.	Ketua	Darwanto / 3522201312840002
2.	Sekretaris	Sunarso / 35222026820004
3.	Bendahara	Tangkis / 3522160204820008
4.	Anggota	6 (Enam) Orang

- b. Pada tahap awal manajer SPR masih mengikuti sistim dan cara kerja peternak, setelah evaluasi dan hasil yang didapat tidak menunjukkan kemajuan, manajer dapat meyakinkan peternak untuk mengikuti sistim dan cara kerja manajer SPR.
- c. Memasuki tahun kedua terjadi perubahan pola pikir masyarakat terhadap budidaya ternak.
- d. Untukantisipasi kebutuhan pakan ternak pada musim kering dilakukan pengawetan pakan berupa silase dari limbah pertanian dan perkebunan (pucuk tebu).
- e. Pengurus GPPT telah mengimplementasikan materi yang didapat dan hasilnya berdampak positif bagi kegiatan peternakannya.
- f. Margin keuntungan penjualan sapi jantannya naik dari sebelumnya dan waktu mencari hijauan sekarang lebih efisien karena sudah punya lahan rumput walaupun belum begitu luas sehingga bisa melakukan pekerjaan selain peternakan.
- g. Rekording telah dilaksanakan meliputi :
- h. IB, Partus, Mortalitas, Pembelian Ternak, dan Penjualan Ternak. Perolehan data rekording tersebut sangat membantu guna mengidentifikasi populasi betina, betina produktif, Calving Interval, Conception Rate dan Service per Conception.
- i. Membentuk pra-koperasi dalam rangka penguatan modal.
- j. Setelah berjalannya SPR peternak meyakini bahwa SPR merupakan awal keberhasilan peningkatan Kelembagaan Peternak. Dengan demikian, pada tahap berikutnya terjalin kekompakan dan kerja sama yang semakin baik didorong semangat ingin belajar dan ingin ada perubahan menuju perbaikan. Dengan kata lain, bagi peternak, SPR menjadi suatu KEBUTUHAN.

Agenda khusus SPR Mega Jaya Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016

- Program Uji coba pengembangan usaha pembiakan indukan Sapi Brahman Cross melalui program Silvopastura dengan pola semi Intensif antara Indonesia Cattle Breeding (ICB) Indonesia Australia, PT.PERHUTANI, dan SPR “MEGA JAYA”
- ICB yang memfasilitasi 100 ekor induk brahman cross, pagar kejut, kandang kawin dan timbangan
- PT.PERHUTANI menyediakan 37,6 Ha untuk areal kandang komunal dan penggembalaan, dan 150,4 Ha sebagai lokasi penanaman Hijauan Makanan Ternak (HMT).

3. Rencana Kegiatan SPR Mega Jaya (Sumber : Tim SPR Institut Pertanian Bogor)

Tahun 2016 (Implementasi)

- Implementasi PI pada 3 titik SPR dengan skala ekonomis
- Implementasi program Mulya-52 pada 3 titik SPR
- Implementasi program usaha pembiakan sapi (rencana dengan PT. Santosa Agrindo)
- Implementasi penanaman dan pengolahan hijauan pakan ternak (dengan PT. Perhutani dalam program silvopastura)
- Implementasi BPTI (BukuPemilik Ternak Indukan) sebagai jaminan usaha
- Pembentukan badan usaha kolektif

Tahun 2017 (Afirmasi)

- Penguatan sistem melalui pembentukan standar baku sistem produksi dan usaha
- Aplikasi Penelitian Institusi pada sistem usaha dari 3 titik SPR
- Penguatan badan usaha kolektif hingga mampu mencapai profesionalisme usaha
- Integrasi usaha hulu hilir dan usaha pendukung peternakan (usaha penyediaan pakan hijauan dan konsentrat, usaha penyediaan pupuk organik, dll)
- Adopsi SPR di kecamatan lain

- Penguatan data base peternak melalui BPTI (Buku Pemilik Ternak Indukan)

Tahun 2018 (Kemandirian)

- Persiapan SPR untuk mandiri.
- Badan usaha kolektif mampu secara mandiri mencukupi kebutuhan peternak.
- Membuat sistem dana penyangga bagi anggota badan usaha kolektif.
- Terbentuk sistem informasi data base peternak yang dinamis.
- Rancangan kesepakatan mitra SPR-IPB-Pemkab Bojonegoro-Investor

4. Kendala

Beberapa kendala yang di temukan antara lain :

- Masih ada GPPT SPR yang belum melaksanakan tugas sebagai mana mestinya.
- Mengubah pola pikir dan perilaku peternak agar mau berkelompok.

B. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro

1. Profil Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro beralamat di Jalan Basuki Rahmat nomor 2 Bojonegoro. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bojonegoro membina 4 SPR yang ada di sana yaitu :

1. Kecamatan Kasiman Desa Sekaran Dusun Ngantru (SPR “MEGA JAYA”)
2. Kecamatan Temayang Desa Soko (SPR “TUNAS BAROKAH”)
3. Kecamatan Kedungadem Desa Drokilo dan Desa Sidorejo (SPR “MAJU BERSAMA”)
4. Kecamatan Tambakrejo Desa Napis (baru akhir tahun 2015) SPR “LEMBU SETO”

Kebijakan yang digulirkan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro selain program SPR sendiri mengarahkan kegiatan lain yang dapat mendukung kegiatan SPR antara lain :

- Penanaman rumput unggul (HMT) di lokasi SPR
- Pemberian hibah alat pengolah pakan ternak di lokasi SPR

- Pemeriksaan dan Penanganan status kesehatan Reproduksi, penyakit parasiter dan keswan umum

2. Kegiatan Penunjang SPR tahun 2015- 2016

1. Desa Sekaran Kecamatan Kasiman :

- Kegiatan pengembangan budidaya ternak dana APBN sebanyak 20 ekor Sapi PO betina (tahun 2015)

2. Desa Soko Kecamatan Temayang

- Kegiatan wilayah sumber bibit dana APBD Propinsi Jawa Timur sebanyak 30 ekor Sapi PO betina (tahun 2015)

3. Desa Drokilo dan Sidorejo Kecamatan Kedungadem

- Kegiatan Penguatan Pakan Ternak (APBN 2015)
- Rencana lokasi indukan brahman cross (dana APBN tahun 2016)

4. Desa Napis Kecamatan Tambakrejo

- Kegiatan wilayah sumber bibit sapi PO betina (APBD Propinsi 2016) sebanyak 20 ekor

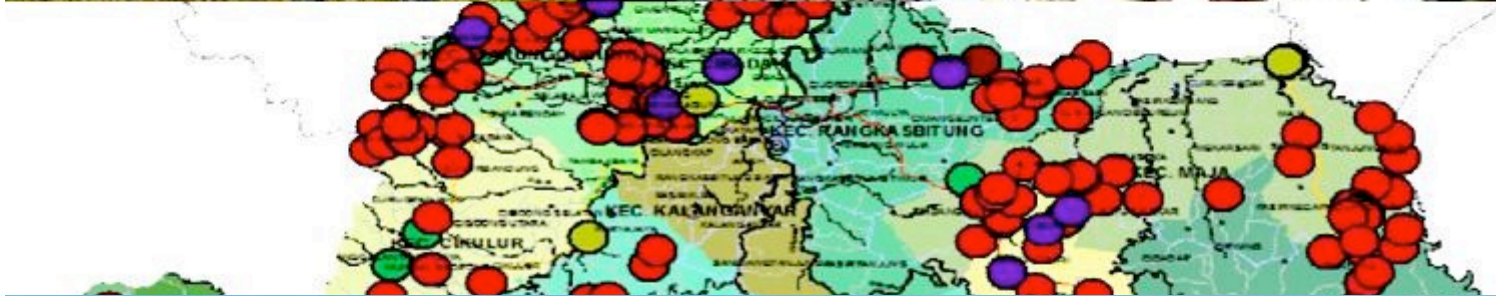
2.7.2 Hasil Pembahasan Studi Banding

Berdasarkan penjelasan tentang pelaksanaan SPR di SPR yang menjadi objek studi banding Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro dapat diungkapkan bahwa pelaksanaan SPR di seluruh SPR merupakan prestasi yang dapat dibanggakan. Beberapa hal yang merupakan keunggulan pada prestasi ini adalah adanya komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder. Komitmen ini dibangun karena kuatnya pemahaman tentang pentingnya peningkatan kemampuan peternak dan hal ini tidak lepas dari adanya kebijakan Dinas Peternakan yang “mendukung” dan mengkoordinasikan semua stakeholder sehingga semua lini mendukung keberhasilan program ini.



BAB 3

PENDEKATAN & METODOLOGI

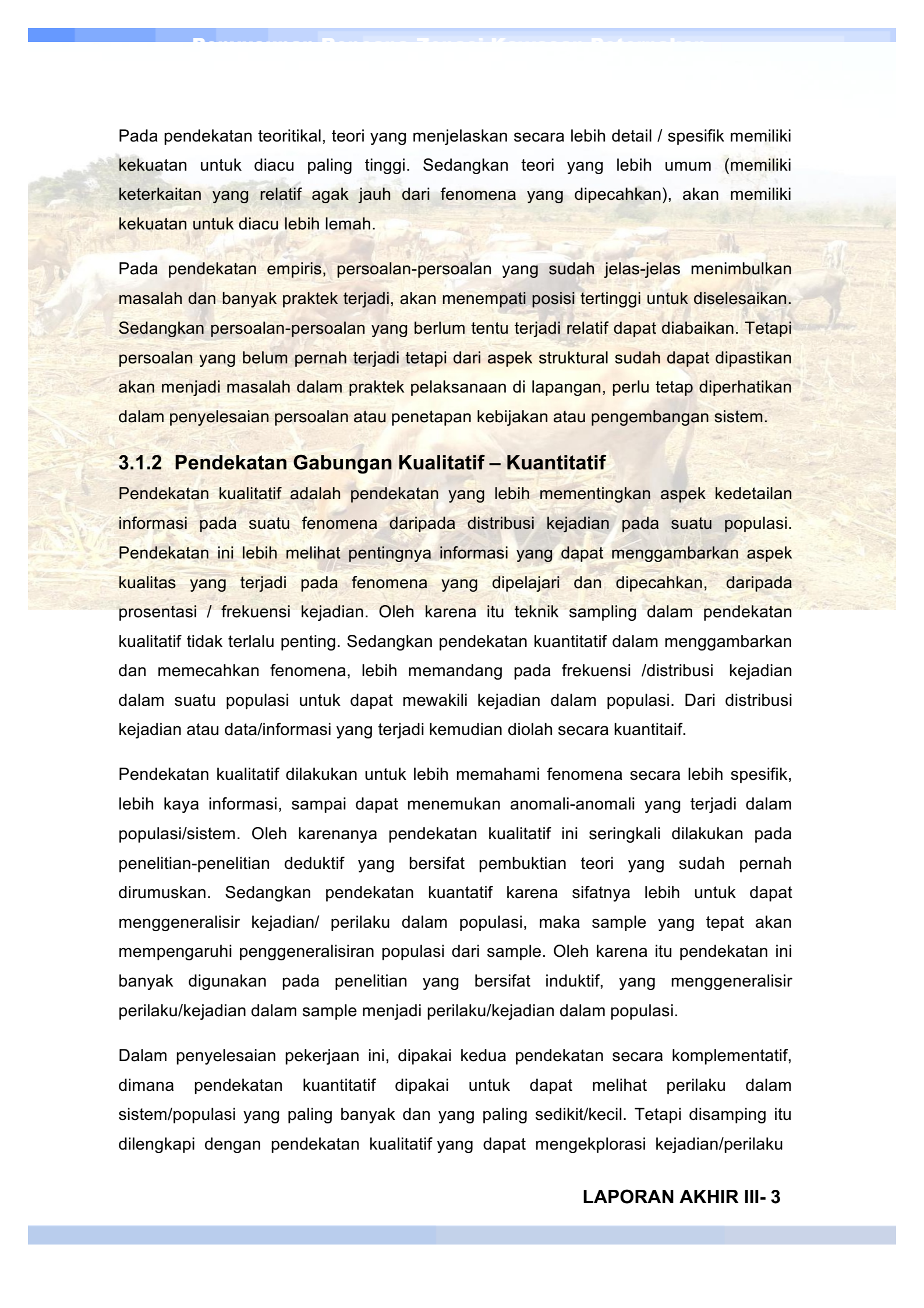


3.1 PENDEKATAN

3.1.1 Pendekatan Gabungan Teoritik – Legalistik – Empirik

Dalam pelaksanaan penyelesaian pekerjaan ini ditempuh pendekatan gabungan, yang menggabungkan antara pendekatan teoritik, pendekatan legalitas, dan pendekatan empiris. Apabila dalam pendekatan teoritik lebih banyak memandang persoalan yang hendak diselesaikan dengan sudut pandang teori, sebaliknya dalam pendekatan empiris lebih banyak melihat dari sudut pandang kejadian empiris yang terjadi di realitas yang harus diselesaikan. Pendekatan legalitas lebih melihat pada sudut pandang aspek legal/normatif pada penyelesaian setiap persoalan yang hendak dipecahkan. Tetapi dalam penyelesaian pekerjaan ini tidak dipilih salah satu pendekatan saja, tetapi menggabungkan ketiga pendekatan tersebut untuk saling melengkapi sehingga didapat penyelesaian persoalan yang terbaik / paling optimal.

Pendekatan legalitas pada dasarnya adalah mengakomodasikan semua legalitas yang sudah pernah dibuat dan berlaku untuk menjadi pedoman pada pengembangan selanjutnya. Yang menjadi pedoman tentu merupakan legalitas yang tingkatan kekuatan hukumnya lebih tinggi. Apabila ada perbedaan diantara legalitas yang ada, akan dipakai ketentuan yang ada pada ketetapan legalitas yang lebih tinggi. Sedangkan apabila legalitas lebih rinci berbeda dengan apa yang akan dikembangkan, dapat diabaikan dan dapat dibuat ketentuan transisi untuk mengakomodasikan adanya perbedaan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu yang menjadi obyek bagi legalitas yang lebih rinci tersebut pada waktu sebelumnya. Karena yang dipakai dasar dalam pendekatan ini adalah aspek legalitas, maka urutan tingkat kekuatan hukum yang digunakan juga mengikuti ketentuan legal yang ada. Dalam kaitannya dengan kegiatan yang akan dilakukan, pendekatan ini digunakan agar kegiatan yang akan dilakukan/direncanakan tidak melanggar ketentuan yang lebih tinggi yang sudah ada, dan dapat mengakomodasikan ketentuan transisi jika diperlukan karena kebijakan detail sebelumnya. Oleh karena itu produk-produk kebijakan yang terkait dengan kegiatan ini, seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur/Bupati, maupun Keputusan Gubernur/Bupati yang akan diperhatikan dan diakomodasikan dalam rencana pengembangannya.



Pada pendekatan teoritikal, teori yang menjelaskan secara lebih detail / spesifik memiliki kekuatan untuk diacu paling tinggi. Sedangkan teori yang lebih umum (memiliki keterkaitan yang relatif agak jauh dari fenomena yang dipecahkan), akan memiliki kekuatan untuk diacu lebih lemah.

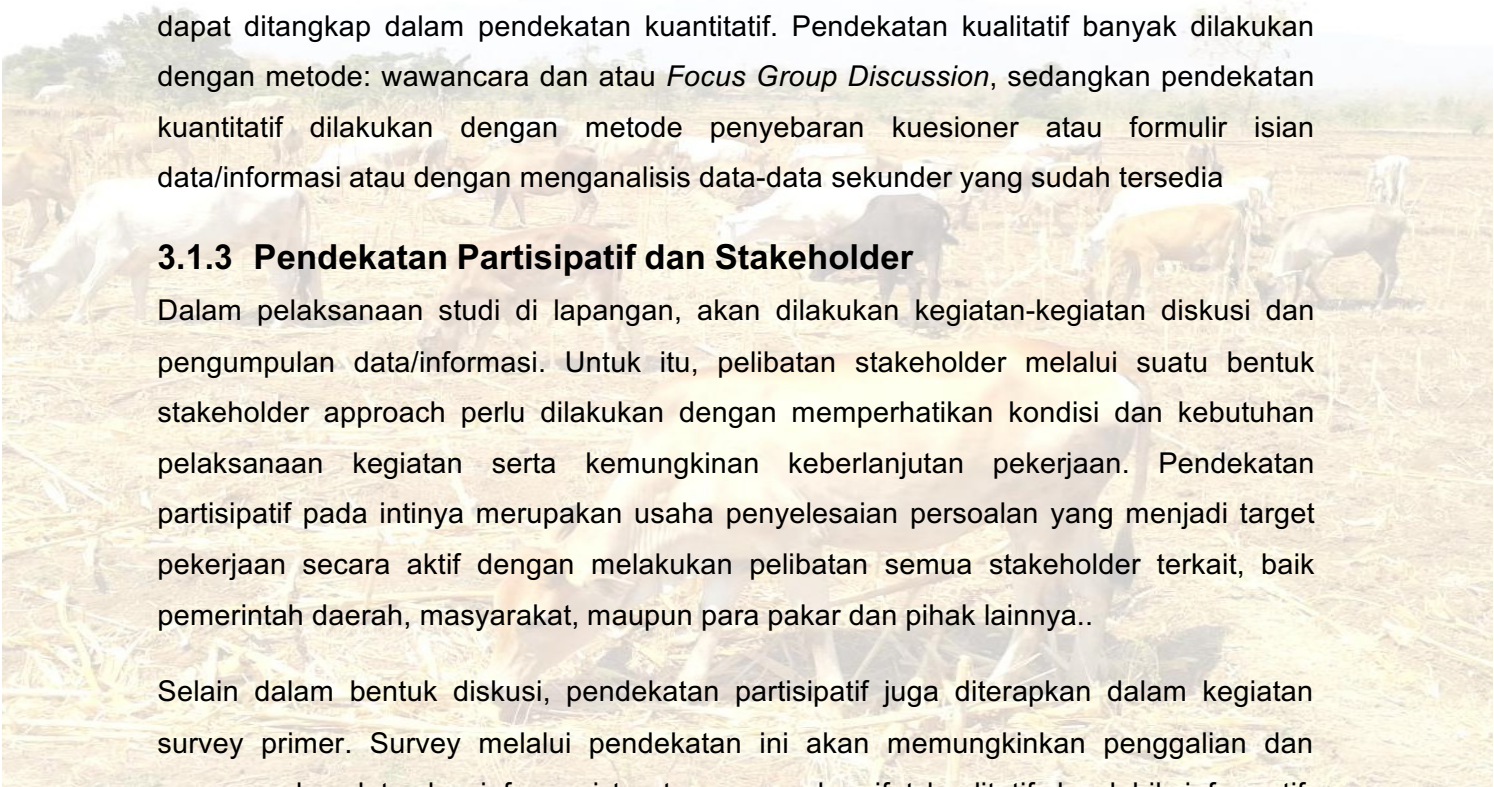
Pada pendekatan empiris, persoalan-persoalan yang sudah jelas-jelas menimbulkan masalah dan banyak praktek terjadi, akan menempati posisi tertinggi untuk diselesaikan. Sedangkan persoalan-persoalan yang belum tentu terjadi relatif dapat diabaikan. Tetapi persoalan yang belum pernah terjadi tetapi dari aspek struktural sudah dapat dipastikan akan menjadi masalah dalam praktek pelaksanaan di lapangan, perlu tetap diperhatikan dalam penyelesaian persoalan atau penetapan kebijakan atau pengembangan sistem.

3.1.2 Pendekatan Gabungan Kualitatif – Kuantitatif

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang lebih mementingkan aspek kedetailan informasi pada suatu fenomena daripada distribusi kejadian pada suatu populasi. Pendekatan ini lebih melihat pentingnya informasi yang dapat menggambarkan aspek kualitas yang terjadi pada fenomena yang dipelajari dan dipecahkan, daripada prosentasi / frekuensi kejadian. Oleh karena itu teknik sampling dalam pendekatan kualitatif tidak terlalu penting. Sedangkan pendekatan kuantitatif dalam menggambarkan dan memecahkan fenomena, lebih memandang pada frekuensi /distribusi kejadian dalam suatu populasi untuk dapat mewakili kejadian dalam populasi. Dari distribusi kejadian atau data/informasi yang terjadi kemudian diolah secara kuantitatif.

Pendekatan kualitatif dilakukan untuk lebih memahami fenomena secara lebih spesifik, lebih kaya informasi, sampai dapat menemukan anomali-anomali yang terjadi dalam populasi/sistem. Oleh karenanya pendekatan kualitatif ini seringkali dilakukan pada penelitian-penelitian deduktif yang bersifat pembuktian teori yang sudah pernah dirumuskan. Sedangkan pendekatan kuantitatif karena sifatnya lebih untuk dapat menggeneralisir kejadian/ perilaku dalam populasi, maka sample yang tepat akan mempengaruhi penggeneralisiran populasi dari sample. Oleh karena itu pendekatan ini banyak digunakan pada penelitian yang bersifat induktif, yang menggeneralisir perilaku/kejadian dalam sample menjadi perilaku/kejadian dalam populasi.

Dalam penyelesaian pekerjaan ini, dipakai kedua pendekatan secara komplementatif, dimana pendekatan kuantitatif dipakai untuk dapat melihat perilaku dalam sistem/populasi yang paling banyak dan yang paling sedikit/kecil. Tetapi disamping itu dilengkapi dengan pendekatan kualitatif yang dapat mengeksplorasi kejadian/perilaku



kecil yang tersembunyi yang selama ini terjadi tidak/kurang diperhatikan sehingga tidak dapat ditangkap dalam pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif banyak dilakukan dengan metode: wawancara dan atau *Focus Group Discussion*, sedangkan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner atau formulir isian data/informasi atau dengan menganalisis data-data sekunder yang sudah tersedia

3.1.3 Pendekatan Partisipatif dan Stakeholder

Dalam pelaksanaan studi di lapangan, akan dilakukan kegiatan-kegiatan diskusi dan pengumpulan data/informasi. Untuk itu, pelibatan stakeholder melalui suatu bentuk stakeholder approach perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan serta kemungkinan keberlanjutan pekerjaan. Pendekatan partisipatif pada intinya merupakan usaha penyelesaian persoalan yang menjadi target pekerjaan secara aktif dengan melakukan pelibatan semua stakeholder terkait, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun para pakar dan pihak lainnya..

Selain dalam bentuk diskusi, pendekatan partisipatif juga diterapkan dalam kegiatan survey primer. Survey melalui pendekatan ini akan memungkinkan penggalian dan pengumpulan data dan informasi terutama yang bersifat kualitatif dan lebih informatif. Pendekatan partisipatif ini dipilih dalam penyelesaian pekerjaan untuk mengali informasi yang dalam, sehingga rumusan persoalan dan solusi yang dihasilkan tepat pada sarannya. Pendekatan ini memungkinkan 'ownership' yang tinggi dari para stakeholders di daerah terhadap seluruh proses maupun hasil pekerjaan studi ini.

3.1.4 Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan

Pendekatan pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pendekatan dalam perencanaan yang memandang bahwa pembangunan bukan merupakan suatu kegiatan yang sesaat melainkan suatu kegiatan yang berlangsung secara kontinyu dan tidak pernah berhenti seiring dengan perkembangan jaman. Pendekatan ini menekankan pada keseimbangan ekosistem, antara ekosistem buatan dengan ekosistem alamiah. Dalam perencanaan pembangunan kesesuaian ekologi dan sumber daya alam penting artinya agar pembangunan yang terjadi tidak terbatas dalam tahun rencana yang disusun saja.

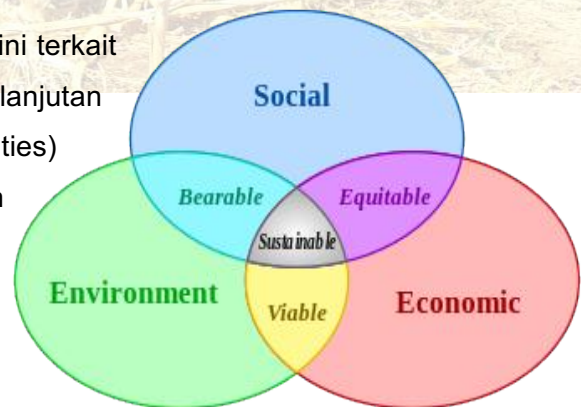
Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan suatu perencanaan yang berwawasan lingkungan, namun bukan berarti menjadikan kepentingan lingkungan sebagai segala-galanya. Dalam pendekatan ini yang dipentingkan adalah keseimbangan antara

pembangunan lingkungan dan non-lingkungan (ekonomi, sosial, teknologi, dan sebagainya) sehingga dicapai suatu kondisi pembangunan yang harmonis. Dalam pendekatan ini Terdapat tiga prinsip dasar yang dipegang, yaitu (Haughton dan Hunter, 1994) :

- Prinsip persamaan antar generasi, yaitu pengaruh pada kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka harus dipertimbangkan. Prinsip ini dikenal juga sebagai principle of futurity.
- Prinsip keadilan sosial, yaitu keberlanjutan mensyaratkan bahwa pengontrolan keseluruhan distribusi sumber daya harus merata.
- Prinsip tanggungjawab transfrontier, yaitu bahwa dampak dari aktivitas manusia seharusnya tidak melibatkan suatu pemindahan geografis yang tidak seimbang dari masalah lingkungan. Dalam prinsip ini terdapat perlindungan terhadap kualitas dari lingkungan.

Dalam pendekatan pembangunan berkelanjutan ini terkait juga dengan penciptaan keberlanjutan masyarakat/komunitas (sustainable communities) tempat dimana suatu komunitas ingin tinggal dan bekerja pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan akan dapat terus berlanjut jika terdapat masyarakat yang terus berlanjut pula.

Dalam sustainable communities, masyarakat menciptakan suatu komunitas seperti yang dikehendaki oleh masyarakat sehingga dapat tercipta suatu keberlanjutan dalam komunitas tersebut. Sustainable communities ini akan dapat dikembangkan dimana banyak "pemain" dalam peran yang berbeda-beda dan dengan ketertarikan dan nilai yang berbeda dalam suatu aliran informasi yang berharga dan mereka memiliki kesempatan untuk bergabung dalam suatu proses pembelajaran dan respon inovatif terhadap perubahan lingkungan dan perubahan lainnya (Innes dan Booher, 2000).



3.1.5 Tinjauan Mengenai Pengembangan Ekonomi Wilayah

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.



Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal juga dapat tergerak untuk mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang mantap, misalnya, akan membuat pengusaha dapat melihat ada peluang untuk peningkatan produksi pertanian dan perluasan ekspor.

Dengan peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan dalam pembangunan, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak

dan retribusi tidak naik, sehingga tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan ekonomi daerah pada tahun depan.

Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, dan perlu mengoreksi kebijakan yang keliru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dua prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah yang perlu diperhatikan adalah (1) mengenali ekonomi wilayah dan (2) merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-bisnis.

3.1.6 Tinjauan Mengenai Pola Dasar Pengembangan Kawasan Pertanian

Pola dasar pengembangan kawasan pertanian dirancang untuk meningkatkan keberhasilan penerapan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 yang telah dijabarkan ke dalam strategi pembangunan pertanian. Strategi pembangunan pertanian berfokus pada tujuh aspek dasar yang disebut dengan TUJUH GEMA REVITALISASI.

Implementasi TUJUH GEMA REVITALISASI merupakan kelanjutan, perluasan dan pendalaman telah dilaksanakan melalui perencanaan kebijakan, program, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan secara terpadu guna mendukung tercapainya EMPAT TARGET SUKSES Kementerian Pertanian. Pola dasar pengembangan kawasan pertanian dikelompokkan: (1) pola pengembangan kawasan yang sudah ada, dan (2) pola pengembangan kawasan baru.

a. Pola Pengembangan Kawasan yang Sudah Ada (*existing*)

Pola ini ditujukan bagi kawasan pertanian yang sudah ada dan berkembang, untuk memperluas skala produksi, serta melengkapi/memperkuat simpulsimpul agribisnis yang belum berfungsi optimal. Luasan kawasan dapat bertambah sesuai dengan daya dukung. Kawasan yang telah mandiri diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daerah sekitarnya (*trickledown effect*).

b. Pola Pengembangan Kawasan Baru

Pola ini ditujukan untuk kawasan komoditas unggulan pada wilayah baru/potensial yang belum dikembangkan. Ada dua pendekatan pengembangan kawasan, yaitu (1) memperluas skala dan mengadakan kegiatan yang belum terlaksana, (2) membangun kawasan baru di kawasan potensial secara bertahap hingga mencapai skala minimum

kawasan. Secara skematis pola dasar pengembangan kawasan dapat digambarkan pada gambar di bawah ini.



Penentuan kawasan baru dapat didasarkan pada komoditas yang potensial, dan ketersediaan lahan yang sesuai untuk mendukung pengembangan komoditas tersebut (*commodity-driven*). Ada kalanya lokasi potensial sudah ada, namun belum terdapat komoditas yang layak untuk dikembangkan. Dalam pengembangan kawasan pertanian harus ditentukan terlebih dahulu komoditas yang tepat berdasarkan potensi pasar dan wilayah.

3.1.7 Tinjauan Mengenai Konsep Agroekosistem

Pengembangan kawasan pertanian disusun dengan mempertimbangkan kualitas dan ketersediaan sumberdaya lahan melalui pewilayahan komoditas, dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan agroklimat agar diperoleh hasil produksi dan produktivitas pertanian yang optimal dan berwawasan lingkungan.

Kondisi agroekosistem di wilayah salah satunya dicirikan oleh kondisi bio-fisik lahan yang mencakup ketinggian lokasi, kelerengan lahan, kondisi iklim, dan karakteristik tanah. Untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan, penentuan komoditas unggulan harus mengacu pada peta pewilayahan komoditas pertanian skala 1:50.000 yang telah mempertimbangkan agroekosistem setempat.

3.1.8 Tinjauan Mengenai Sistem Agribisnis

Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan kawasan komoditas unggulan adalah meningkatnya kuantitas produksi, kualitas produk dan kesinambungan produksi komoditas yang dihasilkan. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengembangan komoditas unggulan, maka pengembangan kawasan komoditas unggulan harus dilaksanakan melalui pendekatan sistem agribisnis. Hal ini mengandung pengertian bahwa pengembangan komoditas pertanian di kawasan komoditas unggulan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu mulai dari pengadaan input produksi hingga pemasaran produk yang dihasilkan petani. Dengan kata lain, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan kawasan komoditas unggulan dapat meliputi aspek pengadaan input produksi, proses produksi komoditas, aspek pemasaran, pengolahan komoditas, serta aspek penyuluhan dan permodalan, yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan komoditas unggulan di kawasan setempat.

Pendekatan agribisnis dalam pengembangan kawasan juga bermakna bahwa kegiatan pertanian pada suatu kawasan berorientasi pada keuntungan usahatani. Hal ini mengisyaratkan perlunya efisiensi dalam penggunaan input produksi, serta optimasi produksi. Pendekatan agribisnis juga mensyaratkan adanya keterpaduan antar pemangku kepentingan pertanian yang terdiri dari kalangan bisnis/usaha, masyarakat dan pemerintah. Namun demikian, motor utama penggerak suatu kawasan pertanian tetap berada di masyarakat dan dunia usaha, sedangkan keberadaan pemerintah hanya sebagai fasilitator dan pengungkit terutama dalam pengembangan tahap awal.

Kawasan pertanian yang dibangun melalui pendekatan agribisnis memiliki orientasi produksi yang jelas, apakah dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan lokal, atau untuk memenuhi permintaan pasar khususnya pasar ekspor. Kawasan pertanian yang mengembangkan komoditas pangan utama dari sub-sektor tanaman pangan (terutama padi, jagung, kedelai), komoditas peternakan (sapi potong), dan komoditas perkebunan (gula) merupakan kawasan yang diarahkan untuk menjadi pemasok utama kebutuhan pangan masyarakat. Keterpaduan kegiatan yang dibangun dalam kawasan pertanian tersebut lebih diarahkan untuk dapat menghasilkan produk berdaya saing melalui peningkatan kuantitas produksi dan produktivitas melalui berbagai instrumen mencakup perluasan areal, penggunaan benih/bibit unggul, aplikasi teknologi budidaya, pengairan dan kegiatan-kegiatan lainnya dengan titik berat kepada aspek hulu (benih/bibit unggul)

dan aspek budidaya (kuantitas produksi), serta tetap mengedepankan aspek kualitas dan efisiensi.

Kawasan pertanian yang mengembangkan komoditas bernilai tinggi dan diminati pasar (sebagai produk kebutuhan sekunder atau tersier), merupakan kawasan yang diarahkan untuk menjadi pemasok terhadap permintaan pasar baik di tingkat lokal maupun internasional. Produk-produk bernilai tinggi dan bukan merupakan kebutuhan pangan utama tersebut sebagian diantaranya mencakup produk-produk unggulan hortikultura dan perkebunan. Keterpaduan kegiatan yang dibangun dalam kawasan berorientasi permintaan pasar lebih diarahkan untuk dapat meningkatkan daya saing produk melalui peningkatan produksi dan kualitas produk, kontinuitas ketersediaan produk, pengolahan pasca panen dan kegiatan-kegiatan lainnya dengan titik berat kepada aspek budidaya (praktik GAP) dan aspek pasca panen (pengolahan, penyimpanan dan peningkatan kualitas).

3.1.9 Tinjauan Mengenai Pengembangan dan Penyebaran Ternak

Strategi pembangunan peternakan mempunyai prospek yang baik dimasa depan, karena permintaan bahan-bahan yang berasal dari ternak akan terus meningkat seiring dengan permintaan jumlah penduduk, pendapatan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan bergizi tinggi sebagai pengaruh dari naiknya tingkat pendidikan rata-rata penduduk (Santosa, 1997).



Pembangunan dan pengembangan tersebut diantaranya, yaitu meliputi pembangunan dibidang pertanian, sebagai contoh, yaitu pembangunan dibidang peternakan. Banyak peternakan di pedesaan yang kurang memperhatikan masalah pertumbuhan ternak dan mengabaikan masalah ekonomi perusahaan karena pada umumnya bentuk usaha peternakan di pedesaan (terutama pada ternak besar seperti sapi dan kerbau dan ternak

sedang seperti kambing dan domba) masih berbentuk peternakan rakyat dimana ternak yang dipelihara digunakan sebagai tabungan atau simpanan bagi peternak dengan sistem pemeliharaan yang dilakukan masih sederhana sehingga produktivitas ternak yang dihasilkan pun kurang maksimal. Perlu adanya informasi terkini mengenai teknologi peternakan kepada peternak guna meningkatkan produktivitas ternak dan memberikan nilai tambah bagi peternak.

3.1.10 Tinjauan Tentang Pengelolaan Peternakan

Perilaku tersebut tergantung dari banyak faktor diantaranya: watak, suku dan kebangsaan dari petani itu sendiri, tingkat kebudayaan bangsa dan masyarakatnya, dan juga dari kebijaksanaan pemerintah (Tohir, 1991).

Ternak sebagai komoditas, sekelompok ternak yang dihasilkan dari turunan ternak sumberdaya melalui suatu perkawinan tertentu atau kelompok ternak yang telah terpilih melalui satu jalur perkawinan tertentu atau seleksi genetik tertentu berdasarkan ciri-ciri karakteristik yang diunggulkan. Komoditi ternak sendiri meliputi ternak ruminansia besar (seperti sapi dan kerbau), ruminansia kecil (seperti kambing dan domba) dan ternak unggas (seperti ayam dan itik) dengan tujuan pemeliharaan ternak sebagai ternak komersial yakni ternak yang langsung menghasilkan produk pangan seperti daging, susu dan telur, dan pemeliharaan ternak sebagai ternak pembibitan yakni sebagai penyedia ternak komersial yang unggul. Sistem pemeliharaan ternak ini juga dapat dilakukan secara terintegrasi baik integrasi antar komoditi ternak atau dengan komoditi lainnya seperti pertanian dan perkebunan.

Usaha tani adalah kegiatan usaha manusia untuk mengusahakan tanahnya dengan maksud untuk memperoleh hasil tanaman atau hewan tanpa mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah yang bersangkutan untuk memperoleh hasil selanjutnya (Adiwilaga, 1982). Usahatani adalah kegiatan mengorganisasikan atau mengelola aset dan cara dalam pertanian.

Usahatani juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengorganisasi sarana produksi pertanian dan teknologi dalam suatu usaha yang menyangkut bidang pertanian (Moehar, 2001). Tujuan utama dari usaha ternak adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, baik berupa uang maupun berwujud hasil. Usaha ternak bisa digolongkan menjadi dua: Hasil Pokok, yaitu dapat berupa makanan seperti : daging, susu, dan telur. Berupa tenaga kerja seperti tenaga kerbau dalam membajak. Hasil Ikutan (*by product*), pada umumnya, dari usaha ternak, kecuali memberikan hasil utama, juga memberikan hasil sampingnya yang bisa dimanfaatkan

antara lain: Pupuk, dari hewan ternak menyusui dan unggas dapat diperoleh kotorannya yang sangat besar manfaatnya bagi usaha pertanian. Kulit untuk sepatu, tas, alat musik dan wayang. Tangkai tanduk digunakan untuk tangkai kipas, tangkai wayang, sisir, kancing baju dan masih banyak lagi. Tulang, dapat digunakan sebagai tepung tulang yang digunakan sebagai pakan ayam dan babi (Sihombing, 2006).

Faktor-faktor produksi dalam usahatani terdiri atas empat unsur pokok, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan pengelolaan. Keempat faktor produksi tersebut dalam usahatani mempunyai kedudukan yang sama pentingnya (Hernanto, 1988). Menurut Saragih (2000), berdasarkan corak usaha tani, kegiatan usaha ternak di Indonesia, telah berkembang 4 tipologi usaha, yaitu : Usaha tani ternak sebagai usaha sambilan, yaitu petani ternak mengusahakan berbagai macam komoditi terutama tanaman pangan, dimana ternak sebagai usaha sambilan untuk mencukupi kebutuhan sendiri dengan tingkat pendapatan dari usaha tani ternak kurang dari 30%. Usaha tani ternak sebagai cabang usaha, yaitu petani ternak mengusahakan pertanian campuran (mixed farming) dengan ternak sebagai cabang usaha tani dengan tingkat pendapatan dan budidaya ternak 30-70% (semi komersial). Usaha tani ternak sebagai usaha pokok, yaitu petani ternak mengusahakan ternak sebagai usaha sambilan (*single commodity*) dengan tingkat pendapatan dari ternak sekitar 70-100%. Usaha tani ternak sebagai usaha industri, yaitu peternak mengusahakan ternak sebagai industri komoditas ternak secara khusus (*specialized farming*) dengan tingkat pendapatan 100% dari usaha ternak pilihan. Aritonang (1993) berpendapat bahwa corak usahatani yang sub-sistem umumnya menerapkan pola penanganan ternak yang bersifat tradisional (penerapan teknologi yang rendah) dengan skala usaha yang kecil. Semakin besar skala usaha, tujuan ekonomi semakin menonjol sehingga prinsip ekonomi intensif diperhatikan.

Kelompok tani adalah organisasi non formal di perdesaan yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani. Anggota kelompok tani umumnya memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi, sertamempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani. Kelompok tani sendiri memiliki beberapa fungsi yakni sebagai kelas belajar dimana kelompok tani menjadi wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang lebih sejahtera. Fungsi kedua sebagai wahana kerjasama dimana kelompok tani kelompok tani menjadi tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam

kelompoktani dan antar kelompoktani serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Terakhir, kelompok tani juga berfungsi sebagai unit Produksi dimana usahatani yang dilaksanakan oleh masing masing anggota kelompoktani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

Gabungan kelompok tani menjadi salah satu organisasi yang dapat membantu peternak dalam meningkatkan usahanya. Menurut Peraturan Menteri Pertanian NOMOR : 273/KPTS/Ot.160/4/2007, Gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Dengan adanya organisasi dalam bentuk gabungan kelompok tani, peternak dapat saling bertukar informasi mengenai perkembangan teknologi peternakan yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan produktivitas ternak yang dihasilkan, selain itu peternak juga dapat memperoleh informasi mengenai pasar dan harga yang terbaik untuk produk atau ternak yang akan dijual. Dengan adanya gapoktan, peternak yang tergabung dalam kelompok tani akan memperoleh jaringan dan informasi yang lebih luas lagi dan diharapkan hal ini dapat meningkatkan dan memperkuat usaha peternakan yang dilakukan.

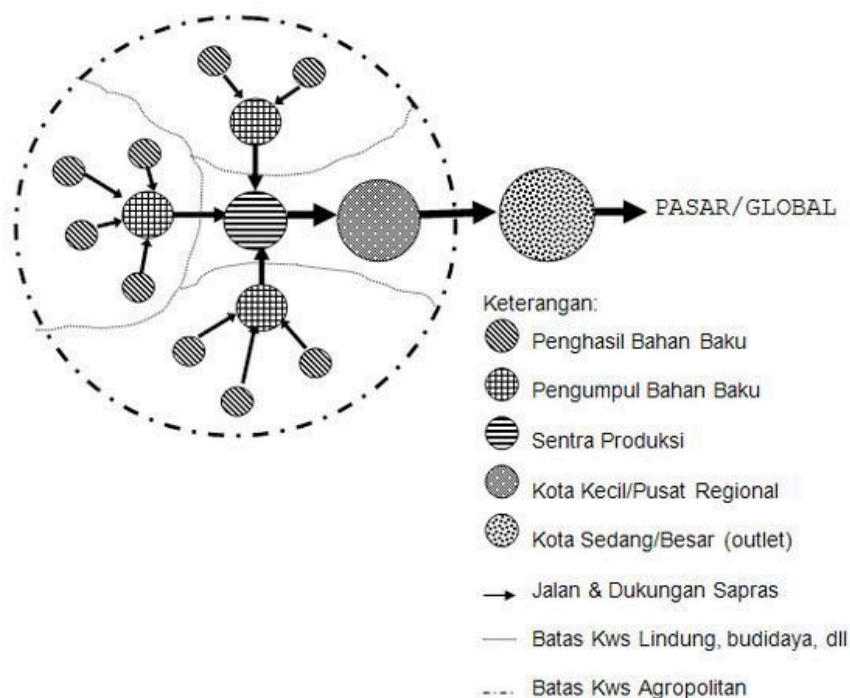
Sentra Peternakan Rakyat (SPR) merupakan suatu kawasan tertentu sebagai media pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang di dalamnya terdapat populasi ternak tertentu yang dimiliki oleh sebagian besar pemukim di satu desa atau lebih, serta sumber daya alam untuk kebutuhan hidup ternak (air dan bahan pakan). Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang didalamnya menerapkan Sekolah Peternakan Rakyat (Sekolah-PR) sebagai jawaban dan alternatif solusi untuk mengembangkan peternakan rakyat menuju usaha bisnis kolektif yang *feasible*, *bankable*, dan berdaya saing. Dengan ruang lingkup peternak berskala kecil berbasis kelompok dan atau gabungankelompok dengan komoditas yang dikembangkan berupa ternak sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing/domba, babi, itik, ayam lokal dan ayam rasdi wilayah yang potensial untuk pengembangan peternakan sehingga dapat membentuk suatu kawasan komoditas peternakan. Kawasan Komoditas Peternakan adalah Sentra atau gabungan sentrasentra peternakan yang memenuhi batas minimal skala ekonomi dan manajemen pembangunan di wilayah serta secara fungsional terkait Sumber Daya Alam, sosial budaya dan keberadaan infrastruktur penunjang.

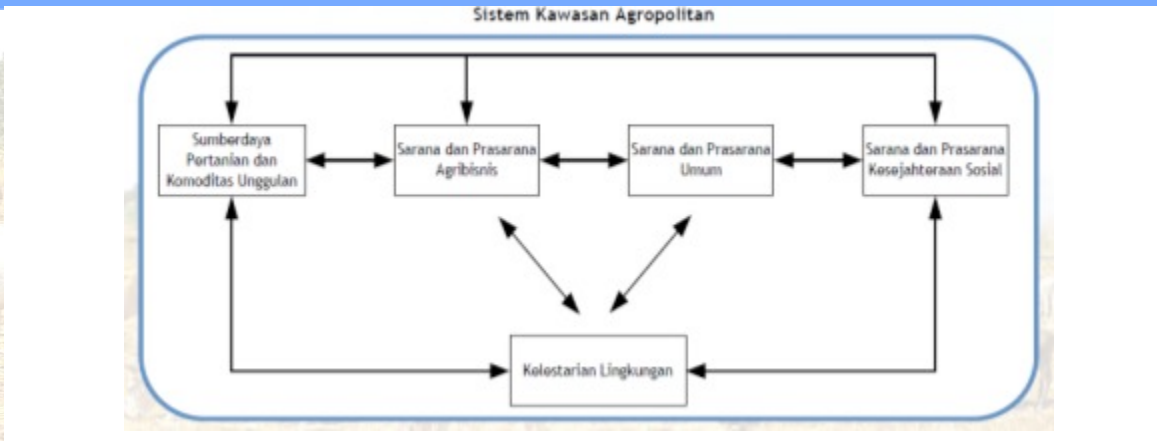
Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak

Integrasi antara komoditas peternakan dengan komoditas pertanian lainnya diharapkan dapat membentuk sebuah wilayah kawasan agropolitan. Konsep agropolitan, yaitu pengembangan wilayah perdesaan atau kota-kota perdesaan yang aktifitas utamanya adalah kegiatan agribisnis. Agropolitan merupakan bentuk pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian yang merupakan basis utama di perdesaan dengan sektor industri yang selama ini terpusat dikembangkan di perkotaan.

Melalui pengembangan agropolitan, diharapkan terjadi interaksi yang kuat antara pusat kawasan agropolitan dengan wilayah produksi pertanian dalam sistem kawasan agropolitan. Melalui pendekatan ini, produk pertanian dari kawasan produksi akan diolah terlebih dahulu di pusat kawasan agropolitan sebelum di jual (ekspor) ke pasar yang lebih luas sehingga nilai tambah terhadap produk pertanian tetap berada di kawasan agropolitan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pertanian. Konsep agropolitan ini dapat dibentuk dengan cara penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas pertanian, infrastruktur (transportasi, irigasi, air bersih, listrik, serta teknologi komunikasi dan informasi) dan fasilitas sosial ekonomi perdesaan yang memadai termasuk lembaga keuangan.

Konsepsi Pengembangan Kawasan Agropolitan





3.2 METODOLOGI

3.2.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Nazir, 2005: 174). Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua, yaitu: (Hasan, 2002: 82)

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer ini juga disebut data asli atau data baru.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia.

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui survei primer (observasi, wawancara, dan dokumentasi) untuk memperoleh data primer dan survei sekunder (studi literatur dan survei instansi terkait) untuk memperoleh data sekunder.

1. Survei primer atau observasi atau visualisasi lapangan, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dan melengkapi teknik telaah dokumen, terutama untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang daerah pekerjaan secara langsung di lapangan. Survei primer dilakukan untuk mengetahui karakteristik wilayah perencanaan meliputi kondisi lingkungan dan kegiatan yang sedang berlangsung pada saat sekarang. Adapun teknik pengumpulan data primer atau survei primer yang digunakan dalam studi ini adalah melalui:

a. Pengamatan/observasi dan Dokumentasi

Metode pengamatan atau observasi dilakukan dengan mengamati langsung obyek kawasan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat mengenai kondisi eksisting obyek kawasan, fakta-fakta yang ada dilapangan baik itu permasalahan, aktifitas, perilaku maupun kebutuhan pengembangan.

Pengamatan/observasi ini ditunjang dengan pencatatan kondisi lapangan serta dokumentasi/pengambilan gambar/foto secara digital untuk lebih mengoptimalkan hasil pengamatan yang ingin dicapai/data terbaru/teknik langsung dari lapangan atau objek kajian/kawasan.

b. Metode *interview*/wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Mempunyai tujuan untuk mendapatkan data yang lebih mendetail dan terperinci dari individu-individu yang kesehariannya berada di lapangan dan individu-individu yang mempunyai kaitan langsung ataupun tidak langsung dengan obyek. Adapun data-data yang dapat diambil diantaranya adalah aktivitas, perilaku, dan kebutuhan dilihat dari individu dan komunitas. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada stakeholder seperti SKPD terkait, instansi kecamatan, kelurahan dan masyarakat penerima manfaat setempat.

Untuk memperlancar pelaksanaan survei primer, digunakan alat-alat survey berikut ini:

- Surat perijinan survei, digunakan sebagai dasar bahwa penelitian yang dilakukan telah diketahui oleh pihak yang berwenang, sehingga penelitian sah.
- Daftar wawancara, berisi tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada responden ketika melakukan wawancara.
- Kamera, digunakan pada saat observasi lapangan, untuk merekam kejadian-kejadian atau informasi-informasi yang berkaitan dengan kawasan.
- Alat Ukur (jika diperlukan) untuk mengetahui ukuran objek yang diteliti secara akurat.
- Daftar Cek List objek yang akan diamati untuk mempermudah pelaksanaan pengamatan.

2. Survei sekunder atau telaah dokumen, dimana teknik ini berupa perekaman atau pencatatan data sekunder dari instansi/lembaga terkait dan media masa. Survei ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang telah terdokumentasikan dalam buku, laporan dan statistik yang umumnya terdapat di instansi terkait. Disela-sela survei, dilakukan diskusi yang melibatkan aparat pemerintah daerah yang terkait dengan pengembangan kawasan untuk saling tukar informasi dan pengetahuan tentang kondisi aktual.

Pada survei sekunder dilakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur dan instansi terkait.

a. Studi literatur, dilakukan melalui kajian kepustakaan dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pengembangan industri kecil serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Buku literatur
- Peraturan perundang-undangan
- Pedoman perencanaan dan dokumen-dokumen lainnya.

b. Survei Instansi

Survei instansi, dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dari instansi yang terkait.

Semua data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil kegiatan pengumpulan data dan survei kemudian dikompilasi. Pada dasarnya kegiatan kompilasi data ini dilakukan dengan cara mentabulasi dan mengsistematisasi data-data tersebut dengan menggunakan cara komputerisasi. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya data dan informasi yang telah diperoleh sehingga mudah untuk dianalisis.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya data dan informasi yang telah diperoleh sehingga akan mempermudah pelaksanaan tahapan selanjutnya yaitu tahap analisis.

Tabel 3.1
Jenis dan Sumber Data

No	Jenis Data	Tahun	Bentuk	Sumber Data
1	Peta Satuan Lahan dan Tanah	Terbaru	Digital	Puslitnak
2	Citra Satelit <i>Land System/Land Suitability</i>	Terbaru	Digital	Bakosurtanal/BIG
3	Peta Land Use	Terbaru	Digital	RTRW Kabupaten
4	Peta Curah Hujan	Terbaru	Digital	RTRW Kabupaten
5	Peta Rupa Bumi	Terbaru	Digital	RTRW Kabupaten

No	Jenis Data	Tahun	Bentuk	Sumber Data
6	Peta Administrasi	Terbaru	Digital	RTRW Kabupaten
7	Data Keragaman Ternak	Terbaru	Dokumen	Kabupaten Dalam Angka
8	Data RTRW Propinsi	Terbaru	Dokumen	Dinas terkait
9	Data RTRW Kabupaten	Terbaru	Dokumen	Dinas terkait
10	Data RDTR Kecamatan Terkait/Podes	Terbaru	Dokumen	Dinas terkait
11	Data terkait lainnya	Terbaru	Dokumen	Dinas terkait

3.2.2 Pendekatan dan Metoda Analisis

Metoda analisis data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (pendekatan campuran / *mix approach*). Analisis kualitatif pada penelitian ini dilakukan dengan metoda *content analysis* (analisis isi). Analisis isi meliputi proses penyimpulan, penciptaan ide dan penstrukturan. Analisis isi merupakan suatu teknik untuk membuat kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditiru dan sah dengan memperhatikan konteksnya Analisis isi berusaha memahami data bukan sebagai kesimpulan yang bersifat fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam sebuah teks dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang direpresentasikan. Analisis konten dilakukan pada saat melakukan pengkajian terhadap dokumen perencanaan pemanfaatan ruang yang ada maupun peraturan perundangan yang terkait. Analisis kuantitatif pada kegiatan ini dilakukan melalui analisis spasial dengan bantuan / pendekatan Sistem Informasi Geografi (SIG) dan analisis statistik deskriptif. Adapun identifikasi dan analisis data kuantitatif yang dilakukan adalah (1) identifikasi jenis penggunaan lahan yang berpotensi untuk pengembangan ternak, (2) penilaian kesesuaian lingkungan ekologis ternak, (3) penilaian kesesuaian lahan untuk tanaman hijauan makanan ternak, (4) tingkat ketersediaan hijauan makan ternak, (5) prioritas arahan lahan, (6) ketersediaan sarana dan prasarana pendukung usaha peternakandan (7) analisis wilayah untuk arahan kawasan penyebaran dan pengembangan.

Kerangka Analisa

Penyusunan Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak



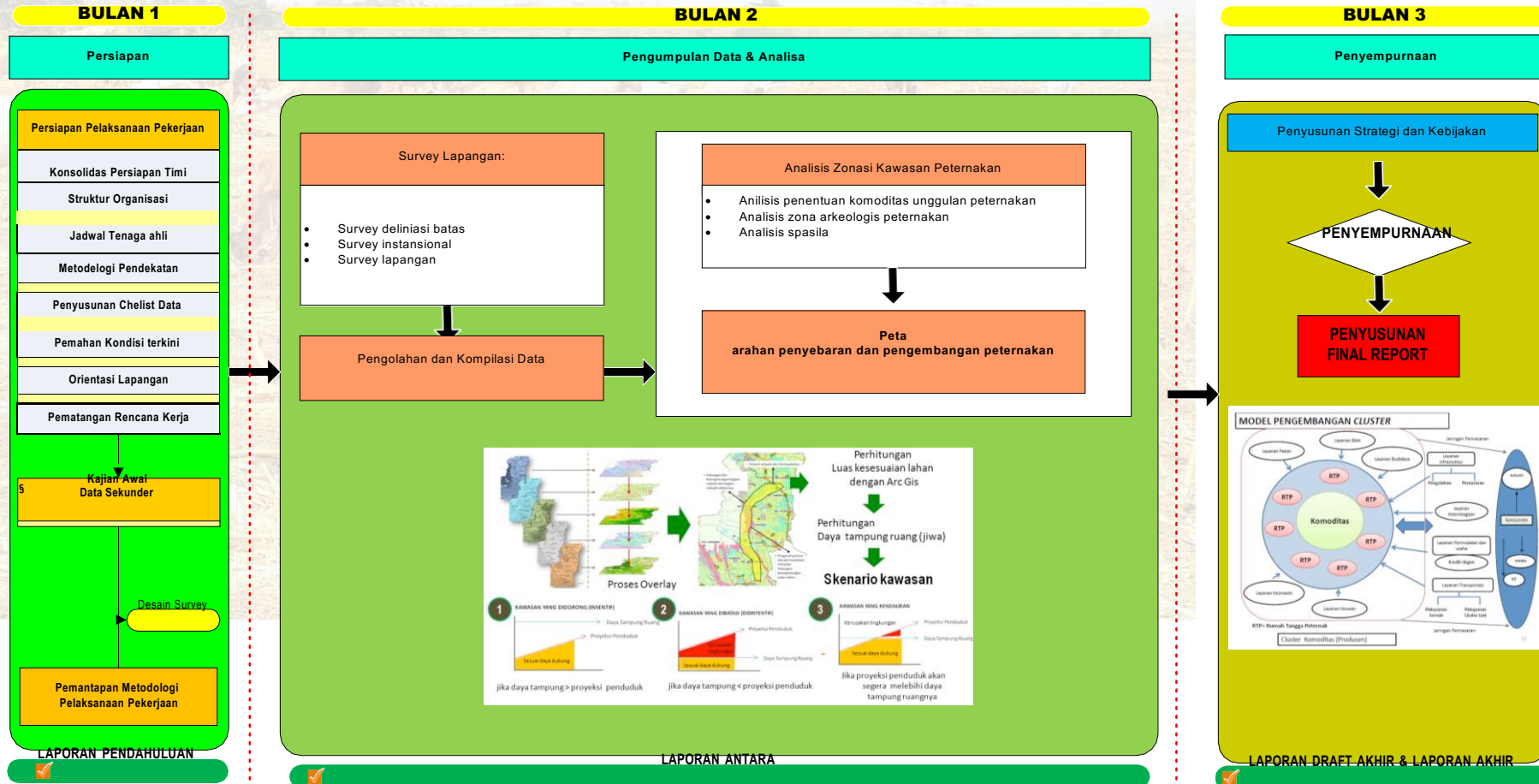
Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kawasan

Implementasi Pengembangan Kawasan

Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak

Kerangka Penyelesaian Pekerjaan

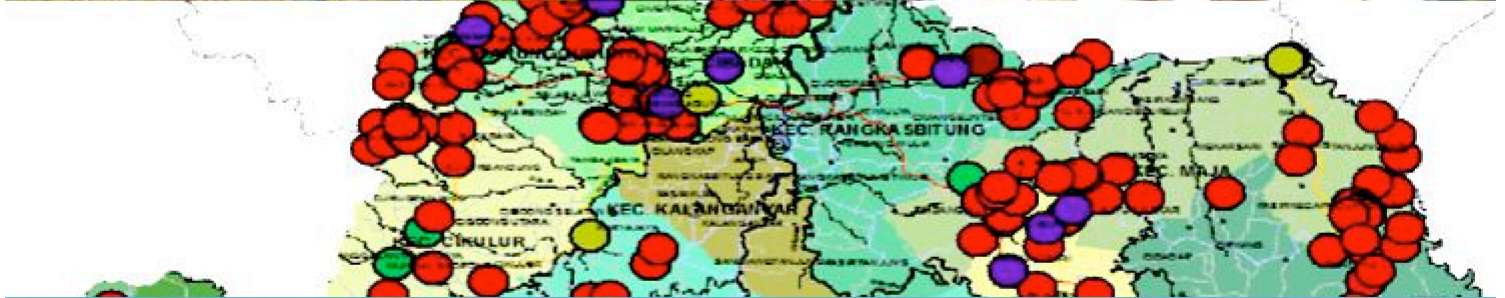
Penyusunan Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak





BAB 4

GAMBARAN UMUM WILAYAH



4.1 LETAK GEOGRAFIS & ADMINISTRASI

4.1.1 Letak Geografis

Secara geografi Kabupaten Lebak, terletak pada posisi 105°25' -106°30' Bujur Timur dan 6°18' - 7°00' Lintang Selatan. Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah 330.507,16 Ha. Sedangkan luas wilayah laut yang menjadi kewenangan Kabupaten Lebak yaitu 73,3 Km² dengan panjang pantai sekitar 91,42 Km². Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Serang dan Tangerang
- Sebelah Timur : Kabupaten Bogor dan Sukabumi
- Sebelah Barat : Kabupaten Pandeglang
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia

4.1.2 Administrasi

Secara administratif, pada tahun 2014 Kabupaten Lebak terdiri dari 28 kecamatan, 5 kelurahan dan 340 desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Cibeber yaitu 40.096,41 Ha (12,13 %) diikuti oleh Kecamatan Cimarga 18.752,65 Ha (5,67 %), Kecamatan Panggarangan 17.715,51 Ha (5,36 %), Kecamatan Banjarsari 15.955,5 Ha (4,83 %) dan Kecamatan Cileles 15.338,76 Ha (4,64 %). Sedangkan untuk kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kalanganyar yaitu 2.859,34 Ha atau hanya 0,87 % dari luas Kabupaten Lebak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Luas Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah (%)	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Malingping	9.127	3,00	14
2	Wanasalam	13.429	4,41	13
3	Panggarangan	16.336	5,37	11
4	Cihara	15.957	5,24	9
5	Bayah	15.374	5,05	11
6	Cilograng	10.720	3,52	10
7	Cibeber	38.315	12,58	22
8	Cijaku	7.436	2,44	10
9	Cigemblong	7.529	2,47	9
10	Banjarsari	14.531	4,77	20
11	Cileles	12.498	4,10	12
12	Gunungkencana	14.577	4,79	12
13	Bojongmanik	5.821	1,91	9
14	Cirinten	9.112	2,99	10
15	Leuwidamar	14.691	4,83	12

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah (%)	Jumlah Kelurahan/Desa
16	Muncang	8.498	2,79	12
17	Sobang	10.720	3,52	10
18	Cipanas	7.538	2,48	14
19	Lebakgedong	6.255	2,05	6
20	Sajira	11.098	3,64	15
21	Cimarga	18.343	6,02	17
22	Cikulur	6.606	2,17	13
23	Warunggunung	4.593	1,51	12
24	Cibadak	4.134	1,36	15
25	Rangkasbitung	4.951	1,63	16
26	Kalanganyar	2.591	0,85	7
27	Maja	5.987	1,97	14
28	Curugbitung	7.255	2,38	10
	Total	304.472	100,00	345

Sumber: Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2015

4.2 KONDISI FISIK

4.2.1 Topografi

Kabupaten Lebak mempunyai keadaan topografi yang cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah di bagian utara dan selatan, dengan ketinggian berkisar antara 100 meter hingga di atas 1.000 meter dari permukaan laut. Daerah dengan ketinggian antara 100 sampai 500 meter di atas permukaan laut meliputi sekitar 80 %, kawasan yang berada pada ketinggian 500 sampai 1.000 meter meliputi 16 % dan kawasan yang berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter sekitar 4 % dari luas keseluruhan Kabupaten Lebak. Ketinggian wilayah di Kabupaten Lebak dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelas ketinggian, yaitu:

1. Ketinggian antara 100-500 meter di atas permukaan air laut; tersebar di Kecamatan Banjarsari, Bayah, Bojongmanik, Cibadak, Cibeber, Cigemblong, Cihara, Cijaku, Cikulur, Cileles, Cilograng, Cimarga, Cipanas, Cirinten, Curugbitung, Gunungkencana, Kalanganyar, Lebakgedong, Malingping, Muncang, Panggarangan, Rangkasbitung, Maja, Wanasalam, Warunggunung, Kalanganyar.
2. Ketinggian antara 500-1.000 meter di atas permukaan air laut; tersebar di sebagian Kecamatan Bayah, Bojongmanik, Cibeber, Cigemblong, Cijaku, Cileles, Cilograng, Cipanas, Cirinten, Gunungkencana, Lebakgedong, Leuwidamar, Panggarangan, Muncang, Sajira dan Sobang.
3. Ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan air laut. Tersebar di sebagian kecil Kecamatan Cibeber, Cipanas, Lebakgedong, Muncang dan Sobang.

Tabel 4.2
Luas Wilayah dan Ketinggian Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah & Ketinggian	
		Luas Wilayah (Ha)	Ketinggian (m)
1	Banjarsari	14.531	120
2	Bayah	15.374	3
3	Bojongmanik	5.821	200
4	Cibadak	4.134	220
5	Cibeber	38.315	200
6	Cigemblong	7.529	70
7	Cihara	15.957	4
8	Cijaku	7.436	70
9	Cikurur	6.606	240
10	Cileles	12.498	164
11	Cilograng	10.720	3
12	Cimarga	18.343	220
13	Cipanas	7.538	180
14	Cirinten	9.112	200
15	Curugbitung	7.255	140
16	Gunungkencana	14.577	170
17	Kalanganyar	2.591	217
18	Lebakgedong	6.255	180
19	Leuwidamar	14.691	230
20	Maja	5.987	140
21	Malingping	9.217	40
22	Muncang	8.498	260
23	Panggarangan	16.336	4
24	Rangkasbitung	4.951	217
25	Sajira	11.098	165
26	Sobang	10.720	260
27	Wanasalam	13.429	40
28	Warunggunung	4.953	250
Kab. Lebak		304.472	4.207

Sumber : Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2015

4.2.2 Morfologi

Morfologi Kabupaten Lebak dapat dibagi menjadi; dataran, perbukitan (landai, bergelombang, terjal) dan gunung/pegunungan.

1. Dataran, tersebar di bagian, utara, barat dan selatan Kabupaten Lebak,
2. Perbukitan landai, tersebar di bagian selatan dan utara kearah timur Kabupaten Lebak,

3. Perbukitan bergelombang, terletak di bagian tengah dan selatan kearah timur Kabupaten Lebak,
4. Perbukitan terjal, terletak di bagian tengah kearah timur Kabupaten Lebak
5. Gunung/Pegunungan, 40%, terletak di bagian timur kabupaten Lebak.

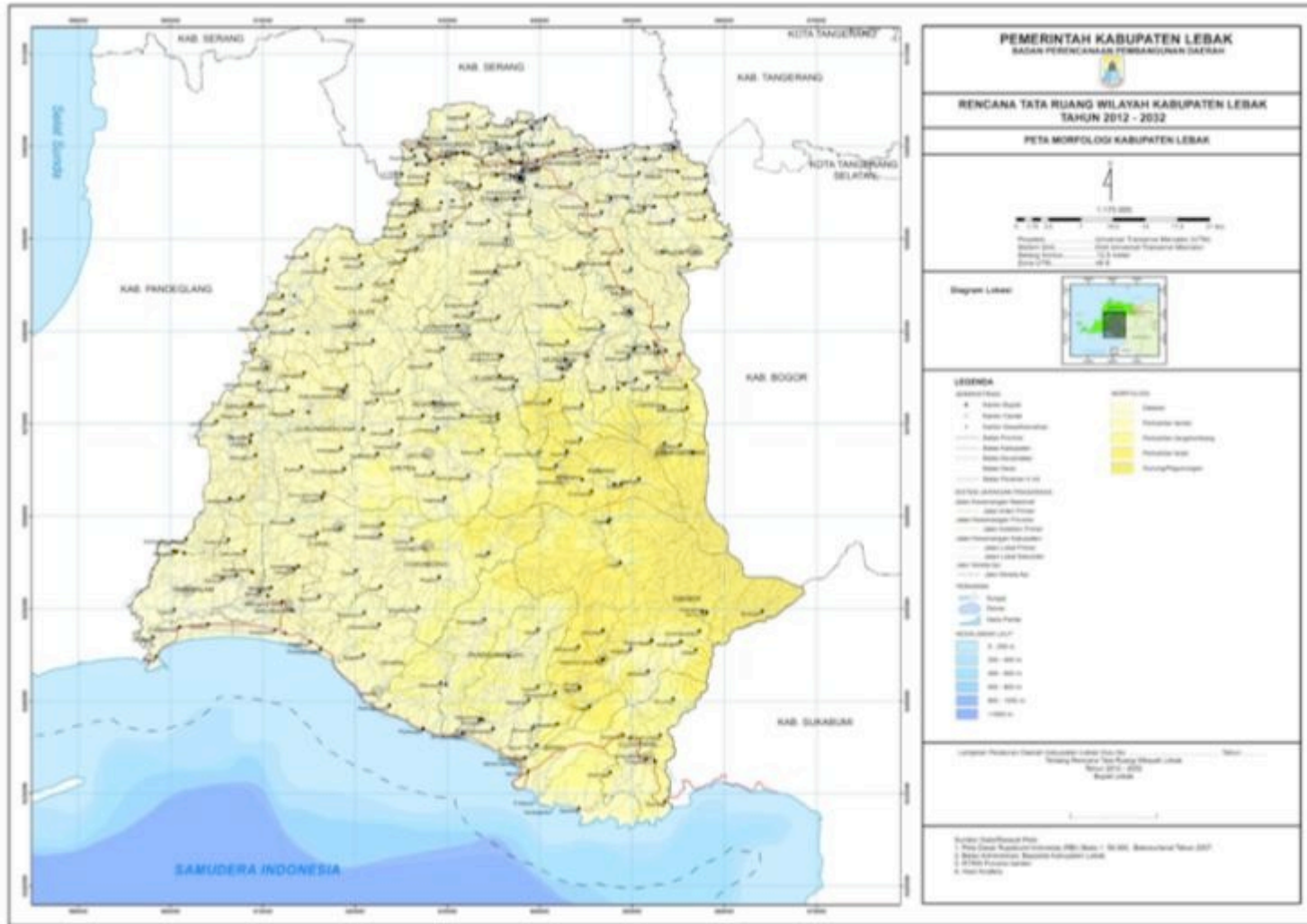
Tabel 4.3
Morfologi Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Mofologi					Total
		Dataran	Perbukitan landai	Perbukitan Bergelombang	Perbukitan Terjal	Gunung/ Pegunungan	
1	Banjarsari	12.991,70	2.974,59				15.966,30
2	Bayah	2.476,88	3.932,69	6.327,09	1.492,89		14.229,57
3	Bojongmanik	919,7	6.533,62	2.129,68			9.583,07
4	Cibadak	3.590,84					3.590,84
5	Cibeber		6.682,62	6.937,13	23.146,62	3.339,85	40.106,24
6	Cigemblong	1.402,49	6.145,54	7.405,49	361,18		15.314,73
7	Cihara	4.109,21	6.163,63	2.220,94			12.493,80
8	Cijaku	6.529	3.824,05	1.075,36			11.428,42
9	Cikukur	5.348,01	847,43				6.195,44
10	Cileles	9.654,26	5.721,90				15.376,16
11	Cilograng	287,05	2.615,70	6.115,35	554,53	152,83	9.725,47
12	Cimarga	12.204,30	6.224,98	144,55	100,04		18.673,88
13	Cipanas	1.958,40	3.180,26	1.316,37	78,69		6.533,73
14	Cirinten	1.873,62	7.371,47	3.050,16			12.295,25
15	Curugbitung	8.501,69	900,85				9.402,54
16	Gunungkencana	5.959,78	7.698,55	130,00			13.788,33
17	Kalanganyar	2.838,78	4,6				2.843,4
18	Lebakgedong		749,32	3.565,86	4.494,47	344,04	9.153,69
19	Leuwidamar	2.191,89	7.777,30	4.113,38	141,60	49,28	14.273,47
20	Maja	7.831,65	10,61				7.842,26
21	Malingping	8.701,25	1.478,31				10.179,56
22	Muncang	1.443,60	3.039,37	1.965,70	1.484,24	800,03	8.732,95
23	Pangarangan	1.679,7	6.607,87	8.676,97	685,80	69,40	17.719,76
24	Rangkasbitung	6.870,18	410,78				7.280,96
25	Sajira	6.661,87	3.259,54	547,99	4,12		1.0473,5
26	Sobang		508,44	2.559,46	6.749,82	1.306,32	11.124,06
27	Wanasalam	11.413,92					11.413,92
28	Warunggunung	4.548,36	185,41				4.733,78
	Kab. Lebak	131.988,28	9.4849,59	5.8281,56	39.294,05	6.061,77	330.475,2

Sumber : Peta Topografi dan Lereng Provinsi Banten Tahun 2012

Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak

Gambar 4.4
Peta Morfologi Kabupaten Lebak



4.2.3 Jenis Tanah

Berdasarkan pengaruh 5 (lima) faktor pembentuk tanah yaitu batuan induk, topografi, umur, iklim, dan vegetasi, maka Kabupaten Lebak secara umum tersusun oleh jenis tanah berikut:

1. Jenis tanah Latosol, jenis tanah ini umumnya tersebar di daerah beriklim basah, curah hujan lebih dari 300 mm/tahun, dan ketinggian tempat berkisar 300–1.000 meter. Tanah ini terbentuk dari batuan gunung api kemudian mengalami proses pelapukan lanjut, serta agak peka terhadap erosi. Jenis tanah latosol ini terdapat di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Lebak kecuali Kecamatan Curugbitung, Gunungkencana, dan Maja.
2. Jenis tanah Podsolik, berasal dari batuan pasir kuarsa, tersebar di daerah beriklim basah tanpa bulan kering, curah hujan lebih 2.500 mm/tahun. Tekstur lempung hingga berpasir, kesuburan rendah hingga sedang, warna merah, dan kering. Serta mempunyai tingkat kepekaan terhadap erosi yang peka dengan sebaran meliputi hampir seluruh kecamatan kecuali Bayah, Cibeber, Cigemblong, Cilograng, Lebakgedong, Panggarangan dan Sobang.
3. Jenis tanah Alluvial, Andosol, Regosol dan Rensina, tersebar di sebagian kecil di beberapa kecamatan.

4.2.4 Geologi

Geologi (jenis batuan) Kabupaten Lebak didominasi oleh Batuan Gunung Api Plistosen (26,42%), Batuan Sedimen Pliosen (17,01%) dan Batuan Gunung Api Pliosen (8,87%) sedangkan Endapan Undak Sungai merupakan jenis batuan yang paling sedikit di jumpai di Kabupaten Lebak.

4.2.5 Hidrologi

Secara Hidrogeologi Kabupaten Lebak terbagi menjadi beberapa, yaitu:

1. air tanah dangkal yang berada di bagian barat daya dan timur Kabupaten Lebak,
2. air tanah terletak di seluruh wilayah kabupaten Lebak (mendominasi),
3. air tanah yang memancar, terletak di bagian timur Kabupaten Lebak,
4. wilayah air DAM Karian yang terletak di utara Kabupaten Lebak (Kecamatan Cimara, Kalangayar dan Sajira).

Tabel 4.4
Hidrogeologi Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Daerah Air Tanah Yang Dangkal	Daerah Air Tanah Yang Sedang	Rencana DAM Karian	Sumber Mata Air Yang Memancar	Total (Ha)
1	Banjarsari		15,175.77		779.73	15,955.50
2	Bayah		14,377.21			14,377.21
3	Bojongmanik		9,591.83			9,591.83
4	Cibadak		3,632.71			3,632.71
5	Cibeber	1,069.83	39,026.58			40,096.41
6	Cigemblong		15,304.93			15,304.93
7	Cihara	1,495.63	10,974.23			12,469.86
8	Cijaku	710.96	10,757.46			11,468.42
9	Cikukur		6,182.97			6,182.97
10	Cileles		15,115.13		223.63	15,338.76
11	Cilograng		9,601.72			9,601.72
12	Cimarga		16,958.55	1,794.10		18,752.65
13	Cipanas		6,525.30			6,525.30
14	Cirinten		12,254.96			12,254.96
15	Curugbitung		9,317.33			9,317.33
16	Gunungkencana		13,801.50			13,801.50
17	Kalanganyar		2,848.72	10.61		2,859.34
18	Lebakgedong	1,575.29	7,584.69			9,159.98
19	Leuwidamar		14,305.09			14,305.09
20	Maja		7,817.14			7,817.14
21	Malingping	7,949.77	2,251.70			10,201.47
22	Muncang		8,695.38			8,695.38
23	Panggarangan		17,715.51			17,715.51
24	Rangkasbitung		6,994.54	315.16		7,309.71
25	Sajira		10,067.03	399.61		10,466.64
26	Sobang	684.52	10,464.82			11,149.34
27	Wanasalam	9,899.71	1,519.31			11,419.02
28	Warunggunung		4,736.53			4,736.53
Kab. Lebak		23,385.70	303,598.63	2,519.48	1,003.35	330,507.16

Sumber : Peta Hidrogeologi Provinsi Banten

4.2.6 Klimatologi

Kabupaten Lebak memiliki curah hujan yang tinggi yaitu berkisar antara 2000 - >5000 mm/tahun. Curah hujan terbesar berada di bagian timur sedangkan terkecil berada di bagian utara Kabupaten Lebak.

4.2.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kabupaten Lebak di secara umum didominasi oleh kebun campuran, perkebunan (rakyat dan swasta), persawahan (irigasi dan tadah hujan).



**Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan
Kabupaten Lebak**

**Tabel 4.5
Curah Hujan Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Curah Hujan					Total
		<3.000mm/tahun	3.000 - 3.500 mm/tahun	3.500 - 4.000 mm/tahun	4.000 - 4.500 mm/tahun	>4.500 mm/tahun	
1	Banjarsari	8.865,94	7.089,57	-	-	-	15.955,51
2	Bayah	785,13	12.225,23	1.356,53	10,32	-	14.377,21
3	Bojongmanik	1.845,33	5.293,23	2.453,32	-	-	9.591,88
4	Cibadak	3.623,71	-	-	-	-	3.623,71
5	Cibeber	-	805,91	5.205,61	11.685,72	22.399,17	40.096,41
6	Cigemblong	-	5.050,35	6.646,39	3.610,20	-	15.306,94
7	Cihara	3.606,75	8.859,12	3,99	-	-	12.469,86
8	Cijaku	-	10.373,16	1.095,25	-	-	11.468,41
9	Cikukur	6.182,97	-	-	-	-	6.182,97
10	Cileles	12.531,75	2.807,01	-	-	-	15.338,76
11	Cilograng	-	4.826,32	3.372,11	1.403,28	-	9.601,71
12	Cimarga	15.344,13	2.539,06	869,47	-	-	18.752,66
13	Cipanas	-	346,96	5.384,33	794,01	-	6.525,30
14	Cirinten	-	6.145,69	5.830,76	278,51	-	12.254,96
15	Curugbitung	7.773,78	1.543,55	-	-	-	9.317,33
16	Gunungkencana	770,79	13.030,71	-	-	-	13.801,50
17	Kalanganyar	2.859,34	-	-	-	-	2.859,34
18	Lebakgedong	-	-	2.997,51	2.735,16	3.427,31	9.159,98
19	Leuwidamar	3.375,11	5.454,19	4.424,08	1.051,71	-	14.305,09
20	Maja	7.817,14	-	-	-	-	7.817,14
21	Malingping	3.441,11	6.760,36	-	-	-	10.201,47

No	Kecamatan	Curah Hujan					Total
		<3.000mm/tahun	3.000 - 3.500 mm/tahun	3.500 - 4.000 mm/tahun	4.000 - 4.500 mm/tahun	>4.500 mm/tahun	
22	Muncang	23,33	1.147,15	7.126,99	397,91	-	8.695,38
23	Panggarangan	1.234,87	6.452,89	8.794,67	1.233,09	-	17.715,52
24	Rangkasbitung	7.309,70	-	-	-	-	7.309,70
25	Sajira	2.095,56	4.884,02	3.487,06	-	-	10.466,64
26	Sobang	-	-	2.368,49	7.192,33	1.588,53	11.149,35
27	Wanasalam	7.894,92	3.524,10	-	-	-	11.419,02
28	Warunggunung	4.736,53	-	-	-	-	4.736,53
Total		102.126,88	109.158,50	61.414,54	30.392,23	27.415,00	330.507,15

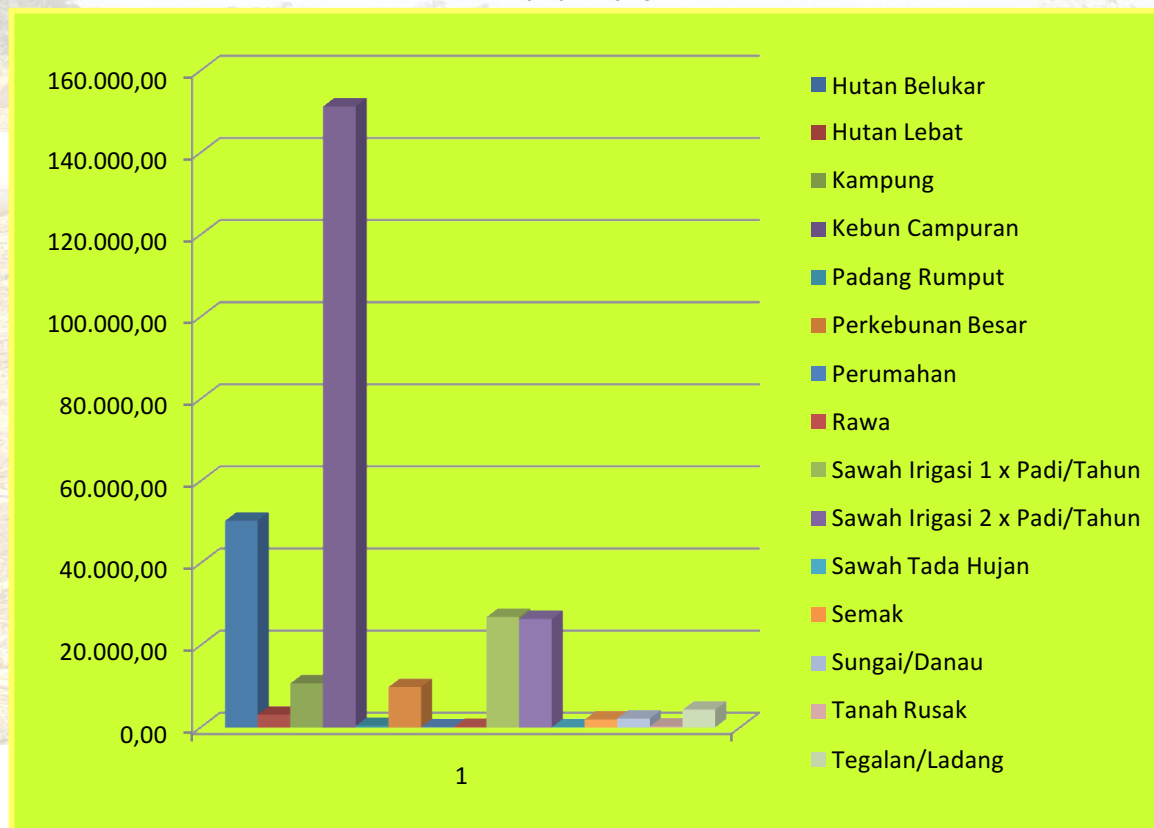
Sumber : Peta Curah Hujan Provinsi Banten



		Hutan Belukar	Hutan Lebat	Kampung	Rebun Campuran	Padang Rumput	Perkebunan Besar	Perumahan	Rawa	Irigasi 1 x Padi/Tahun	Irigasi 2 x Padi/Tahun	Tada Hujan
1	Banjarsari	2.575,40	-	713,90	7.895,27	136,89	231,86	-	1,91	944,81	1.457,96	-
2	Bayah	2.876,13	-	770,39	7.155,95	0,52	494,35	-	-	1.004,82	123,72	-
3	Bojongmanik	644,03	-	192,11	1.762,14	0,69	-	-	-	5,63	228,94	-
4	Cibadak	-	-	389,97	1.458,38	18,30	-	-	5,81	1.119,09	1.493,74	-
5	Cibeber	14.771,86	702,33	374,00	20.171,70	6,65	-	-	-	1.588,96	19,88	0,0
6	Cigemblong	2.883,52	294,42	146,69	9.191,74	9,26	373,93	-	-	1.590,64	652,63	-
7	Cihara	1.334,52	-	190,09	9.228,02	-	-	-	-	1.194,37	80,17	-
8	Cijaku	766,99	-	213,69	7.854,70	1,96	-	-	-	1.062,28	718,45	-
9	Cikukur	-	-	493,66	533,40	12,64	-	-	-	411,85	1.828,45	-
10	Cileles	1.728,06	-	476,76	8.165,05	7,39	1.448,59	-	-	1.244,27	452,93	-
11	Cilograng	4.332,57	-	255,23	3.990,42	-	-	-	-	457,89	80,49	-
12	Cimarga	3.936,36	-	572,10	3.264,82	24,41	2.603,51	-	-	2.038,27	1.430,38	-
13	Cipanas	97,80	126,42	290,35	3.856,88	3,67	0,09	-	-	1.356,23	625,59	0,1
14	Cirinten	411,22	87,77	155,94	8.543,38	0,44	-	-	-	996,88	1.132,24	-
15	Curugbitung	-	-	481,86	5.587,48	-	0,07	-	-	164,82	1.732,64	-
16	Gunungkencana	4.412,29	-	377,33	5.581,55	1,38	-	-	-	1.217,44	700,39	51,8
17	Kalanganyar	-	-	229,96	998,95	-	489,96	-	-	128,42	794,88	-
18	Lebakgedong	-	291,38	104,56	6.491,70	-	0,03	-	-	725,40	80,45	-
19	Leuwidamar	1.618,42	201,52	451,01	2.500,83	10,60	-	-	-	947,63	386,20	-
20	Maja	-	-	645,53	2.676,29	15,06	1.203,90	-	-	314,80	2.147,90	-
21	Malingping	685,85	-	557,15	5.405,13	9,13	-	-	95,78	1.480,47	572,08	-
22	Muncang	168,46	122,47	159,05	2.711,22	-	258,32	-	-	2.106,14	699,85	-
23	Panggarangan	5.937,06	-	263,55	7.098,42	1,17	-	-	-	975,39	409,23	-
24	Rangkasbitung	-	-	933,24	2.016,75	67,55	2.526,79	84,38	-	240,73	1.314,24	-
25	Sajira	29,62	-	395,31	6.434,43	35,86	231,87	-	-	552,16	1.495,37	-
26	Sobang	1.106,89	1.308,57	131,79	4.946,75	-	-	-	-	2.813,84	-	-
27	Wanasalam	57,29	-	358,82	4.562,06	10,16	-	-	16,89	233,24	3.687,34	-
28	Warunggunung	-	-	460,08	1.201,46	4,01	-	-	-	9,52	2.101,82	-
Total		50.374,34	3.134,88	10.784,12	151.284,87	377,74	9.863,27	84,38	120,39	26.925,99	26.447,96	52,0

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034

Gambar 4.9
Penggunaan Lahan Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan
Tahun 2013



Sumber : Diolah dari Data Penggunaan Lahan RTRW Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034

4.3 KONDISI KEPENDUDUKAN

4.3.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Lebak tahun 2014 berdasarkan data Lebak Dalam Angka Tahun 2015 yaitu sebanyak 1.259.315 jiwa. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 415 jiwa dari tahun sebelumnya yaitu 1.204.095 jiwa. Penduduk Kabupaten Lebak tersebar di 28 kecamatan, 5 kelurahan dan 340 desa. Ditinjau dari Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Lebak dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang relatif menurun. Pada periode 1980-1990, LPP Kabupaten Lebak mencapai 2,49% menurun menjadi hanya 1,72% dan kembali pada periode 2009-2014 mengalami penurunan menjadi 1,59%. Kondisi tersebut menunjukkan upaya pengendalian penduduk di Kabupaten Lebak relatif cukup baik. Walaupun rata-rata pertumbuhannya masih di bawah rata-rata nasional, namun demikian tetap harus dilakukan peningkatan upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat diturunkan dari waktu ke waktu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7
Jumlah Penduduk di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Malingping	63.022	62.490	63.282	61.470	61.500	64.157
2	Wanasalam	51.684	53.261	53.936	51.161	51.233	53.510
3	Panggarangan	34.967	35.283	35.729	34.913	35.242	36.927
4	Cihara	28.676	29.590	29.964	29.425	29.530	31.003
5	Bayah	38.086	38.410	38.895	40.734	40.716	42.603
6	Cilograng	30.603	31.776	32.178	31.882	31.689	33.242
7	Cibeber	51.740	54.398	55.086	54.053	54.228	56.615
8	Cijaku	26.601	26.788	27.126	26.884	26.876	28.250
9	Cigemblong	21.052	21.727	22.002	19.542	19.527	20.630
10	Banjarsari	61.393	65.503	66.335	57.295	57.384	59.888
11	Cileles	48.567	48.139	48.749	46.627	46.684	48.793
12	Gunung Kencana	34.230	34.722	35.160	32.797	32.661	34.250
13	Bojongmanik	21.858	21.442	21.713	21.243	21.206	22.371
14	Cirinten	24.436	24.443	24.752	24.887	24.765	26.061
15	Leuwidamar	47.625	51.192	51.840	50.555	50.430	52.677
16	Muncang	33.779	32.545	32.957	31.475	31.615	33.165
17	Sobang	27.358	28.089	28.444	28.337	28.361	29.790
18	Cipanas	47.467	47.693	48.297	45.435	45.388	47.448
19	Lebak Gedong	20.629	20.933	21.198	21.531	21.537	22.714
20	Sajira	46.612	46.700	47.292	46.170	46.366	48.739
21	Cimarga	60.848	62.581	63.372	60.807	60.968	63.605
22	Cikulur	48.944	49.200	49.822	46.632	46.627	48.739
23	Warunggunung	51.856	51.414	52.064	52.335	52.302	54.618
24	Cibadak	55.199	56.946	57.666	58.034	58.057	60.587
25	Rangkasbitung	114.114	111.371	112.781	116.921	116.659	121.359
26	Kalanganyar	30.655	30.686	31.074	31.995	31.982	33.546
27	Maja	49.080	49.501	50.127	50.420	50.526	52.777
28	Curugbitung	31.828	32.210	32.618	30.120	30.036	31.528
	Total	1.202.909	1.219.033	1.234.459	1.203.680	1.204.095	1.259.315

Sumber : Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2010-2015

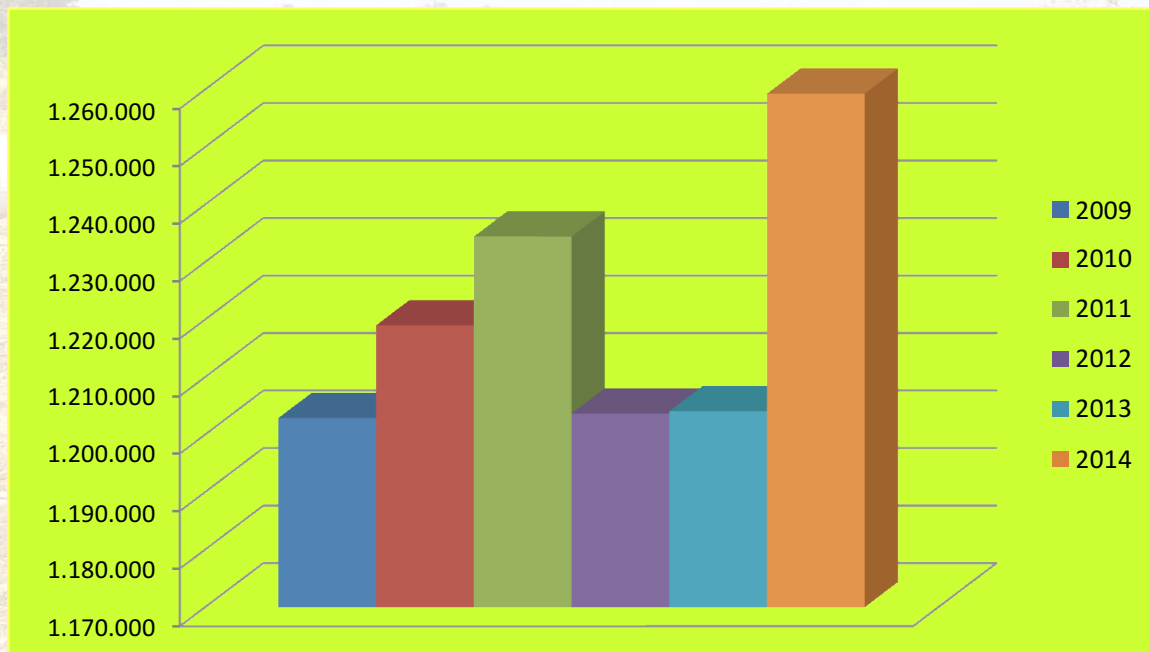
Tabel 4.8

Laju Jumlah Penduduk di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)				
		2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
1	Malingping	-0,84	1,27	-2,86	0,05	4,32
2	Wanasalam	3,05	1,27	-5,14	0,14	4,44
3	Panggarangan	0,90	1,26	-2,28	0,94	4,78
4	Cihara	3,19	1,26	-1,80	0,36	4,99
5	Bayah	0,85	1,26	4,73	-0,04	4,63
6	Cilograng	3,83	1,27	-0,92	-0,61	4,90
7	Cibeber	5,14	1,26	-1,88	0,32	4,40
8	Cijaku	0,70	1,26	-0,89	-0,03	5,11
9	Cigemblong	3,21	1,27	-11,18	-0,08	5,65
10	Banjarsari	6,69	1,27	-13,63	0,16	4,36
11	Cileles	-0,88	1,27	-4,35	0,12	4,52
12	Gunung Kencana	1,44	1,26	-6,72	-0,41	4,87
13	Bojongmanik	-1,90	1,26	-2,16	-0,17	5,49
14	Cirinten	0,03	1,26	0,55	-0,49	5,23
15	Leuwidamar	7,49	1,27	-2,48	-0,25	4,46
16	Muncang	-3,65	1,27	-4,50	0,44	4,90
17	Sobang	2,67	1,26	-0,38	0,08	5,04
18	Cipanas	0,48	1,27	-5,93	-0,10	4,54
19	Lebak Gedong	1,47	1,27	1,57	0,03	5,47
20	Sajira	0,19	1,27	-2,37	0,42	5,12
21	Cimarga	2,85	1,26	-4,05	0,26	4,33
22	Cikulur	0,52	1,26	-6,40	-0,01	4,53
23	Warunggunung	-0,85	1,26	0,52	-0,06	4,43
24	Cibadak	3,16	1,26	0,64	0,04	4,36
25	Rangkasbitung	-2,40	1,27	3,67	-0,22	4,03
26	Kalanganyar	0,10	1,26	2,96	-0,04	4,89
27	Maja	0,86	1,26	0,58	0,21	4,46
28	Curugbitung	1,20	1,27	-7,66	-0,28	4,97
	Total	1,34	1,27	-2,49	0,03	4,59

Sumber : Diolah dari Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2010-2015

Gambar 4.10
Jumlah Penduduk di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014



Sumber : Diolah dari Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2010-2015

Gambar 4.11
Laju Jumlah Penduduk di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014



Sumber : Diolah dari Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2010-2015

4.3.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Pada tahun 2014, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Rangkasbitung, yang merupakan Ibukota Kabupaten, yaitu sebesar 121.359 jiwa atau sekitar 9.64% diikuti Kecamatan Malingping pada urutan kedua sebanyak 64.157 jiwa (5,09%) dan Kecamatan Cimarga sebesar 60.968 jiwa (5,06%). Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Cigemblong dengan jumlah penduduk 19.527 jiwa atau sekitar 1,62 %.

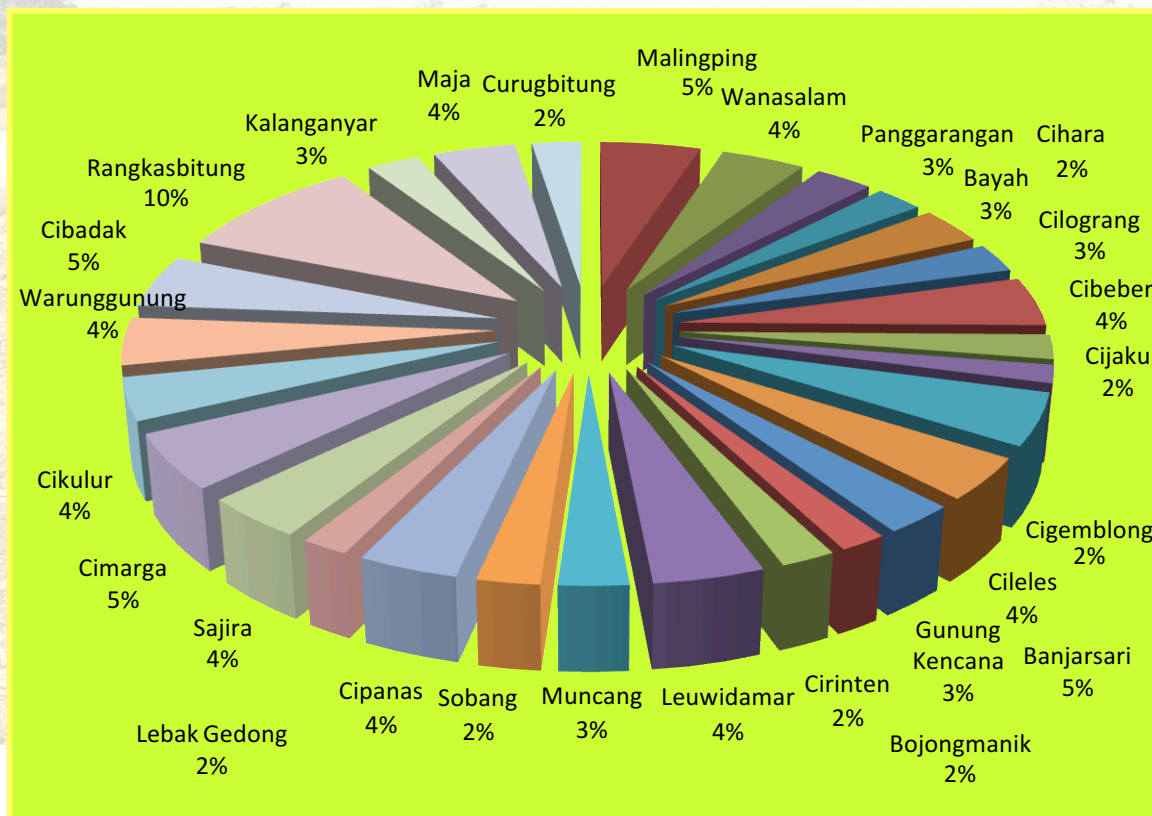
Tabel 4.9

Distribusi Penduduk di Kabupaten Lebak Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1	Malingping	64.157	5,09
2	Wanasalam	53.510	4,25
3	Panggarangan	36.927	2,93
4	Cihara	31.003	2,46
5	Bayah	42.603	3,38
6	Cilograng	33.242	2,64
7	Cibeber	56.615	4,50
8	Cijaku	28.250	2,24
9	Cigemblong	20.630	1,64
10	Banjarsari	59.888	4,76
11	Cileles	48.793	3,87
12	Gunung Kencana	34.250	2,72
13	Bojongmanik	22.371	1,78
14	Cirinten	26.061	2,07
15	Leuwidamar	52.677	4,18
16	Muncang	33.165	2,63
17	Sobang	29.790	2,37
18	Cipanas	47.448	3,77
19	Lebak Gedong	22.714	1,80
20	Sajira	48.739	3,87
21	Cimarga	63.605	5,05
22	Cikulur	48.739	3,87
23	Warunggunung	54.618	4,34
24	Cibadak	60.587	4,81
25	Rangkasbitung	121.359	9,64
26	Kalanganyar	33.546	2,66
27	Maja	52.777	4,19
28	Curugbitung	31.528	2,50
	Total	1.259.315	100,00

Sumber : Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2015

Gambar 4.12
Distribusi Penduduk di Kabupaten Lebak Tahun 2014



Sumber : Diolah dari Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2015

Dengan luas wilayah sekitar 304.472 Ha, kepadatan penduduk di Kabupaten Lebak pada tahun 2010 mencapai 3,95 Jiwa/Ha. Jika dilihat dari kepadatan penduduk menurut kecamatan, Kecamatan Rangkasbitung merupakan kecamatan paling padat penduduknya yaitu 23,56 Jiwa/Ha kemudian diikuti Kecamatan Cibadak dengan kepadatan 14,04 Jiwa/Ha dan Kecamatan Kalanganyar sebesar 12,34 Jiwa/Ha. Sedangkan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah di Kabupaten Lebak adalah Kecamatan Cibeber yaitu 1,42 Jiwa/Ha dan Kecamatan Cihara dengan 1,85 Jiwa/Ha. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Lebak pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebak Tahun 2014

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Ha)
1	Malingping	14.531	64.157	3.85
2	Wanasalam	15.374	53.510	3.60
3	Panggarangan	5.821	36.927	3.68
4	Cihara	4.134	31.003	8.22
5	Bayah	38.315	42.603	1.02
6	Cilograng	7.529	33.242	2.07
7	Cibeber	15.957	56.615	4.34
8	Cijaku	7.436	28.250	2.35
9	Cigemblong	6.606	20.630	3.15
10	Banjarsari	12.498	59.888	3.73
11	Cileles	10.720	48.793	4.80
12	Gunung Kencana	18.343	34.250	1.75
13	Bojongmanik	7.538	22.371	3.25
14	Cirinten	9.112	26.061	2.01
15	Leuwidamar	7.255	52.677	5.36
16	Muncang	14.577	33.165	2.29
17	Sobang	2.591	29.790	9.97
18	Cipanas	6.255	47.448	4.96
19	Lebak Gedong	14.691	22.714	1.51
20	Sajira	5.987	48.739	5.91
21	Cimarga	9.217	63.605	5.99
22	Cikulur	8.498	48.739	5.34
23	Warunggunung	16.336	54.618	2.95
24	Cibadak	4.951	60.587	7.97
25	Rangkasbitung	11.098	121.359	11.14
26	Kalanganyar	10.720	33.546	2.88
27	Maja	13.429	52.777	4.43
28	Curugbitung	4.953	31.528	6.35
	Total	304.472	1.259.315	3.64

Sumber : Diolah dari Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2015

4.3.3 Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur berfungsi untuk melihat seberapa besar penduduk belum produktif, penduduk produktif, dan penduduk non produktif. Komposisi penduduk berdasarkan usia produktif dan nonproduktif dapat digunakan untuk menghitung angka ketergantungan (dependency ratio). Angka ini penting diketahui karena dapat memperkirakan beban tiap penduduk nonproduktif untuk menopang kebutuhan hidupnya. Permasalahan dalam komposisi penduduk lainnya adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan penduduk dengan usia produktif (15-65 th). Hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia nonproduktif. Penduduk usia produktif akan terbebani oleh penduduk yang tidak berkualitas untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi mereka sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lebak 2015 terlihat bahwa usia belum produktif di Kabupaten lebak (0 -14) tahun berjumlah 399,795 jiwa, sementara untuk usia produktif (15 -64) tahun berjumlah 809,106 jiwa sedangkan untuk usia non produktif (>65) tahun berjumlah 62,384 jiwa.

Tabel 4.11
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

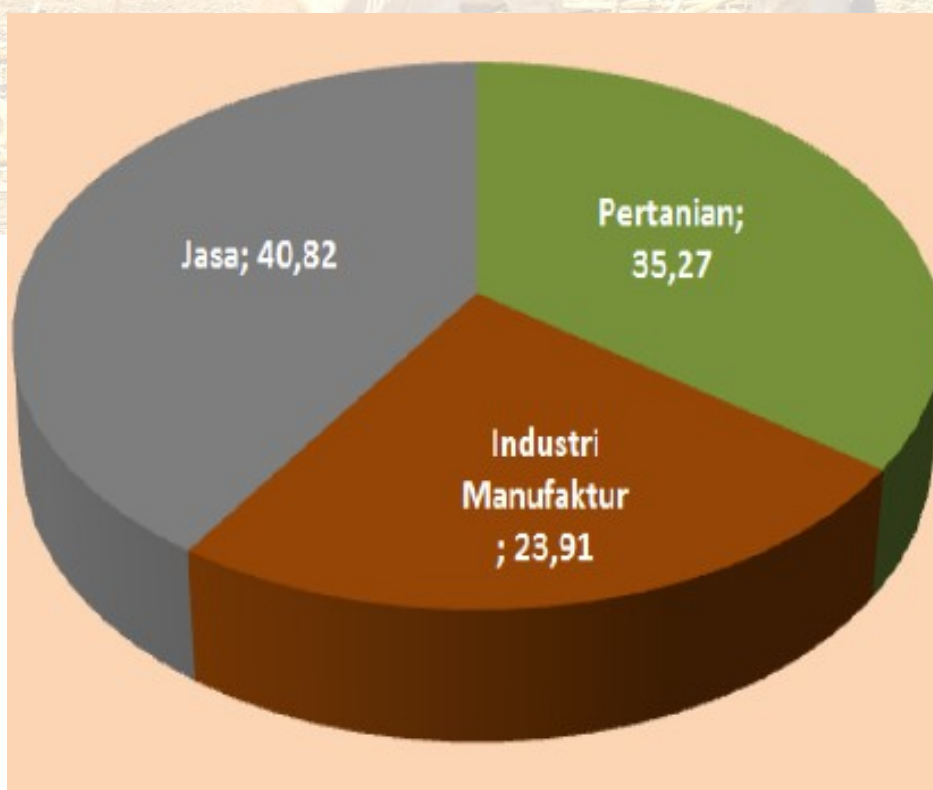
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	
0-4	67,769	65,890	133,659
5-10	67,813	63,938	131,751
10-14	70,183	64,202	134,385
15-19	62,714	52,889	115,603
20-24	52,306	50,706	103,012
25-29	50,511	49,893	100,404
30-34	47,157	47,503	94,660
35-39	47,563	46,135	92,698
40-44	44,031	43,862	87,893
45-49	40,413	36,538	76,951
50-54	31,902	29,142	61,044
55-59	22,465	20,883	43,348
60-64	17,698	15,795	33,493
65-69	11,186	11,177	22,363
70-74	6,790	7,476	14
75 +	6,204	7,575	13,779
Jumlah	645,705	613,604	1,259,309

Sumber : Lebak Dalam Angka Tahun 2015

4.3.4 Ketenagakerjaan

Komposisi tenaga kerja berdasarkan 3 Sektor utama didominasi oleh sector Industri sebanyak 40,82 %, diikuti oleh sektor pertanian dengan 35,27 % dan yang terakhir adalah industri manufaktur, sebanyak 23,91 %. Terjadinya peralihan struktur ketenagakerjaan dari sector pertanian ke sector jasa seharusnya menjadi perahitian para penmangku kebijakan di wialayah Kabupaten Lebak. Karena Kabupaten Lebak dari sisi ekonomi masih bergantung kepada sector pertanian yang menguasai sebanyak 27,3 % dari Produk Domestik regional Bruto pada tahun 2014.

Gambar 4.13
Komposisi Tenaga Kerja
Menurut 3 (Tiga) Sektor Utama di Kabupaten Lebak
Tahun 2014

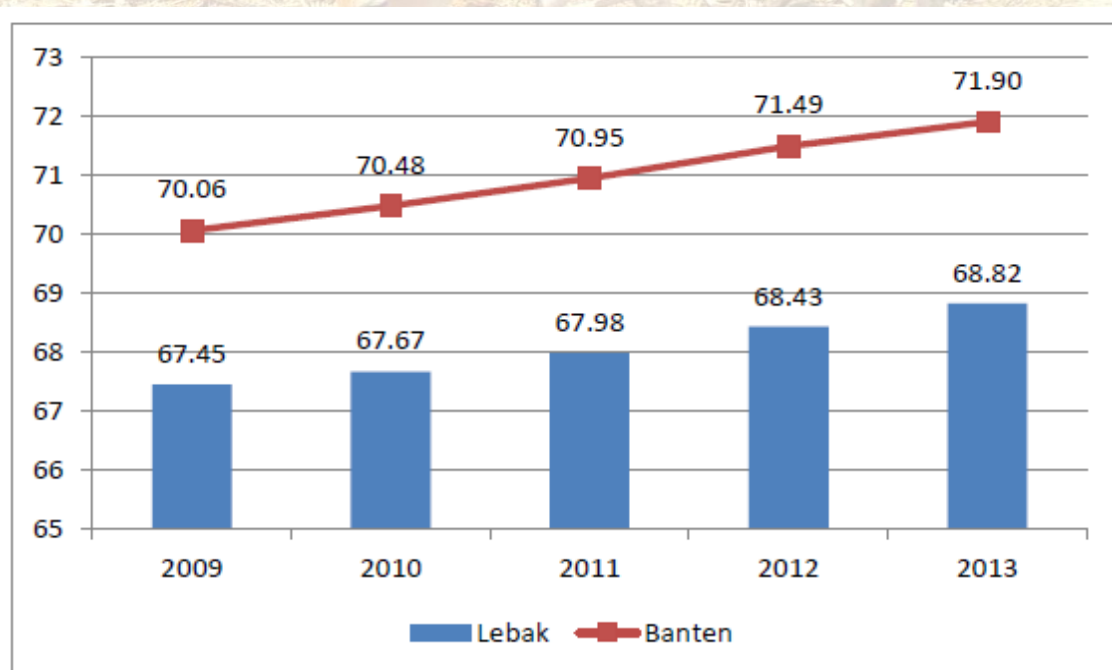


Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015

4.3.5 Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Usia Harapan Hidup (UHH), capaian tingkat pendidikan (Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf), serta pengeluaran per kapita guna akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. Perkembangan IPM di Kabupaten Lebak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 0,50%, namun tingkat pencapaiannya masih rendah dibandingkan dengan Provinsi Banten seperti tergambar pada grafik berikut.

Gambar 4.14
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Sumber : RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019

4.3.6 Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Semakin baik pendidikan masyarakat akan memberikan harapan bahwa masyarakat akan semakin mudah menyerap informasi - informasi yang berkaitan dengan pembangunan, sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2014 kemampuan membaca dan menulis (AMH) serta rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk 96,05 persen dan 6,29 tahun. Dengan kata lain rata-rata tingkat pendidikan penduduk Lebak usia 15 tahun keatas baru sebatas lulus Sekolah Dasar dan merupakan yang terendah di Propinsi Banten. Angka Partisipasi Sekolah penduduk Lebak mengalami peningkatan di seluruh tingkatan usia sekolah. Untuk tingkat SD (7-12 Th) naik menjadi 97,64 persen. Sedangkan untuk tingkat SMP (13-15 Th) dan setingkat SMA (16-18 Th) masing-masing mengalami kenaikan menjadi 85,83 persen dan 55,58 persen naik dari tahun sebelumnya yang hanya 84,49 persen dan 44,09 persen. Makin mudahnya akses pendidikan bagi penduduk, terutama penduduk daerah terpencil menjadi faktor pendorong peningkatan partisipasi sekolah.

Tabel 4.12

Indikator Pendidikan di Kabupaten Lebak

Uraian	Sat	2010	2011	2012	2013	2014
Angka Melek Huruf	%	94.6	94.82	95.69	96.05	98.07
Rata-rata Lama Sekolah (+25 Th)	Th	5.34	5.58	5.7	5.81	5.84
Angka Partisipasi Sekolah						
07-12 Tahun	%	97.72	96.53	97.4	97.64	99.14
13-15 Tahun	%	73.18	83.76	84.49	85.83	92.71
16-18 Tahun	%	33.58	41.25	44.09	55.58	58.32

Sumber : Lebak Dalam Angka Tahun 2015

4.4 KONDISI EKONOMI

4.4.1 Perkembangan Nilai Pendapatan Regional

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah dari masing-masing sektor. Dengan demikian data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan dalam melihat perkembangan ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, karena kontribusi sektor yang besar sangat berpeluang untuk mempengaruhi kemajuan wilayah tersebut. Suatu wilayah dalam perkembangan ekonominya itu tidak hanya ditunjang oleh satu sektor kegiatan saja, tetapi ditunjang oleh sektor-sektor yang lainnya.

Suatu wilayah dalam melihat perkembangan dan pertumbuhannya, serta kemajuan pembangunan baik yang telah dan hendak dicapai itu dapat terlihat dari karakteristik kegiatan perekonomiannya, dimana laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah salah satu indikatornya. Berdasarkan kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2011-2014 atas harga konstan terungkap bahwa kontribusi sektor pertanian pada tahun 2011 - 2014 merupakan sektor yang paling dominan perannya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lebak yaitu sebesar 37,38 % pada tahun 2011, 37,39 % pada tahun 2012, 38,70 % pada tahun 2013 dan 38,90 % pada tahun 2014. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.



**Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan
Kabupaten Lebak**

**Tabel 4.13
Kontribusi PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2011-2014
Atas Dasar Harga Konstan 2000**

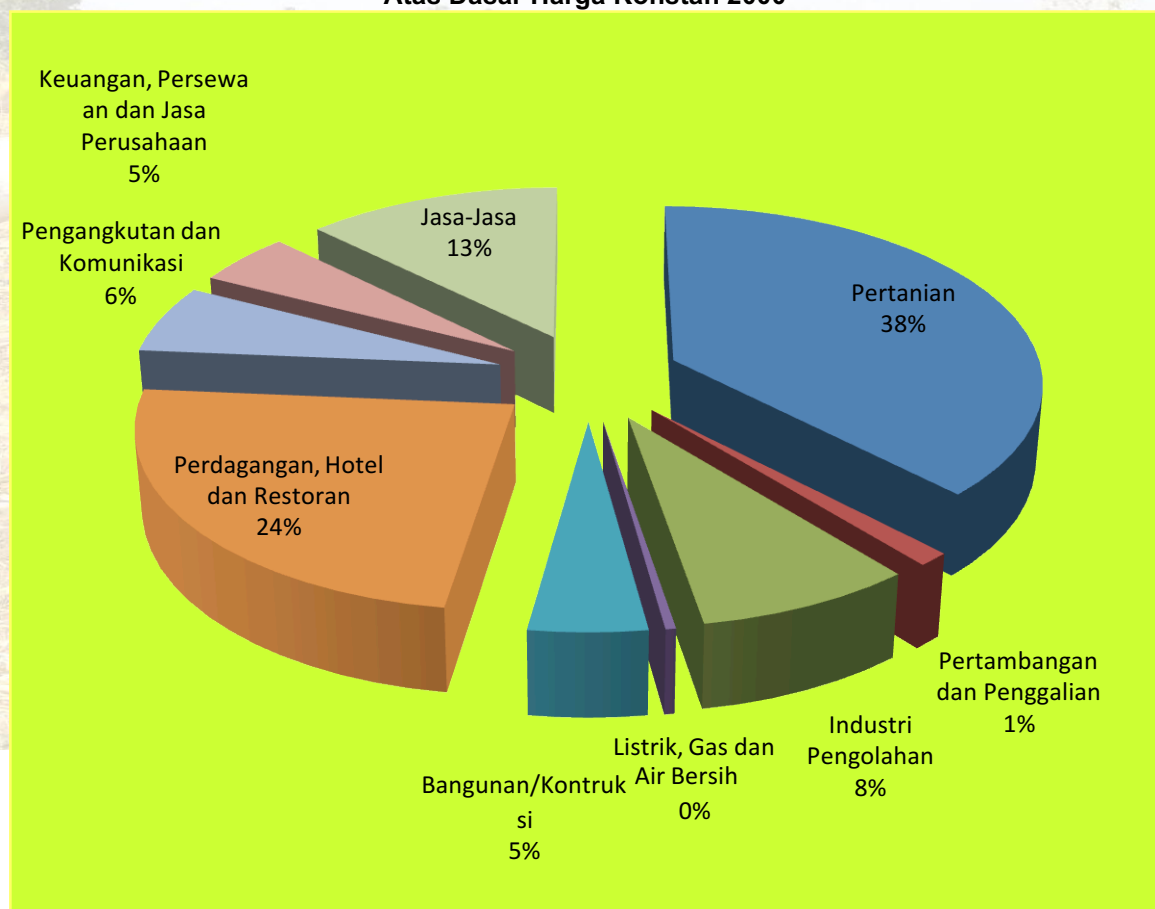
No	Sektor/Sub Sektor/ Sub Sub Sektor	PDRB (Juta Rupiah)				Kontribusi (%)			
		2011	2012*)	2013*)	2014**)	2011	2012*)	2013*)	2014**)
1	Pertanian	1.474.157,60	1.570.601,09	1.610.386,11	1.653.902,67	37,38	37,79	38,7	38,9
	1.1 Tanaman Bahan Pangan	1.022.532,34	1.053.442,42	1.074.365,02	1.095.323,55	25,93	25,35	24,49	23,77
	1.2 Tanaman Perkebunan	226.753,21	261.044,56	267.630,85	278.344,45	5,75	6,28	6,1	6,04
	1.3 Peternakan	160.223,43	181.642,00	188.907,68	196.697,10	4,06	4,37	4,45	4,71
	1.4 Kehutanan	21.776,45	26.054,55	27.767,80	28.766,25	0,55	0,63	0,63	0,62
	1.5 Perikanan	42.872,17	48.417,56	51.714,76	54.771,33	1,09	1,16	1,18	1,19
2	Pertambangan dan Penggalian	46.204,55	51.392,53	54.525,16	58.733,73	1,17	1,24	1,24	1,27
	2.1 Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2. Pertambangan tanpa Migas	15.662,43	17.167,07	17.492,82	18.170,60	0,4	0,41	0,4	0,39
	2.3 Penggalian	30.542,12	34.225,46	37.032,34	40.563,13	0,77	0,82	0,84	0,88
3	Industri Pengolahan	347.663,23	367.914,86	381.613,60	396.856,21	8,82	8,85	8,7	8,61
	3.1 Industri Migas	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2 Industri Tanpa Migas	347.663,23	367.914,86	381.613,60	396.856,21	8,82	8,85	8,7	8,61
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	14.188,77	16.478,29	17.627,31	18.841,90	0,36	0,4	0,4	0,41
	4.1 Listrik	11.212,43	13.315,00	14.307,79	15.407,66	0,28	0,32	0,33	0,33
	4.2 Gas Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.3 Air Bersih	2.976,34	3.163,29	3.319,52	3.434,25	0,08	0,08	0,08	0,07
5	Bangunan/Kontruksi	182.667,90	184.110,55	198.714,13	214.772,66	4,63	4,43	4,53	4,66
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	926.674,31	982.061,55	1.072.572,38	1.141.406,61	23,5	23,63	24,45	24,77
	6.1 Perdagangan Besar dan Eceran	727.554,23	766.943,15	839.757,45	889.223,25	18,45	18,45	19,14	19,3
	6.2 Hotel	2.577,43	2.884,32	3.090,31	3.310,00	0,07	0,07	0,07	0,07
	6.3 Restoran	196.542,65	212.234,08	229.724,61	248.873,35	4,98	5,11	5,24	5,4

**Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan
Kabupaten Lebak**

No	Sektor/Sub Sektor/ Sub Sub Sektor	PDRB (Juta Rupiah)				Kontribusi (%)			
		2011	2012*)	2013*)	2014**)	2011	2012*)	2013*)	2014**)
7	Pengangkutan dan Komunikasi	238.217,66	255.957,31	274.177,39	293.984,38	6,04	6,16	6,25	6,38
	7.1 Pengangkutan	207.665,23	222.091,90	237.225,92	252.841,15	5,27	5,34	5,41	5,49
	7.2 Komunikasi	30.552,43	33.865,40	36.951,48	37.446,76	0,77	0,81	0,84	0,81
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	186.316,98	197.627,99	211.740,14	227.545,35	4,72	4,76	4,83	4,94
	8.1 Bank	44.231,76	47.761,27	51.792,90	56.725,82	1,12	1,15	1,18	1,23
	8.2 Lembaga Keuangan Tanpa Bank	9.665,43	11.063,39	11.934,36	12.883,54	0,25	0,27	0,27	0,28
	8.3 Sewa Bangunan	110.643,34	113.221,11	120.888,67	129.124,92	2,81	2,72	2,76	2,8
	8.4 Jasa Perusahaan	21.776,45	25.582,21	27.124,21	28.811,07	0,55	0,62	0,62	0,63
9	Jasa-Jasa	505.743,45	529.999,66	566.266,08	601.548,32	12,82	12,75	12,91	13,06
	9.1 Perusahaan Umum	346.871,00	366.154,34	386.028,28	407.911,07	8,8	8,81	8,8	8,85
	9.2 Swasta	158.872,45	163.845,32	180.237,80	193.637,25	4,03	3,94	4,11	4,2
	TOTAL	3.943.610,90	4.156.143,83	4.387.622,30	4.607.591,83	100	100	100	100

Sumber : Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2015

Gambar 4.15
Kontribusi PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2014
Atas Dasar Harga Konstan 2000



Sumber : Diolah dari Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2015

4.4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak dilihat dari tahun 2011-2014 terus mengalami peningkatan baik itu sektor primer, sekunder maupun tersier. Walaupun sektor pertanian mendominasi dalam hal kontribusi PDRB, justru peningkatannya relative kecil. Sektor dengan LPE tertinggi di Kabupaten Lebak adalah bangunan dan konstruksi.

Apabila memperhatikan kecenderungan laju pertumbuhannya, pertumbuhan sektor bangunan dan konstruksi merupakan sektor dengan nilai pertumbuhan paling tinggi yaitu sekitar 8% per tahun. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya nilai investasi yang ditanamkan oleh investor terhadap sektor ini terutama investasi PMDN dan banyaknya pabrik yang kurang berkembang akibat kondisi perekonomian yang merugikan. Kondisi ini dari sisi lingkungan menguntungkan, karena kecenderungan tekanannya semakin berkurang.

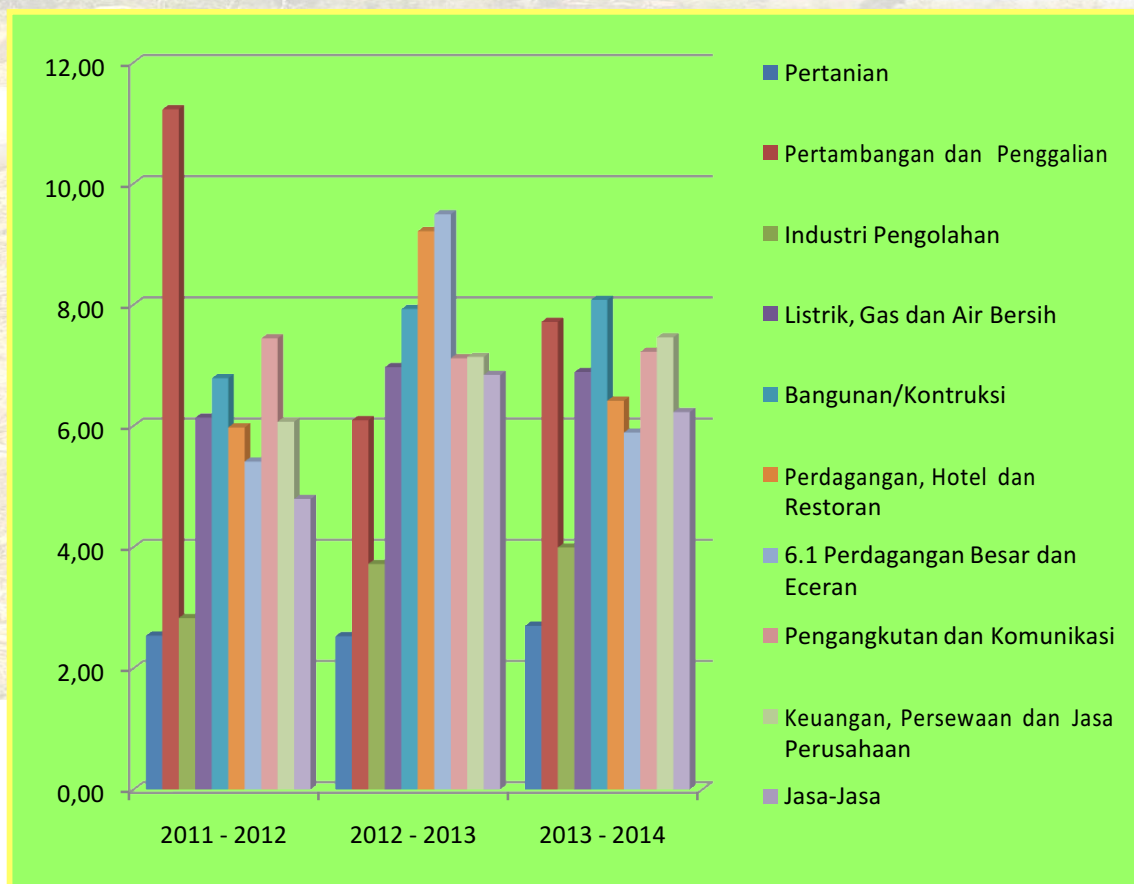
Dengan demikian, sektor usaha yang secara potensi dapat didorong pertumbuhannya adalah di sektor pertanian, yang apabila melihat potensi wilayah Kabupaten Lebak dapat diarahkan kepada kegiatan agrowisata.

Tabel 4.14
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2014
Atas Dasar Harga Konstan 2000

No	Sektor/Sub Sektor/ Sub Sub Sektor	2011 - 2012	2012 - 2013	2013 - 2014
1	Pertanian	2,54	2,53	2,70
	1.1 Tanaman Bahan Pangan	3,02	1,99	1,95
	1.2 Tanaman Perkebunan	1,51	2,52	4,00
	1.3 Peternakan	3,37	4,00	4,12
	1.4 Kehutanan	4,65	6,58	3,60
	1.5 Perikanan	4,93	6,81	7,91
2	Pertambangan dan Penggalian	11,23	6,10	7,72
	2.1 Minyak dan Gas Bumi	-	-	-
	2.2. Pertambangan tanpa Migas	1,61	1,90	3,87
	2.3 Penggalian	7,06	8,20	9,53
3	Industri Pengolahan	2,83	3,72	3,99
	3.1 Industri Migas	-	-	-
	3.2 Industri Tanpa Migas	2,83	3,72	3,99
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	6,14	6,97	6,89
	4.1 Listrik	7,75	7,46	7,69
	4.2 Gas Kota	-	-	-
	4.3 Air Bersih	3,28	4,94	3,46
5	Bangunan/Kontruksi	6,79	7,93	8,08
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,98	9,22	6,42
	6.1 Perdagangan Besar dan Eceran	5,41	9,49	5,89
	6.2 Hotel	6,91	7,14	7,11
	6.3 Restoran	7,98	8,24	8,34
7	Pengangkutan dan Komunikasi	7,45	7,12	7,22
	7.1 Pengangkutan	6,95	6,81	6,58
	7.2 Komunikasi	10,84	9,11	9,34
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,07	7,14	7,46
	8.1 Bank	7,98	8,44	9,52
	8.2 Lembaga Keuangan Tanpa Bank	6,46	7,87	7,95
	8.3 Sewa Bangunan	5,33	6,77	6,81
	8.4 Jasa Perusahaan	5,48	6,03	6,22
9	Jasa-Jasa	4,80	6,84	6,23
	9.1 Perusahaan Umum	5,56	5,43	5,67
	9.2 Swasta	3,13	10,00	7,43
	TOTAL	5,39	5,57	5,01

Sumber : Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2015

Gambar 4.16
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2014
Atas Dasar Harga Konstan 2000



Sumber : Diolah dari Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2015

4.4.3 Struktur Perekonomian Wilayah

Sektor pertanian hingga tahun 2014 masih mendominasi struktur perekonomian di Kabupaten Lebak. Proporsi nilai sektor pertanian terhadap total PDRB pada tahun 2014 (33,68%) sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (33,38). Hal ini kemungkinan dipicu oleh kenaikan produksi di sektor Tabama (Padi) yang mengalami peningkatan produksi mencapai 14 %. Sektor perdagangan, Hotel dan restoran tetap menduduki urutan kedua dan proporsinya pun makin meningkat. Selain itu sektor yang mengalami peningkatan adalah sektor bangunan menjadi 5,24 %, diikuti oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 4,65 %. Sedangkan sektor -sektor lainnya (pertambangan, Industri, Listrik, angkutan dan jasa-jasa) mengalami sedikit penurunan.

4.4.4 Keuangan Daerah

Dari ketiga kelompok pendapatan daerah dalam struktur APBD Kabupaten Lebak, Dana Perimbangan masih berperan besar dalam pembentukan struktur APBD. Tercatat selama lima tahun terakhir, kontribusi Dana Perimbangan terhadap APBD Kabupaten Lebak rata-rata tiap tahunnya mencapai 77,57%. Hal ini menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap pembiayaan dari Pemerintah Pusat. Mengingat otonomi daerah telah mengamankan kemandirian daerah, khususnya dalam hal pendanaan, upaya terhadap peningkatan PAD masih menjadi pekerjaan rumah sekaligus agenda utama bagi pemerintah daerah.

Sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 22,59%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata per tahun realisasi Dana Perimbangan yang hanya 10,62%. Melihat pertumbuhan PAD yang cukup menggembirakan ini tentunya menjadi angin segar tersendiri bagi pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lebak. Hal ini sekaligus memberi bukti bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam menggalang PAD mulai menunjukkan hasil. Secara lengkap, rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tersaji pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 4.15

Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lebak
Tahun Anggaran 2010-2014
(Rupiah)

	Tahun Anggaran				
	2010	2011	2012	2013	2014
Penerimaan (000. Rp)	1.001.808.229,91	1.287.670.737,99	1.387.896.558,33	1.577.914.289,39	1.796.231.788,25
Pengeluaran (000. Rp)	899.703.320,26	1.192.088.004,16	1.285.425.873,86	1.519.338.642,90	1.725.537.969,21

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak

Tabel 4.16

Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lebak
Tahun Anggaran 2010-2014
(Persen)

	Tahun Anggaran				
	2010	2011	2012	2013	2014
Penerimaan (000. Rp)	14,21	18,26	19,68	22,38	25,47
Pengeluaran (000. Rp)	13,59	18,00	19,41	22,94	26,06

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak

Tabel 4.17

Laju Pertumbuhan

Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lebak
Tahun Anggaran 2010-2014

	Tahun Anggaran			
	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
Penerimaan (000. Rp)	28,53	7,78	13,69	13,84
Pengeluaran (000. Rp)	32,50	7,83	18,20	13,57

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak

Gambar 4.17
Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lebak
Tahun Anggaran 2010-2014
(Rupiah)



Sumber: Diolah dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak

Gambar 4.18
Penerimaan Pemerintah Kabupaten Lebak
Tahun Anggaran 2010-2014 (Persen)



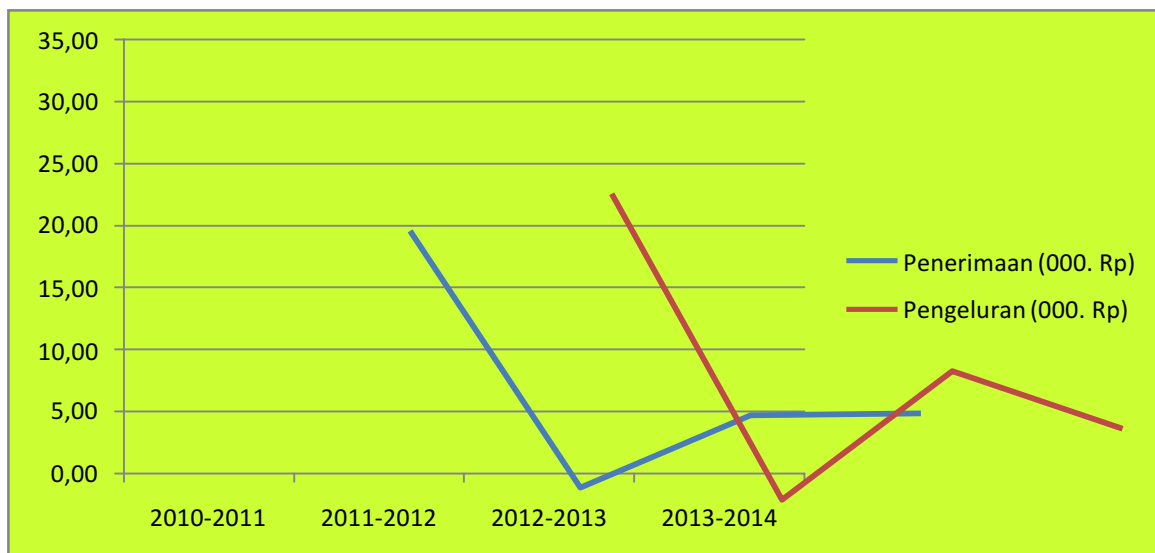
Sumber: Diolah dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak

Gambar 4.19
Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lebak
Tahun Anggaran 2010-2014 (Persen)



Sumber: Diolah dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak

Gambar4.20
Laju Pertumbuhan
Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lebak
Tahun Anggaran 2010-2014



Sumber: Diolah dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak

4.5 KONDISI SUB SEKTOR PETERNAKAN

4.5.1 Tugas Pokok Dinas Peternakan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 10 Tahun 2007 Tentang "Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak" telah ditetapkan mengenai Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak. Salah satu dari pembentukan organisasi tersebut adalah Dinas Peternakan Kabupaten Lebak. Berdasarkan perda tersebut diketahui bahwa:

1. Dinas Peternakan adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah dibidang Peternakan.
2. Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung- jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan azas otonomi serta melaksanakan Tugas Pembantuan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 3 pada Peraturan Daerah tersebut, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

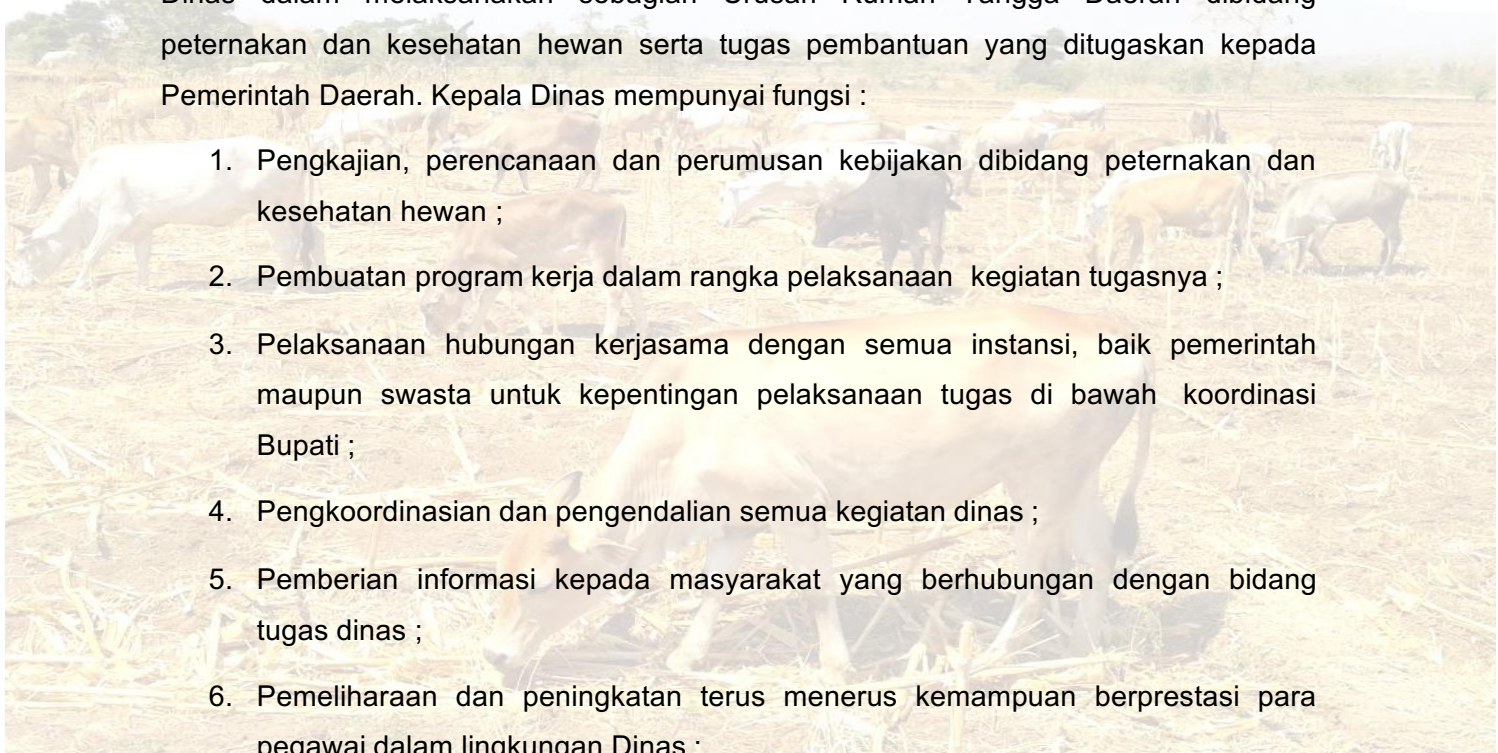
1. Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang peternakan dan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh Bupati ;
2. Penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pengendalian dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
3. Penyusunan hasil pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi kewenangan Daerah ;
4. Penyusunan standar pembibitan yang menjadi kewenangan Daerah ;
5. Penyusunan program diklat sumberdaya manusia/aparat peternakan yang meliputi teknis fungsional, keterampilan dan kejuruan ;
6. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan perijinan serta usaha peternakan ;
7. Pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
8. Penyelenggaraan usaha pengelolaan dibidang peternakan dan kesehatan hewan
9. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi peternakan yang meliputi teknologi peternakan dan kesehatan hewan di tingkat usaha ternak ;
10. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas ;
11. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Unsur-unsur Organisasi Dinas Peternakan, terdiri dari:

1. Pimpinan adalah Kepala Dinas ;
2. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris;
3. Pelaksana adalah Kepala-kepala Bidang, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat :
 - a Sub Bagian Keuangan ;
 - b Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c Sub Bagian Program.
- c. Bidang Produksi :
 - a Seksi Perbibitan dan Pakan Ternak ;
 - b Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan ;
 - c Seksi Pengembangan Teknologi Peternakan.
- d. Bidang Kesehatan Hewan :
 - a Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan ;
 - b Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
 - c Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Hewan.
- e. Bidang Sarana dan Usaha Peternakan :
 - a Seksi Bina Usaha Peternakan ;
 - b Seksi Kelembagaan Peternak ;
 - c Seksi Obat-obatan dan Alsinak.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dibidang peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Pengkajian, perencanaan dan perumusan kebijakan dibidang peternakan dan kesehatan hewan ;
2. Pembuatan program kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugasnya ;
3. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas di bawah koordinasi Bupati ;
4. Pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan dinas ;
5. Pemberian informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan bidang tugas dinas ;
6. Pemeliharaan dan peningkatan terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dalam lingkungan Dinas ;
7. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan mengenai bidang peternakan dan kesehatan hewan kepada Bupati sebagai bahan untuk menentukan kebijakan atau membuat keputusan ;
8. Pertanggungjawaban tugas Kepala Dinas secara teknis administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian dan program. Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan administrasi umum di lingkungan Dinas ;
2. Melaksanakan dan menyusun pedoman serta petunjuk tata laksana administrasi umum ;
3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian serta program ;
4. Menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Dinas ;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi :

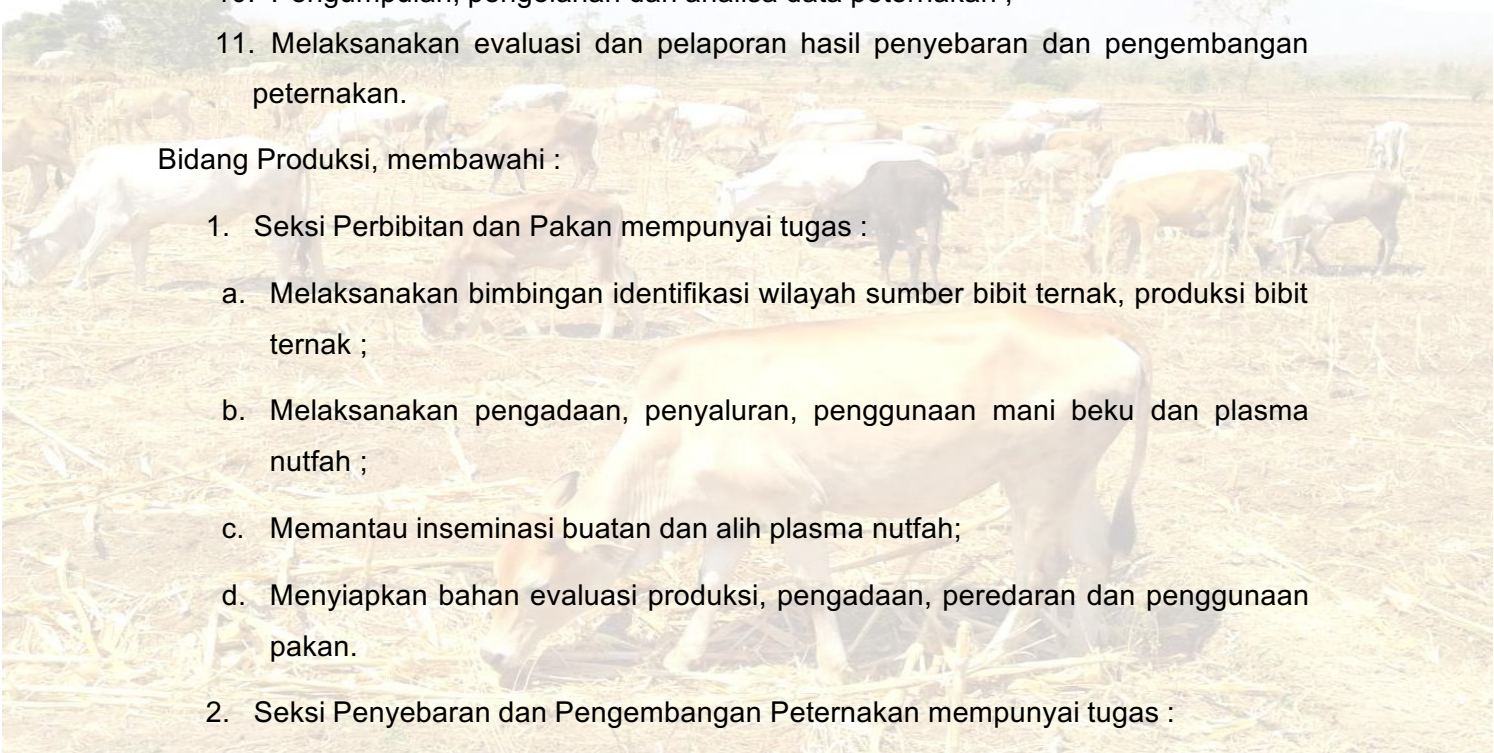
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Program.

Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan Administrasi Umum, kearsipan, surat menyurat, rumah tangga, protokoler, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi perlengkapan kantor, administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan ;
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas serta pengelolaan administrasi keuangan ;
3. Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengolahan data dan statistik serta evaluasi dan penyusunan laporan.

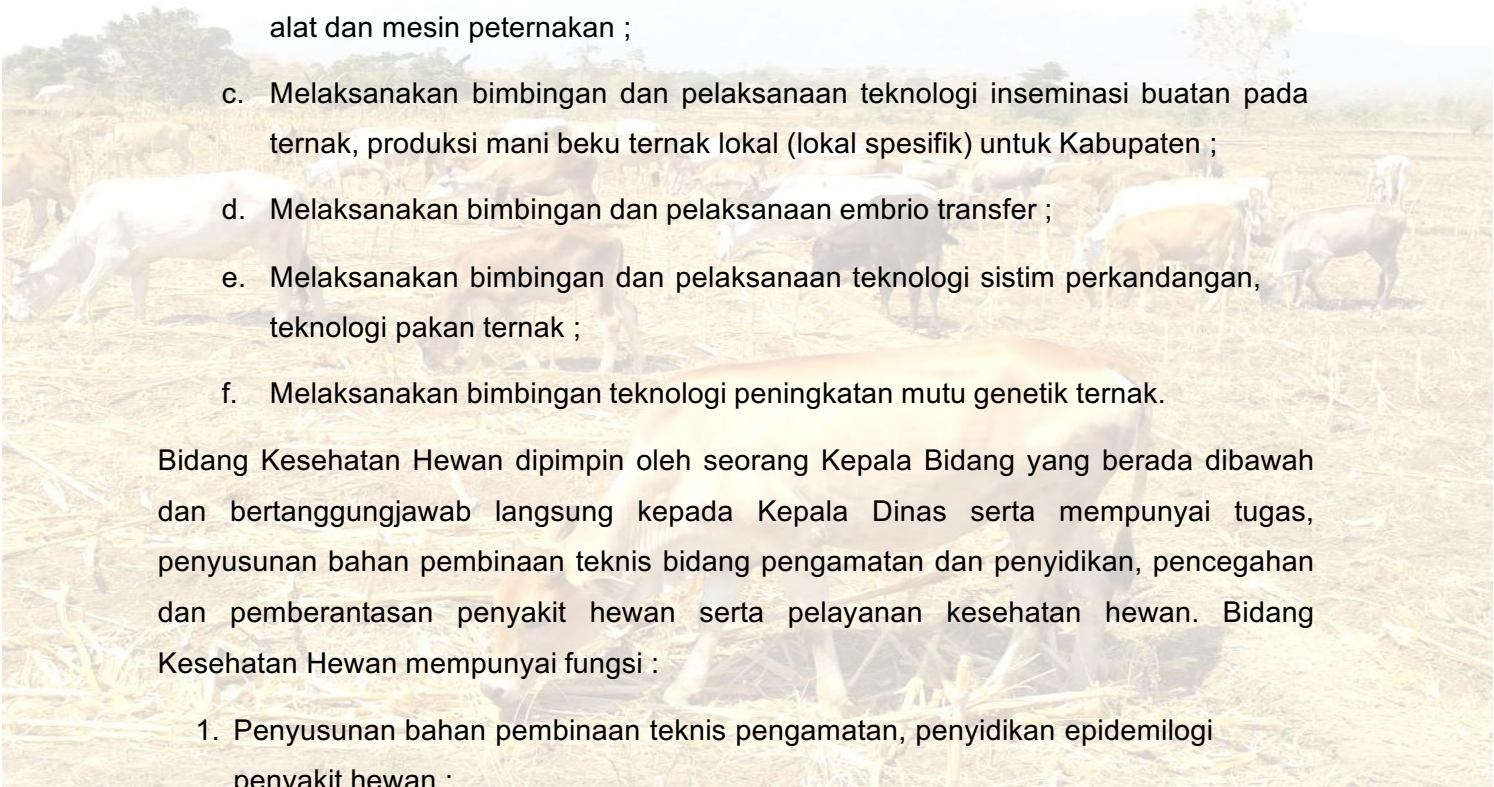
Bidang Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional di bidang produksi peternakan yang meliputi perbibitan dan pakan ternak, penyebaran dan pengembangan peternakan, dan pengembangan teknologi peternakan. Bidang Produksi mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pembinaan umum di bidang produksi peternakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas ;
2. Pembimbingan produksi bibit dan mutu ternak, peredaran, penggunaan dan pengawasan mutu pakan ternak, penyiapan dan penerapan teknologi peternakan serta pendayagunaan alat dan mesin peternakan ;
3. Melaksanakan bimbingan reproduksi ;
4. Melaksanakan bimbingan pembibitan ternak ;
5. Melaksanakan bimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan ternak ;
6. Melaksanakan bimbingan pengkajian dan penerapan teknologi ;
7. Melaksanakan identifikasi dan penyiapan lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan ;
8. Melaksanakan bimbingan redistribusi ternak pemerintah ;

- 
9. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk dan olahan peternakan ;
 10. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data peternakan ;
 11. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil penyebaran dan pengembangan peternakan.

Bidang Produksi, membawahi :

1. Seksi Perbibitan dan Pakan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan bimbingan identifikasi wilayah sumber bibit ternak, produksi bibit ternak ;
 - b. Melaksanakan pengadaan, penyaluran, penggunaan mani beku dan plasma nutfah ;
 - c. Memantau inseminasi buatan dan alih plasma nutfah;
 - d. Menyiapkan bahan evaluasi produksi, pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan.
2. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan bimbingan identifikasi penyebaran dan pengembangan peternakan ;
 - b. Menyiapkan lokasi peternakan dan menata penyebaran ternak serta mengurus redistribusi ternak ;
 - c. Melaksanakan bimbingan identifikasi penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan ternak spesifik dan unggulan Daerah ;
 - e. Melaksanakan bimbingan penyiapan wilayah dan peternak di Daerah penyebaran dan pengembangan peternakan ;
 - f. Melaksanakan bimbingan penataan peternakan ;
 - g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penyebaran dan pengembangan peternakan.
3. Seksi Pengembangan Teknologi Peternakan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan bimbingan uji lapangan dan penerapan produksi serta pengkajian penerapan pelaksanaan kaji terap teknologi dibidang peternakan ;

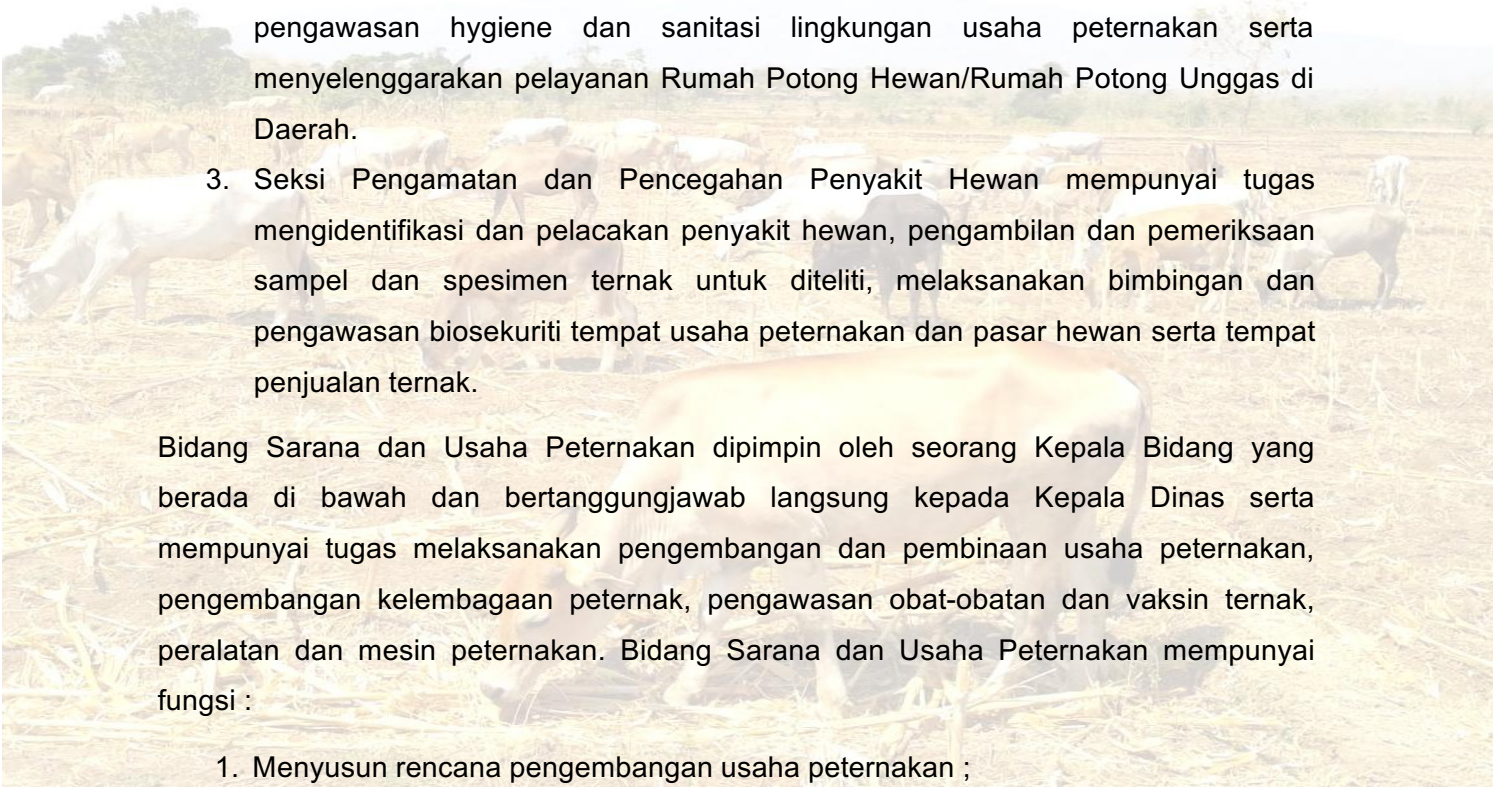
- 
- b. Melaksanakan bimbingan pengembangan produksi, rekayasa dan penggunaan alat dan mesin peternakan ;
 - c. Melaksanakan bimbingan dan pelaksanaan teknologi inseminasi buatan pada ternak, produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) untuk Kabupaten ;
 - d. Melaksanakan bimbingan dan pelaksanaan embrio transfer ;
 - e. Melaksanakan bimbingan dan pelaksanaan teknologi sistim perkandungan, teknologi pakan ternak ;
 - f. Melaksanakan bimbingan teknologi peningkatan mutu genetik ternak.

Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas, penyusunan bahan pembinaan teknis bidang pengamatan dan penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pelayanan kesehatan hewan. Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan pembinaan teknis pengamatan, penyidikan epidemiologi penyakit hewan ;
2. Penyusunan bahan pembinaan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
3. Penyusunan bahan pembinaan teknis pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan ;
4. Penyusunan bahan pembinaan teknis bimbingan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner.

Bidang Kesehatan Hewan, membawahi :

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan bimbingan teknis pengobatan penyakit hewan ;
 - b. Melaksanakan bimbingan, mengamati, mencatat dan membuat peta penyakit, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan ;
 - c. Melaksanakan bimbingan pendirian, pengelolaan dan rujukan Laboratorium Kesehatan Hewan ;
 - d. Melaksanakan pemantauan lalu lintas hewan, pangan asal hewan, membimbing vaksinasi, pemberantasan dan pelaporan penyakit hewan.

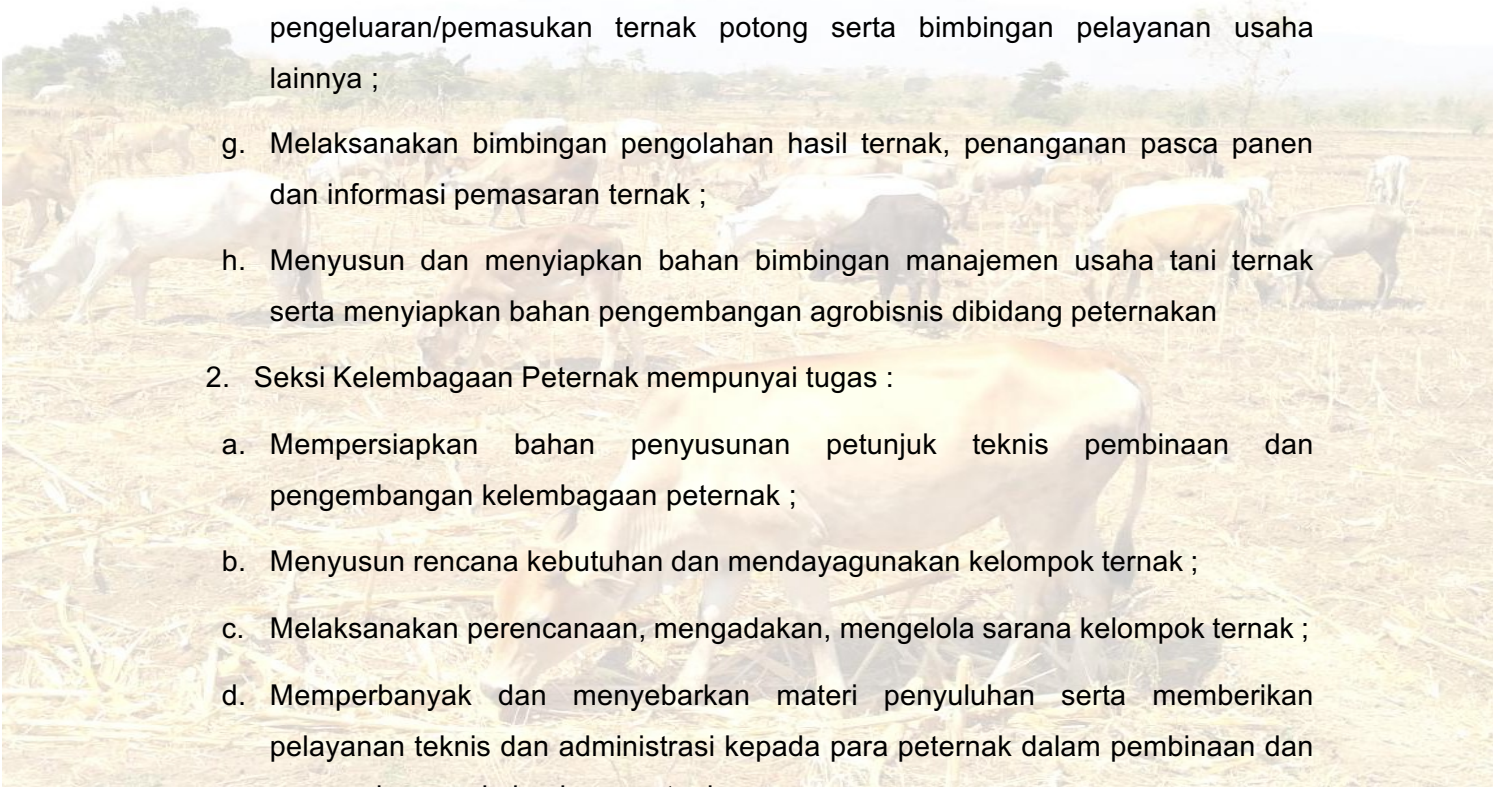
- 
2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas membimbing pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan serta menyelenggarakan pelayanan Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas di Daerah.
 3. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Hewan mempunyai tugas mengidentifikasi dan pelacakan penyakit hewan, pengambilan dan pemeriksaan sampel dan spesimen ternak untuk diteliti, melaksanakan bimbingan dan pengawasan biosekuriti tempat usaha peternakan dan pasar hewan serta tempat penjualan ternak.

Bidang Sarana dan Usaha Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pembinaan usaha peternakan, pengembangan kelembagaan peternak, pengawasan obat-obatan dan vaksin ternak, peralatan dan mesin peternakan. Bidang Sarana dan Usaha Peternakan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana pengembangan usaha peternakan ;
2. Melaksanakan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan kelembagaan peternak ;
3. Melaksanakan pengawasan penggunaan dan peredaran obat-obatan serta vaksin ternak ;
4. Melaksanakan bimbingan, penggunaan dan pengembangan peralatan mesin peternakan.

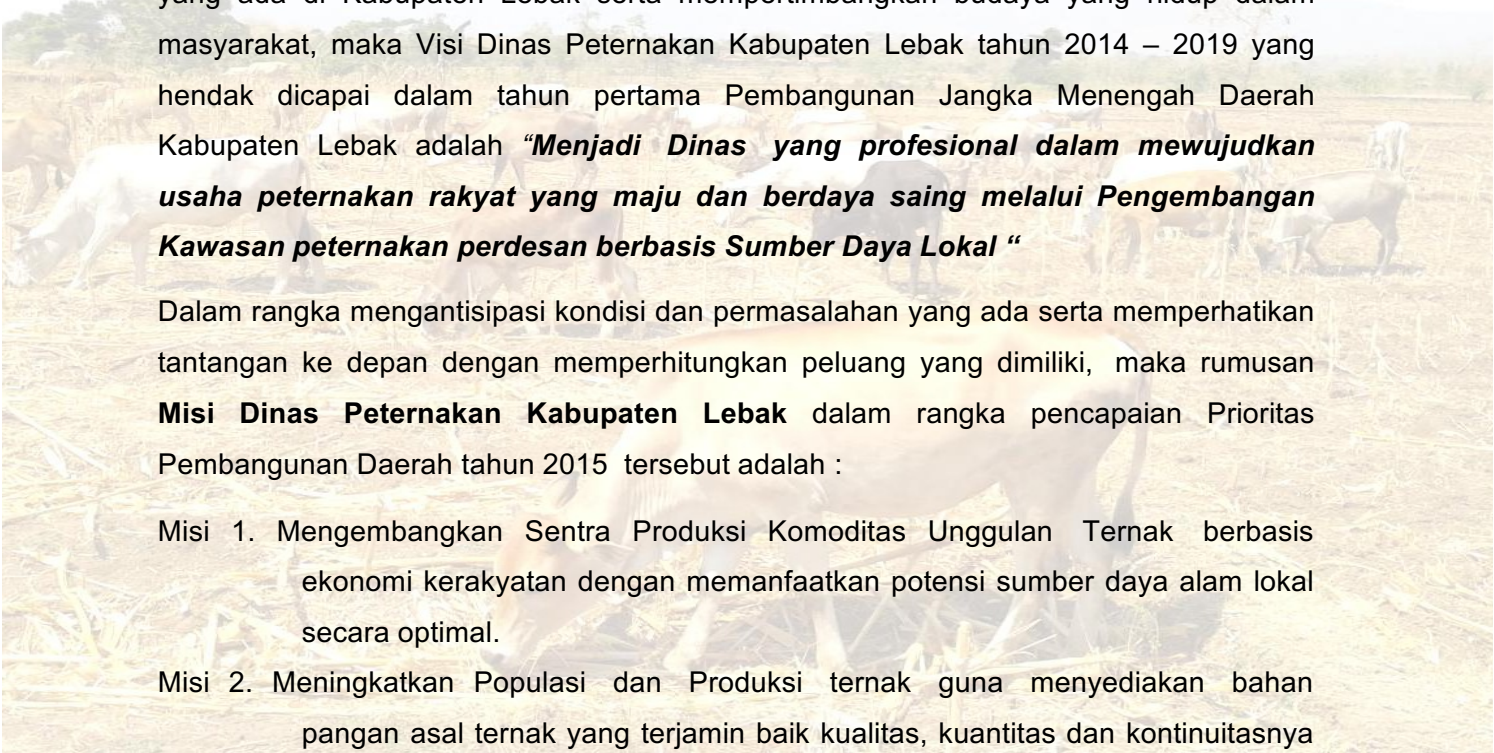
Bidang Sarana dan Usaha Peternakan, membawahi :

1. Seksi Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pembinaan Usaha Peternakan ;
 - b. Melaksanakan pemantauan sumber daya peternakan ;
 - c. Melaksanakan pelayanan usaha peternakan ;
 - d. Melaksanakan bimbingan pengolahan dan pemasaran peternakan ;
 - e. Melaksanakan bimbingan usaha ternak, memantau tata lahan dan lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan), ketenagaan, perkreditan dan investasi usaha peternakan ;

- 
- f. Menyelenggarakan urusan perijinan usaha peternakan dan perijinan pengeluaran/pemasukan ternak potong serta bimbingan pelayanan usaha lainnya ;
 - g. Melaksanakan bimbingan pengolahan hasil ternak, penanganan pasca panen dan informasi pemasaran ternak ;
 - h. Menyusun dan menyiapkan bahan bimbingan manajemen usaha tani ternak serta menyiapkan bahan pengembangan agrobisnis dibidang peternakan
2. Seksi Kelembagaan Peternak mempunyai tugas :
 - a. Mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kelembagaan peternak ;
 - b. Menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan kelompok ternak ;
 - c. Melaksanakan perencanaan, mengadakan, mengelola sarana kelompok ternak ;
 - d. Memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para peternak dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani ;
 - e. Melaksanakan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan peternak.
 3. Seksi Obat-obatan dan Alsinak, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan obat hewan dan vaksin ;
 - b. Melaksanakan bimbingan pembuatan dan penggunaan peralatan mesin peternakan serta sarana peternakan lainnya.

4.5.2 Arah Pembangunan kebijakan Sektor Peternakan

Mengacu kepada Visi Kabupaten Lebak yang ditetapkan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak 2014-2019, tercantum visi Kabupaten Lebak yaitu “ **Menuju Kabupaten Lebak yang maju dan berdaya saing melalui pemantapan pembangunan perdesaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan.** Selanjutnya salah satu prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tema RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2015 adalah **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Penguatan Ekonomi Daerah.**



Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Lebak serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Dinas Peternakan Kabupaten Lebak tahun 2014 – 2019 yang hendak dicapai dalam tahun pertama Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak adalah ***“Menjadi Dinas yang profesional dalam mewujudkan usaha peternakan rakyat yang maju dan berdaya saing melalui Pengembangan Kawasan peternakan perdesaan berbasis Sumber Daya Lokal “***

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka rumusan **Misi Dinas Peternakan Kabupaten Lebak** dalam rangka pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2015 tersebut adalah :

- Misi 1. Mengembangkan Sentra Produksi Komoditas Unggulan Ternak berbasis ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal secara optimal.
- Misi 2. Meningkatkan Populasi dan Produksi ternak guna menyediakan bahan pangan asal ternak yang terjamin baik kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya dengan harga terjangkau serta semakin berperan dalam menyediakan kebutuhan masyarakat.
- Misi 3. Menciptakan Kawasan yang Kondusif bagi Peningkatan Status Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Keamanan serta Ketahanan Pangan Asal Hewan.
- Misi 4. Menumbuhkan Usaha Kelompok yang berorientasi Pasar yang didukung oleh tersedianya sarana prasarana usaha Peternakan guna peningkatan pendapatan peternak.
- Misi 5. Melayani masyarakat peternakan dengan profesional melalui kemitraan strategis

Sedangkan **Tujuan dan sasaran** pembangunan peternakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengembangan kawasan peternakan yang telah terintegrasi kepada kebijakan tata ruang

Sasaran yang dicapai adalah:

- Meningkatnya jumlah kawasan peternakan dan berkembangnya ternak bantuan pemerintah serta meningkatnya populasi dan produksi ternak

- Meningkatnya kelompok dalam pengembangan kawasan yang memiliki kelayakan teknis, sosial dan ekonomis

2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas produk unggulan kerbau.

Sasaran yang dicapai adalah:

- Terfasilitasinya dan Peningkatan Sarana Pembibitan Ternak Kerbau
- Produksi Bibit Ternak untuk Pengembangan Kawasan di masa mendatang

3. Meningkatkan produktivitas ternak

Sasaran yang dicapai adalah :

- Meningkatnya angka kebuntingan dan kelahiran ternak
- Meningkatkan Konsumsi protein Hewani
- Meningkatnya Konsumsi Pangan Asal Hewan berupa Daging dan Telur

4. Meningkatnya Sistem Kesehatan Hewan yang Komprehensif

Sasaran yang dicapai adalah :

- Meningkatnya Kesehatan ternak melalui Pelayanan pengobatan ternak.
- Terawasinya Kawasan budidaya Ternak yang terhindar dari Penyakit Hewan menular
- Diperolehnya Produk Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

5. Meningkatkan Pendapatan peternak

Sasaran yang dicapai adalah :

- Peningkatan pendapatan Peternak dengan NTP

6. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang peternakan

Sasaran yang dicapai adalah :

- Penyusunan Perencanaan Pembangunan Peternakan
- Peningkatan Kinerja Aparatur Peternakan
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk mendukung tujuan sasaran pembangunan tersebut, terdapat **4 strategi pembangunan peternakan** yaitu :

1. Peningkatan Populasi Ternak Unggulan dan skala Usaha pemilikan ternak secara intensif dan Ekstensif
2. Pengembangan Wilayah berdasarkan Komoditas Ternak Unggulan

3. Peningkatan Produktivitas Ternak dan Teknologi Peternakan dengan Pendekatan Agribisnis
4. Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan menular dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Adapun **Kebijakan Dinas Peternakan** Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan peningkatan Produksi Peternakan Kerbau, Kambing, Domba yang berdampak bagi perekonomian.
2. Kebijakan pengembangan komoditi unggulan Ternak Kerbau yang berskala Ekonomis
3. Kebijakan Pengembangan Kawasan Usaha Peternakan
4. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan (Perbibitan, Pemasaran, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner)
5. Kebijakan Pengembangan infrastruktur (lahan,air,sarana dan prasarana) dan agroindustri diperdesaan.

Selanjutnya operasional kebijakan pembangunan peternakan di Kabupaten Lebak, dilaksanakan melalui program-program pembangunan dan Kegiatan, dimana program tersebut secara teknis sejalan dengan program Kementerian Pertanian, serta program pembangunan Pemerintah Kabupaten Lebak. Adapun program dan kegiatan pada tahun 2015 tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak (DAK)
 - Kegiatan Pembibitan dan perawatan ternak
 - Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
 - Kegiatan Pengembangan agribisnis peternakan
 - Kegiatan Kegiatan PAP dana tugas pembantuan
2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan menular
 - Kegiatan Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah
 - Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemberantasan Rabies dan Avian influenza

3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

- Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga petani
- Kegiatan Penyuluhan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

4. Program Peningkatan Penerapan teknologi Peternakan

- Kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan
- Kegiatan Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

- Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan (DAK)
- Kegiatan Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Kegiatan Penyusunan renja SKPD

7. Program Perencanaan Pembangunan ekonomi

- Kegiatan Perencanaan pembangunan ekonomi

8. Program Peningkatan dan Prasarana Aparatur


- Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan surat menyurat
- Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

- 
- Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
 - Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
 - Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor
 - Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran

11. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.5.3 Perkembangan Nilai Pendapatan Regional Sub Sektor Peternakan

Berdasarkan kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2011-2014 atas harga konstan terungkap bahwa kontribusi sektor pertanian pada tahun 2011 - 2014 merupakan sektor yang paling dominan perannya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lebak 38,90 % pada tahun 2014. Untuk sub sektor peternakan sendiri menyumbang kontribusi sekitar 4 %. Baik secara umum pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak khususnya sub sektor peternakn tahun 2011-2014 mengalami pertumbuhan yang positif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 4.18

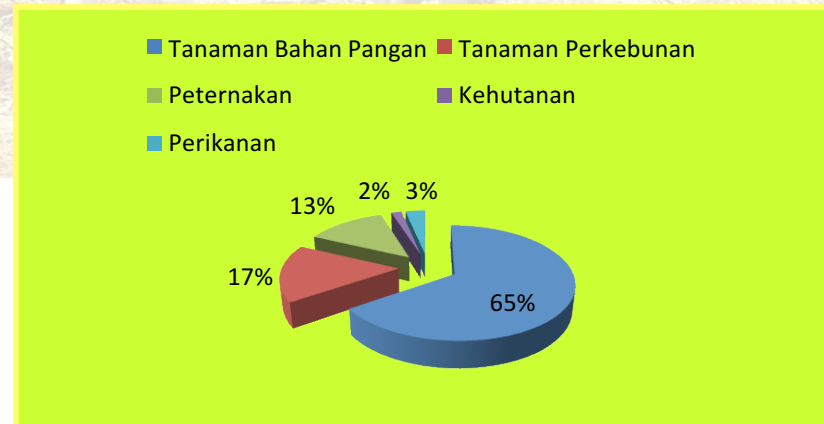
Kontribusi PDRB Sektor Peternakan
Kabupaten Lebak Tahun 2011-2014 Atas Dasar Harga Konstan 2000

Sektor/Sub Sektor/ Sub Sub Sektor	PDRB (Juta Rupiah)				Kontribusi (%)			
	2011	2012*)	2013*)	2014**)	2011	2012*)	2013*)	2014**)
Pertanian	1.474.157,60	1.570.601,09	1.610.386,11	1.653.902,67	37,38	37,79	38,7	38,9
1.1 Tanaman Bahan Pangan	1.022.532,34	1.053.442,42	1.074.365,02	1.095.323,55	25,93	25,35	24,49	23,77
1.2 Tanaman Perkebunan	226.753,21	261.044,56	267.630,85	278.344,45	5,75	6,28	6,1	6,04
1.3 Peternakan	160.223,43	181.642,00	188.907,68	196.697,10	4,06	4,37	4,45	4,71
1.4 Kehutanan	21.776,45	26.054,55	27.767,80	28.766,25	0,55	0,63	0,63	0,62
1.5 Perikanan	42.872,17	48.417,56	51.714,76	54.771,33	1,09	1,16	1,18	1,19

Sumber : Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2015

Gambar 4.21

Kontribusi PDRB Sektor Pertanian
Kabupaten Lebak Tahun 2011-2014 Atas Dasar Harga Konstan 2000



Sumber : Diolah dari Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2015

4.5.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan

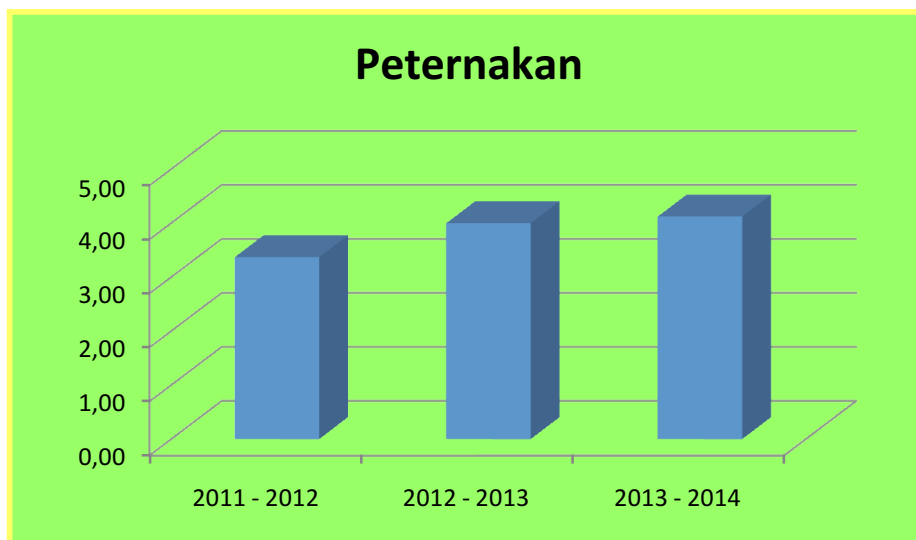
Sektor pertanian sebagai sektor dengan kontribusi tertinggi memiliki nilai laju pertumbuhan ekonomi sekitar 2,70% dan sub sektor peternakan sekitar 4,12% pada tahun 2013-2014. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 4.19
Laju Pertumbuhan PDRB
Sub Sektor Peternakan Kabupaten Lebak Tahun 2014
Atas Dasar Harga Konstan 2000

Sektor/Sub Sektor/ Sub Sub Sektor	2011 - 2012	2012 - 2013	2013 - 2014
Pertanian	2,54	2,53	2,70
1.1 Tanaman Bahan Pangan	3,02	1,99	1,95
1.2 Tanaman Perkebunan	1,51	2,52	4,00
1.3 Peternakan	3,37	4,00	4,12
1.4 Kehutanan	4,65	6,58	3,60
1.5 Perikanan	4,93	6,81	7,91

Sumber : Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2015

Gambar 4.22
Laju Pertumbuhan PDRB
Sub Sektor Peternakan Kabupaten Lebak Tahun 2014
Atas Dasar Harga Konstan 2000

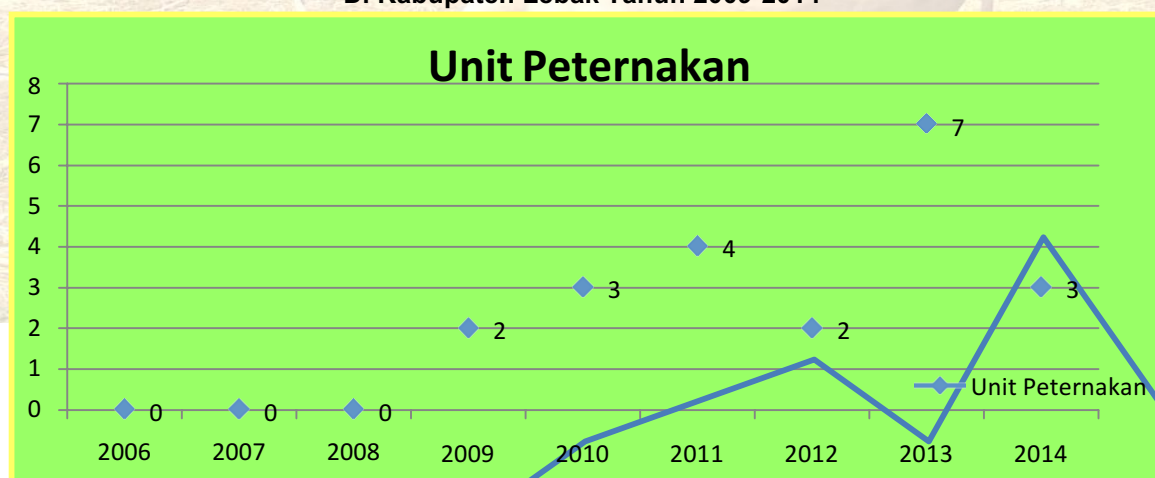


Sumber : Diolah dari Kabupaten Lebak Dalam Angka Tahun 2015

4.5.5 Jumlah, Luasan Unit dan Ijin Usaha Peternakan

Berdasarkan data dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Lebak dapat diketahui bahwa unit usaha peternakan mulai berkembang di Kabupaten Lebak sejak tahun 2009 dengan luas sekitar 2.550.000 m². kondisi ini mengalami naik turun hingga 2014. Selain itu disini sudah ada beberapa ijin usaha peternakan dari tahun 2009 hingga 2014. Jenis ternak yang dikembangkan adalah jenis ternak unggas ayam. Ijin usaha peternakan ini tersebar di beberapa kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Gambar 4.23
Jumlah Unit Usaha Peternakan
Di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014



Sumber : Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Lebak

Gambar 4.24
Luasan Unit Usaha Peternakan
Di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014



Sumber : Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Lebak

Tabel 4.20

Jumlah Ijin Usaha Peternakan di Kabupaten Lebak Tahun 2009

No	Nama Perusahaan Pemohon/Pemilik/Direktur	Alamat Perusahaan/Pemohon	Lokasi Objek Ijin	Jenis Objek Ijin	Luas (M ²)	Jumlah Retribusi	NO. / TGL. SURAT IJIN	KETERANGAN (TGL. SETOR)
1	EKO P SANDJOJO, B.SE, MBA (a.n PT. SIERAD PRODUCE, Tbk)	Jl. Raya Parung Bogor KM.19 Jabon Mekar Parung Kab. Bogor	Blok. Desa Lebak Asih Kec. Curugbitung Kab. Lebak, Blok. Sukarame Kec. Sajira Kab. Lebak	Peternakan Ayam Terpadu	2.500.000	125.050.000	503/89- IPPT/KPPT/2009 15 - 07 - 2009	15 - 07 - 2009
2	LEO AGUNG CAHYA UDYANA (PT. PRAMANA AGRIRESORCES)	Jl. Pangeran Jayakarta 115 C1-3 RT.001 RW.07 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat 10730	Kp. Jambu Bol Ds. Muaradua Ke. Cikulur	Peternakan/Penggemukan Sapi	50.000	2.550.000	503/174- IPPT/KPPT/2009 28 - 12 - 2009	29 - 12 - 2009
					2.550.000	127.600.000		

Sumber : Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPM PPT) Kabupaten Lebak

Tabel 4.21

Jumlah Ijin Usaha Peternakan di Kabupaten Lebak Tahun 2010

No	Nama Perusahaan Pemohon/Pemilik/Direktur	Alamat Perusahaan/Pemohon	Lokasi Objek Ijin	Jenis Objek Ijin	Luas (M ²)	Jumlah Retribusi	NO. / TGL. SURAT IJIN	KETERANGAN (TGL. SETOR)
1	H. AHMAD JAELANI	Kp. Cigareweuk RT.08 RW.03 Ds. Cilangkap Kec. Maja	Kp. Cigareweuk RT.08 RW.03 Ds. Cilangkap Kec. Maja	Kandang Ayam	753	426.500	503/83- IPPT/KPPT/2010 28 - 04 - 2010	30 - 04 - 2010
2	ARMAN ALI an. PT. PADMA KARYA PRIMA	Kp. Rawahingkik RT.02 RW.01 Ds. Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor	Blok Pasir Jaran Ds. Kecapi dan Blok Lebong Ds. Sanglang Kec. Maja Kab. Lebak	Peternakan Ayam	180.000	9.050.000	503/154- IPPT/KPPT/2010 15 - 09 - 2010	14 - 09 - 2010
3	MICHAEL W DHARMAWAN an. PT. SINTA PRIMA FEEDMIL	Jl. Raya Narogong KM.18 Limusnunggal Cileungsi-Bogor	Blok Ds. Cilayang Kec. Curug Bitung Kab. Lebak	Peternakan Ayam	50.000	2.550.000	503/155- IPPT/KPPT/2010 15 - 09 - 2010	14 - 09 - 2010
Total (3 Perijinan)					753	12.026.500		

Sumber : Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPM PPT) Kabupaten Lebak

Tabel 4.22

Jumlah Ijin Usaha Peternakan di Kabupaten Lebak Tahun 2011

No	Nama Perusahaan Pemohon/Pemilik/Direktur	Alamat Perusahaan/Pemohon	Lokasi Objek Ijin	Jenis Objek Ijin	Luas (M ²)	Jumlah Retribusi	NO. / TGL. SURAT IJIN	KETERANGAN (TGL. SETOR)
1	I. WAYAN SUGIARTO / A.N. PT. CHAROEN POKHPAND INDONESIA, Tbk	Jl. Ancol VIII No. 1 Jakarta 14430	Blok Ds. Jagabaya Kec. Warunggunung	Peternakan Ayam	85.000	-	503/54- IPPT/KPPT/2011 05 - 05 - 2011	-
2	EKO P. SANDJOJO, BSEE.,M.BA / An. SIERAD PRODUCE, Tbk	Gedung Plaza City View Lt.1 Jl. Kemang Timur No.22 Jaksel 12510	Blok. Cimanjangan Ds. Lebak Asih Kec. Curugbitung	Pembangunan Hatchery dan Fasilitas Pendukungnya	460.000	-	503/31- IPPT/KPPT/2011 15 - 03 - 2011	-
3	WAYAN SUGIARTO, SH A.N. PT. CHAROEN POKHPAND INDONESIA, Tbk	Jl. Ancol VIII No. 1 Jakarta 14430	Blok Desa Cilayang Kec. Maja	Peternakan Ayam	11.000	-	503/167- IPPT/KPPT/2011 06 - 12 - 2011	-
Total (3 Perijinan)					556.000			

Sumber : Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Lebak

Tabel 4.23

Jumlah Ijin Usaha Peternakan di Kabupaten Lebak Tahun 2012

No	Nama Perusahaan Pemohon/Pemilik/Direktur	Alamat Perusahaan/Pemohon	Lokasi Objek Ijin	Jenis Objek Ijin	Luas (M ²)	Jumlah Retribusi	NO. / TGL. SURAT IJIN	KETERANGAN (TGL. SETOR)
1	" PT. PADMA KARYA PRIMA " / ARMAN ALI	Kampung Rawahingkik RT 002 RW 001 Desa Cilimusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor	Blok Ciajer Kampung Cibedil Desa Sangiang Kecamatan Maja	Peternakan Ayam	160.000	-	503/57- IPPT/KPPT/2012 05 - 03 - 2012	-
2	" PT. PADMA KARYA PRIMA " / ARMAN ALI	Kampung Rawahingkik RT 002 RW 001 Desa Cilimusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor	Blok Tihul Kampung Cibokor Desa Ciuyah Kecamatan Sajira	Peternakan Ayam	270.000	-	503/58- IPPT/KPPT/2012 05 - 03 - 2012	-
Total (2 Perijinan)					430.000			

Sumber : Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Lebak

Tabel 4.24

Jumlah Ijin Usaha Peternakan di Kabupaten Lebak Tahun 2013

No	Nama Perusahaan Pemohon/Pemilik/Direktur	Alamat Perusahaan/Pemohon	Lokasi Objek Ijin	Jenis Objek Ijin	Luas (M ²)	Jumlah Retribusi	NO. / TGL. SURAT IJIN	KETERANGAN (TGL. SETOR)
1	" PT. PADMA KARYA PRIMA " / ARMAN ALI	Kampung Rawahingik RT 002 RW 001 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor	Blok Cijurig Kampung Solear Timur dan Solear Barat Desa Sindangmulya Kecamatan Maja	Peternakan Ayam	350.000	-	503/76-KPPT/KPPT/2013 06 - 05 - 2013	-
2	" PT. SATWA BORNEO JAYA BREEDING FARM " / TETIONO	Jalan Yos Sudarso No. 133 RT 023 RW 008 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang	Blok Pasir Batang Desa Jayasari Kecamatan Cimarga	Pembibitan dan Budidaya Ayam Ras	44 Ha	-	503/89-IPPT/BPMPPT/2013 07 - 11 - 2013	-
3	" PT. SATWA BORNEO JAYA BREEDING FARM " / TETIONO	Jalan Yos Sudarso No. 133 RT 023 RW 008 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang	Blok Cilegong Desa Muncangkopong Kecamatan Cikulur	Pembibitan dan Budidaya Ayam Ras	10.579	-	503/90-IPPT/BPMPPT/2013 07 - 11 - 2013	-
4	" PT. SATWA BORNEO JAYA BREEDING FARM " / TETIONO	Jalan Yos Sudarso No. 133 RT 023 RW 008 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang	Blok Talaga Desa Muara Dua Kecamatan Cikulur	Pembibitan dan Budidaya Ayam Ras	5.083	-	503/91-IPPT/BPMPPT/2013 07 - 11 - 2013	-
5	" PT. SINTA PRIMA FEEDMILL " / MICHAEL WAHYUDI DHARMAWAN	Kampung Rawahingik RT 002 RW 001 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor	Blok Sintal wangi Desa Sukajaya Kecamatan Sajira	Peternakan Ayam	75.000	-	503/77-KPPT/KPPT/2013 06 - 05 - 2013	-
6	" PT. CHAREON POKPHAND JAYA FARM " / EDDY DHARMAWAN M	Jalan Ancol VIII / I Ancol Barat Kelurahan Ancol Kecamatan Kademangan Jakarta Utara 14430	Blok Desa Jayasari Kecamatan Cimarga	Peternakan Ayam	272.574	-	503/101-IPPT/BPMPPT/2013 15 - 11 - 2013	-
7	" PT. ALFINDO IF MAKMUR " / ROY S WIRADHARMA	Jalan MH. Thamrin No. 9 Cikokol Tangerang 15117	Blok Desa Cibungur Mekar Kecamatan Sajira	Peternakan Ayam	201.946	-	503/131-IPPT/BPMPPT/2013 23 - 12 - 2013	-
TOTAL (7 PERIJINAN)					899.520	-		-

Sumber : Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Lebak

Tabel 4.25

Jumlah Ijin Usaha Peternakan di Kabupaten Lebak Tahun 2014

No	Nama Perusahaan Pemohon/Pemilik/Direktur	Alamat Perusahaan/Pemohon	Lokasi Objek Ijin	Jenis Objek Ijin	Luas (M ²)	Jumlah Retribusi	NO. / TGL. SURAT IJIN	KETERANGAN (TGL. SETOR)
1	"/ WIWI SRI SUSILAWATI	Jalan Duku VI H6/32 PE RT 001 RW 015 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang	Blok Pasir Tundun Desa Warunggunung Kecamatan Warunggunung	Peternakan Ayam	11.840	-	503/61- IPPT/BPMPPT/2014 18 - 07 - 2014	-
2	"/ Ir. MS SIREGAR, MM	Jalan Kemenyan RT 008 RW 005 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jayakarta Jakarta Selatan	Blok Bahbul Desa Cimangeunteung Kecamatan Rangkasbitung	Peternakan Ayam	12.325	-	503/66- IPPT/BPMPPT/2014 01 - 09 - 2014	-
3	"/ H. UDING SUHANDI	Kampung Somang RT 001 RW 001 Desa Sukaraja Kecamatan Sajira	Blok Kayu Manis Desa Sajira Kecamatan Sajira	Peternakan Ayam	2.035	-	503/68- IPPT/BPMPPT/2014 19 - 09 - 2014	-
TOTAL (3 PERIJINAN)					26.200	-		-

Sumber : Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Lebak

Mekanisme dan prosedur izin usaha peternakan yang berlaku adalah Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/06/2002 tentang Pedoman dan Perizinan Usaha Peternakan. Usaha Peternakan di Kabupaten Lebak merupakan usaha peternakan rakyat yang perlu mendapat perhatian dan pembinaan baik dari sisi teknis pengelolaan maupun administrasi diantaranya perizinan usaha. Langkah yang ditempuh adalah memberikan kemudahan dalam memperoleh izin usaha dan pendaftaran usaha peternakannya melalui mekanisme dan prosedur yang dapat menjamin kepastian berusaha.

Pada tahun 2015 Dinas Peternakan telah mengeluarkan izin usaha peternakan 9 Perusahaan dan tanda daftar peternakan rakyat sebanyak 10 Orang Peternak seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.26
Izin Usaha Peternakan Dan
Tanda Daftar Peternakan Rakyat Tahun 2015

No.	NAMA	JENIS USAHA	TEMPAT USAHA	JUMLAH (Ekor)	NAMA PERUSAHAAN
1	Eddy Dharmawan Mansyoer	Broiler Farm	Ds Lebak Asih Kec. Curugbitung	25200	Rekomendasi PT Charoen Phokpand
2.	Suwiji SE	Pemasukan Sapi Bakalan	Ds Nameng Kec. Rangkasbitung	1500	PT Septia Anugrah
3	Suwiji SE	Pemasukan Sapi Bakalan	Ds Nameng Kec. Rangkasbitung	1500	PT Septia Anugrah
4	Suwiji SE	Pemasukan Sapi Bakalan	Ds Nameng Kec. Rangkasbitung	1500	PT Septia Anugrah
5	Unasiyah	Broiler Frm	Kp Hegar Manah Kec Sajira Mekar	80000	
6	Usman Kelana	Broiler farm	Kp Hegar Manah Kec Sajira Mekar	40000	
7	Suwiji SE	Pemasukan Sapi Bakalan	Ds Nameng Kec. Rangkasbitung	1500	PT Septia Anugrah
8	Suwiji SE	Pemasukan Sapi Bakalan	Ds Nameng Kec. Rangkasbitung	1500	PT Septia Anugrah
9	Eddy Dharmawan Mansoer	Ternak Ayam Broiler	Ds Mekarsari Kec Sajira	200000	PT Sarana Proteindo Utama
10	Citra Wahyu	Ternak Ayam Broiler	Kp Sajira Kec Sajira		Rekomendasi BPPMPT
11	H.Hurisal Jamhur	Ternak Sapi	Kec Warunggunung	50	TPPR
12	H Supriyadi	Ternak Ayam Broiler	Ds Sukajaya Kec Sajira	10000	TPPR
13	Eddy Darmawan Mansyur	Ternak Ayam DOC Layer	Ds Jayasari Kec Cimarga		Rekomendasi IHKS
14	Mochamad Azzari Jayabaya	Ternak Sapi	Kp Julat Ds Muara Kec Cikulur	1200	Izin Usaha

No.	NAMA	JENIS USAHA	TEMPAT USAHA	JUMLAH (Ekor)	NAMA PERUSAHAAN
15	Haerudin	Ternak Ayam Broiler	Ds Ciuyah Kec Sajira	10000	TPPR (Perpanjangan)
16	Yoyoh Maesaroh	Ternak Ayam Broiler	Ds Ciuyah Kec Sajira	5000	TPPR (Perpanjangan)
17	Sahroni	Ternak Ayam Broiler	Ds Sindangmulya Kec Maja	6000	TPPR (Perpanjangan)
18	Ayak Moh Enoh	Ternak Ayam Broiler	Kp Ciputih Kec Maja	400000	Izin Usaha Peternakan
19	Suwiji SE	Pemasukan Sapi Bakalan	Ds Nameng Kec. Rangkasbitung	1500	PT Septia Anugrah
20	Suwiji SE	Pemasukan Sapi Bakalan	Ds Nameng Kec. Rangkasbitung	1500	PT Septia Anugrah
21	Mochamad Azzari Jayabaya	Ternak Sapi	Kp Julat Ds Muara Kec Cikulur	1200	Rekomendasi IKHS
22	Ayak Moh Enoh	Ternak Ayam Broiler	Kp Ciputih Kec Maja	400000	Rekomendasi BPMPPT
23	Ayak Moh Enoh	Ternak Ayam Broiler	Kp Ciputih Kec Maja	400000	Izin Usaha Peternakan
24	Suwiji SE	Pemasukan Sapi Bakalan	Ds Nameng Kec. Rangkasbitung	1500	PT Septia Anugrah
25	Soma Iskandar	Ternak Ayam Broiler	Ds Kadu Agung Barat Kec Cibadak	4000	TPPR
25	Soma Iskandar	Ternak Ayam Broiler	Ds Parungsari Kec Sajira	10000	TPPR
26	Tb. Atmakusumah	Ternak Sapi	Ds Sindangsari Kec Warunggunung	50	TPPR

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Lebak

Adapun Tanda Daftar Peternakan Rakyat dapat dilihat pada Tabel berikut :

a. Izin Pemasukan ternak.

Pada tahun 2015 telah mengeluarkan izin pemasukan ternak kepada 2 perusahaan diantaranya PT SEPTIA ANUGRAH untuk memasukkan ternak Sapi Siap Potong 4500 ekor dan Sapi Bakalan 6000 ekor dari Bulan Januari s/d Desember 2015, PT POKHAND Pemasukan DOC Broiler 25.200 ekor

b. Pelayanan usaha peternakan ;

Pada Tahun 2015 telah memfasilitasi pedagang ternak dengan pembangunan Pasar Hewan yang ada Desa Cijoro Pasir Jalan Kuncorojakti Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak.

c. Melaksanakan bimbingan pengolahan dan pemasaran peternakan ;

Mengadakan pertemuan dengan para pedagang ternak yang dilaksanakan di Dinas Peternakan Kabupaten Lebak yang dihadiri beberapa pedagang ternak yang ada di Wilayah Kabupaten Lebak.

d. bimbingan pengolahan hasil ternak, penanganan pasca panen

Memfasilitasi alsinak kepada RPH Rangkasbitung diantaranya pengadaan Pengadaan 1 buah Timbangan duduk, Gerobak Dorong 5 buah dan 1 set pisau sembelih

e. Pelaksanaan informasi pemasaran ternak ;

Telah melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data informasi pasar dengan hasil sebagai berikut : dilaksanakan di 7 Kecamatan/Pasar yang ada di Kabupaten Lebak diantaranya Pasar Cibadak, Pasar Rangkasbitung, Pasar Maja, Pasar Cipanas, Pasar Gunungkencana, Pasar Malingping, dan Pasar Cibeber Perkembangan Harga ternak, Hasil ternak dan pendataan pelaku tataniaga ternak.

Pengembangan kelompok ternak diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan pada anggota dalam mengembangkan agribisnis. Berbagai kegiatan diupayakan dan diharapkan dapat memotivasi peternak atau kelompok ternak dalam meningkatkan produktivitas dan produksi pangan asal ternak. Kegiatan tersebut antara lain dalam Kegiatan **Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani**. Total Anggaran Rp. 170.000.000,- realisasi 98,4 % atau Rp. 167.300.000 Output dari kegiatan ini yaitu :

- Terwujudnya penataan Administrasi Kelompok dan Sosialisasi Penanggulangan Bau dan Lalat sebanyak 10 kelompok
- Terwujudnya Demplot ternak Ayam Buras di lokasi P2WKSS di 2 Desa binaan yaitu Desa Citeupuseun dan Desa Ciparahu Kecamatan Cihara
- Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi kelembagaan petani di 28 Kecamatan

Outcome nya yaitu :

- Meningkatnya produksi ayam buras
- Meningkatnya tatalaksana administrasi kelompok

Hasil Yang telah dicapai :

- Melakukan penataan administrasi kelompok pada Kelompok:
 - Widi Ternak Kp. Cihiang Desa rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung
 - Domba Jaya, Desa Sukamanah Kec. Malingping.
 - Sangiang Mulya, Kp. Kadu Lisung Desa Sangiang Jaya Kec. Cimarga.
 - Guntur I Kp.Puputa Desa Jaya Pura Kec. Cipanas.
- Terselenggaranya Sosialisasi di 6 wilayah yang bertempat di Desa Citeupuseun Kecamatan Cihara , Desa Ciparahu Kecamatan Cihara, Desa Ciuyah Kecamatan Sajira Desa Cirinten Kecamatan Cirinten serta Desa Sindang Mulya Kecamatan Maja, Desa Cibengkung Kecamatan Leuwidamar masing masing sebanyak 20 orang peserta.
- Tersediannya bangunan kandang Ayam Buras sebanyak 2 unit sebagai percontohan pada kegiatan P2WKSS di Desa Ciparahu dan Citeupuseun Kecamatan Cihara.
- Tersediannya ternak Ayam Buras sebanyak 200 ekor sebagai percontohan (demplot) pada kegiatan P2WKSS di Desa Desa Ciparahu dan Citeupuseun Kecamatan Cihara, masing – masing 100 ekor .
- Tersediannya bantuan pakan ternak Ayam Buras sebanyak 400 kg berupa Grower/Konsentrat (pakan penguat) untuk 200 ekor ternak Ayam pada kegiatan P2WKSS di Desa Ciparahu dan Citeupuseun Kecamatan Cihara, masing-masing 200 kg.
- Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi kelembagaan petani di kecamatan Rangkasbitung, Cibadak ,Warunggunung, Cimarga, Cikulur, Leuwidamar, Muncang, Cirinten, Sobang, Cijaku, Cigemlong, Maja, Lebakgedong, Gunungkencana, Malingping, Kalanganyar, Curugbitung, Bojongmanik, Cileles, Sajira, Banjarsari, Bayah, Cipanas, Cilograng, Wanasalam, Panggarangan, Cihara, Cibeber.

4.6 KONDISI INFRASTRUKTUR WILAYAH

4.6.1 Listrik dan Air Bersih

Satu-satunya penyedia kebutuhan air bersih dengan sistim berlangganan bagi konsumen air bersih di Kabupaten Lebak adalah PDAM Lebak. Konsumen yang terbanyak adalah konsumen rumah tangga yang meliputi 95 persen dari total konsumen PDAM Lebak, disusul oleh konsumen dari sektor niaga dan industri (2 %), badan sosial (2 %) dan instansi pemerintah (1 %).

Dari tahun ke tahun jumlah konsumen selalu bertambah. Namun pada tahun 2014 PDAM Lebak mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebanyak 1.730 pelanggan atau penurunan sebesar 10,68 %. Begitu juga dengan konsumen kelompok Niaga dan Industri serta Badan social yang masingmasing mengalami penurunan sebesar 3,87 % dan 0,57 %.

Gambar 4.27

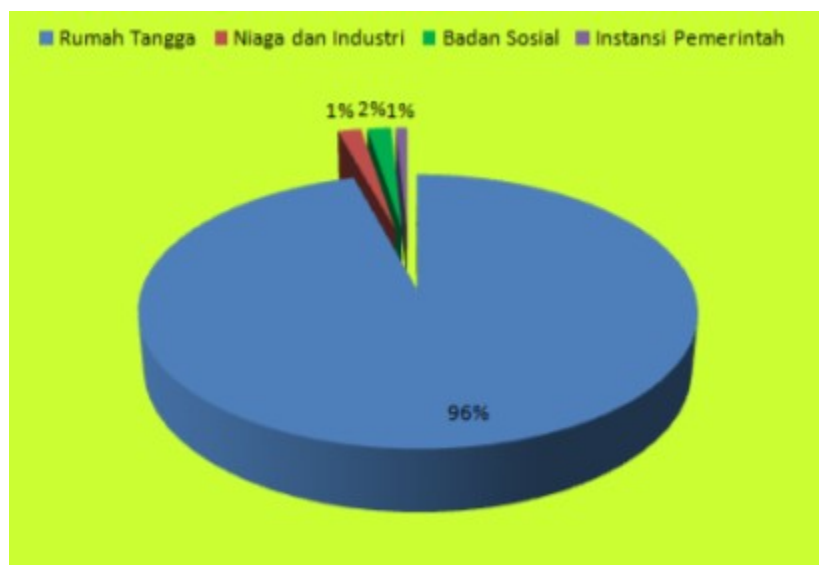
**Komposisi Konsumen dan Penjualan Air PDM
Kabupaten Lebak Tahun 2012-2014**

Konsumen	Satuan	2012	2013	2014
Rumah Tangga	Unit	16.202	14.472	20.171
Niaga dan Industri	Unit	362	348	355
Badan Sosial	Unit	348	346	360
Instansi Pemerintah	Unit	163	167	172
Penjualan	M ³	3,57	3,46	3,67

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015

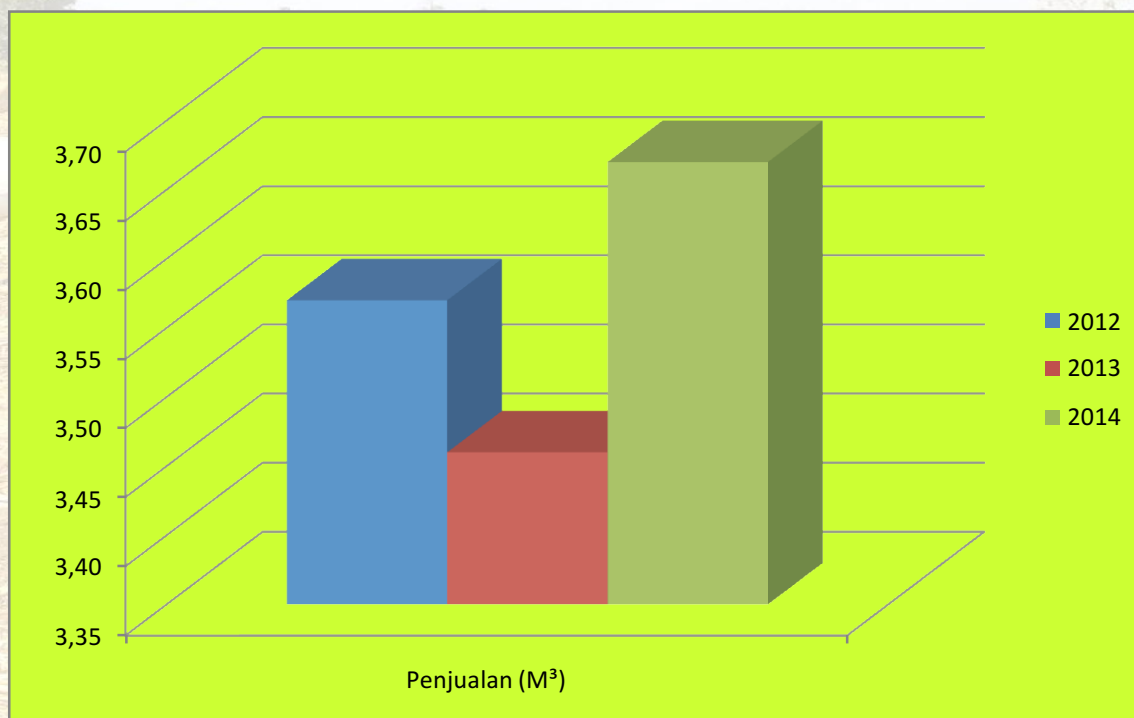
Gambar 4.26

Komposisi Konsumen Air PDAM Kabupaten Lebak Tahun 2014



Sumber: Diolah dari Statistik Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015

Gambar 4.27
Penjualan Air PDAM Kabupaten Lebak Tahun 2012-2014



Sumber: Diolah dari Statistik Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015

Pada Sektor Listrik terjadi keadaan yang bertolak belakang dengan sektor Air Bersih, yaitu terjadi peningkatan baik jumlah sambungan maupun jumlah KWh yang terjual, yaitu dari 236.898.835 KWh pada tahun 2012 menjadi 265.562.504 pada tahun 2014 atau terjadi peningkatan penjualan Kwh sebesar 12,10 %. Jumlah pelanggan pun bertambah sebanyak 11.807 pelanggan dari tahun sebelumnya atau meningkat sebesar 7,81 %. Peningkatan jumlah pelanggan maupun penjualan Kwh yang amat besar kemungkinan disebabkan banyak bermunculan perumahan baru dan perusahaan baru, baik skala mikro, kecil, maupun menengah.

Tabel 4.28
Penjualan Tenaga Listrik Kabupaten Lebak Tahun 2012-2014

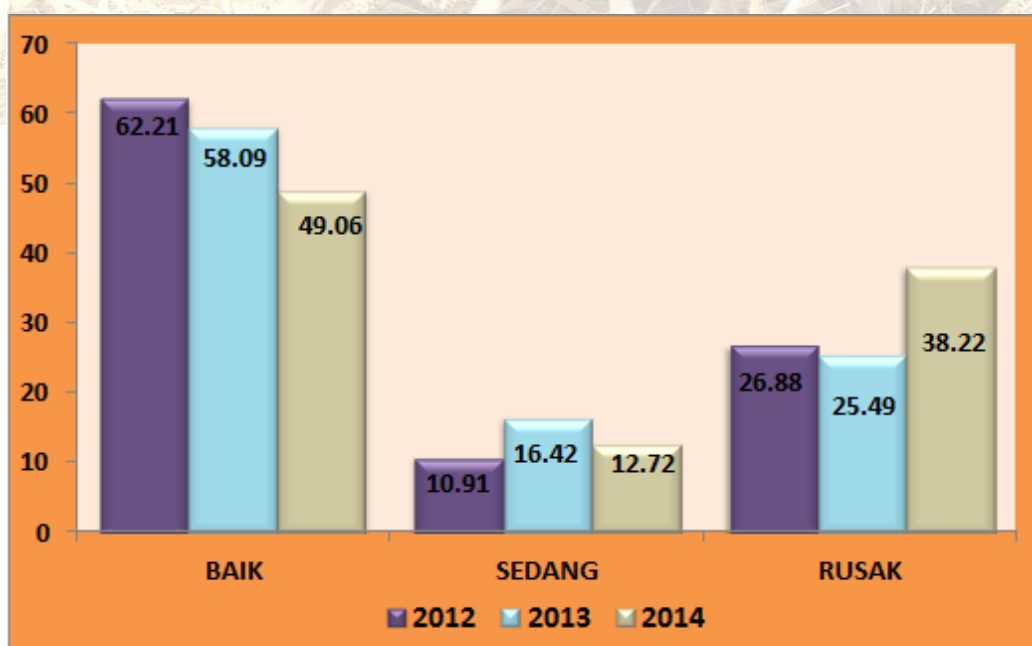
Uraian	Satuan	2012	2013	2014
Jumlah Konsumen	Pelanggan	151.180	162.987	298.661
Jumlah KWH terjual	KWH	236.898.835	265.562.504	430.891.350
Jumlah VA tersambung	KVA	124.607.870	359.977.875	2.727.181.090
Nilai KWH terjual	Juta Rp.	138.941	36.811	281.433

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015

4.6.2 Transportasi dan Komunikasi

Membbaiknya kondisi infrastruktur jalan dan kemajuan teknologi secara signifikan akan mempengaruhi peningkatan kontribusi sektor angkutan dan komunikasi terhadap pembangunan daerah. Perkembangan kondisi jalan untuk jalan dengan kondisi baik tahun 2014 menunjukkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 persentase jalan yang kondisinya baik adalah sebesar 62,21 persen, turun menjadi 58,09 persen pada tahun 2014. Sedangkan jalan yang rusak persentasenya mengalami penurunan dari 26,88 persen pada tahun sebelumnya, menjadi 25,49 persen pada tahun 2014. menurunnya kondisi jalan di Kabupaten Lebak kemungkinan disebabkan karena banyaknya jalan yang rusak akibat banyaknya kendaraan berat yang melintas yang bobotnya melebihi daya tahan jalan. Terutama dengan adanya pembangunan pabrik semen di Kecamatan Bayah.

Gambar 4.28
Kondisi Jalan (%) Kabupaten Lebak Tahun 2012-2014



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015

Di Kabupaten Lebak terdapat 3 stasiun kereta api yaitu Rangkasbitung, Citeras dan Maja. Stasiun yang terbesar adalah stasiun Rangkasbitung yang merupakan stasiun awal pemberangkatan dan stasiun perlintasan dari Jakarta menuju Merak dan sebaliknya. Selama tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun Rangkasbitung, Maja dan Citeras. Jumlah penumpang KA pada tahun 2012 sebanyak 2.379.947 orang, bertambah menjadi 2.809.544 pada tahun 2014, atau bertambah sekitar 18,05 %.

Kenaikan jumlah penumpang ini kemungkinan besar selain pemberlakuan double track jurusan majajakarta mulai April 2014 juga bertambahnya jumlah kereta yang diberangkatkan. Faktor keamanan dan murahnya biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan transportasi ini menjadikan angkutan Kereta Api menjadi jenis transportasi yang sangat diandalkan oleh sebagian besar masyarakat yang menggunakan transportasi umum ke luar wilayah Lebak.





BAB 5

HASIL & PEMBAHASAN



5.1 ANALISIS BERDASARKAN POTENSI KECAMATAN

Analisis potensi kecamatan meliputi tingkat perkembangan kecamatan, tipe kecamatan dan potensi dasar masing-masing kecamatan di Kabupaten Lebak. Kriteria ini diperlukan untuk menentukan kelayakan suatu wilayah kecamatan menjadi pusat pertumbuhan ternak di kawasan satuan wilayah pengembangan.

5.1.1 Tingkat Perkembangan Peternakan

Tingkat perkembangan kecamatan meliputi banyaknya jumlah masing-masing kategori desa di setiap kecamatan. Kategori desa yang dimaksud adalah desa swakarsa, desa swadaya dan desa swasembada. Desa swadaya adalah desa yang masih terikat oleh tradisi karena taraf pendidikan yang masih relatif rendah, produksi yang masih diarahkan untuk kebutuhan primer keluarga dan komunikasi keluar sangat terbatas. Desa ini bersifat sedenter, artinya sudah ada kelompok keluarga yang bermukim secara menetap.

Norma yang terdapat di desa ini adalah mata pencaharian penduduk di sektor primer yaitu sebagian besar penduduk hidup dari pada pertanian, peternakan, nelayan, dan pencaharian dari hutan, adat istiadat masih mengikat dan kelembagaan dan pemerintahan desa masih sederhana. Prasarana kurang memadai dan biasanya desa ini mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Desa swadaya memiliki ciri-ciri daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antar manusia sangat erat, pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

Desa swakarya merupakan desa yang setingkat lebih maju dari desa swadaya, di mana adat-istiadat masyarakat desa sedang mengalami transisi, pengaruh dari luar sudah mulai masuk ke desa, yang mengakibatkan perubahan cara berpikir dan bertambahnya lapangan pekerjaan di desa, sehingga mata pencaharian penduduk sudah mulai berkembang dari sektor primer ke sektor sekunder, produktifitas mulai meningkat dan diimbangi dengan bertambahnya prasarana desa. Adat yang merupakan tatanan hidup masyarakat sudah mulai mendapatkan perubahan sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam aspek kehidupan sosial.

Norma-norma desa swakarya adalah mata pencaharian penduduk di sektor sudah mulai bergerak di bidang kerajina dan industri kecil, seperti pengolahan hasil pengawetan bahan makanan, out put desa merupakan jumlah dari keseluruhan produksi desa yang dinyatakan dalam nilai rupiah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan,

kerajinan, perdagangan pada tingkat sedang, adat istiadat dan kepercayaan penduduk berada pada tingkat transisi.

Desa ini mulai mampu menyelenggarakan rumahnya tangganya sendiri, administrasi cukup baik, dan LKMD mulai berfungsi menggerakkan peran serta, masyarakat dalam pembangunan. Ciri-ciri desa swakarya adalah kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh, sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi, desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian, telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain, jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar.

Desa swasembada atau disebut juga dengan desa maju atau berkembang. Desa swasembada adalah desa yang lebih maju daripada desa swakarya dan tidak terikat oleh adat-istiadat. Pengertian secara umum, desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Di desa ini adat istiadat dalam masyarakatnya sudah tidak mengikat, hubungan antar manusia bersifat nasional. Mata pencaharian penduduk sudah beraneka ragam dan bergerak di sektor tertier, teknologi baru sudah benar-benar di bidang pertanian, sehingga produktivitasnya tinggi. Diimbangi dengan prasarana desa yang cukup. Bentuk desa bervariasi, tetapi rata-rata memenuhi syarat-syarat pemukiman yang baik. Para pemukim sudah banyak berpendidikan setingkat dengan sekolah atas.

Norma-norma desa swasembada (berkembang) adalah mata pencaharian penduduk di sektor tertier yaitu sebagian besar penduduknya bergerak di bidang perdagangan dan jasa, output desa merupakan jumlah dari seluruh produksi desa di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan perdagangan/ jasa sudah tinggi. Ciri-ciri desa swasembada adalah kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan, penduduknya padat-padat, tidak terikat dengan adat istiadat, telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain, partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.

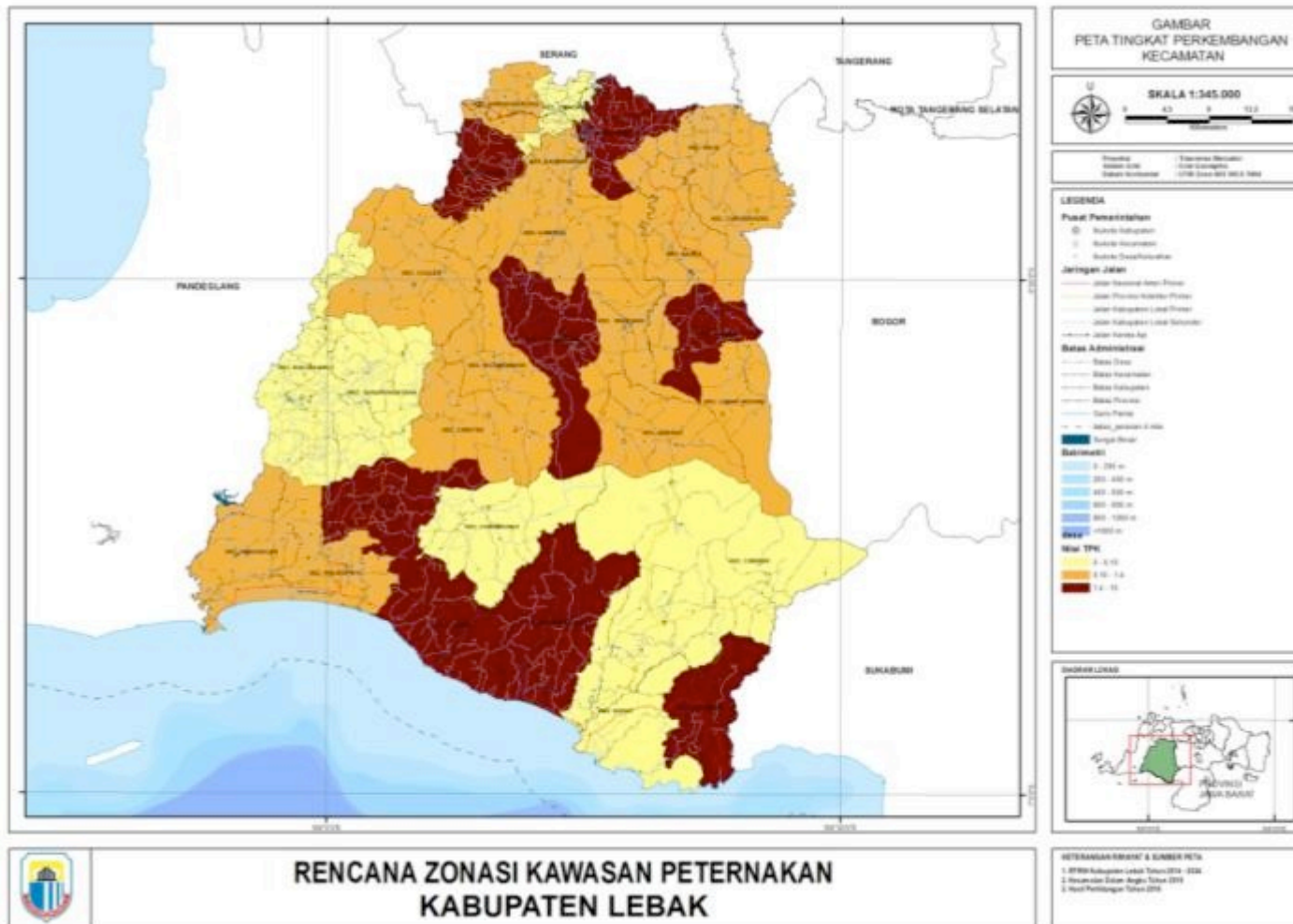
Tabel 5.1
Tingkat Perkembangan Kecamatan di Kabupaten Lebak

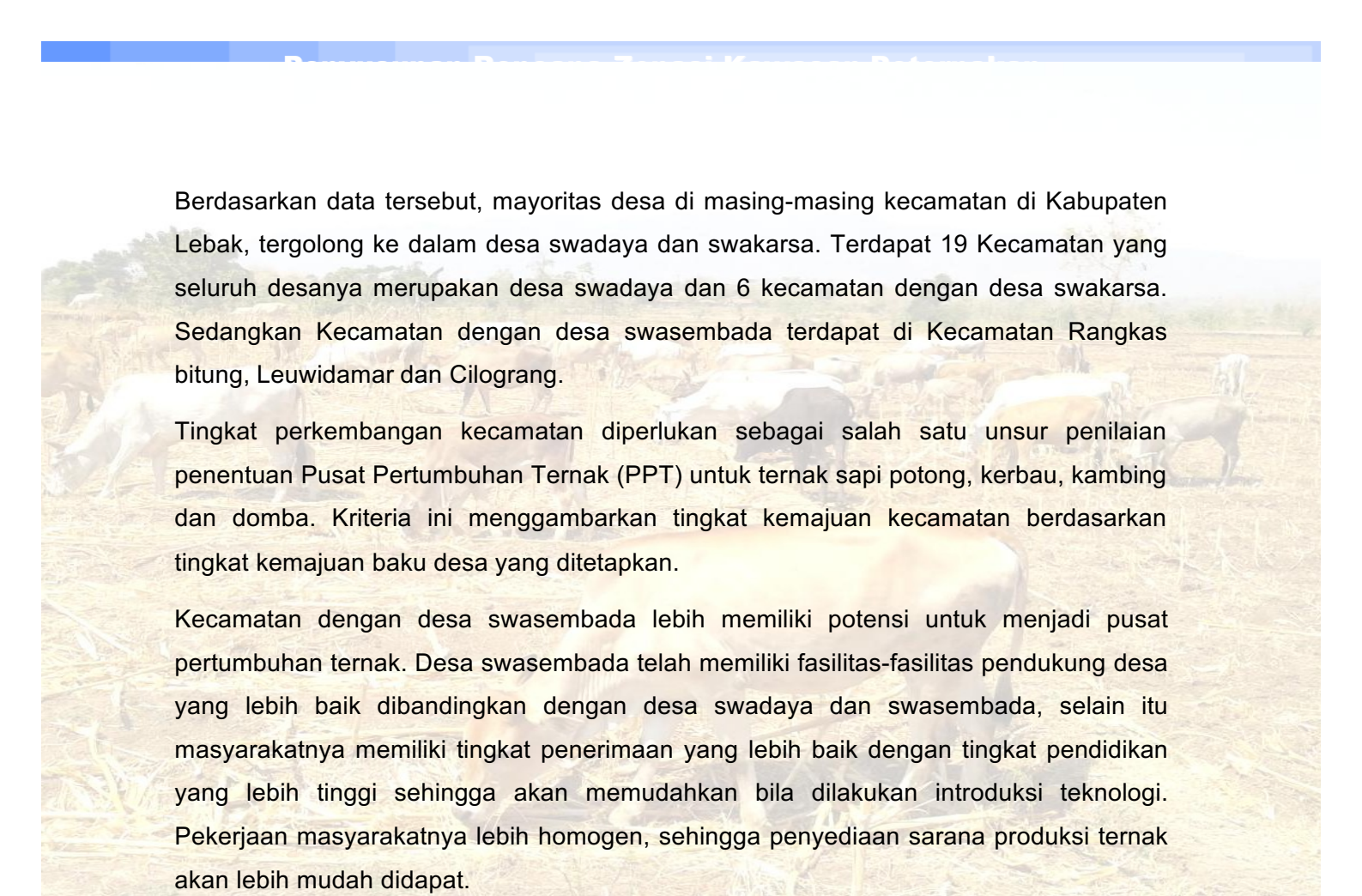
No	Kecamatan	Jumlah Desa			Total desa
		Swadaya	Swakarsa	Swasembada	
1	Cigemblong	9	0	0	9
2	Cikulur	0	13	0	13
3	Cimarga	17	0	0	17
4	Sajira	15	0	0	15
5	Banjarsari	20	0	0	20
6	Malingping	14	0	0	14
7	Wanasalam	13	0	0	13
8	Panggarangan	0	11	0	11
9	Cihara	0	9	0	9
10	Bayah	11	0	0	11
11	Cilograng	0	0	10	10
12	Cibeber	22	0	0	22
13	Cijaku	0	10	0	10
14	Cileles	12	0	0	12
15	Gn Kencana	0	12	0	12
16	Bojong Manik	9	0	0	9
17	Citinten	10	0	0	10
18	Leuwidamar	0	0	12	12
19	Muncang	12	0	0	12
20	Sobang	10	0	0	10
21	Cipanas	0	14	0	14
22	Lebak gedong	6	0	0	6
23	Warunggunung	12	0	0	12
24	Cibadak	15	0	0	15
25	Rangkas bitung	0	0	16	16
26	Kalanganyar	7	0	0	7
27	Maja	14	0	0	14
28	Curug Bitung	10	0	0	10

Sumber: Hasil Analisis 2016

Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak

Gambar 5.1
Peta Tingkat Perkembangan Kecamatan





Berdasarkan data tersebut, mayoritas desa di masing-masing kecamatan di Kabupaten Lebak, tergolong ke dalam desa swadaya dan swakarsa. Terdapat 19 Kecamatan yang seluruh desanya merupakan desa swadaya dan 6 kecamatan dengan desa swakarsa. Sedangkan Kecamatan dengan desa swasembada terdapat di Kecamatan Rangkas bitung, Leuwidamar dan Cilograng.

Tingkat perkembangan kecamatan diperlukan sebagai salah satu unsur penilaian penentuan Pusat Pertumbuhan Ternak (PPT) untuk ternak sapi potong, kerbau, kambing dan domba. Kriteria ini menggambarkan tingkat kemajuan kecamatan berdasarkan tingkat kemajuan baku desa yang ditetapkan.

Kecamatan dengan desa swasembada lebih memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ternak. Desa swasembada telah memiliki fasilitas-fasilitas pendukung desa yang lebih baik dibandingkan dengan desa swadaya dan swasembada, selain itu masyarakatnya memiliki tingkat penerimaan yang lebih baik dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga akan memudahkan bila dilakukan introduksi teknologi. Pekerjaan masyarakatnya lebih homogen, sehingga penyediaan sarana produksi ternak akan lebih mudah didapat.

5.1.2 Tipe Kecamatan

Tipe kecamatan merupakan kategori yang menggambarkan kedekatan profil desa terhadap peternakan, kriteria ini berlaku untuk menentukan pusat pertumbuhan semua jenis ternak kecuali ternak babi. Semakin dekat hubungan tipe kecamatan dengan komoditas peternakan maka semakin baik dan semakin potensial wilayah tersebut untuk dikembangkan menjadi pusat perkembangan kecamatan.

Kabupaten lebak memiliki Kecamatan dengan tipe desa mayoritas berupa desa pertanian dimana masyarakatnya sebagian besar bermata pencarian sebagai petani. Hal ini menjadi penting terutama untuk memenuhi kebutuhan pakan hijauan untuk ternak ruminansia dan kemampuan masyarakat dalam memelihara ternak. Tipe desa pertanian, memiliki potensi yang besar untuk pengembangan pusat pertumbuhan ternak. Seluruh kecamatan di Kabupaten Lebak memiliki potensi yang tinggi menjadi pusat pertumbuhan ternak berdasarkan kriteria tipe kecamatan.

5.1.3 Potensi Dasar Kecamatan

Potensi dasar kecamatan ditentukan berdasarkan tiga faktor yakni kepadatan penduduk, faktor alam dan letak kecamatan.

a. Kepadatan Penduduk

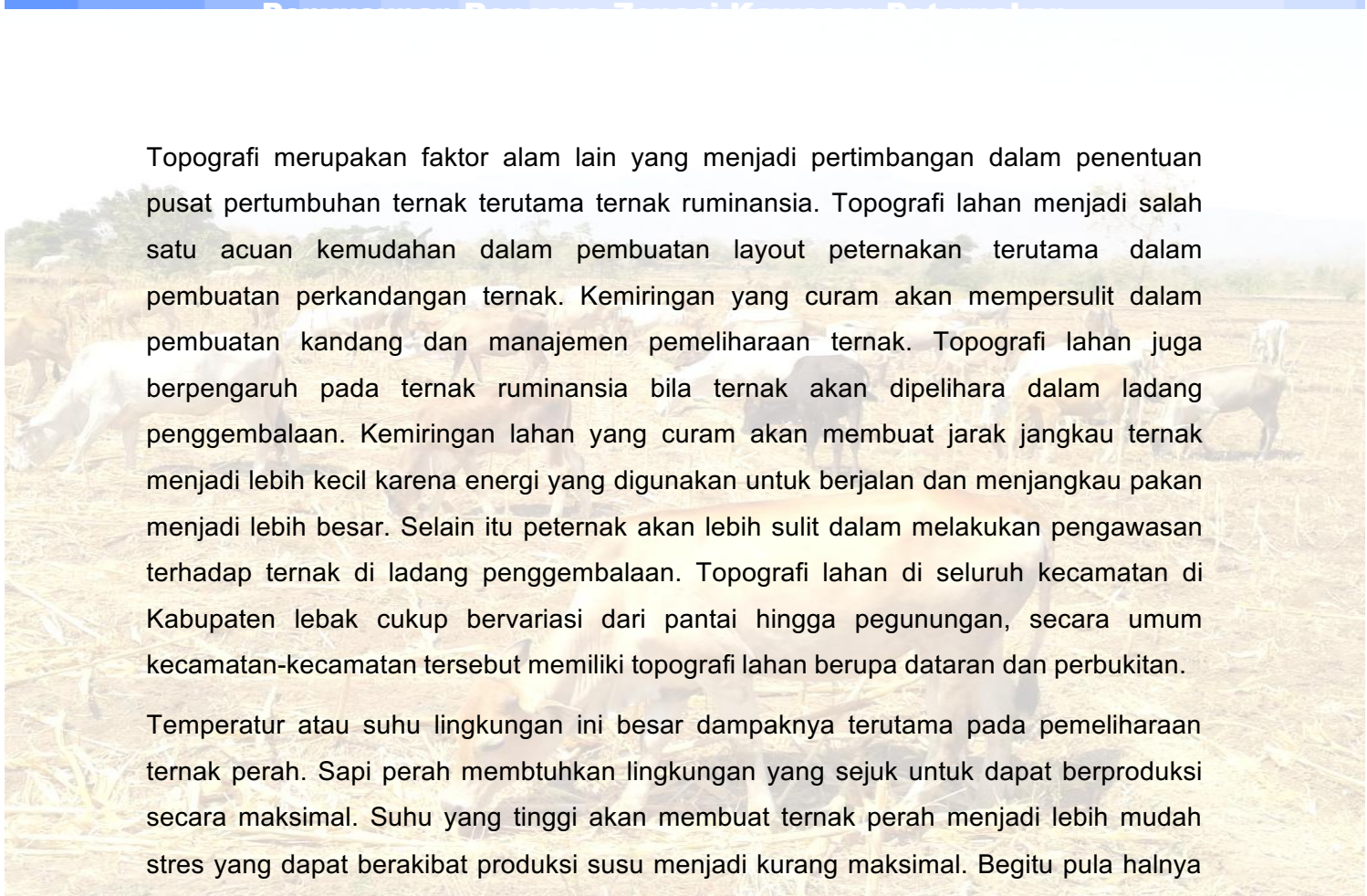
Kepadatan penduduk menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi dan luas usaha peternakan di suatu wilayah. Kepadatan penduduk kurang dari 200 orang/km², memiliki kesempatan yang lebih tinggi untuk dilakukannya usaha peternakan di wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka potensi dilakukannya usaha peternakan akan semakin rendah hal ini karena kepadatan penduduk yang tinggi akan membutuhkan lahan pemukiman penduduk yang lebih luas sehingga lahan di wilayah kecamatan akan mengutamakan untuk dijadikan lokasi pemukiman di bandingkan pemanfaatan lahan lainnya termasuk juga usaha peternakan. Rataan kepadatan penduduk di 28 kecamatan di Kabupaten Lebak, mencapai lebih dari 300 orang/Km². Hal ini menjadi salah satu faktor yang kurang menguntungkan untuk pembentukan kawasan pertumbuhan ternak di beberapa wilayah kecamatan.

b. Faktor Alam

Faktor alam menjadi pertimbangan dalam penentuan pusat pertumbuhan ternak karena pemeliharaan ternak membutuhkan lingkungan yang mendukung untuk hidup ternak sehingga dapat memproduksi secara maksimal. Penilaian faktor alam meliputi produktivitas tana, iklim dan curah hujan, topografi dan suhu lingkungan.

Tanah yang subur akan meningkatkan produksi tanaman hijau sebagai sumber pakan ternak, dengan produksi pakan yang tinggi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hijauan untuk ternak ruminansia di wilayah tersebut. Secara umum, Kecamatan di Kabupaten Lebak memiliki kondisi tanah yang subur sehingga dapat mendukung meningkatnya produksi tanaman hijau sebagai sumber pakan ternak ruminansia.

Selain kondisi tanah, curah hujan juga dapat meningkatkan produksi tanaman hijau dan meningkatkan ketersediaan air yang dibutuhkan oleh ternak. Salah satu syarat lokasi peternakan adalah dekat dengan sumber air hal ini karena air merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang kebutuhan hidup ternak, air dimanfaatkan sebagai air minum maupun untuk kegiatan sanitasi kandang dan peralatan. Kabupaten Lebak memiliki iklim dengan curah hujan berkisar antara <3000-4500mm dengan kategori iklim sedang hingga basah.



Topografi merupakan faktor alam lain yang menjadi pertimbangan dalam penentuan pusat pertumbuhan ternak terutama ternak ruminansia. Topografi lahan menjadi salah satu acuan kemudahan dalam pembuatan layout peternakan terutama dalam pembuatan perkandangan ternak. Kemiringan yang curam akan mempersulit dalam pembuatan kandang dan manajemen pemeliharaan ternak. Topografi lahan juga berpengaruh pada ternak ruminansia bila ternak akan dipelihara dalam ladang penggembalaan. Kemiringan lahan yang curam akan membuat jarak jangkauan ternak menjadi lebih kecil karena energi yang digunakan untuk berjalan dan menjangkau pakan menjadi lebih besar. Selain itu peternak akan lebih sulit dalam melakukan pengawasan terhadap ternak di ladang penggembalaan. Topografi lahan di seluruh kecamatan di Kabupaten Lebak cukup bervariasi dari pantai hingga pegunungan, secara umum kecamatan-kecamatan tersebut memiliki topografi lahan berupa dataran dan perbukitan.

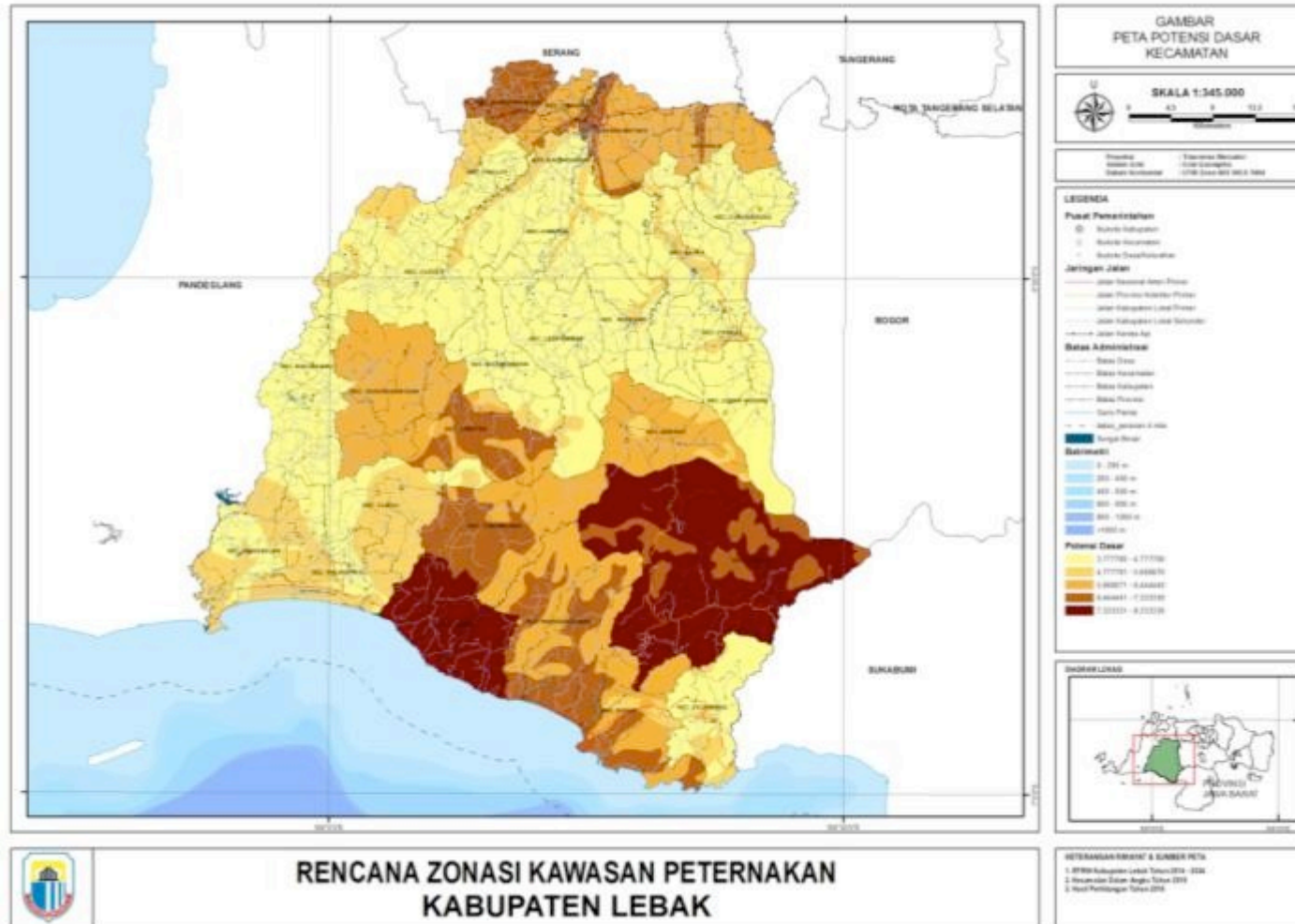
Temperatur atau suhu lingkungan ini besar dampaknya terutama pada pemeliharaan ternak perah. Sapi perah membutuhkan lingkungan yang sejuk untuk dapat berproduksi secara maksimal. Suhu yang tinggi akan membuat ternak perah menjadi lebih mudah stres yang dapat berakibat produksi susu menjadi kurang maksimal. Begitu pula halnya dengan ternak unggas terutama ayam ras yang membutuhkan suhu lingkungan yang sejuk namun ternak unggas memiliki toleransi terhadap lingkungan yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan ternak perah. Suhu rata-rata di Kabupaten Lebak adalah 24°C. Suhu lingkungan yang baik untuk pemeliharaan sapi perah adalah kurang dari 17°C.

c. Letak Kecamatan

Letak kecamatan dibagi kedalam tiga kategori yakni dekat, sedang dan jauh. Letak kecamatan dekat apabila kecamatan terletak dekat dengan kota besar yang memiliki pelabuhan atau terminal inter-regional pusat pasar regional atau sub regional, industri menengah atau besar, pusat pendidikan menengah atau tinggi. Sedangkan kategori sedang apabila letak kecamatan berada dekat dengan kota kecil yang memiliki sub terminal regional, pusat pasar terdekat, pendidikan menengah atau atas dan lainnya. Kategori jauh apabila letak kecamatan merupakan kecamatan terpencil atau terletak di wilayah pelosok.

Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak

Gambar 5.2
Peta Potensi Dasar Tingkat Kecamatan



Mayoritas letak kecamatan di Kabupaten Lebak tergolong ke dalam kategori sedang karena kabupaten Lebak terletak berdekatan dengan beberapa kota kecil seperti Bogor, Pandeglang, Tangerang. Sedangkan Kecamatan Rangkasbitung, Cibadak, Warunggunung dan Maja tergolong memiliki letak kecamatan yang dekat dengan Kota Serang sebagai salah satu kota besar yang memiliki fasilitas yang memadai.

5.2 ANALISIS BERDASARKAN SUMBERDAYA ALAM & SUMBERDAYA MANUSIA

5.2.1 Nisbah Lahan Pangan Terhadap Penduduk

Nisbah lahan pangan terhadap penduduk menggambarkan ketersediaan lahan pangan dimasa yang akan datang (20 tahun yang akan datang) dan kemampuan daya dukungnya terhadap usaha peternakan. Kriteria ini diperlukan terutama untuk menentukan pusat pertumbuhan ternak ruminansia yang dapat memanfaatkan hasil lahan pangan sebagai sumber pakan. Lahan pangan yang dimaksud berupa lahan persawahan, ladang dan tegalan serta lahan perkebunan baik perkebunan rakyat ataupun perkebunan besar. Pemeliharaan ternak ruminansia juga dapat diintegrasikan dengan lahan pertanian dan perkebunan. Integrasi ini bertujuan untuk menekan biaya pakan ternak dimana ternak memakan sisa-sisa hasil lahan pangan seperti jerami padi. Semakin tinggi nisbah lahan pangan terhadap penduduk semakin potensial wilayah tersebut untuk dijadikan pusat perkembangan ternak ruminansia.

Perkiraan nisbah lahan pangan terhadap penduduk di Kabupaten Lebak 20 tahun yang akan datang bervariasi di setiap kecamatan. Kecamatan Cipanas, Warunggunung, Cibadak, Rangkasbitung dan Kalanganyar diprediksi akan memiliki nisbah lahan pangan terhadap penduduk yang rendah dengan nisbah kurang dari 0.1 hektar. Sedangkan Kecamatan Cikulur, Banjarsari, Wanasalam dan Maja diprediksi akan memiliki nisbah lahan pangan terhadap penduduk sebesar 0.1-0.2 hektar pada 20 tahun yang akan datang dan Kecamatan lainnya diprediksi masih memiliki nisbah lahan pangan terhadap populasi penduduk yang tinggi yakni di atas 0.2 hektar.

5.2.2 Kapasitas Tampung Ternak

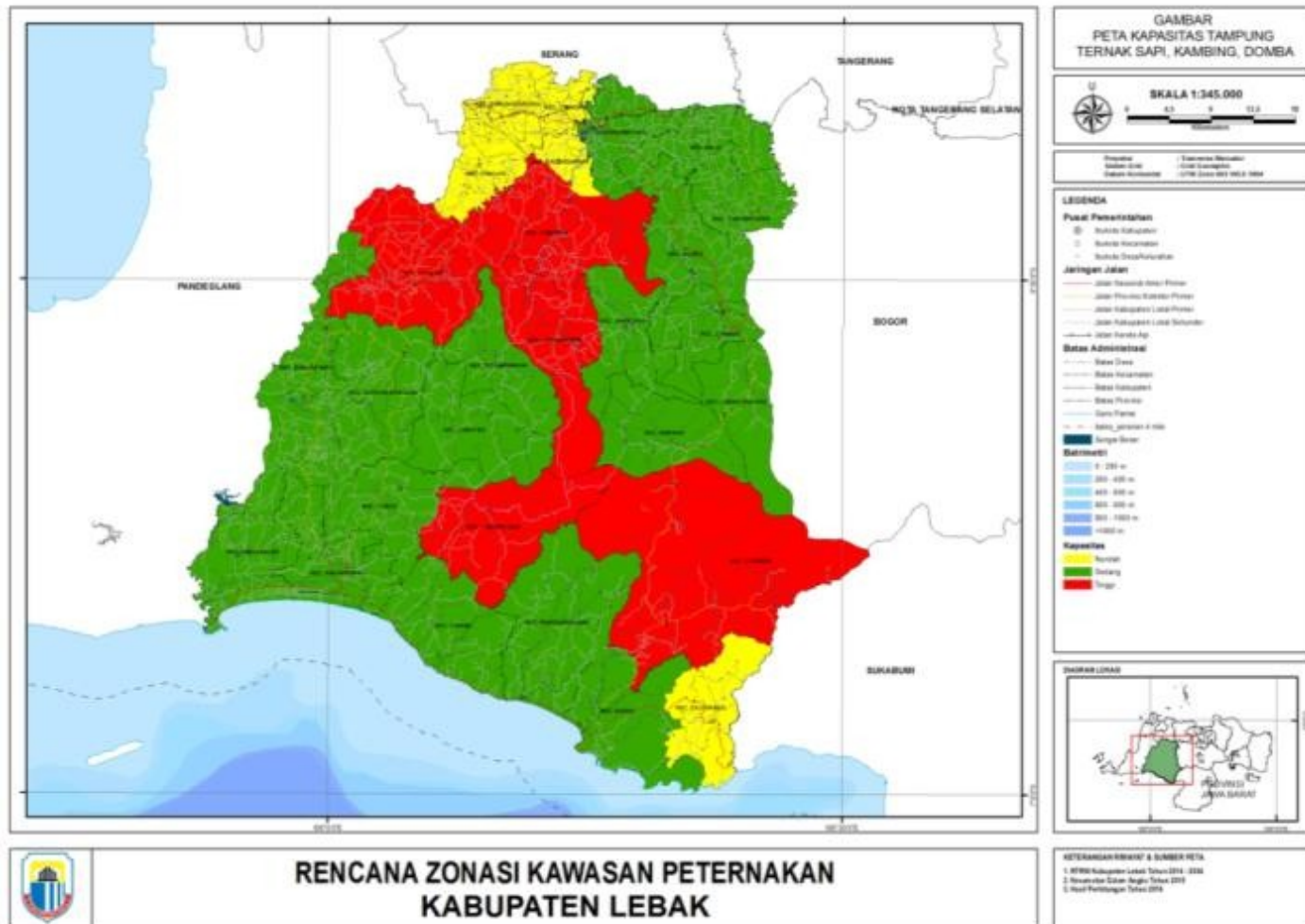
Kapasitas tampung ternak merupakan kriteria yang diperuntukan untuk menentukan pusat pertumbuhan ternak ruminansia, hal ini dikarenakan ternak ruminansia sangat tergantung pada ketersediaan hijauan makanan ternak sebagai salah satu sumber pakan yang harus tersedia. Hijauan yang digunakan sebagai pakan ternak dapat berasal dari sisa lahan pangan seperti pesawahan, ladang dan tegalan dan perkebunan, selain itu sumber hijauan juga diperoleh dari padang rumput atau alang-alang. Kapasitas tampung ternak ruminansia dalam suatu wilayah menggambarkan populasi maksimum ternak ruminansia yang dapat ada di wilayah tersebut pada kemampuan wilayah dalam menyediakan pakan hijauan.

Kabupaten Lebak merupakan wilayah dengan mata pencarian utama masyarakatnya sebagai petani dengan sebagian besar pemanfaatan lahan digunakan sebagai lahan pertanian. Hal ini merupakan faktor pendukung yang baik, karena dengan lahan pertanian yang luas, maka daya tampung ternak ruminansia dapat menjadi lebih tinggi. Sehingga pembentukan pusat pertumbuhan ternak lebih mendukung. Daya tampung ternak ruminansia terbesar berada di Kecamatan Cibeber dengan kapasitas tampung sebanyak 48012 Satuan Ternak (ST) dan kapasitas tampung ternak ruminansia paling rendah berada di Kecamatan Kalanganya sebanyak 7590 ST.

Pemeliharaan ternak sapi dan kerbau juga dapat dilakukan di ladang penggembalaan. Di Indonesia sistem pemeliharaan ternak dapat dikategorikan menjadi intensif (terutama di P. Jawa), ekstensif (di luar Pulau Jawa) dan semi-intensif. Sistem pemeliharaan ekstensif dan semi-intensif biasanya menggunakan padang penggembalaan sebagai area sumber pakan untuk ternaknya dengan cara digembala, baik itu siang maupun malam. Sehingga perbaikan maupun pengembangan padang penggembalaan sangat diperlukan, agar pemeliharaan ternak secara ekstensif dapat menghasilkan produksi ternak yang optimal dan berkelanjutan.

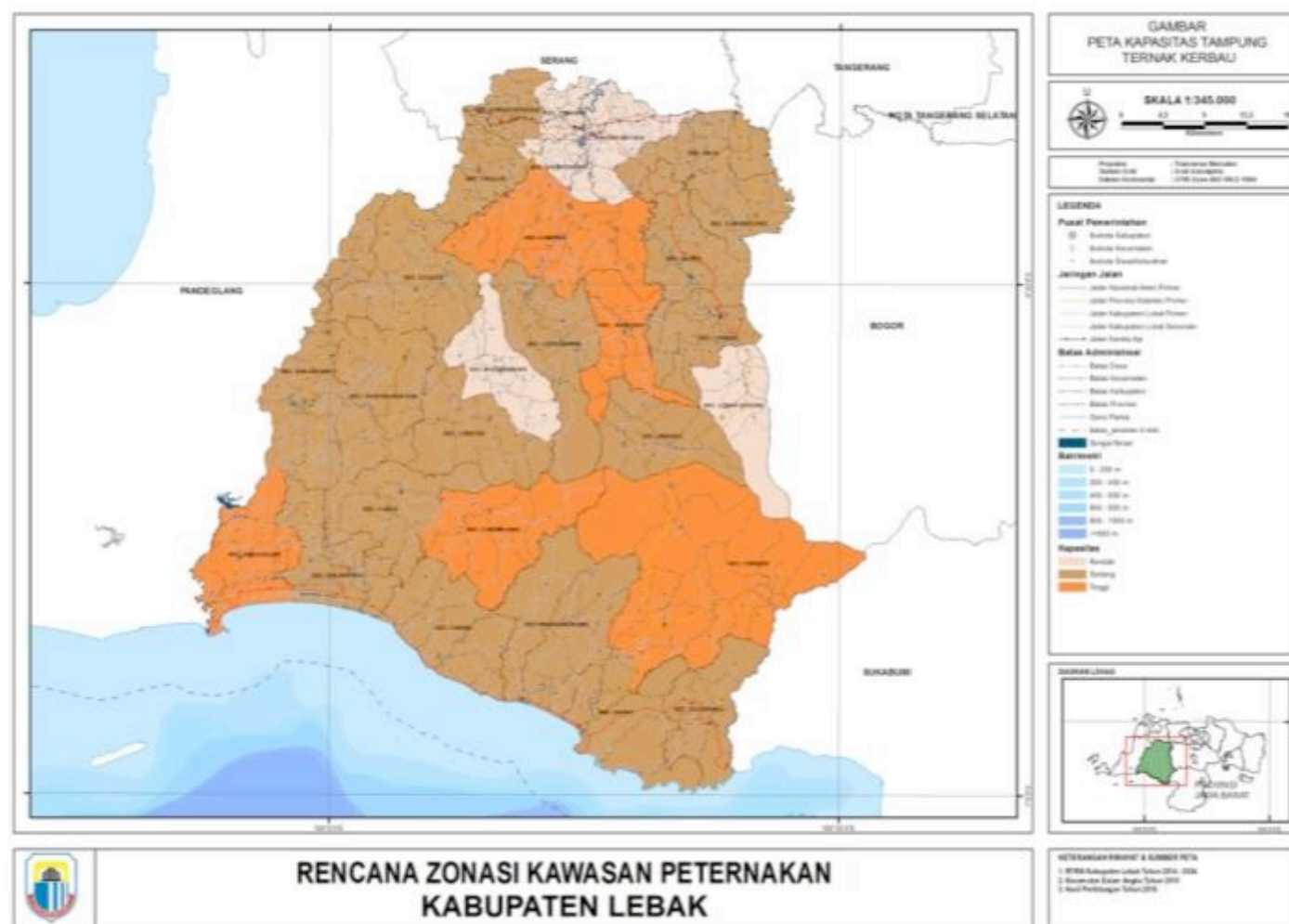
Padang rumput alam yang ada di Indonesia mempunyai komposisi rumput alam yang berbeda-beda. Padang penggembalaan alam yang diperbaiki akan meningkatkan kapasitas tampungnya. Penyisipan *Centrosema pubescens* pada padang penggembalaan alam meningkatkan kapasitas tampung dari 0.38 ekor/ha menjadi 0,93 ekor/ha (Bahar et al., 1997). Dalam pengelolaan padang penggembalaan atau pastura, baik tanaman maupun ternak perlu mendapat perhatian. Sehingga padang penggembalaan dapat digunakan secara berkelanjutan dan produksi ternak optimal.

Gambar 5.3
Peta Kapasitas Tampung Ternak Sapi, Kambing & Domba



Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak

Gambar 5.4
Peta Kapasitas Tampung Ternak Kerbau



Tujuan perbaikan padang penggembalaan adalah untuk meningkatkan kapasitas tampung dan kualitas hijauannya sehingga produksi ternak meningkat tanpa merusak habitat dan lingkungan. Namun perbaikan padang penggembalaan sangat sulit untuk dilaksanakan apabila status lahan tidak jelas karena pada kondisi status lahan tidak jelas, karena tidak adanya kejelasan pihak yang akan bertanggung jawab dan mengelola lahan penggembalaan.

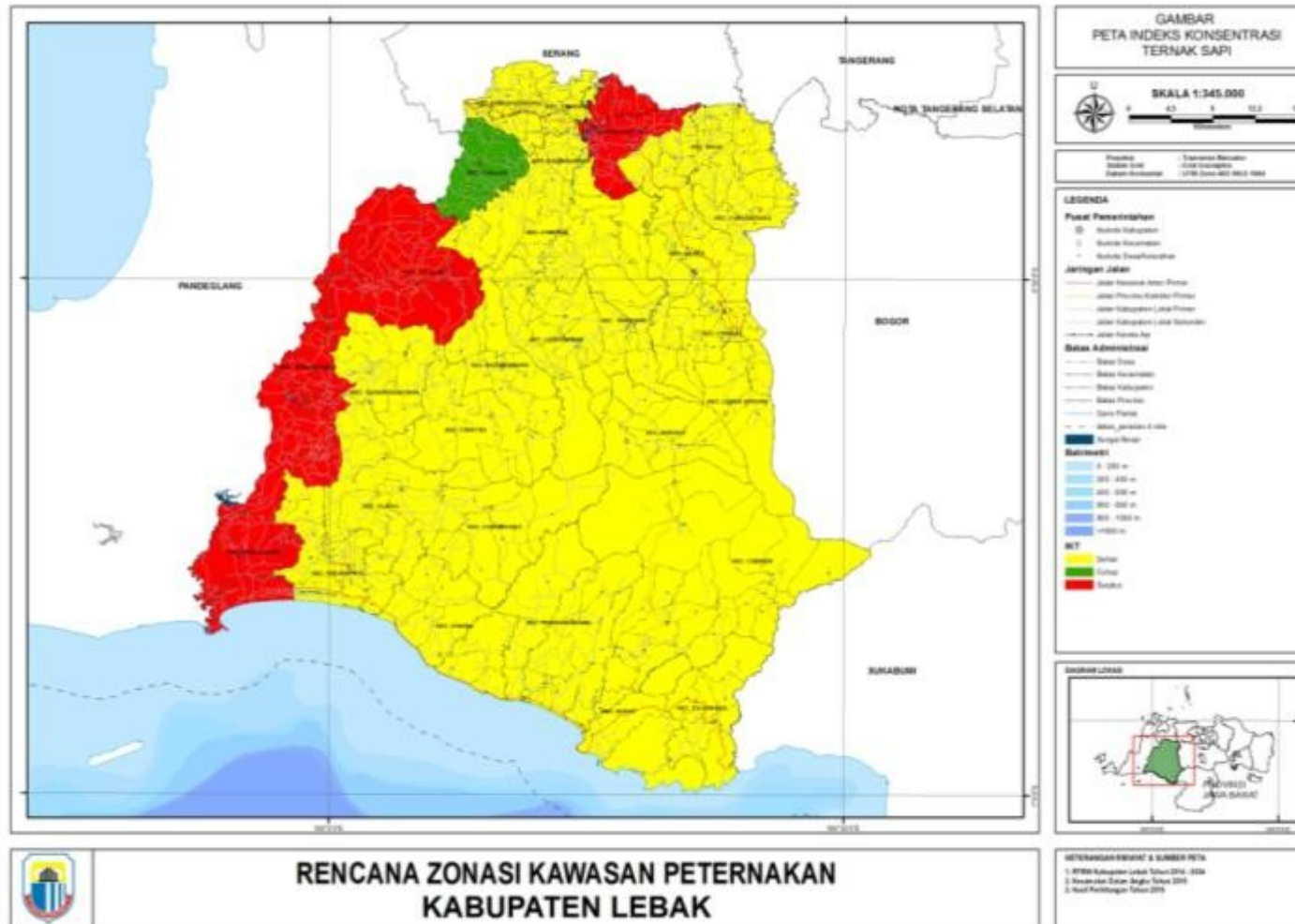
Perbaikan padang penggembalaan meliputi perbaikan teknis dan nonteknis. Perbaikan yang bersifat teknis antara lain perbaikan vegetasi (introduksi rumput unggul dan leguminosa atau introduksi (legumiosa pada padang rumput alam) kombinasi dengan pemupukan, penyediaan sumber air (embung-embung), pemagaran (bila diperlukan), dan tak kalah pentingnya adalah manajemen penggembalaan untuk menjamin keanekaragaman tanaman tetap terjaga, sehingga tidak terjadi overgrazing (penggembalaan yang berlebihan) atau undergrazing (penggembalaan kurang). Pada kasus overgrazing, padang rumput menjadi gundul dan sulit untuk tumbuh kembali yang lama kelamaan akan tumbuh gulma yang berbatang keras atau gulma beracun atau undergrazing. dimana ada sektor-sektor padang rumput yang tidak pernah diinjak oleh ternak, dengan demikian rumput akan tumbuh semakin tua dan keras sehingga ternak tidak akan menyentuhnya. Akhirnya rumput berubah menjadi gulma. Untuk menghindari overgrazing atau undergrazing, padang penggembalaan sebaiknya dibagi menjadi paddock-paddock (Nurhayati, 2011)

5.2.3 Indeks Konsentrasi Ternak

Indeks konsentrasi ternak kecamatan ditentukan dari nisbah populasi ternak kecamatan terhadap rata-rata populasi kecamatan dalam kabupaten. Indeks konsentrasi ternak dapat menggambarkan kepadatan populasi ternak komparatif antar kecamatan dalam satu kabupaten. Secara tidak langsung indeks konsentrasi ternak juga menggambarkan kecocokan wilayah kecamatan pada jenis ternak tertentu berdasarkan populasi ternak yang ada. Indeks konsentrasi ternak menjadi cerminan penerimaan masyarakat di suatu kecamatan terhadap komoditas ternak tertentu berdasarkan kualitas dan kuantitas usaha peternakan.

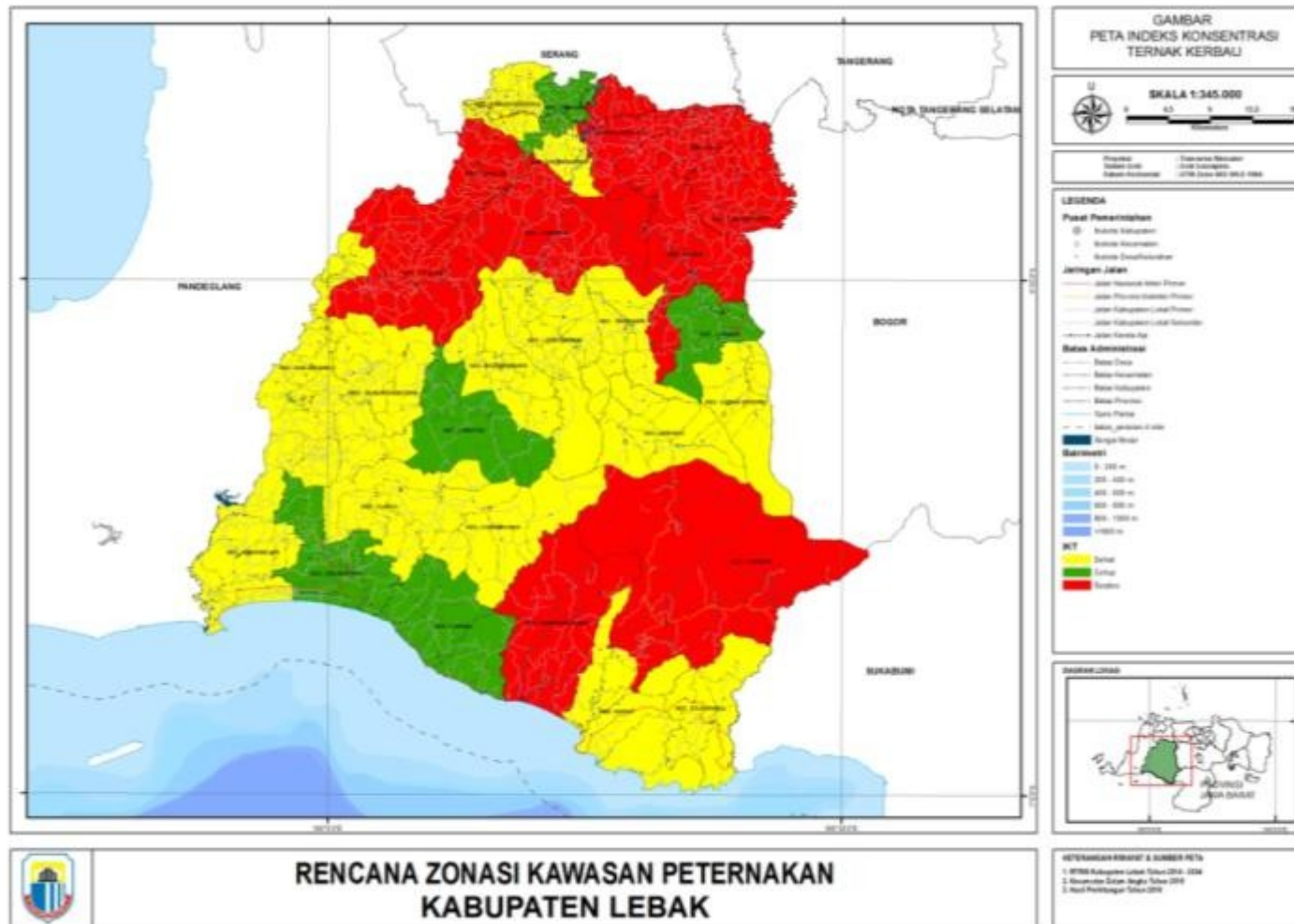


Gambar 5.5
Indeks Konsentrasi Ternak Sapi

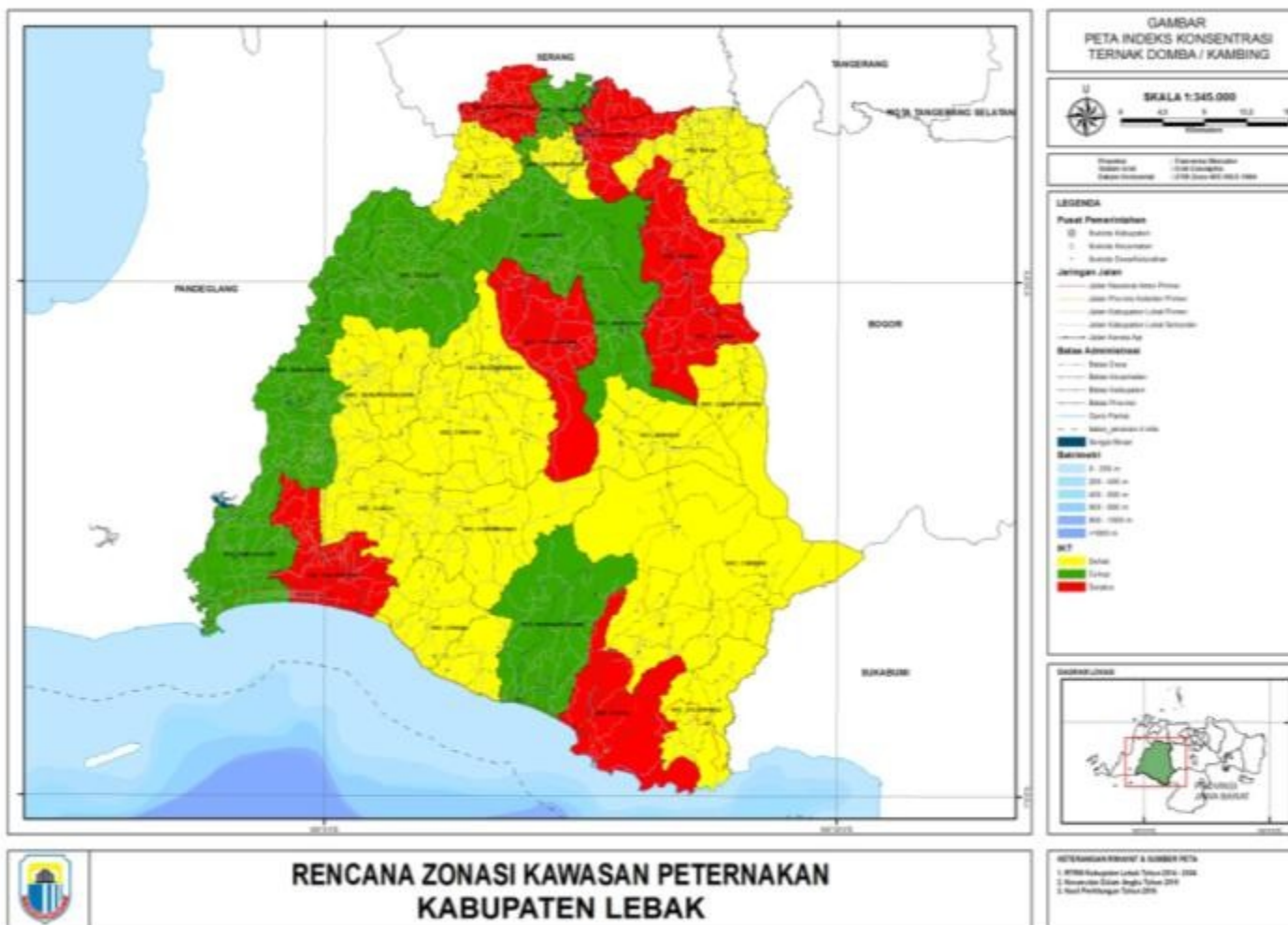




Gambar 5.6
Indeks Konsentrasi Ternak Kerbau

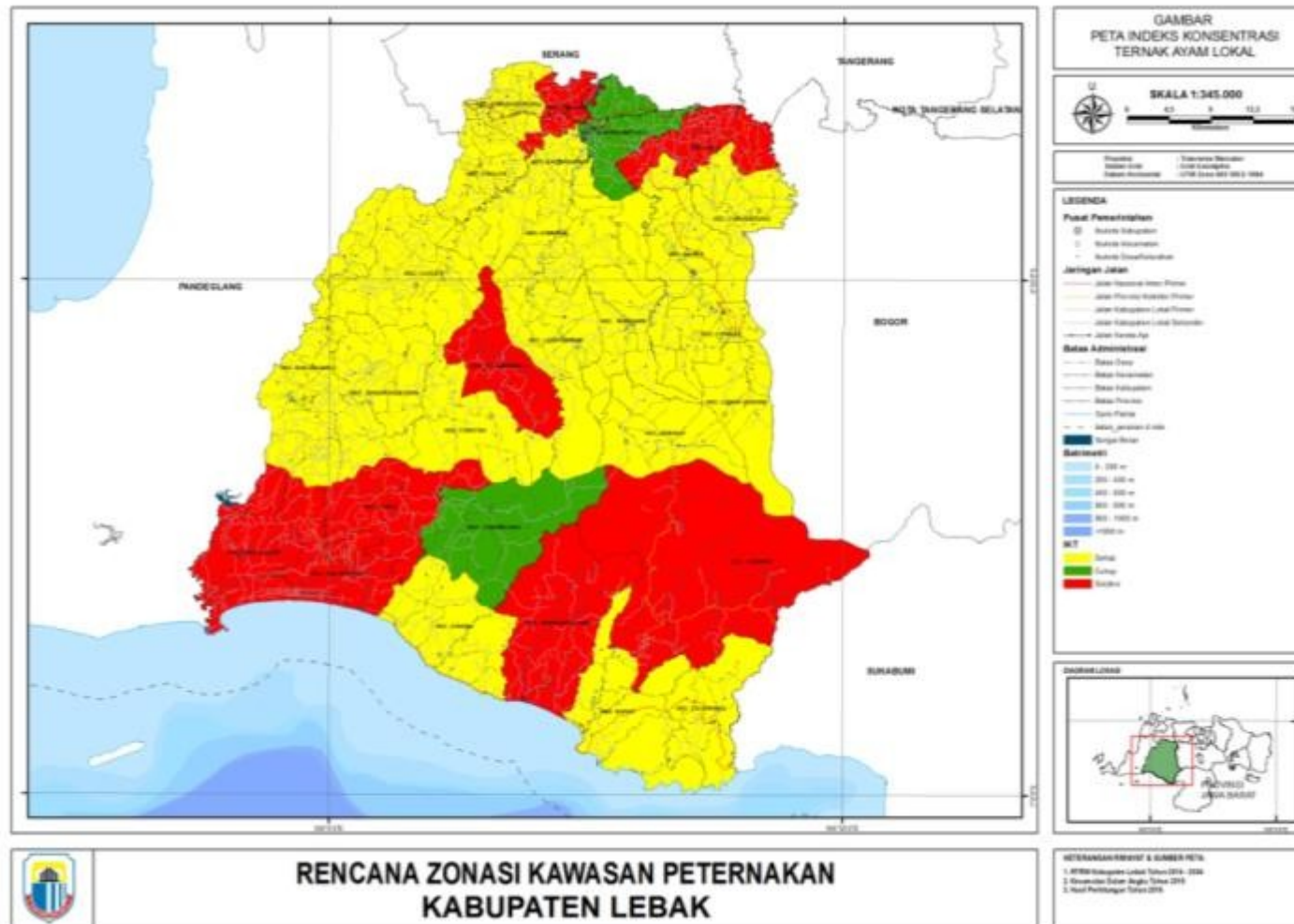


Gambar 5.7
Indeks Konsentrasi Ternak Kambing/Domba



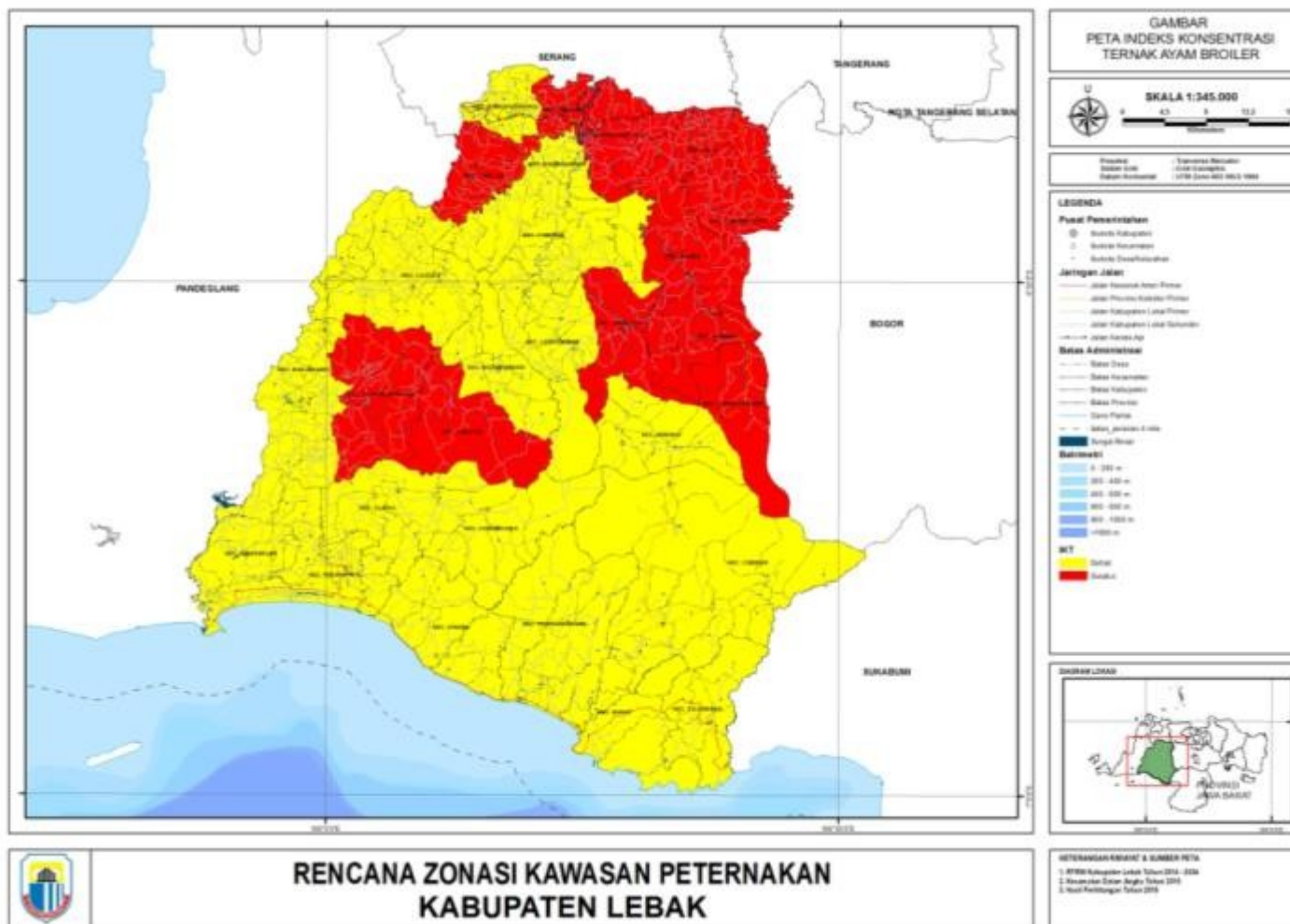


Gambar 5.8
Indeks Konsentrasi Ternak Ayam Lokal

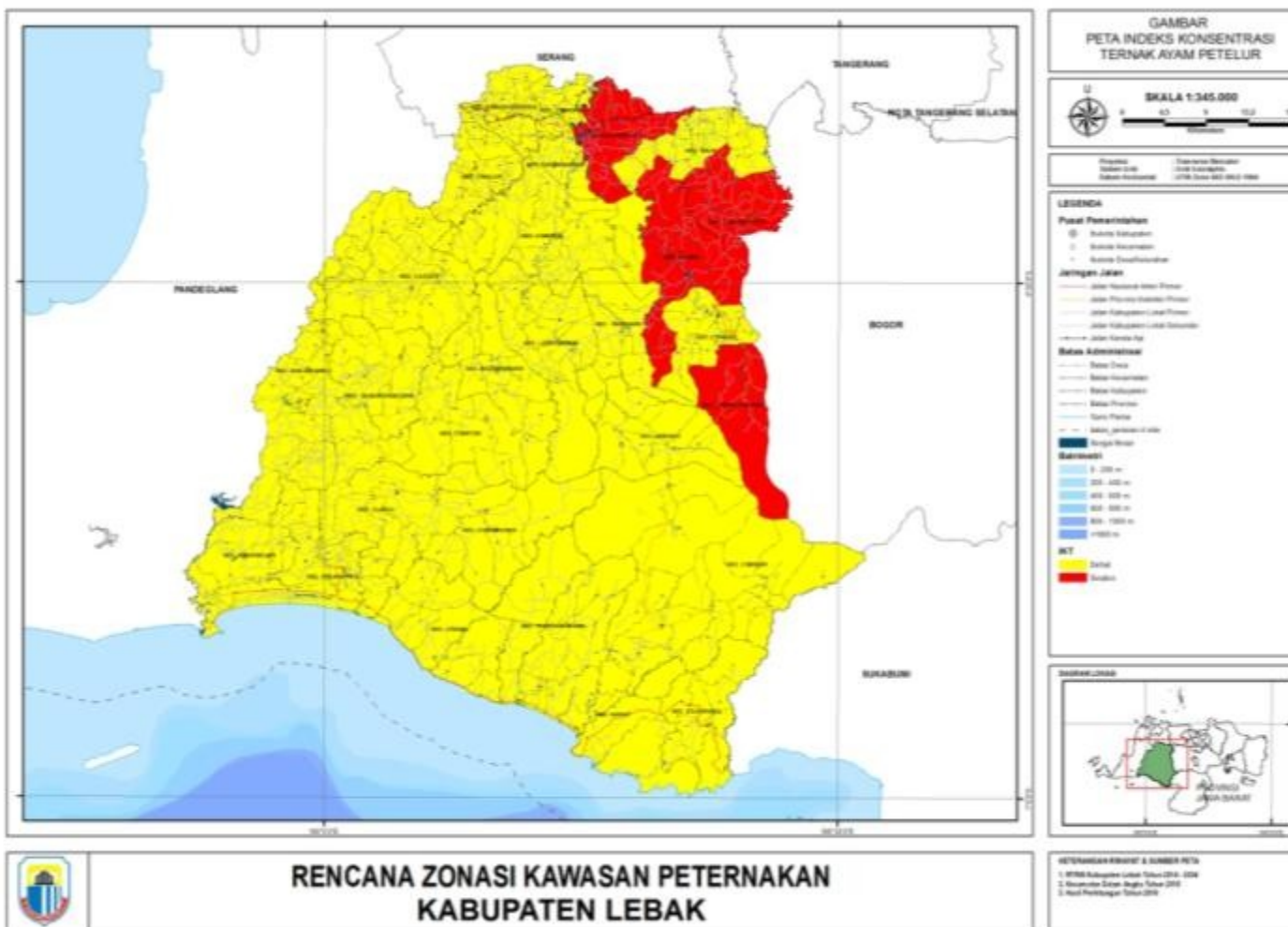




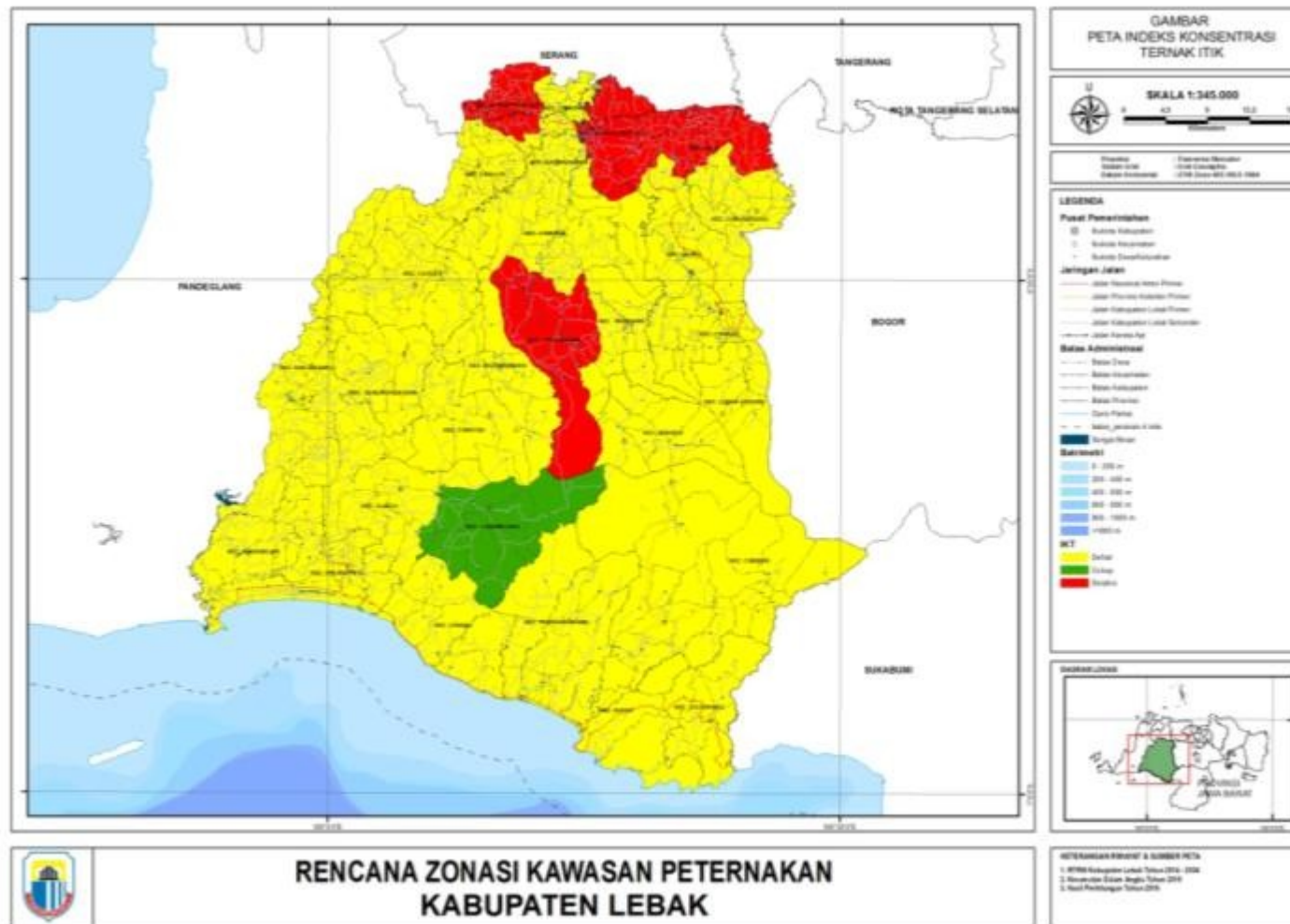
Gambar 5.9
Indeks Konsentrasi Ternak Ayam Broiler



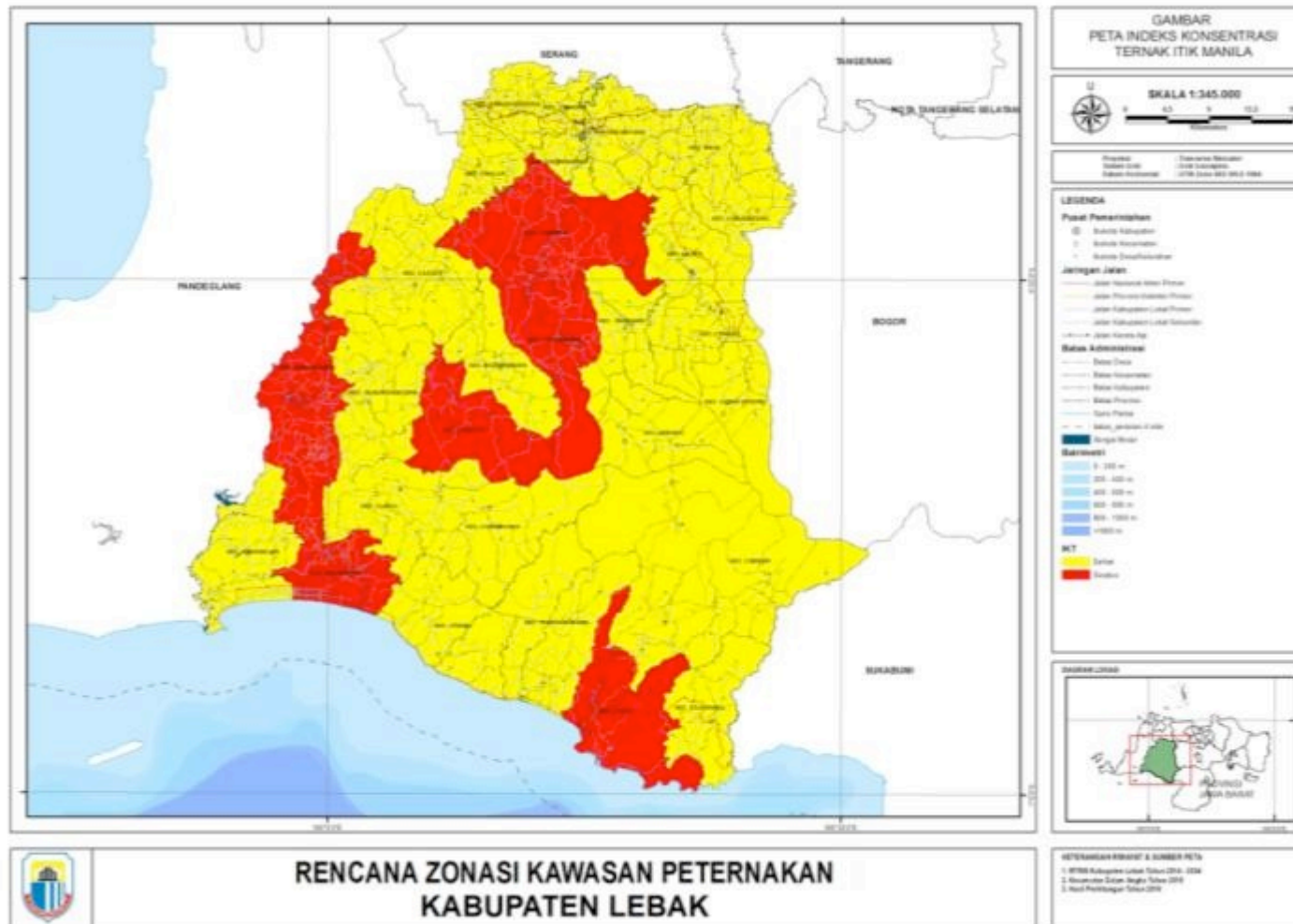
Gambar 5.10
Indeks Konsentrasi Ternak Ayam Petelur



Gambar 5.11
Indeks Konsentrasi Ternak Itik



Gambar 5.12
Indeks Konsentrasi Ternak Itik Manila



Indeks konsentrasi ternak kecamatan dengan nilai lebih dari satu memiliki arti kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan populasi ternak dominan dibandingkan dengan rata-rata kecamatan lainnya, bila nilai indeks konsentrasi ternak bernilai satu artinya kecamatan tersebut hanya dapat mencukupi kebutuhan intern kecamatan itu sendiri, dan bila nilai indeks konsentrasi ternak kurang dari satu artinya kecamatan tersebut minim atau kurang terhadap kecukupan komoditi ternak tersebut.

Indeks konsentrasi ternak di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lebak berbeda pada setiap komoditinya. Konsentrasi ternak tertinggi untuk komoditi sapi potong berada di Kecamatan Rangkasbitung, sedangkan untuk komoditi kerbau populasi terbanyak berada di Kecamatan Sajira, Maja dan Curug bitung, komoditi ternak kambing dan domba hampir merata di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Sajira, Bayah, Cipanas dan Rangkasbitun. Konsentrasi ternak unggas juga tersebar di beberapa wilayah kecamatan seperti ternak ayam lokal populasi terbanyak berada di Kecamatan Cibadak, populasi ayam broiler tersebar di beberapa wilayah kecamatan seperti Kecamatan Cipanas (populasi terbanyak), Sajira, Muncang, Lebak Gedong dan Curug Bitung, sedangkan untuk konsentrasi ternak itik berada di Kecamatan Maja dan itik manila terpusat di Kecamatan Leuwidamar.

5.2.4 Tingkat Pengetahuan Peternak

Kriteria tingkat pengetahuan peternak diperlukan dalam penentuan pusat pertumbuhan ternak ruminansia yang relatif membutuhkan keterampilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 tahun 2013, kelompok tani terbagi menjadi 4 kategori yakni kelompok tani kelas pemula, kelompok tani kelas lanjut, kelompok tani kelas madya, kelompok tani kelas utama.

Menurut Abdulah (2008), Kelompok tani ternak kelas pemula memiliki ciri-ciri yakni anggota kelompok memahami pentingnya berkelompok untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Kelompok sudah memiliki struktur organisasi, pengurus, anggota, retariat, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), buku administrasi (buku notulen, buku anggota buka simpan pinjam, buku pengurus, buku arsip kelompok, buku kas, dll).Kelompok tani ternak kelas lanjut memiliki ciri-ciri yakni AD/ART telah dijalankan semestinya, pertemuan rutin dilakukan minimal sebulan sekali dan hasil pertemuan tercatat, kelompok mampu mengidentifikasi masalah dan menyusun perencanaan, kegiatan usahaproduktif telah dimiliki oleh kelompok.

Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak

Gambar 5.13
Peta Tingkat Pengetahuan Peternak



Kelompok mempunyai akses pinjaman kredit karena modal yang dimiliki kelompok layak mendapatkan kredit. Status kelas kelompok tani madya yaitu kelompok telah mengembangkan jaringan kerja dengan lembaga lain (pasar, keuangan). Kelompok memiliki data dasar yang mendukung aspek pemasaran hasil pertanian/peternakan, dan mempunyai usaha penanganan pasca panen. Sedangkan kelompok tani ternak kelas utama/mandiri adalah kelompok tani ternak yang telah memiliki kelembagaan kelompok yang kuat sehingga dapat melakukan evaluasi dan perencanaan, melakukan monitoring secara rutin. Kelembagaan kelompok telah berkembang, pendapatan anggota jelas meningkat dan memiliki akses terhadap permodalan.

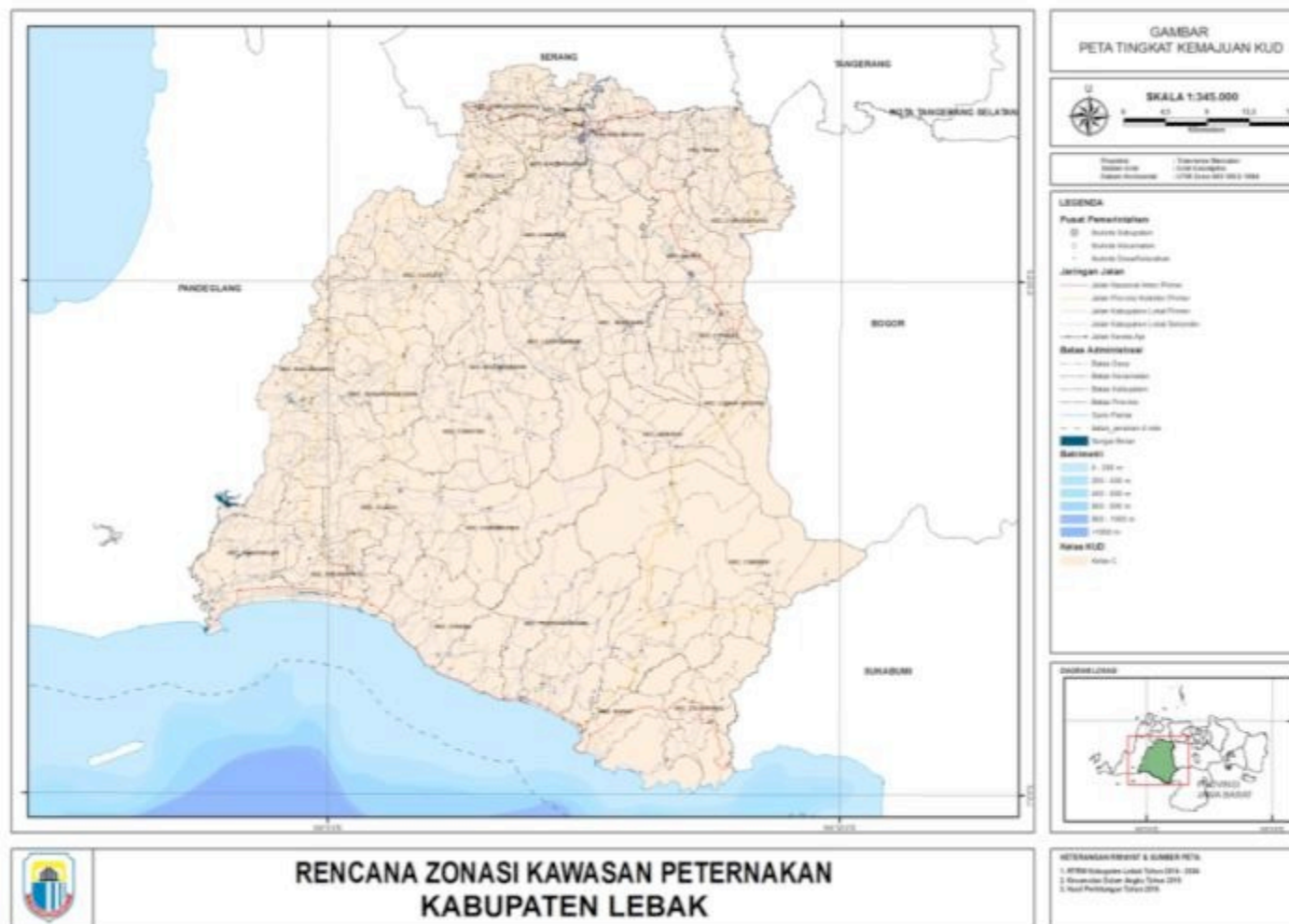
Berdasarkan data yang diperoleh, kelompok peternak yang ada di Kabupaten Lebak berkisar antara 188 kelompok yang tersebar di 21 Kecamatan. Keseluruhan kelompok peternak tersebut tergolong dalam klasifikasi kelompok peternak pemula. Hal ini perlu diperhatikan, kelas kelompok peternak pemula dianggap memiliki informasi dan kemampuan pemeliharaan ternak yang masih terbatas. Diperlukan adanya upaya peningkatan pengetahuan peternak dengan berbagai cara seperti melakukan penyuluhan mengenai manajemen pemeliharaan ternak, pelatihan pembuatan pakan ternak dan pelatihan dan penyuluhan lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan peternak dan kelompok ternak, sehingga proses pemeliharaan ternak yang dilakukan dapat lebih efisien, produktifitas ternak meningkat sehingga dapat meningkatkan pendapatan peternak.

5.2.5 Tingkat Kemajuan KUD

Tingkat kemajuan Koperasi Unit Desa (KUD) dibutuhkan terutama pada penentuan pusat pertumbuhan sapi perah. Kondisi peternakan sapi perah sangat memerlukan kelembagaan pemasaran hal ini karena produk peternakan sapi perah yakni susu merupakan bahan pangan yang sangat mudah rusak serta konsumen susu biasanya adalah perusahaan pengolahan susu yang membutuhkan bahan baku dalam jumlah yang besar sehingga perlu diadakannya lembaga pemasaran sebagai pengumpul atau media penghubung antara peternak dengan konsumen.

Di Kabupaten Lebak tidak memiliki populasi sapi perah karena mayoritas ternak sapi yang dipelihara adalah sapi potong, sehingga keberadaan koperasi ini tidak terlalu berpengaruh pada kondisi usaha peternakan komoditi lainnya. Koperasi yang ada berjumlah terbatas dengan klasifikasi koperasi yang belum diketahui.

Gambar 5.14
Peta Tingkat Kemajuan KUD



5.3 ANALISIS BERDASARKAN SARANA DAN PRASARAN PENDUKUNG PETERNAKAN

Analisis sarana dan prasarana pendukung usaha peternakan meliputi analisis fasilitas layanan peternakan, jarak ke pusat sub wilayah pengembangan (SWP), ketersediaan listrik, kemudahan transportasi dan jarak ke Industri Pengolahan susu.

5.3.1 Fasilitas Layanan Peternakan

Fasilitas layanan peternakan ini merupakan salah satu kriteria untuk menentukan Pusat Pertumbuhan ternak selain ternak nani dan unggas. Fasilitas layanan peternakan yang dimaksud meliputi fasilitas layanan pembinaan/penyuluhan, layanan kesehatan ternak, layanan pemasaran ternak dan hasilnya, layanan pengadaan sarana produksi, layanan penelitian dan pengembangan peternakan dan layanan lain seperti rumah potong hewan (RPH) dan holding ground.

Fasilitas pendukung usaha peternakan yang ada di Kabupaten Lebak tersebar di beberapa kecamatan sehingga skor untuk masing-masing kecamatan tidak maksimal. Fasilitas rumah potong hewan dan pasar hewan terletak di kecamatan Rangkas Bitung, Pos kesehatan hewan (kewan) terletak di kecamatan Cikulur, Wanasalam dan Cibadak, sedangkan pos Inseminasi Buatan (IB) berada di Kecamatan Sajira, Panggarangan, Leuwidamar dan Kalanganyar.

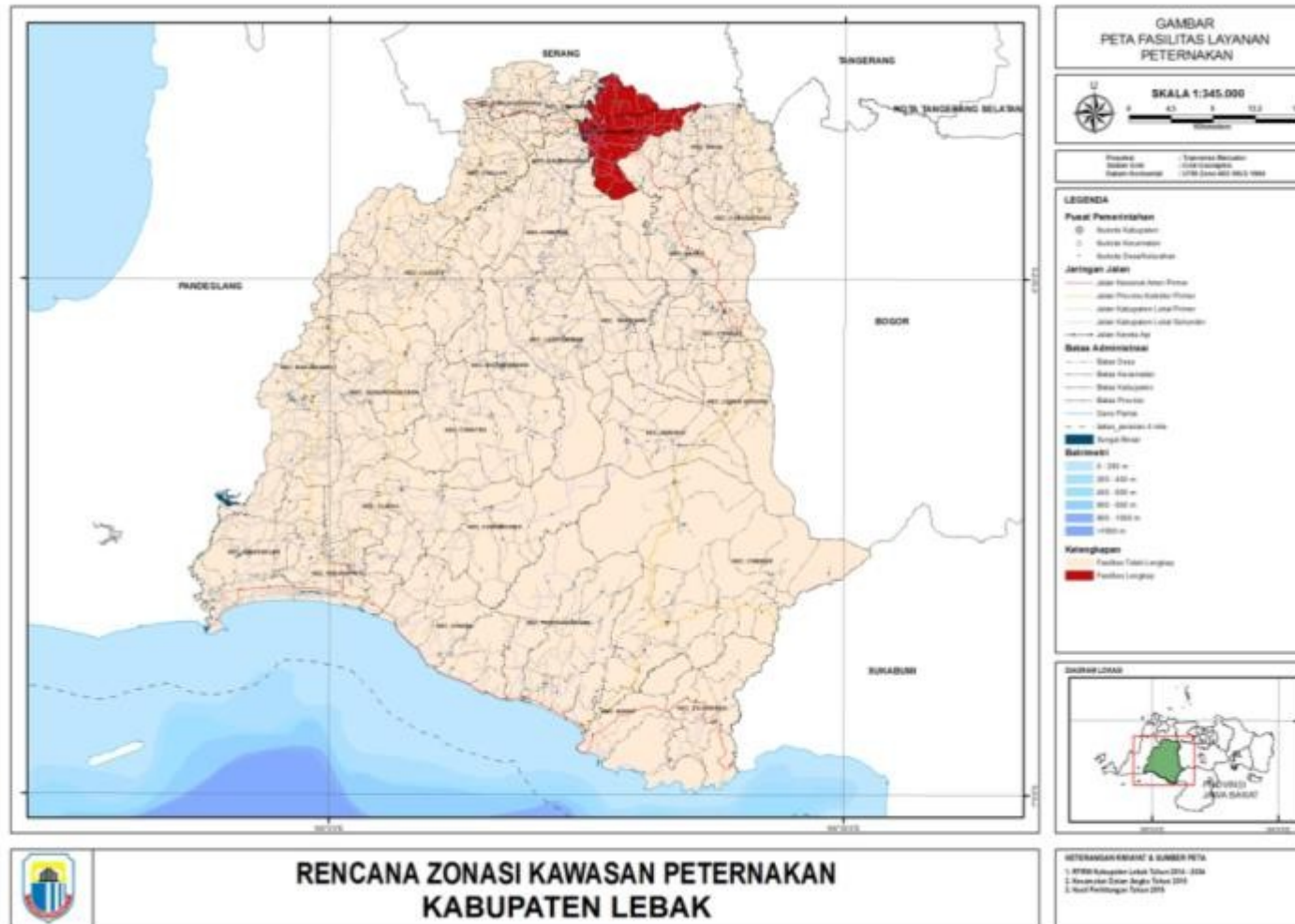
5.3.2 Jarak ke Sub Pusat Wilayah Pengembangan

Jarak kecamatan terhadap SWP dapat menjadi indikator kedekatan kecamatan tersebut terhadap fasilitas pembangunan dan peluangnya untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Jarak ke pusat SWP ditentukan dalam satuan jarak dan waktu tempuh yang diperlukan ke pusat SWP. Jarak kecamatan ke pusat SWP terbagi menjadi 3 kategori yakni kategori dekat apabila pusat SWP dapat ditempuh dalam satu hari pulang pergi dari ibu kota kecamatan, kategori sedang bila pusat SWP dapat dicapai dalam satu hari perjalanan darat/sungai atau kurang dan jauh bila pusat SWP ditempuh dalam waktu lebih dari satu hari perjalanan darat/sungai atau harus melewati perjalanan laut.

Kriteria jarak kecamatan ke pusat SWB ditentukan dengan menentukan jarak dari pusat kecamatan ke Rangkas bitung (sebagai pusat SWP). Beberapa kecamatan terjauh dari pusat SWP diantaranya adalah Kecamatan Panggarangan, Bayah, Cilonggrang, Cibeber dan Cihara, dimana jarak dari pusat kecamatan ke Rangkas bitung mencapai lebih dari 100 km.

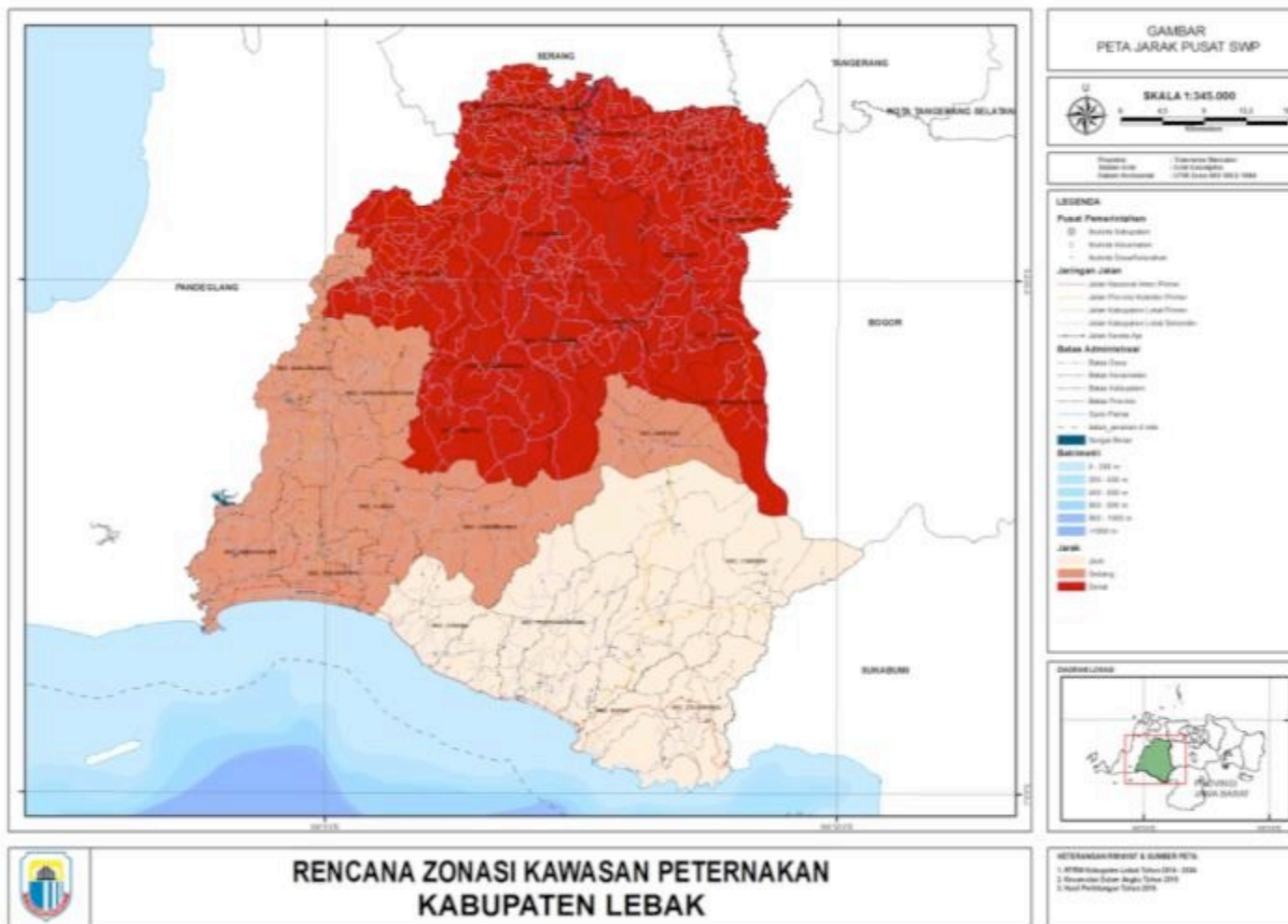
Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak

Gambar 5.15
Peta Fasilitas Layanan Peternakan



Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak

Gambar 5.16
Peta Jarak ke Sub Pusat Wilayah Pengembangan



5.3.3 Ketersediaan Listrik

Ketersediaan listrik ini sangat penting untuk mendukung usaha peternakan terutama komoditi ternak unggas. Pemeliharaan ternak unggas memerlukan ketersediaan listrik terutama pada periode awal pemeliharaan (periode starter) dimana ayam membutuhkan listrik sebagai salah satu sumber penghangat pengganti indukan (brooder) dan sebagai sumber cahaya. Cahaya dapat berfungsi sebagai penghangat dan sebagai sumber rangsangan pertumbuhan ayam. Selain itu, ketersediaan listrik penting untuk lokasi peternakan ayam terutama pada peternakan ayam dengan sistem perkandangan tertutup (closed house), dimana sangat bergantung dengan ketersediaan listrik untuk menjalankan peralatan perkandangan yang umumnya otomatis dan diherakan oleh energi listrik. Ketersediaan listrik di Kecamatan di Kabupaten Lebak telah tersebar dengan baik. Umumnya setiap kecamatan sudah terfasilitasi dengan ketersediaan listrik, sehingga seluruh kecamatan di Kabupaten Lebak berpotensi untuk dijadikan wilayah pusat pengembangan ternak unggas.

5.3.4 Kemudahan Transportasi

Kemudahan transportasi ini meliputi kondisi jalan dan prasarana transportasi lainnya. Hal ini penting terutama pada saat pengiriman ternak dari produsen ke konsumen atau pada saat pengiriman bibit ternak yang akan dipelihara. Kondisi jalan dan prasarana yang kurang baik akan menghambat pengiriman ternak dan berpotensi membuat ternak semakin stres yang dapat mempengaruhi produktivitas ternak bahkan dapat menyebabkan kematian sehingga dapat meningkatkan angka mortalitas akibat perjalanan. Kondisi jalan dan prasarana dikecamatan di Kabupaten Lebak cukup baik terlihat dari kondisi jalan yang sebagian besar berupa jalan aspal dengan kondisi yang baik.

Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak

Gambar 5.17
Peta Ketersediaan Listrik



Tabel 5.18
Peta Kemudahan Transportasi



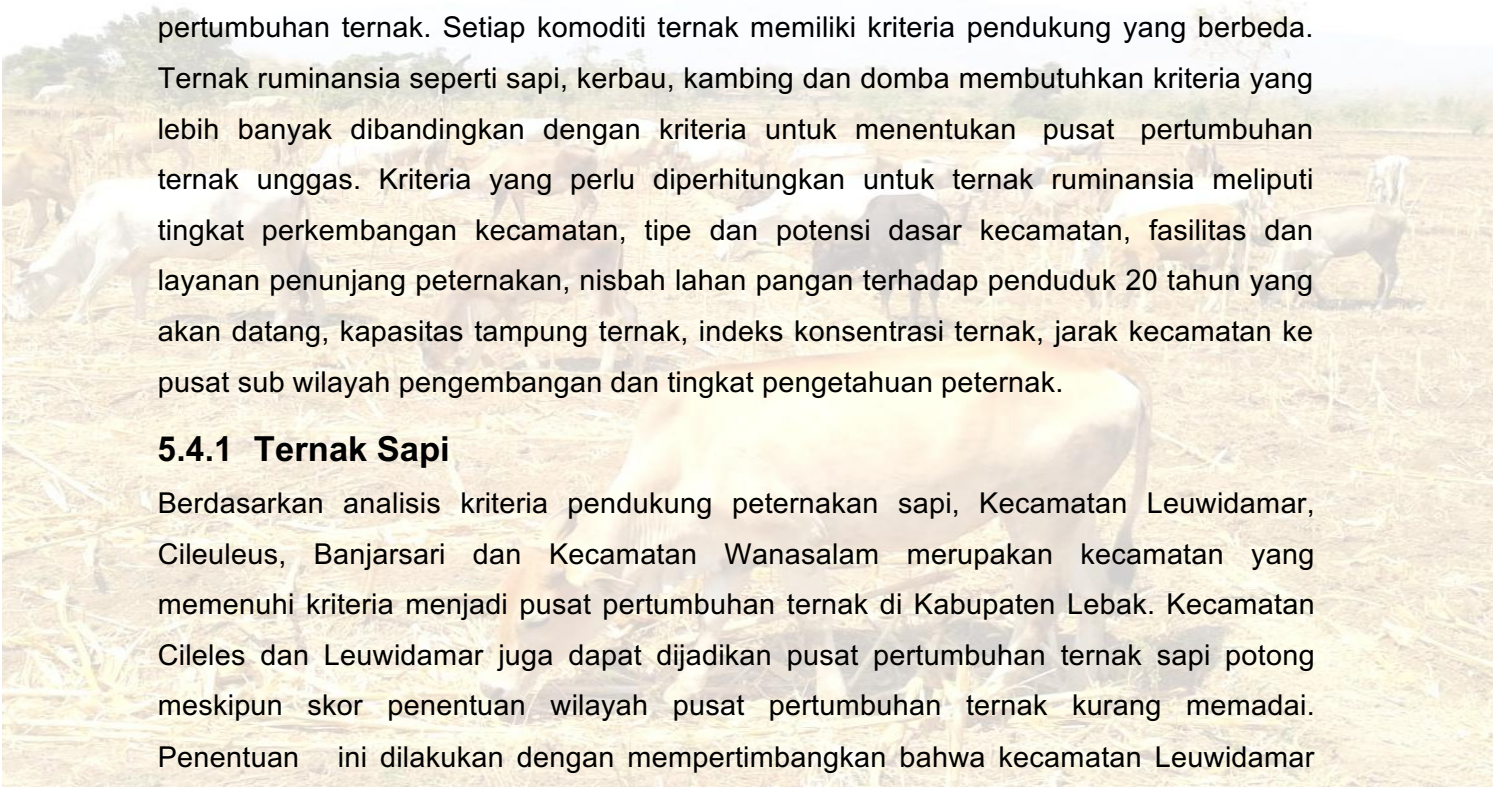
5.4 ANALISIS KECAMATAN DI KABUPATEN LEBAK

Hasil analisis penentuan pusat pertumbuhan ternak berdasarkan Pedoman Penyusunan Tata Ruang Peternakan (1993) di 28 Kecamatan di Kabupaten Lebak pada 8 komoditi ternak disajikan pada Tabel Berikut

Tabel 5.2
Hasil Skor Analisis Penentuan Pusat Pertumbuhan Ternak
Di 28 (Dua Puluh Delapan) Kecamatan Kabupaten Lebak

No	Kecamatan	Sapi Potong	Kambing/Domba	Kerbau	Ayam Lokal	Ayam Broiler	Ayam Petelur	Itik	Itik Manila
1	Cigemblong	50.07	50.07	50.07	81.94	71.94	71.94	81.94	71.94
2	Cikukur	47.48	43.04	57.47	64.44	86.94	64.44	64.44	64.44
3	Cimarga	54.76	59.20	64.75	65.83	65.83	65.83	65.83	88.33
4	Sajira	49.21	59.20	59.20	65.83	88.33	88.33	65.83	65.83
5	Banjarsari	48.10	42.55	38.11	65.83	65.83	65.83	65.83	88.33
6	Malingping	36.88	46.87	41.32	85.56	63.06	63.06	63.06	85.56
7	Wanasalam	46.87	41.32	42.43	85.56	63.06	63.06	63.06	63.06
8	Panggarangan	43.91	48.35	53.90	88.89	66.39	66.39	66.39	66.39
9	Cihara	43.91	43.91	48.35	66.39	66.39	66.39	66.39	66.39
10	Bayah	40.08	50.07	40.08	67.78	67.78	67.78	67.78	90.28
11	Cilograng	38.60	38.60	43.04	64.44	64.44	64.44	64.44	64.44
12	Cibeber	46.99	46.99	56.98	93.33	70.83	70.83	70.83	70.83
13	Cijaku	48.10	48.10	48.10	91.67	69.17	69.17	69.17	69.17
14	Cileles	63.52	57.97	57.97	63.06	63.06	63.06	63.06	63.06
15	Gn Kencana	48.96	48.96	48.96	67.78	90.28	67.78	67.78	67.78
16	Bojong Manik	49.21	49.21	44.77	91.67	69.17	69.17	69.17	69.17
17	Cirinten	50.69	50.69	55.13	69.17	91.67	69.17	69.17	91.67
18	Leuwidamar	64.75	74.74	59.20	65.83	65.83	65.83	88.33	88.33
19	Muncang	49.21	53.65	54.76	65.83	88.33	65.83	65.83	65.83
20	Sobang	44.52	44.52	44.52	67.78	67.78	67.78	67.78	67.78
21	Cipanas	43.04	53.03	47.48	64.44	86.94	64.44	64.44	64.44
22	Lebak gedong	49.21	49.21	44.77	69.17	91.67	91.67	69.17	69.17
23	Warunggunung	36.01	46.00	40.45	68.61	68.61	68.61	91.11	68.61
24	Cibadak	40.45	44.89	44.89	91.11	91.11	68.61	68.61	68.61
25	Rangkas bitung	70.42	70.42	65.98	78.61	91.11	91.11	91.11	68.61
26	Kalanganyar	34.16	34.16	34.16	64.44	64.44	64.44	64.44	64.44
27	Maja	44.89	44.89	54.88	91.11	91.11	68.61	91.11	68.61
28	Curug Bitung	47.98	47.98	57.97	63.06	85.56	85.56	63.06	63.06

Sumber: Hasil Analisis 2016



Skor kecamatan lebih dari sama dengan 70, memiliki potensi untuk dijadikan pusat pertumbuhan ternak. Setiap komoditi ternak memiliki kriteria pendukung yang berbeda. Ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing dan domba membutuhkan kriteria yang lebih banyak dibandingkan dengan kriteria untuk menentukan pusat pertumbuhan ternak unggas. Kriteria yang perlu diperhitungkan untuk ternak ruminansia meliputi tingkat perkembangan kecamatan, tipe dan potensi dasar kecamatan, fasilitas dan layanan penunjang peternakan, nisbah lahan pangan terhadap penduduk 20 tahun yang akan datang, kapasitas tampung ternak, indeks konsentrasi ternak, jarak kecamatan ke pusat sub wilayah pengembangan dan tingkat pengetahuan peternak.

5.4.1 Ternak Sapi

Berdasarkan analisis kriteria pendukung peternakan sapi, Kecamatan Leuwidamar, Cileuleus, Banjarsari dan Kecamatan Wanasalam merupakan kecamatan yang memenuhi kriteria menjadi pusat pertumbuhan ternak di Kabupaten Lebak. Kecamatan Cileles dan Leuwidamar juga dapat dijadikan pusat pertumbuhan ternak sapi potong meskipun skor penentuan wilayah pusat pertumbuhan ternak kurang memadai. Penentuan ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa kecamatan Leuwidamar dan Cileles memiliki skor yang mendekati skor minimum penentuan pusat pertumbuhan ternak. Kecamatan Leuwidamar dan Cileles memiliki kemampuan daya tampung ternak sapi yang tinggi selain itu, di Kecamatan Leuwidamar telah terdapat pos Inseminasi Buatan (IB) yang dapat dimanfaatkan untuk membantu usaha peningkatan populasi ternak sapi potong melalui sistem perkawinan buatan, sedangkan Kecamatan Cileles merupakan salah satu kecamatan dengan indeks konsentrasi ternak sapi yang tinggi. Selain Kecamatan Cileles, indeks konsentrasi ternak sapi yang tinggi juga terdapat di Kecamatan Banjarsari dan Wanasalam.

Selain keterbatasan fasilitas peternakan, rendahnya skor untuk menentukan Pusat Pertumbuhan ternak sapi dikarenakan masih kurangnya pengetahuan peternak terhadap pemeliharaan ternak sapi, hal ini tercermin dari jumlah kelompok tani yang seluruhnya masih berupa kelompok tani ternak kelas pemula. Upaya peningkatan pengetahuan peternak terhadap manajemen pemeliharaan ternak perlu ditingkatkan agar peternak dapat memelihara ternak dengan lebih efisien dan menguntungkan.

5.4.2 Ternak Kambing dan Domba

Pusat pertumbuhan ternak kambing dan domba disarankan berada di Kecamatan Leuwidamar, Cimarga dan Kecamatan Sajira. Hal ini terlihat dari skor penentuan pusat pertumbuhan ternak yang tinggi di dua kecamatan tersebut. Kecamatan Leuwidamar, Cimarga dan Kecamatan Sajira merupakan Kecamatan dengan tingkat perkembangan kecamatan yang paling baik diantara kecamatan lainnya, dimana desa yang berada di kecamatan tersebut termasuk kedalam tingkat desa Swasembada. Ketiga kecamatan tersebut memiliki skor kriteria penentuan pusat pertumbuhan ternak yang mendekati skor Kecamatan Rangkasbitung dan Leuwidamar. Kecamatan Cimarga dan Cileles memiliki kapasitas tampung yang tinggi sedangkan Kecamatan sajira merupakan salah satu Kecamatan dengan indeks konsentrasi ternak yang tinggi selain kecamatan Bayah, Malingping dan Warunggunung. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2014, Kecamatan Malimping, Warunggunung dan Curugbitung akan diarahkan menjadi wilayah Pemukiman dan Bandara.

5.4.3 Ternak Kerbau

Berdasarkan hasil analisa penentuan pusat pertumbuhan ternak kerbau berdasarkan Pedoman Penyusunan Tata Ruang Peternakan (1993), seluruh kecamatan di Kabupaten Lebak tidak mendapatkan skor minimum untuk menjadi pusat wilayah pertumbuhan ternak kerbau. Namun penentuan pusat pertumbuhan ternak tetap dapat dilakukandengan beberapa kebijakan yakni bila suatu kecamatan memiliki potensi daya dukung ternak yang sedang tetapi terkait dengan rencana program investasi prasarana wilayah yang dapat mendukungnya dan terkait dengan suatu program pemasaran hasil dalam skala yang besar.

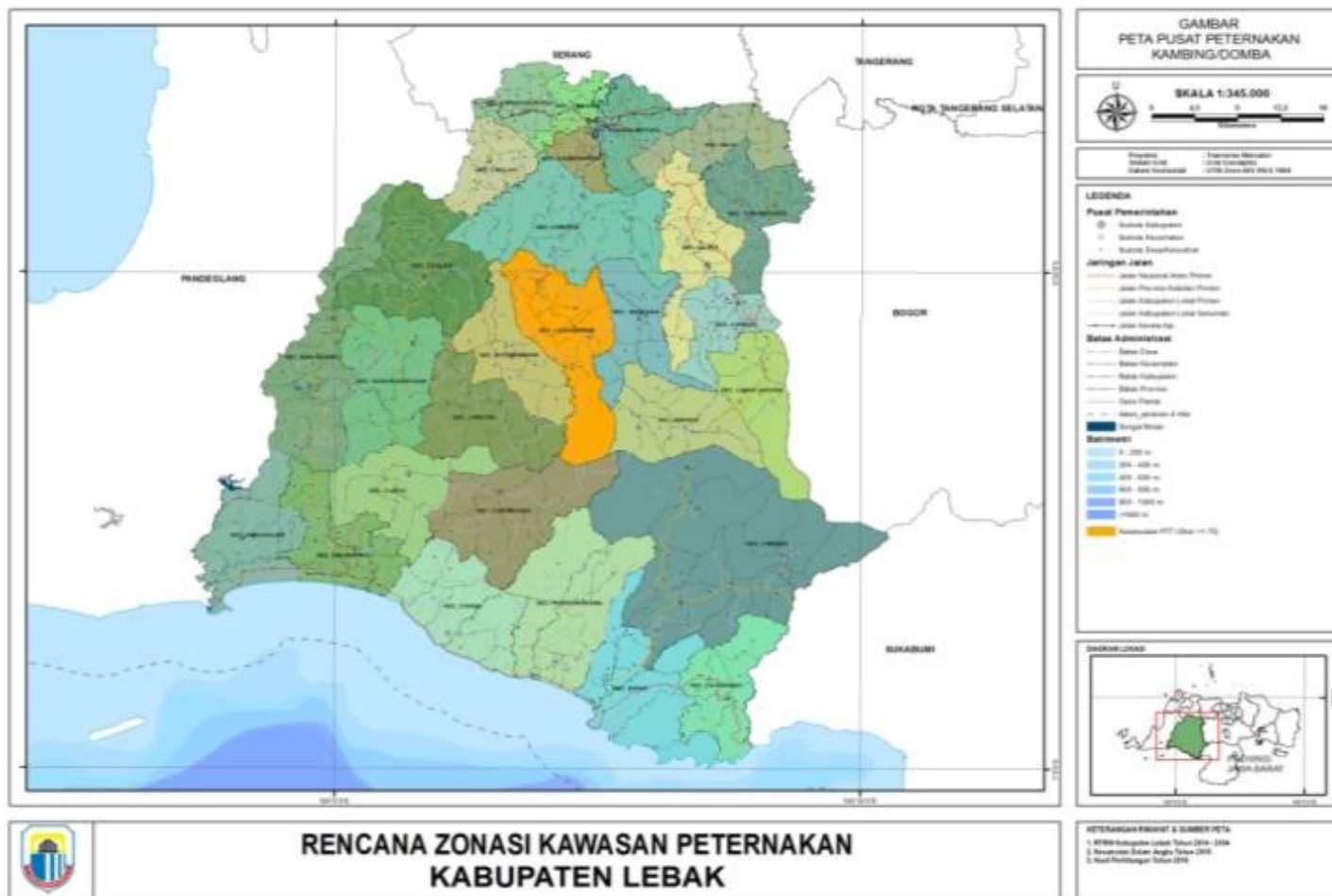
Berdasarkan pertimbangan tersebut, beberapa kecamatan diwilayah Kabupaten Lebak yang dapat dijadikan pusat pertumbuhan ternak kerbau diantaranya adalah Kecamatan Cikulur, Panggaranagn, Cileulus dan Kecamatan Cipanas Sajira, Kecamatan Cikulur memiliki kapasitas tampung ternak yang sedang dengan indeks konsentrasi ternak kerbau yang tinggi, namun kecamatan tersebut memiliki fasilitas pos Inseminasi Buatan yang dapat menunjang usaha ternak kerbau. Sedangkan Kecamatan Cimarga dan Cibeber selain memiliki skor penentuan pusat peternakan yang cukup baik, kedua kecamatan tersebut memiliki kapasitas tampung ternak dan indeks konsentrasi ternak kerbau yang tinggi.

5.4.4 Ternak Unggas

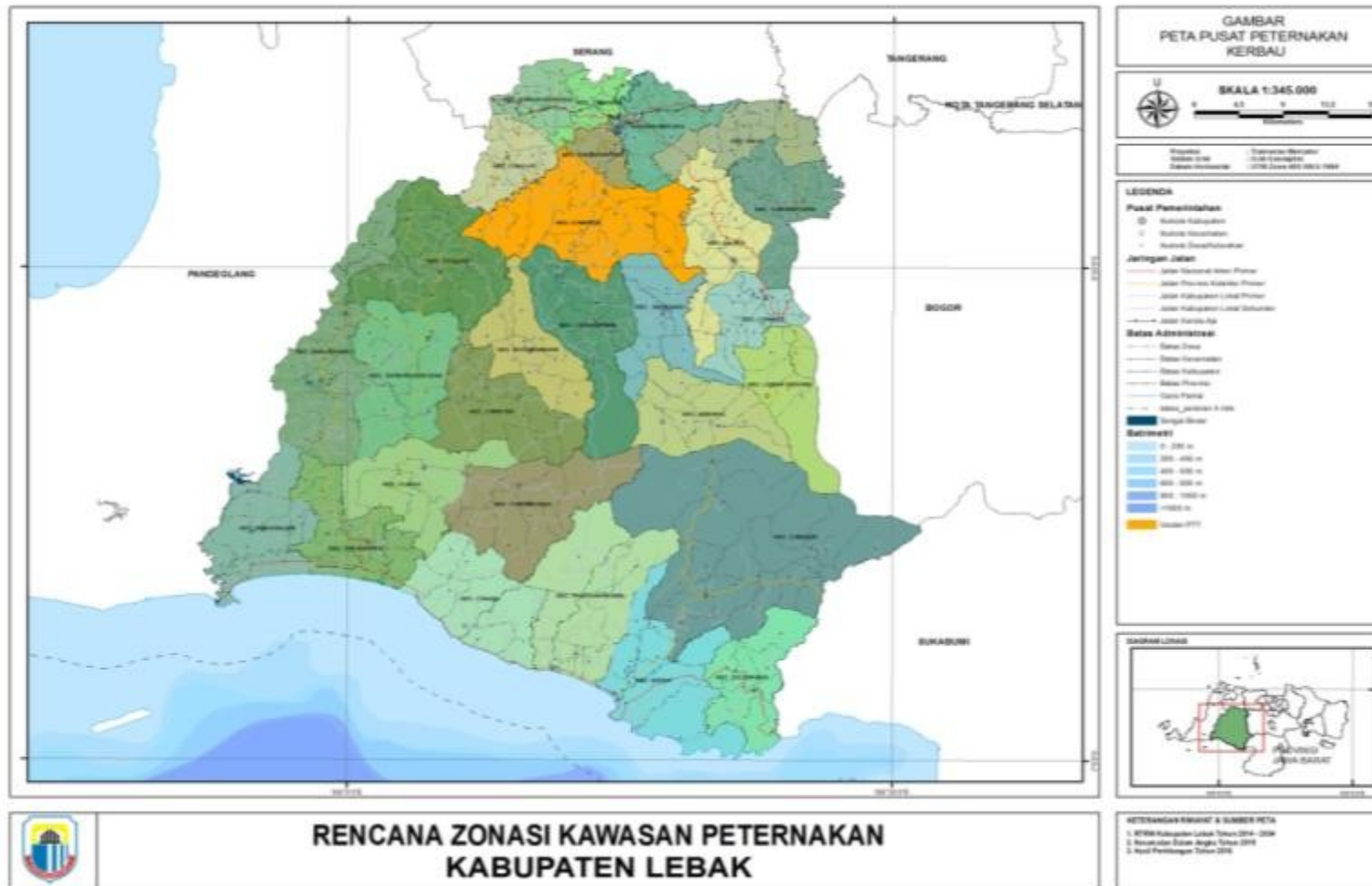
Pusat pertumbuhan ternak unggas membutuhkan kriteria yang lebih sedikit dan mudah dibandingkan dengan penentuan pusat pertumbuhan ternak ruminansia. Hal ini dikarenakan, ternak unggas tidak membutuhkan daya dukung lahan yang luas karena tidak memerlukan pakan hijauan sebagai sumber pakannya. Kebutuhan wilayah usaha peternakan unggas, sebagian besar diperuntukan untuk perkandangan.

Berdasarkan hasil analisis teridentifikasi bahwa pusat pertumbuhan ayam lokal disarankan berada di Kecamatan Cigemblong, Wanasalam, Panggarangan, Cibeber, Cijaku, Bojongmanik dan Kecamatan Cibadak. Untuk pusat pertumbuhan ternak ayam broiler berada di Kecamatan Cigemblong, Cikulur, Sajira, Cibeber, Gunung Kencana, Cirinteun, Muncang, Lebak Gedong dan Kecamatan Cibadak sedangkan pusat pertumbuhan itik manila berada di kecamatan Cigemblong, Cimarga, Banjarsari, Cibeber dan Kecamatan Cirinteun.

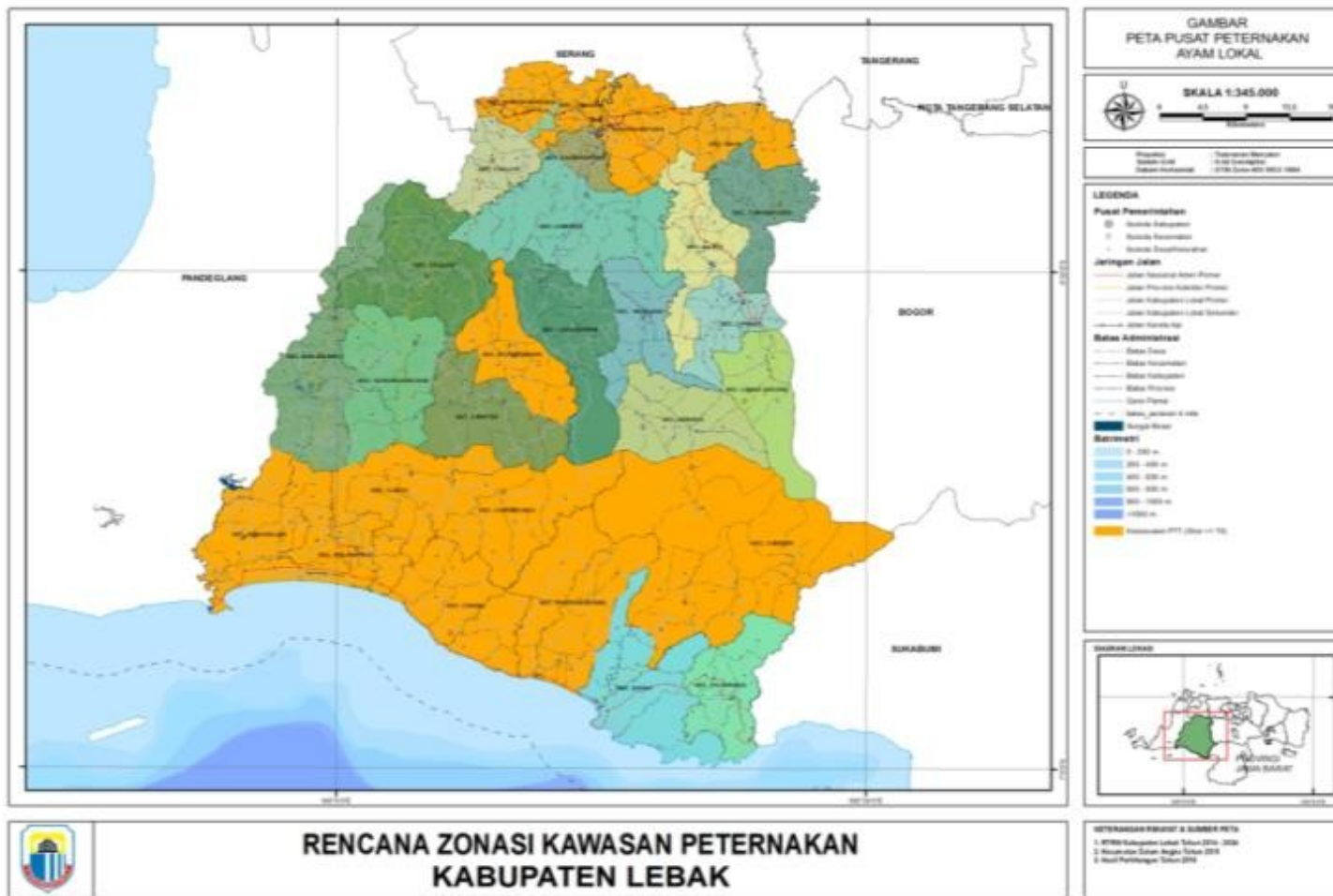
Tabel 5.19
Peta Sebaran Peternakan Kambing/Domba



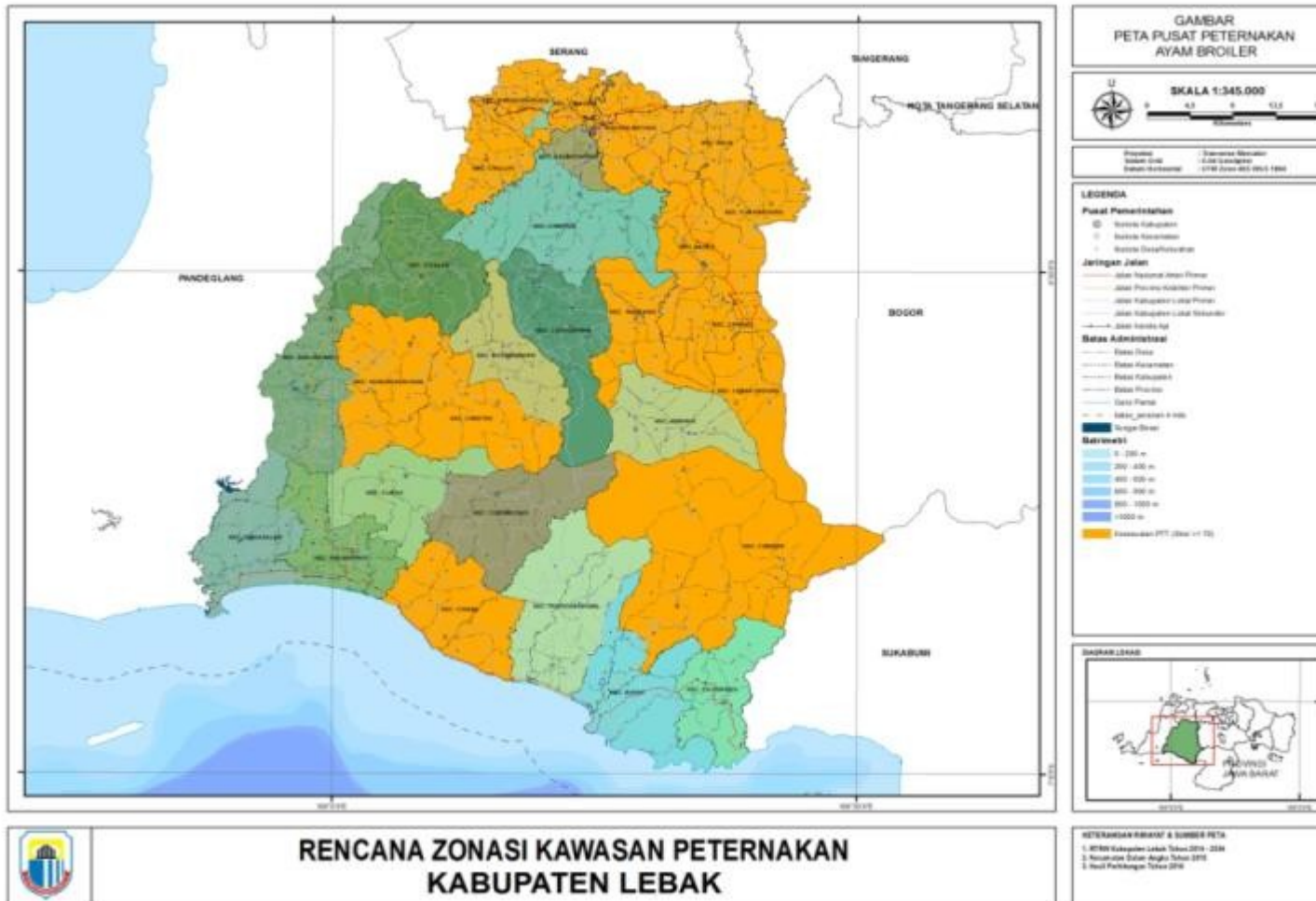
Tabel 5.20
Peta Sebaran Peternakan Kerbau



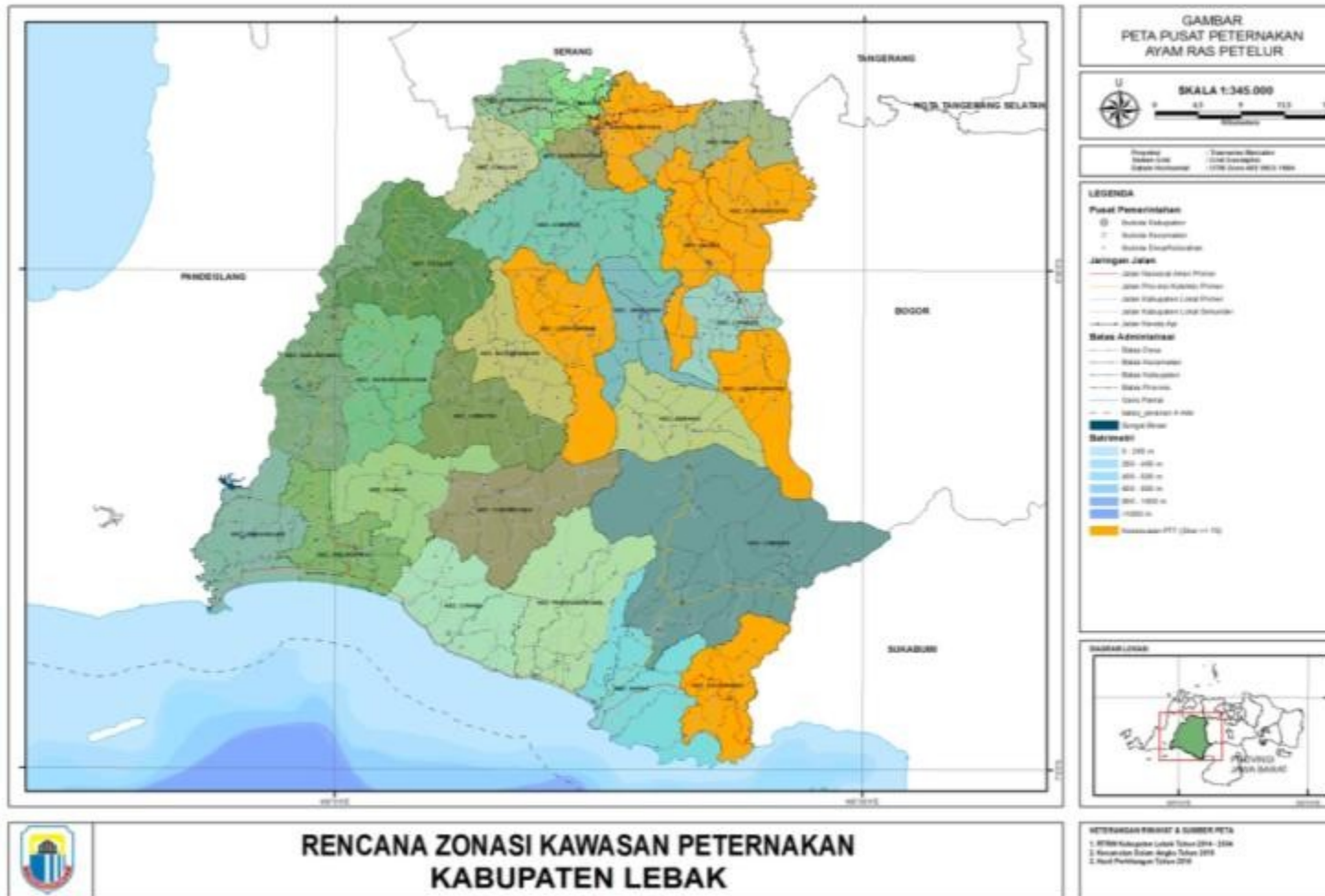
Tabel 5.21
Peta Sebaran Peternakan Ayam Lokal



Tabel 5.22
Peta Sebaran Peternakan Ayam Broiler



Tabel 5.23
Peta Sebaran Peternakan Ayam Petelur

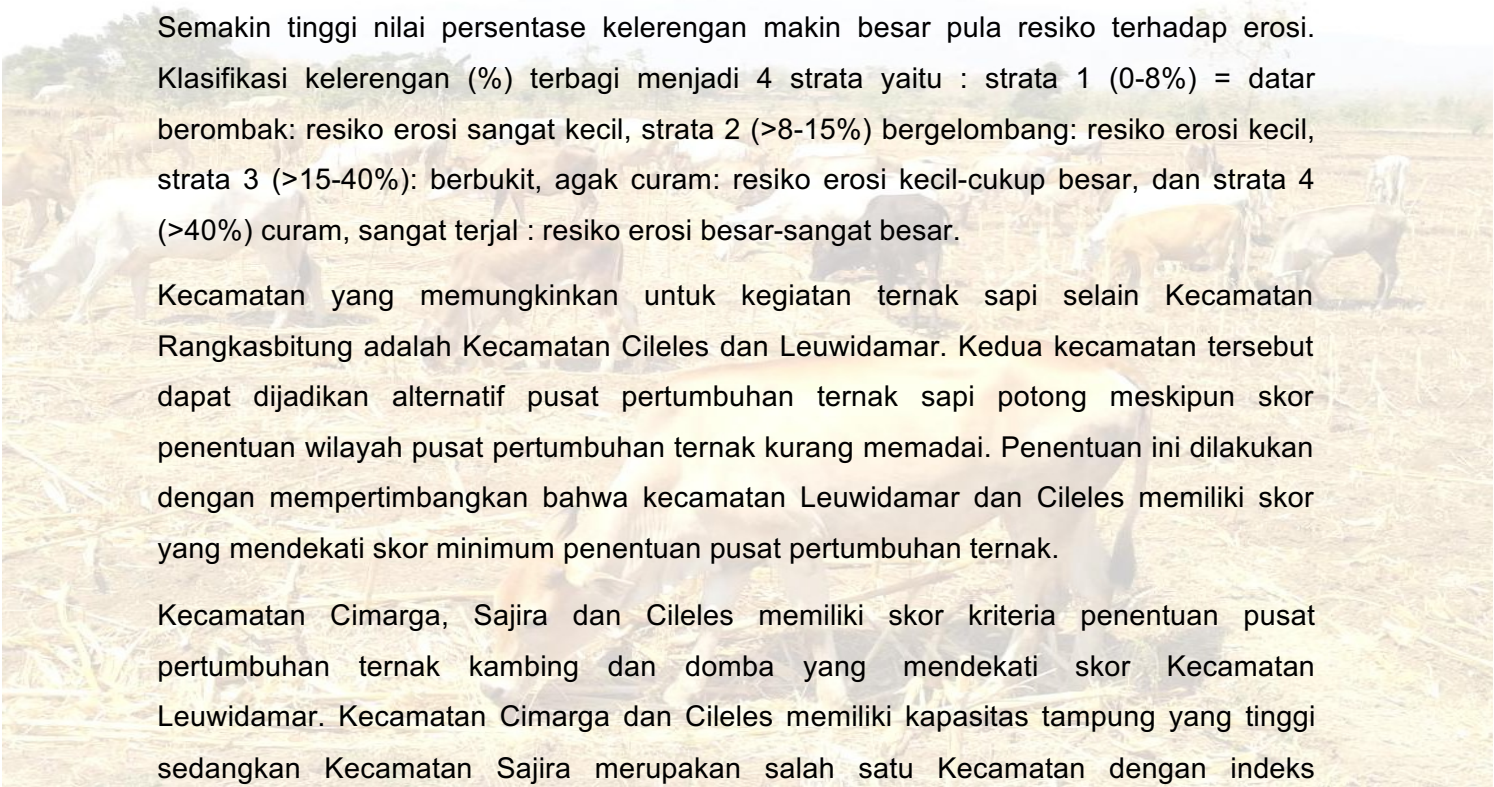


5.5 ANALISIS LUASAN WILAYAH PETERNAKAN DI KABUPATEN LEBAK

Menurut Rusmana et al (2006), analisis potensi wilayah pengembangan peternakan berupa karakterisasi lahan yang menempatkan kecocokan kebutuhan ekologis ternak untuk pengembangannya, didasarkan pada 4 kriteria yakni tingkat kesuburan lahan, ketersediaan air, elevasi dan kelerengan. Diperlukan 4 karakteristik utama fisik lahan berupa peta yang digunakan dalam penyusunan kriteria ekologis dalam pengembangan ternak yaitu : peta jenis tanah (tingkat kesuburan tanah), peta agro klimat (iklim/panjang kemarau), peta ketinggian tempat, peta kelerengan (topografi). Masing-masing karakteristik tersebut mempunyai ciri dan nilai yang saling mempengaruhi satu sama lain. Banyak unsur lain yang terlibat namun secara umum untuk memenuhi tujuan pemetaan kesesuaian suatu komoditas atau kelompok komoditas ternak kriteria tersebut dapat dilakukan.

Kesesuaian lahan diklasifikasikan menjadi 4 tingkat/starata yakni S1 = sangat sesuai (lahan tidak mempunyai pembatas yang serius), S2 = cukup sesuai (lahan mempunyai pembatas yang serius), S3 = sesuai marginal (lahan mempunyai pembatas yang serius), dan S4 = tidak sesuai.

Tanah dijadikan sebagai unsur fisik utama. Jenis kesuburan tanah dibagi menjadi 3 kelompok yakni Strata 1 (tanah subur) adalah jenis tanah alluvial, latosol, mediteran dan regosol, strata 2 (tanah sedang) adalah jenis tanah podsolik merah kuning, grumusol dan renzina dan strata 3 (tidak subur) adalah jenis tanah podsol, litosol, planosol, glei humus dan organosol. Selain kesuburan tanah, agro klimat (iklim/panjang kemarau) menjadi faktor penilaian penentuan kawasan peternakan. Curah hujan merupakan salah satu faktor iklim yang menjadi penilaian. Panjang musim kemarau pertahun dibagi menjadi 3 strata yaitu: strata 1 (< 2 bulan kering pertahun): agro klimat basah, strata 2 (< 2-5 bulan kering pertahun): agro klimat sedang, strata 3 (> 5 bulan kering pertahun): agro klimat kering. Ketinggian tempat menjadi faktor ketiga penentuan kawasan peternakan, semakin tinggi elevasi semakin rendah suhu (temperatur) dan semakin rendah pula intensitas radiasi matahari, setiap kenaikan elevasi 100 m diatas permukaan laut, terjadi penurunan suhu sebesar 0.5 derajat celcius. Elevasi dibedakan menjadi 4 strata yaitu strata 1 (0-100 m), strata 2 (>100-500 m) = daerah tropis murni, strata 3 (>500-1000 m) = daerah peralihan tropis dan sub tropis, dan strata 4 (> 1000 m) = daerah subtropis. Kelerengan adalah faktor terakhir dalam penilaian kawasan peternakan, kriteria ini



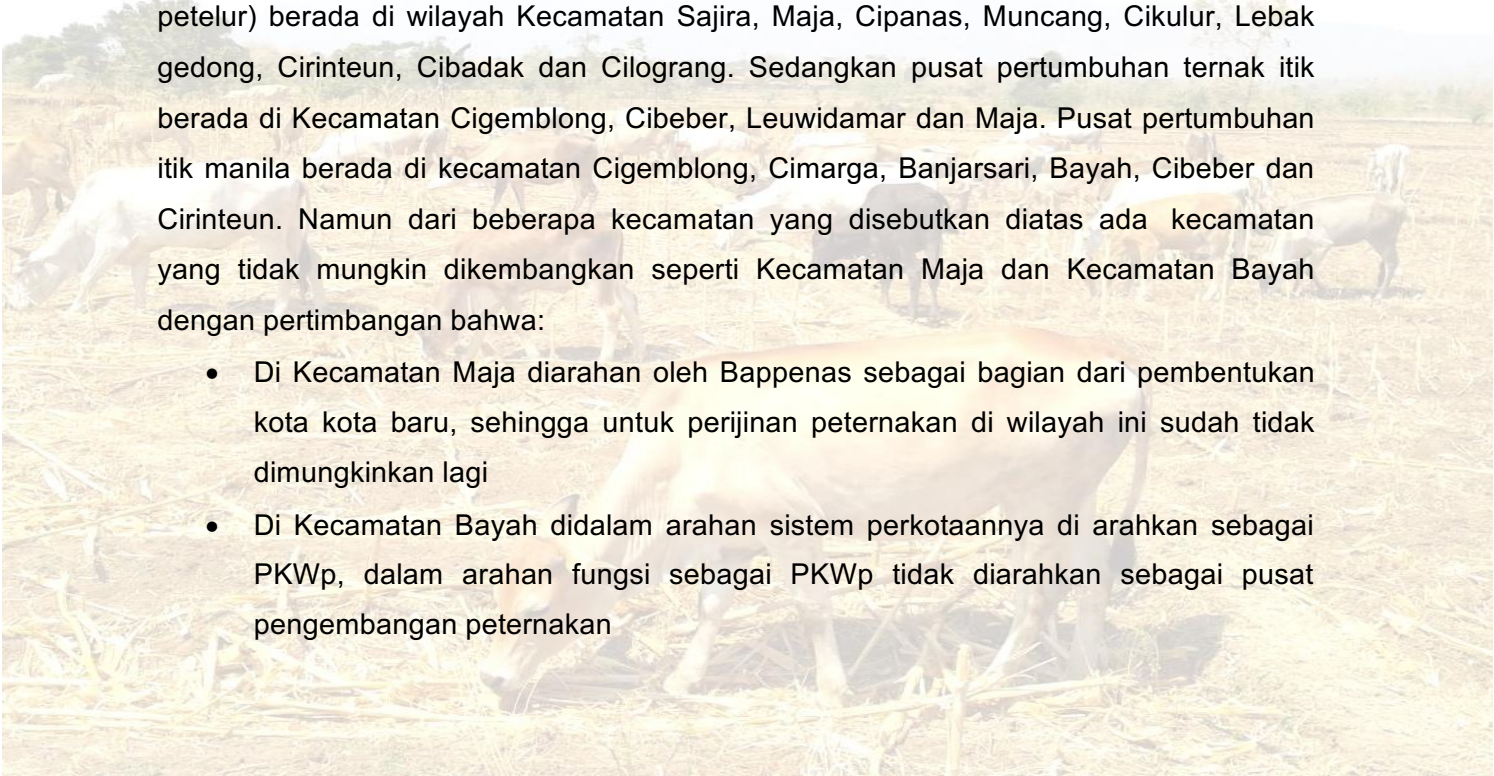
Berkaitan dengan resiko lingkungan terhadap erosi dan dinyatakan dengan persentase. Semakin tinggi nilai persentase kelerengan makin besar pula resiko terhadap erosi. Klasifikasi kelerengan (%) terbagi menjadi 4 strata yaitu : strata 1 (0-8%) = datar berombak: resiko erosi sangat kecil, strata 2 (>8-15%) bergelombang: resiko erosi kecil, strata 3 (>15-40%): berbukit, agak curam: resiko erosi kecil-cukup besar, dan strata 4 (>40%) curam, sangat terjal : resiko erosi besar-sangat besar.

Kecamatan yang memungkinkan untuk kegiatan ternak sapi selain Kecamatan Rangkasbitung adalah Kecamatan Cileles dan Leuwidamar. Kedua kecamatan tersebut dapat dijadikan alternatif pusat pertumbuhan ternak sapi potong meskipun skor penentuan wilayah pusat pertumbuhan ternak kurang memadai. Penentuan ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa kecamatan Leuwidamar dan Cileles memiliki skor yang mendekati skor minimum penentuan pusat pertumbuhan ternak.

Kecamatan Cimarga, Sajira dan Cileles memiliki skor kriteria penentuan pusat pertumbuhan ternak kambing dan domba yang mendekati skor Kecamatan Leuwidamar. Kecamatan Cimarga dan Cileles memiliki kapasitas tampung yang tinggi sedangkan Kecamatan Sajira merupakan salah satu Kecamatan dengan indeks konsentrasi ternak yang tinggi selain itu juga adanya areal pertanian pangan lahan kering seluas 1945,21 Ha yang dapat mendukung kegiatan peternakan kambing dan domba.

kecamatan yang memungkinkan untuk dapat dijadikan pusat pertumbuhan ternak kerbau adalah kecamatan yang memiliki kapasitas tampung ternak yang sedang dengan indeks konsentrasi ternak kerbau yang tinggi, yaitu Kecamatan Cikulur, Panggarangan, Cileles dan Cipanas. Pemilihan 4 kecamatan tersebut sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Banten yang menetapkan sebagai kecamatan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) di Kabupaten Lebak.

Komoditi ternak unggas yang akan ditentukan wilayahnya adalah ayam lokal, ayam broiler, ayam petelur, itik dan itik manila. Setelah mempertimbangkan aspek keruangan, kebijakan dan kondisi saat ini maka dapat disimpulkan wilayah Pusat pertumbuhan ternak untuk ayam lokal yang disarankan berada di Kecamatan Cigemblong, Wanasalam, Panggarangan, Cibeber, Cijaku, Bojongmanik, Cibadak dan Maja. Pusat pertumbuhan ternak ayam broiler berada di Kecamatan Cigemblong, Cikulur, Sajira, Cibeber, Gunung Kencana, Cirinteun, Muncang, Lebak Gedong, Cibadak dan Maja. Pusat Pertumbuhan ternak ayam petelur berada di Kecamatan Cigemblong, Sajira, Cibeber dan Lebak gedong,. Penilaian ini sudah sesuai dengan Perencanaan Strategis



Kabupaten Lebak, dimana pengembangan kawasan ternak ayam ras (broiler dan petelur) berada di wilayah Kecamatan Sajira, Maja, Cipanas, Muncang, Cikulur, Lebak gedong, Cirinteun, Cibadak dan Cilograng. Sedangkan pusat pertumbuhan ternak itik berada di Kecamatan Cigemblong, Cibeber, Leuwidamar dan Maja. Pusat pertumbuhan itik manila berada di kecamatan Cigemblong, Cimarga, Banjarsari, Bayah, Cibeber dan Cirinteun. Namun dari beberapa kecamatan yang disebutkan diatas ada kecamatan yang tidak mungkin dikembangkan seperti Kecamatan Maja dan Kecamatan Bayah dengan pertimbangan bahwa:

- Di Kecamatan Maja diarahkan oleh Bappenas sebagai bagian dari pembentukan kota kota baru, sehingga untuk perijinan peternakan di wilayah ini sudah tidak dimungkinkan lagi
- Di Kecamatan Bayah didalam arahan sistem perkotaannya di arahkan sebagai PKWp, dalam arahan fungsi sebagai PKWp tidak diarahkan sebagai pusat pengembangan peternakan

Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak

Tabel 5.3
Penentuan Kesesuaian Nilai Terbak

Kesuburan Tanah (I,II,III)	Ketinggian Tempat (A,B,C,D)	Kelerengan (1,2,3,4)	Agroklimat (a,b,c)	Nilai Kesesuaian (S1, S2, S3, NS)					
				Kerbau		Sapi Potong		Sapi Perah	
				Nilai	Kecuali	Nilai	Kecuali	Nilai	Kecuali
I			a	S1	IB2a = S2	S1	ID2a = S2	S1	IA2a = S2
							ID3a = S2		IB3a = S2
							IC3a = S2		IA3a = S2
I			b	S2	IA1b = S1	S2	IA1b = S1	S2	ID1b = S1
					IA2b = S1		IA2b = S1		IC1b = S1
					IB1b = S1		IB1b = S1		ID2b = S1
I			c	S2	IA1c = S1	S2	IA1c = S1	S2	ID1c = S1
					ID2c = S1		ID2c = S1		IA2c = S3
							ID3c = S3		IB3c = S3
							IC3c = S3		IA3c = S3
II			a	S2	IIA1a = S1	S2	IIA1a = S1	S2	IID1a = S1
					IIA2a = S1		IIA2a = S1		IIC2a = S1
					IIB1a = S1		IIA1a = S1		IID1a = S1
II			b	S2	IIA1b = S3	S2	IIA1b = S1	S2	IID1b = S1
							IID2b = S3		IIA2b = S3
					IID2b = S3		IID3b = S3		IIB3b = S3
							IIC3b = S3		IIA3b = S3
II			c	S2	IID1c = S3	S2	IID1c = S1\	S2	IID1c = S1
					IID2c = S3		IID2c = S3		IIC1c = S3
							IID3c = S3		IIB1c = S3
							IIC3c = S3		IID2c = S3
							IIB3c = S3		IIC2c = S3
									IID3c = S3

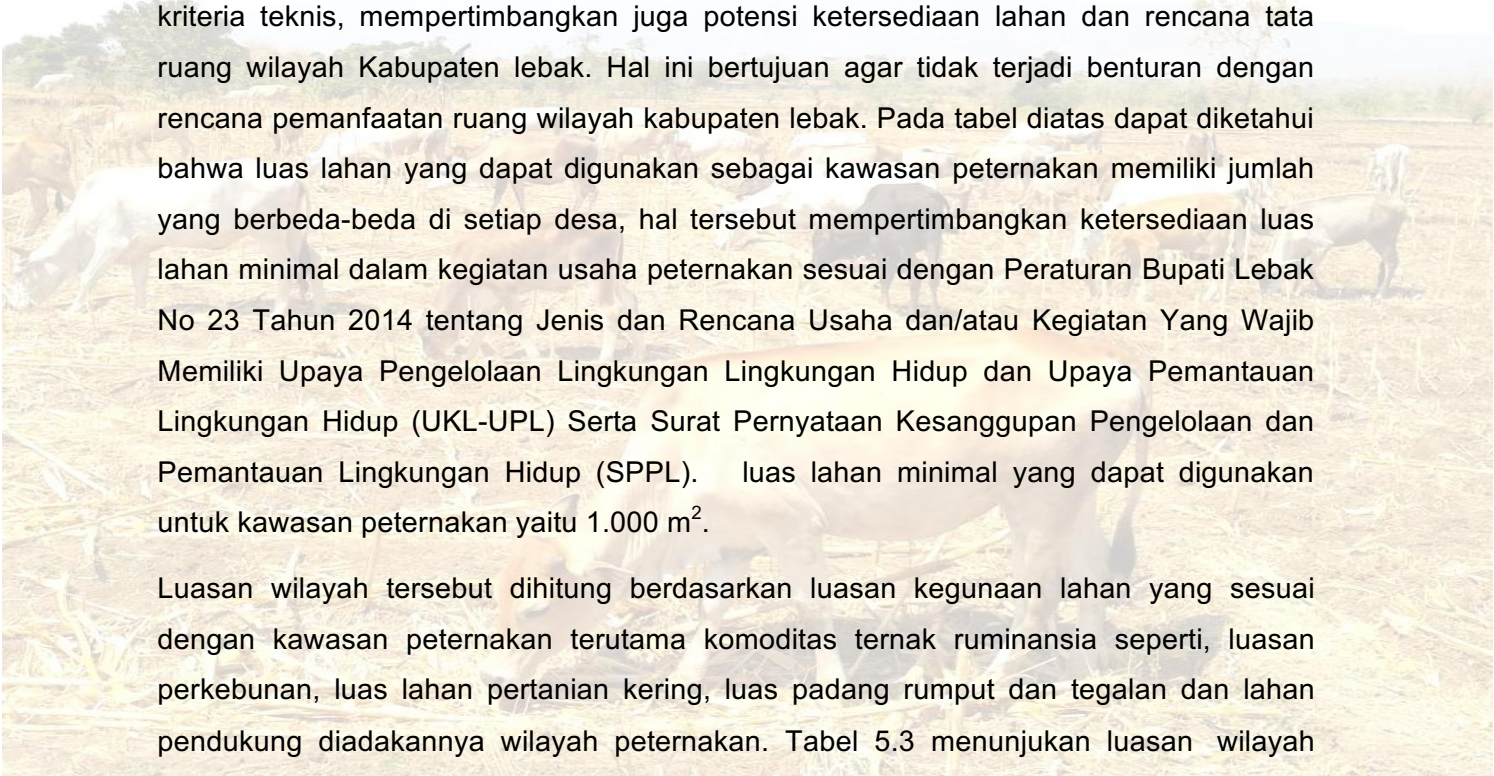
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, luasan lahan yang dapat digunakan untuk usaha peternakan ruminansia di setiap kecamatan di Kabupaten Lebak disajikan pada ini.

Tabel 5.4
Kawasan Pusat Pertumbuhan Ternak dan Luas Wilayah
Yang Dapat Digunakan Untuk Peternakan

No	Kecamatan	Pusat Pertumbuhan Ternak (Komoditas Ternak)	Desa	Luas lahan (Ha)
1	Cigemblong	Ayam Lokal, Broiler, Ras Petelur, Itik, itik manila	Peucangpari	0.16
			Cikadongdong	15.46
2	Cikulur	Kerbau, Broiler	Sumurbandung	50.750,00
			Sukadaya	53.36
			Sukaharja	43.63
			Anggalan	3,00
			Tamanjaya	8.41
			Parage	28.47
			Pasirgintung	23.1
			Curugpanjang	146.02
			Anggalan	186.22
3	Cimarga	Kambing dan domba, itik manila	Mekarmulya	18.1
			Margaluyu	11.89
			Sudamanik	50.44
			Margajaya	62.15
4	Sajira	Kambing dan domba, Broiler, Ras Petelur	Bungurmekar	34.29
			Calungbungur	49.68
			Mekarsari	9.78
			Pajagan	137.78
			Sajira	148.17
			Sajiramekar	138.67
			Sindangsari	77.56
			Sukajaya	70.12
Sukarame	7.72			
5	Banjarsari	Sapi, itik manila	Banjarsari	345.13
			Bendungan	42.48
			Kaduhauk	19.25
			Kumpai	23.98
6	Malingping	Sapi, itik manila	Cilangkahan	2.34
			Kadujajar	48.75
			Kersaratu	27.17
			Malingping selatan	6.47
			Pagelaran	145.54
			Sukamanah	253.01
7	Wanasalam	Sapi, Ayam Lokal	Bejod	0.98
			Cipedang	2.36
			Muara	1.15
			Sukatani	440.91

No	Kecamatan	Pusat Pertumbuhan Ternak (Komoditas Ternak)	Desa	Luas lahan (Ha)
			Wanasalam	105.87
8	Panggarangan	Kerbau, Ayam Lokal	Cibarengkok	52.97
			Cimandiri	350.84
			Gununggede	475.74
			Jatake	178.85
			Sindangratu	34.25
			Sogong	339.55
9	Cihara	Kerbau, Ayam Lokal	Mekarsari	257.67
10	Bayah	Kambing dan domba, itik manila	Sawarna	1.51
11	Cilograng	Kerbau, Ayam Lokal	Pasirbungur	0.54
			Cijengkol	39.24
12	Cijaku	Ayam Lokal	Ciapus	517.37
			Cibeureum	229.01
			Cihujan	352.92
			Cijaku	352.37
			Cimenga	183.36
			Cipalabuh	328.49
			Kandang sapi	422.68
			Mekarjaya	2.39
Sukasenang	749.54			
13	Cileles	Kambing dan domba, Kerbau	Gemuruh	163.79
			Mekarjaya	5.71
			Prabugantungan	514.87
14	Bojong Manik	Ayam Lokal	Cimayang	225.15
			Keboncau	190.53
15	Cirinten	Broiler, itik manila	Cempaka	39.53
			Cibarani	38.38
			Cirinten	503.8
			Datarcae	405.13
			Kadudamas	250.95
			Karangnunggal	178.85
			Karoya	506.09
			Nangerang	180.18
Parakanlima	39.06			
16	Leuwidamar	Kambing dan domba, Itik	Kanekes	449.61
17	Cipanas	Kerbau	Talagahiang	0.76
18	Kalanganyar	Kerbau	Sangiangtanjung	278.65
19	Curug Bitung	Kerbau	Guradog	261.51
			Lebakasih	52.29
Luas Total				11994.45

Sumber: Hasil Analisis 2016



Kesesuaian kawasan untuk masing-masing kecamatan selain dengan memperhatikan kriteria teknis, mempertimbangkan juga potensi ketersediaan lahan dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten lebak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi benturan dengan rencana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten lebak. Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa luas lahan yang dapat digunakan sebagai kawasan peternakan memiliki jumlah yang berbeda-beda di setiap desa, hal tersebut mempertimbangkan ketersediaan luas lahan minimal dalam kegiatan usaha peternakan sesuai dengan Peraturan Bupati Lebak No 23 Tahun 2014 tentang Jenis dan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). luas lahan minimal yang dapat digunakan untuk kawasan peternakan yaitu 1.000 m².

Luasan wilayah tersebut dihitung berdasarkan luasan kegunaan lahan yang sesuai dengan kawasan peternakan terutama komoditas ternak ruminansia seperti, luasan perkebunan, luas lahan pertanian kering, luas padang rumput dan tegalan dan lahan pendukung diadakannya wilayah peternakan. Tabel 5.3 menunjukkan luasan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk peternakan ruminansia, dengan mempertimbangkan keadaan daya dukung lahan baik sebagai lingkungan pemeliharaan ternak maupun sebagai sarana pendukung guna memenuhi kebutuhan pakan hijauan yang diperlukan oleh ternak ruminansia. Pemeliharaan ternak ruminansia memerlukan lahan khusus untuk menanam rumput atau hijauan sebagai sumber pakan ternak.

Sedangkan peternakan dengan komoditas ternak unggas, memiliki kebutuhan luasan lahan yang tidak seluas lahan pemeliharaan ternak ruminansia. Selain karena ukuran yang lebih kecil, ternak unggas tidak membutuhkan hijauan sebagai salah satu bahan pakan yang harus tersedia, sehingga kebutuhan lahan peternakan sebagian besar diperuntukan untuk kandang dan fasilitas pendukung peternakan.

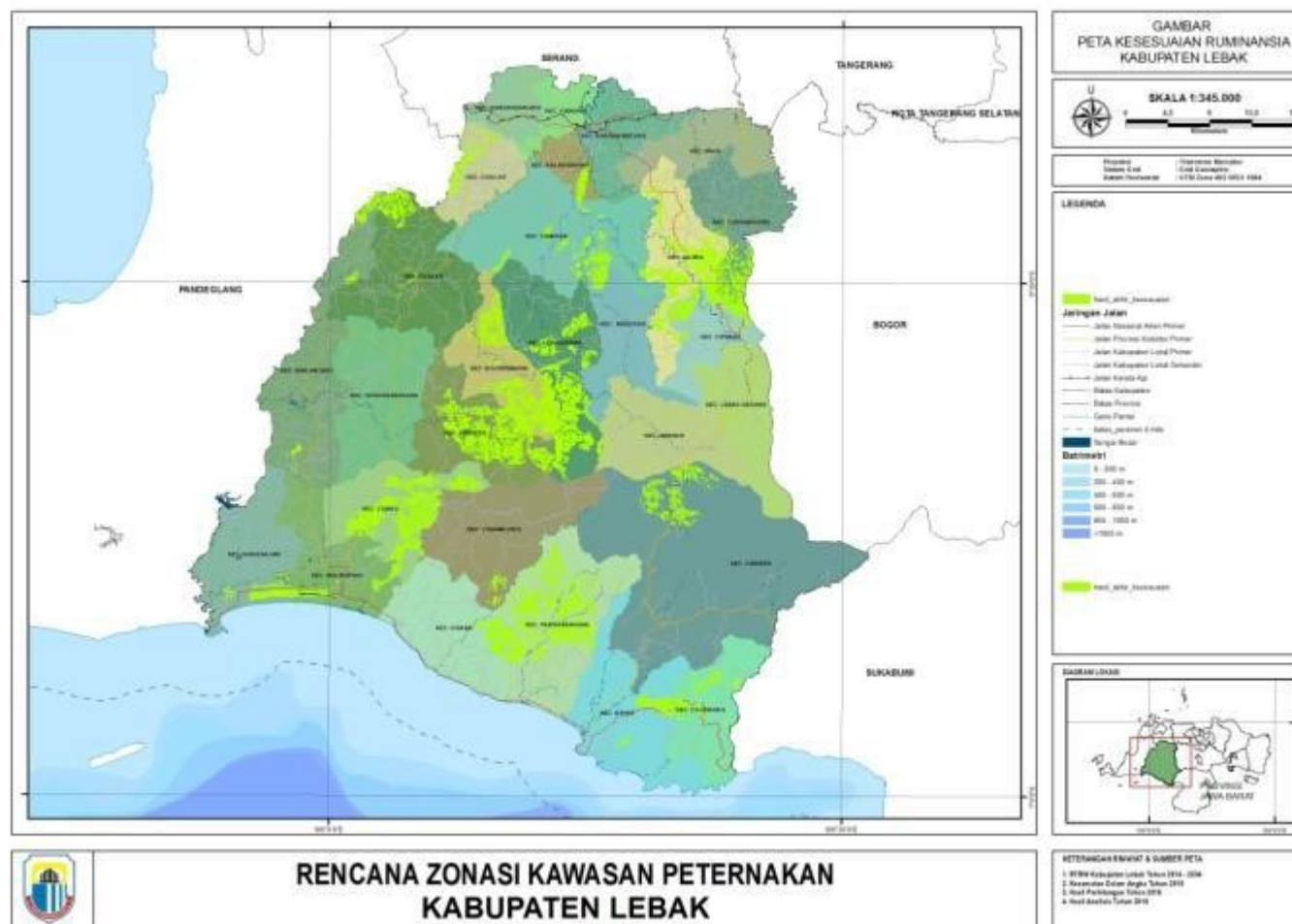
Luasan lahan yang digunakan adalah lahan tipe S1 atau lahan yang sangat cocok untuk dijadikan wilayah peternakan ternak ruminansia di Kabupaten Lebak seluas 12027.25 Ha. Beberapa wilayah lain termasuk kedalam kategori sedang dan lahan marginal. Wilayah yang tidak tergolong ke dalam kategori S1 tetap dapat digunakan sebagai lahan peternakan namun dengan beberapa persyaratan guna mendukung diadakannya usaha peternakan ruminansia di wilayah tersebut.

Kedepannya untuk wilayah yang diarahkan sebagai kawasan peternakan dalam hal perizinannya mengikuti ketentuan yang terdapat pada Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2014. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.4





Gambar 5.27
Wilayah Kawasan Peternakan Ruminansia Di Kabupaten Lebak



Tabel 5.5
Jenis Rencana Usaha Kegiatan Peternakan

No	Jenis Usaha dan/atau kegiatan	Skala Besaran Wajib UKL-UPL	Skala/Besaran Wajib SPPL	Tanpa SPPL
1	Ayam Ras Petelur			
	Populasi (Pop)	Pop > 10.000 ekor induk	100 < Pop ≤ 10.000 ekor induk	Pop ≤ 100
	Jumlah Kandang (JKdg)	JKdg > 3	JKdg > 3	
Luas Lahan (LL)	LL > 2 Ha	LL > 2 Ha		
2	Ayam Ras Pedaging			
	Populasi (Pop)	Pop > 15.000 ekor	100 < Pop ≤ 15.000 ekor	Pop ≤ 100
	Luas Lahan (LL)	Prod/Siklus	Prod/Siklus	
	LL > 2 Ha	≤ 2 Ha		
3	Itik, angsa atau etok			
	Populasi (Pop)	Pop > 15.000 ekor campur	100 < Pop ≤ 15.000 campur	Pop ≤ 100
	Luas Lahan (LL)	LL > 2 Ha	≤ 2 Ha	
4	Kalkun			
	Populasi (Pop)	Pop > 10.000 ekor campur	100 < Pop ≤ 10.000 campur	Pop ≤ 100
	Luas Lahan (LL)	LL > 2 Ha	≤ 2 Ha	
5	Burung Puyuh			
	Populasi (Pop)	Pop > 25.000 ekor campur	1.000 < Pop ≤ 25.000 campur	Pop ≤ 1000
	Luas Lahan (LL)	LL > 1.000 m ²	≤ 1.000 m ²	
6	Burung Dara			
	Populasi (Pop)	Pop > 25.000 ekor campur	100 < Pop ≤ 25.000 campur	Pop ≤ 100
	Luas Lahan (LL)	LL > 3.000 m ²	≤ 3.000 m ²	
7	Kambing dan/atau domba			

No	Jenis Usaha dan/atau kegiatan	Skala Besaran Wajib UKL-UPL	Skala/Besaran Wajib SPPL	Tanpa SPPL
	Populasi (Pop)	Pop > 300 ekor campur	50 < Pop ≤ 100 campur	Pop ≤ 10
	Luas Lahan (LL)	LL > 5.000 m ²	≤ 5.000 m ²	
8	Sapi Potong			
	Populasi (Pop)	Pop > 100 ekor campur	50 < Pop ≤ 100 campur	Pop ≤ 50
	Luas Lahan (LL)	LL > 5.000 m ²	≤ 5.000 m ²	
9	Sapi Perah			
	Populasi (Pop)	Pop > 20 ekor campur	10 < Pop ≤ 20 campur	Pop ≤ 10
	Luas Lahan (LL)	LL > 5.000 m ²	≤ 5.000 m ²	
10	Kerbau			
	Populasi (Pop)	Pop > 75 ekor campur	25 < Pop ≤ 75 campur	Pop ≤ 25
	Luas Lahan (LL)	LL > 5.000 m ²	≤ 5.000 m ²	
11	Kuda			
	Populasi (Pop)	Pop > 50 ekor campur	25 < Pop ≤ 50 campur	Pop ≤ 25
	Luas Lahan (LL)	LL > 5.000 m ²	≤ 5.000 m ²	
12	Kelinci			
	Populasi (Pop)	Pop > 1500 ekor campur	500 < Pop ≤ 1.500 campur	Pop ≤ 500
	Luas Lahan (LL)	LL > 5.000 m ²	≤ 5.000 m ²	
13	Rusa			
	Populasi (Pop)	Pop > 300 ekor campur	50 < Pop ≤ 300 campur	Pop ≤ 50
	Luas Lahan (LL)	LL > 5.000 m ²	≤ 5.000 m ²	
14	Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	Semua besaran		
15	Rumah Pemotongan Unggas (RPU)	Semua besaran		
16	Tempat Pemotongan Unggas (TPU)		Semua besaran	

Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Peternakan Kabupaten Lebak

No	Jenis Usaha dan/atau kegiatan	Skala Besaran Wajib UKL-UPL	Skala/Besaran Wajib SPPL	Tanpa SPPL
17	Pet Shop		Semua besaran	

Sumber :

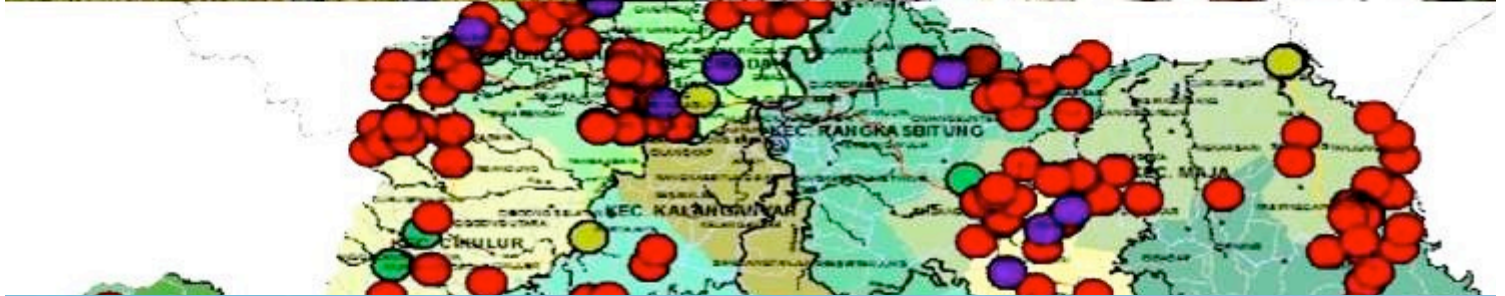
Lampiran Peraturan Bupati Lebak No 23 Tahun 2014 tentang Jenis dan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).





BAB 6

KESIMPULAN & REKOMENDASI



6.1 KESIMPULAN

Setelah melakukan serangkaian kegiatan studi pendahuluan, survey lapangan dan melakukan analisa terhadap potensi dan karakter sub sektor peternakan di Kabupaten Lebak maka bisa di ambil beberapa kesimpulan:

1. Komoditas Unggulan (Peternakan)
Komoditas Peternakan Di Kab Lebak Antara Lain Ternak Kambing/Domba, Kerbau, Ayam Buras, Ayam Ras Pedaging, Itik, Dan Sapi Potong.
2. Nisbah Lahan Pangan (Tinggi)
Kecamatan yang memilik nilai nisbah lahan pangan tinggi tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Bayah, Panggrangan, Cibeber, Cigemblong, Cihara, Cijaku, Cirinteun, Bojongkencana, Bojongmanik dan Kecamatan Cileles
3. Kapasitas Tampung Ruminansia
Daya tampung ternak ruminansia terbesar berada di Kecamatan Cibeber dengan kapasitas tampung sebanyak 48.012 Satuan Ternak (ST) dan kapasitas tampung ternak ruminansia paling rendah berada di Kecamatan Kalanganyar sebanyak 7.590 ST.
4. Arahkan Wilayah Peternakan
Arahkan wilayah peternakan tersebar di 19 (sembilan belas) wilayah dengan luas diperkirakan sebesar 11994.45 ha. Wilayah wilayah tersebut antara lain: Cigemblong, Cikultur, Cimarga, Sajira, Banjarsari, Malingping, Wanasalam, Panggarangan, Cihara, Bayah, Cilograng Cijaku, Cileles, Bojong Manik, Cirinten, Leuwidamar, Cipanas, Kalanganyar dan Curug Bitung

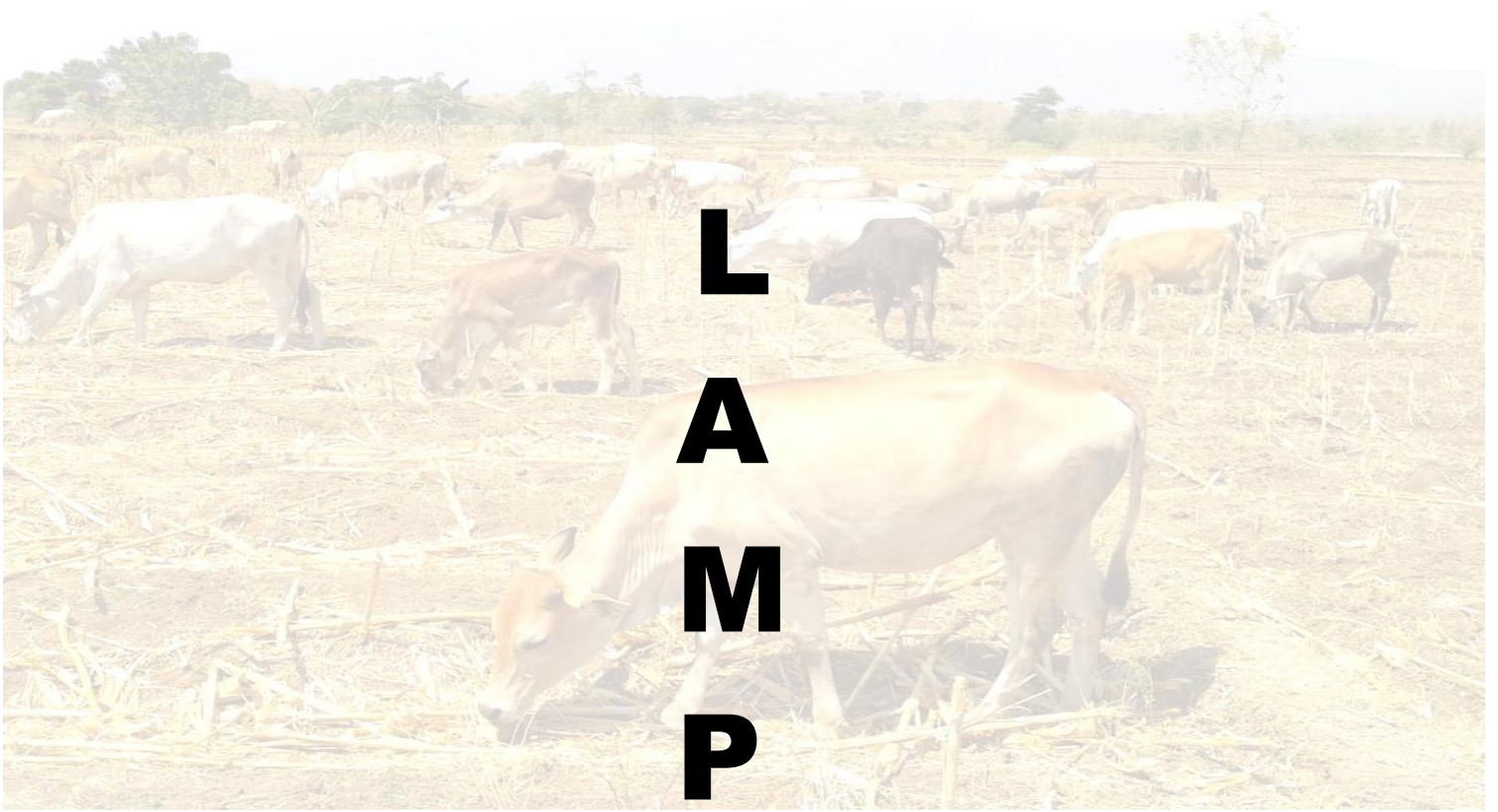
6.2 REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan dalam menindaklanjuti hasil kajian / studi ini antara lain sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti dengan menyusun peraturan daerah terkait peternakan yang didalamnya selain mengatur pengelolaan peternakan tapi juga memberikan arahan kawasan peruntukan peternakan dan pengaturan kawasannya
2. Pemberian izin usaha peternakan baik itu peternakan komersial maupun peternakan rakyat kedepannya sudah mulai diarahkan pada kawasan peruntukan peternakan terpilih. Pemberian izin usaha hendaknya mengacu pada aturan yang telah ada yakni Peraturan Bupati Lebak No.23 Tahun 2014

3. Arahan kawasan peruntukan peternakan yang terpilih dalam kajian ini hendaknya menjadi input penyempurnaan bagi kawasan peruntukan peternakan yang saat ini diarahkan dalam rencana tata ruang wilayah





**L
A
M
P

I
R
A
N**

Lampiran A 1
Skor Perkembangan Tingkat Kecamatan

Kecamatan	Jumlah desa			Total desa	Skor kec
	SWD	SWK	SWB		
Cigemblong	9	0	0	9	1
Cikulur	0	13	0	13	5
Cimarga	17	0	0	17	1
Sajira	15	0	0	15	1
Banjarsari	20	0	0	20	1
Malingping	14	0	0	14	1
Wanasalam	13	0	0	13	1
Panggarangan	0	11	0	11	5
Cihara	0	9	0	9	5
Bayah	11	0	0	11	1
Cilograng	0	0	10	10	10
Cibeber	22	0	0	22	1
Cijaku	0	10	0	10	5
Cileles	12	0	0	12	1
Gn Kencana	0	12	0	12	5
Bojong Manik	9	0	0	9	1
Citinten	10	0	0	10	1
Leuwidamar	0	0	12	12	10
Muncang	12	0	0	12	1
Sobang	10	0	0	10	1
Cipanas	0	14	0	14	5
Lebak gedong	6	0	0	6	1
Warunggunung	12	0	0	12	1
Cibadak	15	0	0	15	1
Rangkas bitung	0	0	16	16	10
Kalanganyar	7	0	0	7	1
Maja	14	0	0	14	1
Curug Bitung	10	0	0	10	1

Sumber: Hasil Analisis 2016

Lampiran A 2
Skor Perkembangan Tingkat Kecamatan

Kecamatan	Jumlah desa	Jumlah Tipe Desa						Skor Sapot	Skor ker/kam /dom	Skor unggas
		Sawah	Ladang	Kebun	Nelayan	Industri kecil	Dagang			
Cigemblong	9	9	0	0	0	0	0	10	10	10
Cikulur	13	13	0	0	0	0	0	10	10	10
Cimarga	17	17	0	0	0	0	0	10	10	10
Sajira	15	15	0	0	0	0	0	10	10	10
Banjarsari	20	20	0	0	0	0	0	10	10	10
Malingping	14	14	0	0	0	0	0	10	10	10
Wanasalam	13	13	0	0	0	0	0	10	10	10
Panggarangan	11	11	0	0	0	0	0	10	10	10
Cihara	9	9	0	0	0	0	0	10	10	10
Bayah	11	11	0	0	0	0	0	10	10	10
Cilograng	10	10	0	0	0	0	0	10	10	10
Cibeber	22	22	0	0	0	0	0	10	10	10
Cijaku	10	10	0	0	0	0	0	10	10	10
Cileles	12	12	0	0	0	0	0	10	10	10
Gn Kencana	12	12	0	0	0	0	0	10	10	10
Bojong Manik	9	9	0	0	0	0	0	10	10	10
Citinten	10	10	0	0	0	0	0	10	10	10
Leuwidamar	12	12	0	0	0	0	0	10	10	10
Muncang	12	12	0	0	0	0	0	10	10	10
Sobang	10	10	0	0	0	0	0	10	10	10
Cipanas	14	14	0	0	0	0	0	10	10	10
Lebak gedong	6	6	0	0	0	0	0	10	10	10
Warunggunung	12	12	0	0	0	0	0	10	10	10
Cibadak	15	15	0	0	0	0	0	10	10	10
Rangkas bitung	16	16	0	0	0	0	0	10	10	10
Kalanganyar	7	7	0	0	0	0	0	10	10	10
Maja	14	14	0	0	0	0	0	10	10	10
Curug Bitung	10	10	0	0	0	0	0	10	10	10

Sumber: Hasil Analisis 2016

Lampiran A 3
Penentuan Potensi Dasar Kecamatan

Kecamatan	Kepadatan 20 th Yad	Letak Kec	Faktor Alam			
			Jenis tanah	curah hujan	topografi	suhu rata
Cigemblong	284	sedang	latosol	3000-4000	campur (2-25%)	24°C
Cikurur	751	sedang	latosol	<3000	dataran (2-15%)	24°C
Cimarga	352	sedang	latosol	3000-3500	dat ren(2-15%)	24°C
Sajira	445	sedang	latosol	3000-3501	dat ren (2-15%)	24°C
Banjarsari	418	sedang	latosol	3000-3500	0-15%	24°C
Malingping	706	sedang	Podsolik	<3000-3500	peg/pantai(2-15%)	24°C
Wanasalam	403	sedang	Podsolik	<3000-3500	0-15%	24°C
Panggarangan	231	sedang	latosol	<3000-4500	peg/dat/pan (2-25%)	24°C
Cihara	199	sedang	latosol	<3000-3500	2-25%	24°C
Bayah	282	sedang	Alluvial	3000-35000	peg/datren (25-40%)	24°C
Cilograng	317	sedang	latosol	3000-4500	peg/datren (2-15%)	24°C
Cibeber	150	sedang	latosol	>4000	pegunungan 25->40	24°C
Cijaku	391	sedang	latosol	3000-3500	2-15%	24°C
Cileles	397	sedang	Podsolik	<3000	2-15%	24°C
Gn Kencana	241	sedang	Podsolik	3000-3500	2-15%	24°C
Bojong Manik	398	sedang	latosol	3000-3500	2-15%	24°C
Citinten	295	sedang	latosol	3000-4000	2-15%	24°C
Leuwidamar	365	sedang	latosol	3000-4000	2-15%	24°C
Muncang	400	sedang	latosol	3500-4000	2-15%	24°C
Sobang	286	sedang	latosol	>3500	15-40%	24°C
Cipanas	640	sedang	podsolik	3000-4000	2-15%	24°C
Lebak gedong	377	sedang	latosol	>3500	15-25%	24°C
Warunggunung	1120	dekat	latosol	<3000	0-15%	24°C
Cibadak	1488	dekat	Aluvial	<3000	0-2	24°C
Rangkas bitung	2473	dekat	Aluvial	<3000	0-15	24°C
Kalanganyar	1328	sedang	latosol	<3000	0-15	24°C
Maja	896	dekat	latosol	<3000	0-15	24°C
Curug Bitung	446	sedang	podsolik	<3000	2-15%	24°C

Sumber: Hasil Analisis 2016

Lampiran A 4
Skor Potensi Dasar Kecamatan

Kecamatan	Skor Faktor Alam				Rara2 Faktor Alam Saper	Rata2 Fak Alam Umum	Skor Pend	Skor Letak Kec	Skor PDK Saper	Skor PDK Umum
	Produksi Lahan	Iklim	Land Perf	Suhu						
Cigemblong	10	10	5	5	7.5	8.3	5	5	5.83	6.11
Cikulur	10	5	10	5	7.5	8.3	1	5	4.50	4.78
Cimarga	10	10	10	5	8.75	10.0	1	5	4.92	5.33
Sajira	10	10	10	5	8.75	10.0	1	5	4.92	5.33
Banjarsari	10	10	10	5	8.75	10.0	1	5	4.92	5.33
Malingping	5	5	10	5	6.25	6.7	1	5	4.08	4.22
Wanasalam	5	5	10	5	6.25	6.7	1	5	4.08	4.22
Panggarangan	10	5	5	5	6.25	6.7	5	5	5.42	5.56
Cihara	10	5	5	5	6.25	6.7	5	5	5.42	5.56
Bayah	10	10	5	5	7.5	8.3	5	5	5.83	6.11
Cilograng	10	10	5	5	7.5	8.3	1	5	4.50	4.78
Cibeber	10	10	1	5	6.5	7.0	10	5	7.17	7.33
Cijaku	10	10	10	5	8.75	10.0	1	5	4.92	5.33
Cileles	5	5	10	5	6.25	6.7	1	5	4.08	4.22
Gn Kencana	5	10	10	5	7.5	8.3	5	5	5.83	6.11
Bojong Manik	10	10	10	5	8.75	10.0	1	5	4.92	5.33
Citinten	10	10	10	5	8.75	10.0	5	5	6.25	6.67
Leuwidamar	10	10	10	5	8.75	10.0	1	5	4.92	5.33
Muncang	10	10	10	5	8.75	10.0	1	5	4.92	5.33
Sobang	10	10	5	5	7.5	8.3	5	5	5.83	6.11
Cipanas	5	10	10	5	7.5	8.3	1	5	4.50	4.78
Lebak gedong	10	10	10	5	8.75	10.0	1	5	4.92	5.33
Warunggunung	10	5	10	5	7.5	8.3	1	10	6.17	6.44
Cibadak	10	5	10	5	7.5	8.3	1	10	6.17	6.44
Rangkas bitung	10	5	10	5	7.5	8.3	1	10	6.17	6.44
Kalanganyar	10	5	10	5	7.5	8.3	1	5	4.50	4.78
Maja	10	5	10	5	7.5	8.3	1	10	6.17	6.44
Curug Bitung	5	5	10	5	6.25	6.7	1	5	4.08	4.22

Sumber: Hasil Analisis 2016

Lampiran A 5
Skor Fasilitas Pelayanan Peternakan

Kecamatan	KUD	Penyuluh	Pos Keswan & IB	RPH	Holding Ground	Toko Peternakan	Lab	Karantina	Skor Fasilitas
Cigemblong									1
Cikukur			1						1
Cimarga									1
Sajira			1						1
Banjarsari									1
Malingping		1							1
Wanasalam			1						1
Panggarangan			1						1
Cihara									1
Bayah									1
Cilograng									1
Cibeber		1							1
Cijaku									1
Cileles									1
Gn Kencana		1							1
Bojong Manik									1
Citinten									1
Leuwidamar			1						1
Muncang									1
Sobang									1
Cipanas		1							1
Lebak gedong									1
Warunggunung									1
Cibadak		1	1						5
Rangkas bitung		1		1		1			10
Kalanganyar			1						1
Maja		1							1
Curug Bitung									1

Sumber: Hasil Analisis 2016

Lampiran A 6
Skor Nisbah Lahan Pangan Terhadap Populasi Penduduk
20 Tahun Yang Akan Datang

Kecamatan	Lahan Pangan 20th YAD (Ha)	Jml Penduduk 20 th YAD (jiwa)	Nisbah lahan	Skor Lahan Pangan
Cigemblong	11850	21367	0.55	10
Cikukur	5597	49583	0.11	5
Cimarga	14221	64460	0.22	10
Sajira	9836	49245	0.20	10
Banjarsari	10969	60658	0.18	5
Malingping	8185	64995	0.13	5
Wanasalam	10002	54136	0.18	5
Panggarangan	11458	37653	0.30	10
Cihara	10976	31769	0.35	10
Bayah	10884	43316	0.25	10
Cilograng	5482	33986	0.16	5
Cibeber	16003	57299	0.28	10
Cijaku	10528	29026	0.36	10
Cileles	14257	49562	0.29	10
Gn Kencana	9155	35030	0.26	10
Bojong Manik	8705	23130	0.38	10
Citinten	11525	26823	0.43	10
Leuwidamar	11907	53518	0.22	10
Muncang	8049	33972	0.24	10
Sobang	6746	30550	0.22	10
Cipanas	5775	48233	0.12	1
Lebak gedong	5639	23575	0.24	10
Warunggunung	4274	55447	0.08	1
Cibadak	3118	61472	0.05	1
Rangkas bitung	5946	122428	0.05	1
Kalanganyar	2530	34382	0.07	1
Maja	7058	53599	0.13	5
Curug Bitung	8807	32313	0.27	10

Sumber: Hasil Analisis 2016

Lampiran A 7
Kapasitas Tampung Ternak

Kecamatan	Luas Sawah 20 Tahun YAD (Ha)	Lahan Kering 20 Tahun YAD (Ha)	Padang Rumput Alam Alang (Ha)	Rawa (Ha)	Daya Tampung (ekor)			
					Sapi Potong	Kerbau	Domba	Kambing
Cigemblong	3310	8540	9	0	46896.39	10937.88	283298.3	309715.2
Cikulur	2539	3058	13	0	22155.9	8393.474	133842.5	146323
Cimarga	4371	9850	25	0	56288.98	14451.18	340038.4	371746.3
Sajira	2608	7228	17	0	38932.26	8623.583	235187.5	257118.2
Banjarsari	2861	8108	527	2	43757.17	9744.401	264334.4	288983.1
Malingping	2671	5514	499	43	32830.57	9191.699	198327.5	216821.1
Wanasalam	4540	5462	523	14	39959.76	15314.36	241394.5	263904.1
Panggarangan	2896	8562	1	0	45339.97	9566.039	273896	299436.3
Cihara	2371	8605	66	0	43475.56	7867.746	262633.2	287123.3
Bayah	2104	8780	1	0	43068.65	6950.063	260175.1	284435.9
Cilograng	1904	3578	0	0	21692.27	6288.912	131041.7	143261.1
Cibeber	5407	10596	6	0	63327.83	17862.62	382559.6	418232.5
Cijaku	2344	8184	2	0	41660.62	7743.333	251669.3	275136.9
Cileles	2338	11919	6	0	56418.91	7725.717	340823.2	372604.3
Gn Kencana	2552	6603	97	0	36290.31	8482.655	219227.6	239670.1
Bojong Manik	1691	7014	1	0	34446.34	5585.924	208088.3	227492.1
Citinten	3022	8503	0	0	45604.43	9981.666	275493.6	301182.8
Leuwidamar	1914	9993	9	0	47121.93	6326.897	284660.8	311204.8
Muncang	3276	4773	0	0	31849.89	10820.63	192403.3	210344.5
Sobang	2743	4003	0	0	26693.92	9060.129	161256.4	176293.2
Cipanas	2133	3642	3	0	22853.65	7046.951	138057.6	150931.1
Lebak gedong	1275	4364	0	0	22313.52	4211.325	134794.7	147364
Warunggunung	2301	1973	4	0	16914.86	7602.405	102181.6	111709.9
Cibadak	1622	1496	1	1	12341.22	5360.219	74552.59	81504.47
Rangkas bitung	1719	4227	64	0	23570.53	5713.089	142388.2	155665.6
Kalanganyar	996	1534	0	0	10011.21	3289.788	60477.12	66116.49
Maja	2804	4254	11	0	27935.76	9267.668	168758.3	184494.6
Curug Bitung	2610	6197	0	0	34849.3	8620.83	210522.5	230153.3

Sumber: Hasil Analisis 2016

Lampiran A 8
Skor Kapasitas Tampung Ternak

Kecamatan	Skor daya tampung		
	Sapi Potong	Kerbau	Kambing/Domba
Cigemblong	10	10	10
Cikulur	1	5	1
Cimarga	10	10	10
Sajira	5	5	5
Banjarsari	5	5	5
Malingping	5	5	5
Wanasalam	5	10	5
Panggarangan	5	5	5
Cihara	5	5	5
Bayah	5	5	5
Cilograng	1	5	1
Cibeber	10	10	10
Cijaku	5	5	5
Cileles	10	5	10
Gn Kencana	5	5	5
Bojong Manik	5	1	5
Citinten	5	5	5
Leuwidamar	10	5	10
Muncang	5	10	5
Sobang	5	5	5
Cipanas	5	5	5
Lebak gedong	5	1	5
Warunggunung	1	5	1
Cibadak	1	1	1
Rangkas bitung	5	1	5
Kalanganyar	1	1	1
Maja	5	5	5
Curug Bitung	5	5	5

Sumber: Hasil Analisis 2016

Lampiran A 9
Populasi Ternak Kabupaten Lebak

Kecamatan	Populasi (Ekor)							
	Sapi Potong	Kerbau	Kambing & Domba	Ayam Lokal	Ayam Broiler	Ayam Petelur	Itik	Itik Manila
Cigemblong	38	558	11635	88007	337	0	6690	84
Cikukur	141	1409	12375	17806	495528	0	732	162
Cimarga	38	2010	13995	7643	134272	5	169	1761
Sajira	10	2688	21109	16720	1131018	56056	3923	135
Banjarsari	322	399	15684	31415	62395	0	1183	4240
Malingping	122	1108	20206	218973	372972	0	1724	2686
Wanasalam	712	533	17137	175106	15044	50	160	1
Panggarangan	0	1648	16176	198068	403	0	2787	670
Cihara	0	1220	8613	2774	430	0	1393	250
Bayah	39	1080	22108	8184	344811	0	1545	7162
Cilograng	68	555	8355	12416	7452	0	2169	252
Cibeber	36	2232	13352	245198	36213	0	649	547
Cijaku	38	908	14196	174286	1924	0	5459	261
Cileles	187	1538	17163	2425	48117	0	1758	119
Gn Kencana	21	586	13632	10013	807833	0	760	1
Bojong Manik	37	281	11681	166515	8858	1	702	8
Citinten	44	1115	6787	11642	904395	1	1094	1755
Leuwidamar	49	580	18938	53370	75561	1	20255	17831
Muncang	18	366	16387	11494	1213160	346	829	45
Sobang	37	514	10726	10067	16653	65	8	94
Cipanas	52	1163	21472	18638	1874176	2873	90	275
Lebak gedong	44	423	11531	9350	1112088	94425	108	23
Warunggunung	65	914	19969	2745	391100	121	7771	44
Cibadak	23	1237	14139	455176	523555	0	468	14
Rangkas bitung	1991	2263	22916	90885	707731	8808	8156	1082
Kalanganyar	25	557	14366	8573	11064	0	667	593
Maja	24	3476	14194	339319	859375	0	14034	55
Curug Bitung	27	2472	9639	26337	1248366	15183	3203	951

Sumber: Hasil Analisis 2016

Lampiran A 10
Indeks Konsentrasi Ternak

Kecamatan	Indeks Konsentrasi Ternak (Ekor)							
	Sapi Potong	Kerbau	Kambing & Domba	Ayam Lokal	Ayam Broiler	Ayam Petelur	Itik	Itik Manila
Cigemblong	0.25	0.46	0.78	1.02	0.00	0.00	2.12	0.06
Cikukur	0.94	1.17	0.83	0.21	1.12	0.00	0.23	0.11
Cimarga	0.25	1.66	0.94	0.09	0.30	0.00	0.05	1.20
Sajira	0.07	2.22	1.41	0.19	2.55	8.82	1.24	0.09
Banjarsari	2.14	0.33	1.05	0.36	0.14	0.00	0.37	2.89
Malingping	0.81	0.92	1.35	2.54	0.84	0.00	0.55	1.83
Wanasalam	4.74	0.44	1.15	2.03	0.03	0.01	0.05	0.00
Panggarangan	0.00	1.36	1.08	2.30	0.00	0.00	0.88	0.46
Cihara	0.00	1.01	0.58	0.03	0.00	0.00	0.44	0.17
Bayah	0.26	0.89	1.48	0.09	0.78	0.00	0.49	4.88
Cilograng	0.45	0.46	0.56	0.14	0.02	0.00	0.69	0.17
Cibeber	0.24	1.85	0.89	2.85	0.08	0.00	0.21	0.37
Cijaku	0.25	0.75	0.95	2.02	0.00	0.00	1.73	0.18
Cileles	1.24	1.27	1.15	0.03	0.11	0.00	0.56	0.08
Gn Kencana	0.14	0.48	0.91	0.12	1.82	0.00	0.24	0.00
Bojong Manik	0.25	0.23	0.78	1.93	0.02	0.00	0.22	0.01
Citinten	0.29	0.92	0.45	0.14	2.04	0.00	0.35	1.20
Leuwidamar	0.33	0.48	1.27	0.62	0.17	0.00	6.41	12.15
Muncang	0.12	0.30	1.10	0.13	2.74	0.05	0.26	0.03
Sobang	0.25	0.43	0.72	0.12	0.04	0.01	0.00	0.06
Cipanas	0.35	0.96	1.44	0.22	4.23	0.45	0.03	0.19
Lebak gedong	0.29	0.35	0.77	0.11	2.51	14.86	0.03	0.02
Warunggunung	0.43	0.76	1.34	0.03	0.88	0.02	2.46	0.03
Cibadak	0.15	1.02	0.95	5.28	1.18	0.00	0.15	0.01
Rangkas bitung	13.25	1.87	1.53	1.05	1.60	1.39	2.58	0.74
Kalanganyar	0.17	0.46	0.96	0.10	0.02	0.00	0.21	0.40
Maja	0.16	2.88	0.95	3.94	1.94	0.00	4.44	0.04
Curug Bitung	0.18	2.05	0.64	0.31	2.82	2.39	1.01	0.65

Sumber: Hasil Analisis 2016

Lampiran A 11
Indeks Konsentrasi Ternak

Kecamatan	Skor Indeks Konsentrasi Ternak							
	Sapi Potong	Kerbau	Kambing & Domba	Ayam Lokal	Ayam Broiler	Ayam Petelur	Itik	Itik Manila
Cigemblong	1	1	1	5	1	1	5	1
Cikukur	5	10	1	1	10	1	1	1
Cimarga	1	10	5	1	1	1	1	10
Sajira	1	10	10	1	10	10	1	1
Banjarsari	10	1	5	1	1	1	1	10
Malingping	1	5	10	10	1	1	1	10
Wanasalam	10	1	5	10	1	1	1	1
Panggarangan	1	10	5	10	1	1	1	1
Cihara	1	5	1	1	1	1	1	1
Bayah	1	1	10	1	1	1	1	10
Cilograng	1	1	1	1	1	1	1	1
Cibeber	1	10	1	10	1	1	1	1
Cijaku	1	1	1	10	1	1	1	1
Cileles	10	10	5	1	1	1	1	1
Gn Kencana	1	1	1	1	10	1	1	1
Bojong Manik	1	1	1	10	1	1	1	1
Citinten	1	5	1	1	10	1	1	10
Leuwidamar	1	1	10	1	1	1	10	10
Muncang	1	1	5	1	10	1	1	1
Sobang	1	1	1	1	1	1	1	1
Cipanas	1	5	10	1	10	1	1	1
Lebak gedong	1	1	1	1	10	10	1	1
Warunggunung	1	1	10	1	1	1	10	1
Cibadak	1	5	5	10	10	1	1	1
Rangkas bitung	10	10	10	5	10	10	10	1
Kalanganyar	1	1	1	1	1	1	1	1
Maja	1	10	1	10	10	1	10	1
Curug Bitung	1	10	1	1	10	10	1	1

Sumber: Hasil Analisis 2016

Lampiran A 12
Skor Jarak Ke Pusat Sub Wilayah Pengembangan

Kecamatan	Pusat SWP	Jarak (km)	Skor Jarak SWP
Cigemblong	Rangkas	77 km	5
Cikulur	Rangkas	17 km	10
Cimarga	Rangkas	9 km	10
Sajira	Rangkas	27 km	10
Banjarsari	Rangkas	70 km	5
Malingping	Rangkas	100 km	5
Wanasalam	Rangkas	99 km	5
Panggarangan	Rangkas	127 km	1
Cihara	Rangkas	105 km	1
Bayah	Rangkas	135 km	1
Cilograng	Rangkas	160 km	1
Cibeber	Rangkas	152 km	1
Cijaku	Rangkas	80 km	5
Cileles	Rangkas	50 km	10
Gn Kencana	Rangkas	58 km	5
Bojong Manik	Rangkas	36 km	10
Citinten	Rangkas	45 km	10
Leuwidamar	Rangkas	20 km	10
Muncang	Rangkas	42 km	10
Sobang	Rangkas	62 km	5
Cipanas	Rangkas	38 km	10
Lebak gedong	Rangkas	47 km	10
Warunggunung	Rangkas	10 km	10
Cibadak	Rangkas	5 km	10
Rangkas bitung	Rangkas	1km	10
Kalanganyar	Rangkas	1 km	10
Maja	Rangkas	21 km	10
Curug Bitung	Rangkas	34 km	10

Sumber: Hasil Analisis 2016

Lampiran A 13
Skor Tingkat Pengetahuan Peternak

Kecamatan	Jumlah Kelompok Ternak				Skor TPP
	Pemula	Lanjut	Madya	Utama	
Cigemblong	1				1
Cikulur	11				1
Cimarga	18				1
Sajira	12				1
Banjarsari	8				1
Malingping	10				1
Wanasalam	5				1
Panggarangan	6				1
Cihara	0				1
Bayah	12				1
Cilograng	0				1
Cibeber	1				1
Cijaku	3				1
Cileles	13				1
Gn Kencana	2				1
Bojong Manik	1				1
Citinten	2				1
Leuwidamar	8				1
Muncang	11				1
Sobang	11				1
Cipanas	38				1
Lebak gedong	7				1
Warunggunung	8				1
Cibadak	0				1
Rangkas bitung	0				1
Kalanganyar	0				1
Maja	0				1
Curug Bitung	0				1

Sumber: Hasil Analisis 2016

Lampiran A 14
Skor Pusat Pertumbuhan Ternak Sapi

Kecamatan	Skor kec	tipe kec	pot Kec	Fasilitas	Nisbah Lh pgn	Kap Tam Ter	Indeks Ter	Jarak SWP	TPP	Total
Cigemblong	1.11	11.1	6.78	1.11	11.1	11.1	1.11	5.55	1.11	50.07
Cikukur	5.55	11.1	5.30	1.11	5.55	1.11	5.55	11.1	1.11	47.48
Cimarga	1.11	11.1	5.92	1.11	11.1	11.1	1.11	11.1	1.11	54.76
Sajira	1.11	11.1	5.92	1.11	11.1	5.55	1.11	11.1	1.11	49.21
Banjarsari	1.11	11.1	5.92	1.11	5.55	5.55	11.1	5.55	1.11	48.10
Malingping	1.11	11.1	4.69	1.11	5.55	5.55	1.11	5.55	1.11	36.88
Wanasalam	1.11	11.1	4.69	1.11	5.55	5.55	11.1	5.55	1.11	46.87
Panggarangan	5.55	11.1	6.17	1.11	11.1	5.55	1.11	1.11	1.11	43.91
Cihara	5.55	11.1	6.17	1.11	11.1	5.55	1.11	1.11	1.11	43.91
Bayah	1.11	11.1	6.78	1.11	11.1	5.55	1.11	1.11	1.11	40.08
Cilograng	11.1	11.1	5.30	1.11	5.55	1.11	1.11	1.11	1.11	38.60
Cibeber	1.11	11.1	8.14	1.11	11.1	11.1	1.11	1.11	1.11	46.99
Cijaku	5.55	11.1	5.92	1.11	11.1	5.55	1.11	5.55	1.11	48.10
Cileles	1.11	11.1	4.69	1.11	11.1	11.1	11.1	11.1	1.11	63.52
Gn Kencana	5.55	11.1	6.78	1.11	11.1	5.55	1.11	5.55	1.11	48.96
Bojong Manik	1.11	11.1	5.92	1.11	11.1	5.55	1.11	11.1	1.11	49.21
Citinten	1.11	11.1	7.40	1.11	11.1	5.55	1.11	11.1	1.11	50.69
Leuwidamar	11.1	11.1	5.92	1.11	11.1	11.1	1.11	11.1	1.11	64.75
Muncang	1.11	11.1	5.92	1.11	11.1	5.55	1.11	11.1	1.11	49.21
Sobang	1.11	11.1	6.78	1.11	11.1	5.55	1.11	5.55	1.11	44.52
Cipanas	5.55	11.1	5.30	1.11	1.11	5.55	1.11	11.1	1.11	43.04
Lebak gedong	1.11	11.1	5.92	1.11	11.1	5.55	1.11	11.1	1.11	49.21
Warunggunung	1.11	11.1	7.15	1.11	1.11	1.11	1.11	11.1	1.11	36.01
Cibadak	1.11	11.1	7.15	5.55	1.11	1.11	1.11	11.1	1.11	40.45
Rangkas bitung	11.1	11.1	7.15	1.11	1.11	5.55	11.1	11.1	1.11	70.42
Kalanganyar	1.11	11.1	5.30	1.11	1.11	1.11	1.11	11.1	1.11	34.16
Maja	1.11	11.1	7.15	1.11	5.55	5.55	1.11	11.1	1.11	44.89
Curug Bitung	1.11	11.1	4.69	1.11	11.1	5.55	1.11	11.1	1.11	47.98

Sumber: Hasil Analisis 2016

Lampiran A 15
Skor Pusat Pertumbuhan Ternak Kambing/Domba

Kecamatan	tingk kec	tipe kec	pot Kec	Fasilitas	Nisbah Lh pngn	Kap Tam Ter	Indeks Ter	Jarak SWP	TPP	Total
Cigemblong	1.11	11.1	6.78	1.11	11.1	11.1	1.11	5.55	1.11	50.07
Cikulur	5.55	11.1	5.30	1.11	5.55	1.11	1.11	11.1	1.11	43.04
Cimarga	1.11	11.1	5.92	1.11	11.1	11.1	5.55	11.1	1.11	59.20
Sajira	1.11	11.1	5.92	1.11	11.1	5.55	11.1	11.1	1.11	59.20
Banjarsari	1.11	11.1	5.92	1.11	5.55	5.55	5.55	5.55	1.11	42.55
Malingping	1.11	11.1	4.69	1.11	5.55	5.55	11.1	5.55	1.11	46.87
Wanasalam	1.11	11.1	4.69	1.11	5.55	5.55	5.55	5.55	1.11	41.32
Panggarangan	5.55	11.1	6.17	1.11	11.1	5.55	5.55	1.11	1.11	48.35
Cihara	5.55	11.1	6.17	1.11	11.1	5.55	1.11	1.11	1.11	43.91
Bayah	1.11	11.1	6.78	1.11	11.1	5.55	11.1	1.11	1.11	50.07
Cilograng	11.1	11.1	5.30	1.11	5.55	1.11	1.11	1.11	1.11	38.60
Cibeber	1.11	11.1	8.14	1.11	11.1	11.1	1.11	1.11	1.11	46.99
Cijaku	5.55	11.1	5.92	1.11	11.1	5.55	1.11	5.55	1.11	48.10
Cileles	1.11	11.1	4.69	1.11	11.1	11.1	5.55	11.1	1.11	57.97
Gn Kencana	5.55	11.1	6.78	1.11	11.1	5.55	1.11	5.55	1.11	48.96
Bojong Manik	1.11	11.1	5.92	1.11	11.1	5.55	1.11	11.1	1.11	49.21
Citinten	1.11	11.1	7.40	1.11	11.1	5.55	1.11	11.1	1.11	50.69
Leuwidamar	11.1	11.1	5.92	1.11	11.1	11.1	11.1	11.1	1.11	74.74
Muncang	1.11	11.1	5.92	1.11	11.1	5.55	5.55	11.1	1.11	53.65
Sobang	1.11	11.1	6.78	1.11	11.1	5.55	1.11	5.55	1.11	44.52
Cipanas	5.55	11.1	5.30	1.11	1.11	5.55	11.1	11.1	1.11	53.03
Lebak gedong	1.11	11.1	5.92	1.11	11.1	5.55	1.11	11.1	1.11	49.21
Warunggunung	1.11	11.1	7.15	1.11	1.11	1.11	11.1	11.1	1.11	46.00
Cibadak	1.11	11.1	7.15	5.55	1.11	1.11	5.55	11.1	1.11	44.89
Rangkas bitung	11.1	11.1	7.15	11.10	1.11	5.55	11.1	11.1	1.11	70.42
Kalanganyar	1.11	11.1	5.30	1.11	1.11	1.11	1.11	11.1	1.11	34.16
Maja	1.11	11.1	7.15	1.11	5.55	5.55	1.11	11.1	1.11	44.89
Curug Bitung	1.11	11.1	4.69	1.11	11.1	5.55	1.11	11.1	1.11	47.98

Sumber: Hasil Analisis 2016

Lampiran A 16
Skor Pusat Pertumbuhan Ternak Kerbau

Kecamatan	tingk kec	tipe kec	pot Kec	Fasilitas	Nisbah Lh pngn	Kap Tam Ter	Indeks Ter	Jarak SWP	TPP	Total
Cigemblong	1.11	11.10	6.78	1.11	11.10	11.10	1.11	5.55	1.11	50.07
Cikukur	5.55	11.10	5.30	1.11	5.55	5.55	11.10	11.10	1.11	57.47
Cimarga	1.11	11.10	5.92	1.11	11.10	11.10	11.10	11.10	1.11	64.75
Sajira	1.11	11.10	5.92	1.11	11.10	5.55	11.10	11.10	1.11	59.20
Banjarsari	1.11	11.10	5.92	1.11	5.55	5.55	1.11	5.55	1.11	38.11
Malingping	1.11	11.10	4.69	1.11	5.55	5.55	5.55	5.55	1.11	41.32
Wanasalam	1.11	11.10	4.69	1.11	5.55	11.10	1.11	5.55	1.11	42.43
Panggarangan	5.55	11.10	6.17	1.11	11.10	5.55	11.10	1.11	1.11	53.90
Cihara	5.55	11.10	6.17	1.11	11.10	5.55	5.55	1.11	1.11	48.35
Bayah	1.11	11.10	6.78	1.11	11.10	5.55	1.11	1.11	1.11	40.08
Cilograng	11.10	11.10	5.30	1.11	5.55	5.55	1.11	1.11	1.11	43.04
Cibeber	1.11	11.10	8.14	1.11	11.10	11.10	11.10	1.11	1.11	56.98
Cijaku	5.55	11.10	5.92	1.11	11.10	5.55	1.11	5.55	1.11	48.10
Cileles	1.11	11.10	4.69	1.11	11.10	5.55	11.10	11.10	1.11	57.97
Gn Kencana	5.55	11.10	6.78	1.11	11.10	5.55	1.11	5.55	1.11	48.96
Bojong Manik	1.11	11.10	5.92	1.11	11.10	1.11	1.11	11.10	1.11	44.77
Citinten	1.11	11.10	7.40	1.11	11.10	5.55	5.55	11.10	1.11	55.13
Leuwidamar	11.10	11.10	5.92	1.11	11.10	5.55	1.11	11.10	1.11	59.20
Muncang	1.11	11.10	5.92	1.11	11.10	11.10	1.11	11.10	1.11	54.76
Sobang	1.11	11.10	6.78	1.11	11.10	5.55	1.11	5.55	1.11	44.52
Cipanas	5.55	11.10	5.30	1.11	1.11	5.55	5.55	11.10	1.11	47.48
Lebak gedong	1.11	11.10	5.92	1.11	11.10	1.11	1.11	11.10	1.11	44.77
Warunggunung	1.11	11.10	7.15	1.11	1.11	5.55	1.11	11.10	1.11	40.45
Cibadak	1.11	11.10	7.15	5.55	1.11	1.11	5.55	11.10	1.11	44.89
Rangkas bitung	11.10	11.10	7.15	11.10	1.11	1.11	11.10	11.10	1.11	65.98
Kalanganyar	1.11	11.10	5.30	1.11	1.11	1.11	1.11	11.10	1.11	34.16
Maja	1.11	11.10	7.15	1.11	5.55	5.55	11.10	11.10	1.11	54.88
Curug Bitung	1.11	11.10	4.69	1.11	11.10	5.55	11.10	11.10	1.11	57.97

Sumber: Hasil Analisis 2016

Lampiran A 17
Skor Pusat Pertumbuhan Ternak Ayam Lokal

Kecamatan	tipe kec	pot das kec	indek kos ter	listrik	total
Cigemblong	25.00	15.28	12.50	25.00	77.78
Cikulur	25.00	11.94	2.50	25.00	64.44
Cimarga	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83
Sajira	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83
Banjarsari	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83
Malingping	25.00	10.56	25.00	25.00	85.56
Wanasalam	25.00	10.56	25.00	25.00	85.56
Panggarangan	25.00	13.89	25.00	25.00	88.89
Cihara	25.00	13.89	2.50	25.00	66.39
Bayah	25.00	15.28	2.50	25.00	67.78
Cilograng	25.00	11.94	2.50	25.00	64.44
Cibeber	25.00	18.33	25.00	25.00	93.33
Cijaku	25.00	13.33	25.00	25.00	88.33
Cileles	25.00	10.56	2.50	25.00	63.06
Gn Kencana	25.00	15.28	2.50	25.00	67.78
Bojong Manik	25.00	13.33	25.00	25.00	88.33
Citinten	25.00	16.67	2.50	25.00	69.17
Leuwidamar	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83
Muncang	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83
Sobang	25.00	15.28	2.50	25.00	67.78
Cipanas	25.00	11.94	2.50	25.00	64.44
Lebak gedong	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83
Warunggunung	25.00	16.11	2.50	25.00	68.61
Cibadak	25.00	16.11	25.00	25.00	91.11
Rangkas bitung	25.00	16.11	12.50	25.00	78.61
Kalanganyar	25.00	11.94	2.50	25.00	64.44
Maja	25.00	16.11	25.00	25.00	91.11
Curug Bitung	25.00	10.56	2.50	25.00	63.06

Sumber: Hasil Analisis 2016

Lampiran A 18
Skor Pusat Pertumbuhan Ternak Ayam Broiler & Petelur

Kecamatan	Ayam Ras Pedaging					Ayam Ras Petelur				
	tipe kec	pot das kec	indek kos ter	listrik	total	tipe kec	pot das kec	indek kos ter	listrik	total
Cigemblong	25.00	15.28	2.50	25.00	67.78	25.00	15.28	2.50	25.00	67.78
Cikulur	25.00	11.94	25.00	25.00	86.94	25.00	11.94	2.50	25.00	64.44
Cimarga	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83
Sajira	25.00	13.33	25.00	25.00	88.33	25.00	13.33	25.00	25.00	88.33
Banjarsari	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83
Malingping	25.00	10.56	2.50	25.00	63.06	25.00	10.56	2.50	25.00	63.06
Wanasalam	25.00	10.56	2.50	25.00	63.06	25.00	10.56	2.50	25.00	63.06
Panggarangan	25.00	13.89	2.50	25.00	66.39	25.00	13.89	2.50	25.00	66.39
Cihara	25.00	13.89	2.50	25.00	66.39	25.00	13.89	2.50	25.00	66.39
Bayah	25.00	15.28	2.50	25.00	67.78	25.00	15.28	2.50	25.00	67.78
Cilograng	25.00	11.94	2.50	25.00	64.44	25.00	11.94	2.50	25.00	64.44
Cibeber	25.00	18.33	2.50	25.00	70.83	25.00	18.33	2.50	25.00	70.83
Cijaku	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83
Cileles	25.00	10.56	2.50	25.00	63.06	25.00	10.56	2.50	25.00	63.06
Gn Kencana	25.00	15.28	25.00	25.00	90.28	25.00	15.28	2.50	25.00	67.78
Bojong Manik	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83
Citinten	25.00	16.67	25.00	25.00	91.67	25.00	16.67	2.50	25.00	69.17
Leuwidamar	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83
Muncang	25.00	13.33	25.00	25.00	88.33	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83
Sobang	25.00	15.28	2.50	25.00	67.78	25.00	15.28	2.50	25.00	67.78
Cipanas	25.00	11.94	25.00	25.00	86.94	25.00	11.94	2.50	25.00	64.44
Lebak gedong	25.00	13.33	25.00	25.00	88.33	25.00	13.33	25.00	25.00	88.33
Warunggunung	25.00	16.11	2.50	25.00	68.61	25.00	16.11	2.50	25.00	68.61
Cibadak	25.00	16.11	25.00	25.00	91.11	25.00	16.11	2.50	25.00	68.61
Rangkas bitung	25.00	16.11	25.00	25.00	91.11	25.00	16.11	25.00	25.00	91.11
Kalanganyar	25.00	11.94	2.50	25.00	64.44	25.00	11.94	2.50	25.00	64.44
Maja	25.00	16.11	25.00	25.00	91.11	25.00	16.11	2.50	25.00	68.61
Curug Bitung	25.00	10.56	25.00	25.00	85.56	25.00	10.56	25.00	25.00	85.56

Sumber: Hasil Analisis 2016

Lampiran A 19
Skor Pusat Pertumbuhan Ternak Itik dan Manila

Kecamatan	Itik					Itik Manila				
	tipe kec	pot das kec	indek kos ter	listrik	total	tipe kec	pot das kec	indek kos ter	listrik	total
Cigemblong	25.00	15.28	12.50	25.00	77.78	25.00	15.28	2.50	25.00	67.78
Cikulur	25.00	11.94	2.50	25.00	64.44	25.00	11.94	2.50	25.00	64.44
Cimarga	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83	25.00	13.33	25.00	25.00	88.33
Sajira	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83
Banjarsari	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83	25.00	13.33	25.00	25.00	88.33
Malingping	25.00	10.56	2.50	25.00	63.06	25.00	10.56	25.00	25.00	85.56
Wanasalam	25.00	10.56	2.50	25.00	63.06	25.00	10.56	2.50	25.00	63.06
Panggarangan	25.00	13.89	2.50	25.00	66.39	25.00	13.89	2.50	25.00	66.39
Cihara	25.00	13.89	2.50	25.00	66.39	25.00	13.89	2.50	25.00	66.39
Bayah	25.00	15.28	2.50	25.00	67.78	25.00	15.28	25.00	25.00	90.28
Cilograng	25.00	11.94	2.50	25.00	64.44	25.00	11.94	2.50	25.00	64.44
Cibeber	25.00	18.33	2.50	25.00	70.83	25.00	18.33	2.50	25.00	70.83
Cijaku	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83
Cileles	25.00	10.56	2.50	25.00	63.06	25.00	10.56	2.50	25.00	63.06
Gn Kencana	25.00	15.28	2.50	25.00	67.78	25.00	15.28	2.50	25.00	67.78
Bojong Manik	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83
Citinten	25.00	16.67	2.50	25.00	69.17	25.00	16.67	25.00	25.00	91.67
Leuwidamar	25.00	13.33	25.00	25.00	88.33	25.00	13.33	25.00	25.00	88.33
Muncang	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83
Sobang	25.00	15.28	2.50	25.00	67.78	25.00	15.28	2.50	25.00	67.78
Cipanas	25.00	11.94	2.50	25.00	64.44	25.00	11.94	2.50	25.00	64.44
Lebak gedong	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83	25.00	13.33	2.50	25.00	65.83
Warunggunung	25.00	16.11	25.00	25.00	91.11	25.00	16.11	2.50	25.00	68.61
Cibadak	25.00	16.11	2.50	25.00	68.61	25.00	16.11	2.50	25.00	68.61
Rangkas bitung	25.00	16.11	25.00	25.00	91.11	25.00	16.11	2.50	25.00	68.61
Kalanganyar	25.00	11.94	2.50	25.00	64.44	25.00	11.94	2.50	25.00	64.44
Maja	25.00	16.11	25.00	25.00	91.11	25.00	16.11	2.50	25.00	68.61
Curug Bitung	25.00	10.56	2.50	25.00	63.06	25.00	10.56	2.50	25.00	63.06

Sumber: Hasil Analisis 2016